PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025-2029

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah, maka diperlukan suatu pengaturan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
11. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
15. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan Permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Kinerja adalah hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak).
22. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja Program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
23. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah sesuai dengan Visi

dan Misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator Tujuan/Sasaran yang terseleksi.

Pasal 2

RPJM Daerah dimaksudkan menjadi pedoman:

a. dalam penyusunan rencana kerja Pemerintahan Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut:

a. BAB I : pendahulun;
b. BAB II : gambaran umum Daerah;
c. BAB III : Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
d. BAB IV : program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. BAB V : penutup.

Pasal 4

Penjabaran sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 5

(1) Pendanaan pelaksanaan RPJM Daerah dibebankan pada APBD.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan pagu indikatif dalam RPJM Daerah untuk setiap tahun anggaran.
(3) Pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
   b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksaan RPJM Daerah; dan
   c. evaluasi terhadap Hasil RPJM Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar, yang meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian Kinerja tahunan tetapi tidak merubah target Kinerja akhir

RPJM Daerah, maka perubahan target dimaksud ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

(4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Sebelum ditetapkannya RPJM Daerah Tahun 2030-2034 yang memuat Visi dan Misi Bupati terpilih periode selanjutnya, RPJM Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

Diundangkan di Tarempa pada
tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 105

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 205

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Kabupaten Kepulauan Anambas dengan segala posisi strategisnya yang tidak hanya penting dalam kerangka Pembangunan Daerah namun juga dalam kerangka pembangunan nasional. Sebagai salah satu kabupaten terluar dan menyandang status kabupaten perbatasan dengan sumberdaya kelautan yang begitu besar, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan komoditas unggulan ekonomi-biru dan kawasan afirmasi Daerah terdepan dan pemerataan pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Daerah diberi kewenangan mengatur mengenai RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional. Instruksi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan, mendukung pencapaian *Suistainable Development Goals (SDGs)*, memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran Daerah, menyikapi perubahan dinamis kondisi global, nasional, dan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, dan mendukung pencapaian Visi, Misi kepala Daerah.
Berkaitan dengan peran dan fungsinya, Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, Daerah dituntut terus berbenah diri melalui Pembangunan Daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan dasar, seperti infrastruktur dasar, penataan wilayah, masalah transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional, Pembangunan Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil Pembangunan Daerah bagi masyarakat secara adil dan merata, agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembanguan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan keuangan Daerah.

RPJM Daerah memuat Visi, Misi dan Program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJM Daerah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJM Daerah menjelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah menggambarkan arah pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, agamis, unggul di bidang maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera. Pencapaian Visi dilakukan melalui perwujudan Misi pembangunan jangka menengah yaitu: (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur, (2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, (3) Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif, (4) Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata dan (5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 105

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 20 Agustus 2025

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan, sehingga dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan RPJMD 2025-2029 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Proses perumusannya melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai unsur, baik pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, sehingga dokumen ini diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Harapan kami, dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saran dan kritik yang membangun senantiasa kami terima dengan senang hati demi hasil yang lebih baik di masa depan.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, pemikiran, dan kerja sama dalam penyusunan RPJMD 2025-2029.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tarempa, 20 Agustus 2025

Bupati Kepulauan Anambas,

Aneng

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN 0

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antardokumen 6
1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 7
1.3.2. Hubungan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-20298
1.3.3. Hubungan RTRW dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 11
1.3.4. Hubungan KLHS dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 12
1.4. Maksud dan Tujuan 13
1.5. Sistematika Penulisan 14

BAB 2. GAMBARAN UMUM DAERAH 0

2.1. Aspek Geografi dan Demografi 1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah 1
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam 3
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 13
2.1.4. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan . 22
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas 27
2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 31
2.1.7. Demografi 34
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 43
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 43
2.2.2. Kesehatan untuk Semua 51
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata 52
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif 55
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 56

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 57
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 59
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia..... 59
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 63
2.3.3. Transformasi Digital..... 71
2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global..... 72
2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 75
1.2. Aspek Pelayanan Umum..... 90
1.2.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif..... 90
1.2.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 99
1.2.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan..... 100
1.2.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah 101
1.3. Gambaran Keuangan Daerah 140
1.3.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024..... 140
1.3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu..... 156
1.3.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan..... 160
1.4. Permasalahan dan Isu Strategis..... 170
1.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 170
1.4.2. Isu Strategis Daerah 197

BAB 3. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 0
3.1 Visi dan Misi..... 2
3.2 Tujuan dan Sasaran..... 6
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah..... 12
3.4 Program-Program Prioritas Daerah 26

BAB 4. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 0
4.1 Program Perangkat Daerah 1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah..... 95
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah..... 95
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah 99

BAB 5. PENUTUP 0
5.1 Kesimpulan..... 1

5.2 Kaidah Pelaksanaan 1
5.3 Pedoman Transisi 2
5.4 Evaluasi Pelaksanaan dan Manajemen Risiko 3
5.5 Penutup 3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. 10
Tabel 2.1. 2
Tabel 2.2. 3
Tabel 2.3. 6
Tabel 2.4. 8
Tabel 2.5. 9
Tabel 2.6. 23
Tabel 2.7. 27
Tabel 2.8. 28
Tabel 2.9. 31
Tabel 2.10. 35
Tabel 2.11. 39
Tabel 2.12. 40
Tabel 2.13. 41
Tabel 2.14. 43
Tabel 2.15. 44
Tabel 2.16. 45
Tabel 2.17. 46
Tabel 2.18. 47
Tabel 2.19. 49
Tabel 2.20. 50
Tabel 2.21. 51
Tabel 2.22. 51
Tabel 2.23. 52
Tabel 2.24. 52
Tabel 2.25. 53
Tabel 2.26. 53
Tabel 2.27. 54
Tabel 2.28. 55
Tabel 2.29. 56
Tabel 2.30. 57

Tabel 2.31. 58
Tabel 2.32. 58
Tabel 2.33. 60
Tabel 2.34. 75
Tabel 2.35. 63
Tabel 2.36. 63
Tabel 2.37. 65
Tabel 2.38. 66
Tabel 2.39. 67
Tabel 2.40. 67
Tabel 2.41. 69
Tabel 2.42. 69
Tabel 2.43. 72
Tabel 2.44. 72
Tabel 2.45. 73
Tabel 2.46. 74
Tabel 2.47. 74
Tabel 2.48. 75
Tabel 2.49. 76
Tabel 2.50. 77
Tabel 2.51. 77
Tabel 2.52. 78
Tabel 2.53. 78
Tabel 2.54. 80
Tabel 2.55. 81
Tabel 2.56. 81
Tabel 2.57. 82
Tabel 2.58. 83
Tabel 2.59. 84
Tabel 2.60. 84
Tabel 2.61. 85
Tabel 2.62. 86
Tabel 2.63. 87
Tabel 2.64. 88
Tabel 2.65. 89
Tabel 2.66. 94
Tabel 2.67. 102
Tabel 2.68. 103
Tabel 2.69. 104
Tabel 2.70. 105
Tabel 2.71. 107
Tabel 2.72. 107
Tabel 2.73. 109

Tabel 2.74. 109
Tabel 2.75. 111
Tabel 2.76. 111
Tabel 2.77. 111
Tabel 2.78. 113
Tabel 2.79. 114
Tabel 2.80. 115
Tabel 2.81. 115
Tabel 2.82. 116
Tabel 2.83. 116
Tabel 2.84. 117
Tabel 2.85. 118
Tabel 2.86. 119
Tabel 2.87. 121
Tabel 2.88. 121
Tabel 2.89. 122
Tabel 2.90. 123
Tabel 2.91. 124
Tabel 2.92. 124
Tabel 2.93. 125
Tabel 2.94. 126
Tabel 2.95. 127
Tabel 2.96. 128
Tabel 2.97. 129
Tabel 2.98. 129
Tabel 2.99. 130
Tabel 2.100. 131
Tabel 2.101. 132
Tabel 2.102. 133
Tabel 2.103. 134
Tabel 2.104. 143
Tabel 2.105. 153
Tabel 2.106. 155
Tabel 2.107. 157
Tabel 2.108. 159
Tabel 2.109. 159
Tabel 2.110. 161
Tabel 2.111. 167
Tabel 2.112. 198
Tabel 3.1. 8
Tabel 3.2. 13
Tabel 3.3. 30
Tabel 3.4. 47

Tabel 4.1. 2
Tabel 4.2. 97
Tabel 4.3. 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. 7
Gambar 1.2. 8
Gambar 1.3. 13
Gambar 2.1. 7
Gambar 2.2. 14
Gambar 2.3. 15
Gambar 2.4. 16
Gambar 2.5. 17
Gambar 2.6. 18
Gambar 2.7. 19
Gambar 2.8. 20
Gambar 2.9. 21
Gambar 2.10. 22
Gambar 2.11. 24
Gambar 2.12. 25
Gambar 2.13. 26
Gambar 2.14. 27
Gambar 2.15. 29
Gambar 2.16. 30
Gambar 2.17. 34
Gambar 2.18. 35
Gambar 2.19. 37
Gambar 2.20. 38
Gambar 2.21. 42
Gambar 2.22. 44
Gambar 2.23. 47
Gambar 2.24. 48
Gambar 2.25. 49
Gambar 2.26. 55
Gambar 2.27. 60
Gambar 2.28. 61
Gambar 2.29. 62
Gambar 2.30. 65
Gambar 2.31. 68

Gambar 2.32. 70
Gambar 2.33. 71
Gambar 2.34. 85
Gambar 2.35. 86
Gambar 2.36. 87
Gambar 2.37. 90
Gambar 2.38. 91
Gambar 2.39. 92
Gambar 2.40. 93
Gambar 2.41. 95
Gambar 2.42. 96
Gambar 2.43. 97
Gambar 2.44. 99
Gambar 2.45. 100
Gambar 2.46. 101
Gambar 2.47. 102
Gambar 2.48. 103
Gambar 2.49. 105
Gambar 2.50. 106
Gambar 2.51. 108
Gambar 2.52. 145
Gambar 2.53. 147
Gambar 2.54. 148
Gambar 2.55. 150
Gambar 2.56. 151
Gambar 2.57. 157
Gambar 3.1. 276

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, daya saing, dan kualitas pelayanan publik.

Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD memiliki peran strategis sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2025 - 2030 terpilih yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 9 Januari 2025 dan dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/221 Tahun 2025 dan 100.2.1.3/1719 Tahun 2025 tanggal 20 Februari 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepada Daerah dan wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Penyusunan RPJMD didasarkan pada RPJPD, terutama terkait dengan arah kebijakan serta sasaran pokok dari RPJPD. Semua sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD harus sesuai dengan kebijakan dan sasaran pokok yang terdapat dalam RPJPD. Dengan demikian, sasaran RPJMD tidak hanya merefleksikan visi dan misi dari Kepala Daerah, tetapi juga setidaknya harus mencakup sasaran pokok RPJPD untuk periode yang bersangkutan.

Sebagai tahap awal dari pelaksanaan visi dan misi pembangunan jangka panjang selama 20 tahun ke depan, RPJMD 2025–2029 memiliki peran krusial dalam meletakkan fondasi yang kokoh, mengarahkan kebijakan

strategis, serta memastikan kesinambungan dan konsistensi pembangunan lintas periode. Capaian dan keberhasilan dalam periode RPJMD ini akan sangat menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan pada tahapan berikutnya dalam RPJPD. Sebagai awalan, maka RPJMD Tahun 2025-2029 dapat meletakkan fondasi yang kokoh menuju pencapaian Indonesia Emas 2045 dan Anambas Mutiara Biru 2045.

Anambas Mutiara Biru 2045 adalah visi jangka panjang daerah untuk mewujudkan "Kepulauan Anambas yang nyaman, maju, dan berkelanjutan, berbasis ekonomi biru". Sasaran utamanya adalah bahwa pada tahun 2045, Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan perekonomian dan daya saing daerah, peningkatan daya saing sumberdaya manusia, dan penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas periode sebelumnya. Hal-hal yang diperhatikan dari hasil KLHS RPJMD adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, isu-isu strategis, serta rekomendasi KLHS. Penelaahan terhadap KLHS RPJMD menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan. Melalui penelaahan ini, diharapkan bahwa dokumen RPJMD telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalamnya terutama pada saat perumusan permasalahan dan isu strategis serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Adapun hal-hal yang diperhatikan dari evaluasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas periode sebelumnya (periode 2021-2026) adalah capaian kinerja perencanaan pembangunan jangka menengah dan permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebabnya. Melalui penelaahan ini, diharapkan bahwa dokumen RPJMD dapat merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis dengan mengakomodasi pembelajaran-pembelajaran dari pembangunan jangka menengah periode sebelumnya.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik, pembahasan dengan Perangkat Daerah, dan penyempurnaan Rancangan Teknokratik menjadi Rancangan Awal berdasarkan hasil pembahasan dengan perangkat daerah. Penyempurnaan Rancangan Teknokratik juga dilakukan dengan memuat dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas , dan program perangkat daerah.

Setelah itu, telah dilakukan forum konsultasi publik yang bertujuan untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan Ranwal RPJMD. Forum konsultasi publik dilaksanakan dengan melibatkan DPRD, perangkat daerah kabupaten, dan pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta

perwakilan kelompok perempuan dan anak. Ranwal RPJMD telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan dari forum konsultasi publik yang dituangkan dalam berita acara. Berikutnya, Ranwal RPJMD dibahas dan disepakati dengan DPRD dan dikonsultasikan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Selain kelima pendekatan di atas, penyusunan RPJMD ini tentu telah melewati berbagai proses dengan pendekatan yang berorientasi substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Pendekatan holistik-tematik menekankan bahwa pembangunan daerah harus dilihat secara menyeluruh (holistik) dan berfokus pada tema prioritas (tematik) yang ingin dicapai dalam periode RPJMD. Pembangunan dilihat sebagai suatu sistem yang saling terkait (ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, infrastruktur, budaya) dan menyesuaikan dengan tema per periode selama periode RPJMD. Dengan demikian pembangunan tidak sekadar program sektoral, melainkan program yang mengarah pada isu strategis yang menyeluruh. Untuk Pendekatan integratif , dilakukan dengan mengedepankan sinergi antar-sektor dengan mengaitkan dokumen RPJMD dengan dokumen-dokumen lain seperti RPJPN, RPJMN, RPJMD dan RPJPD Provinsi, dokumen KLHS untuk memastikan keberlanjutan, dan RTRW sebagai panduan ruang. Di samping itu juga melihat sinergi antar-level pemerintahan, dan antar-pelaku pembangunan. Terakhir, pendekatan spasial yang merupakan perencanaan pembangunan berbasis ruang/wilayah yang mengacu pada RTRW dan data spasial (peta) dilakukan untuk memastikan pembangunan sesuai peruntukan ruang, mencegah konflik lahan, dan mengurangi risiko bencana. Pendekatan spasial ini dilakukan dengan melihat kesesuaian dengan RTRW maupun kawasan strategis.

Keseluruhan pendekatan dalam proses penyusunan RPJMD tersebut mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui berbagai pendekatan yang telah diaplikasikan tersebut, diharapkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 menjadi dokumen yang dapat menerjemahkan dengan baik kebijakan pemimpin daerah sekaligus menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi menuju Anambas Mutiara Biru 2045.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dan diganti menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67).
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor XX).

1.3. Hubungan Antardokumen

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas terhubung erat dengan dokumen rencana pembangunan Provinsi maupun Nasional. Tujuannya adalah memastikan keselarasan antara berbagai dokumen rencana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menciptakan dokumen rencana yang terpadu dan menyatu dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 memedomani RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, serta mengacu pada RPJMD Teknokratik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk memperjelas hubungan tersebut, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 terdapat diagram yang menggambarkan sistematika dan keterpaduan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya, sehingga RPJMD tidak berdiri sendiri melainkan menjadi acuan dan sinkronisasi dari berbagai dokumen perencanaan sektoral yang ada di daerah. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang mengintegrasikan berbagai rencana sektoral untuk memastikan keselarasan visi, misi, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut adalah hubungan antara dokumen rencana pada gambar sebagai berikut

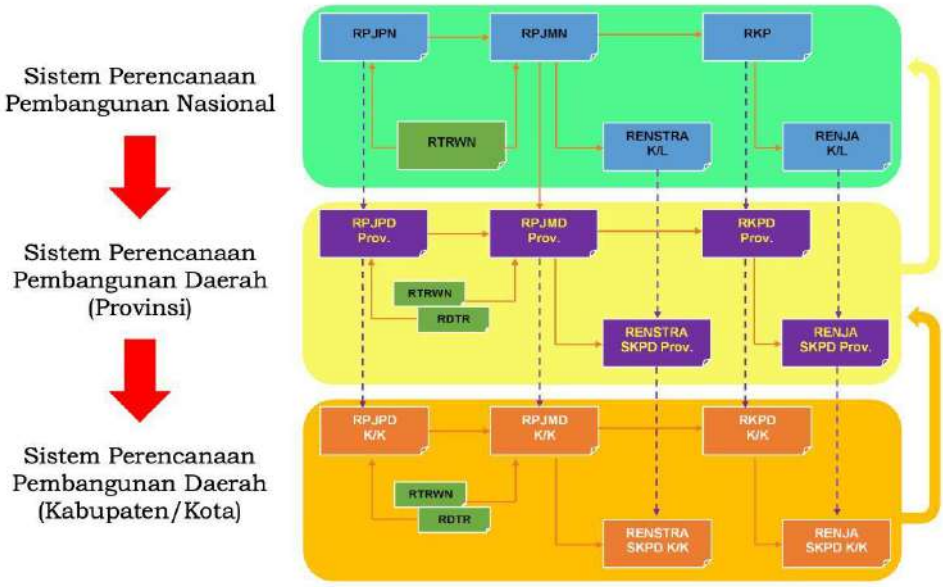

Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya
Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025

Dengan mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025, hubungan ini menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang mengintegrasikan dan mengarahkan seluruh dokumen sektoral agar mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dokumen rencana sektoral di Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya seperti Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2021-2041 dan lain sebagainya.

1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 2 (dua) dokumen perencanaan strategis yang saling terkait dalam pembangunan daerah. RPJPD merupakan rencana strategis yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen ini memberikan panduan dan arah kebijakan umum yang harus dicapai dalam jangka panjang. Adapun RPJMD adalah rencana yang lebih spesifik dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirumuskan berdasarkan RPJPD. RPJMD bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi jangka panjang tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih konkret dan operasional.

Hubungan antara RPJPD dan RPJMD sangat erat, di mana RPJMD harus mengacu dan konsisten dengan RPJPD. RPJPD memberikan kerangka dan

dasar perencanaan jangka panjang yang harus dijadikan acuan dalam proses penyusunan RPJMD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2045 menjadi acuan dalam proses penyusunan Permasalahan dan Isu Strategis. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai dokumen implementasi yang memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan jangka pendek dan menengah tetap berada dalam jalur yang telah dirumuskan oleh RPJPD dari periode pertama hingga periode terakhir.

Dalam menyusun RPJMD, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari dokumen RPJPD. Pertama, permasalahan, isu strategis dan tantangan jangka panjang yang terdapat dalam RPJPD harus dipahami dengan baik untuk dapat diterjemahkan dan harus dipertimbangkan lebih spesifik dalam RPJMD. Kedua, arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJPD perlu diperhatikan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan arah kebijakan dalam RPJMD.

Dengan memperhatikan elemen-elemen penting dari RPJPD, penyusunan RPJMD dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif. RPJMD yang konsisten dengan RPJPD akan memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, sehingga visi jangka panjang daerah dapat tercapai. Selain itu, memperhatikan RPJPD dalam penyusunan RPJMD juga membantu mengidentifikasi prioritas pembangunan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Dengan demikian, hubungan antara RPJPD dan RPJMD bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan.

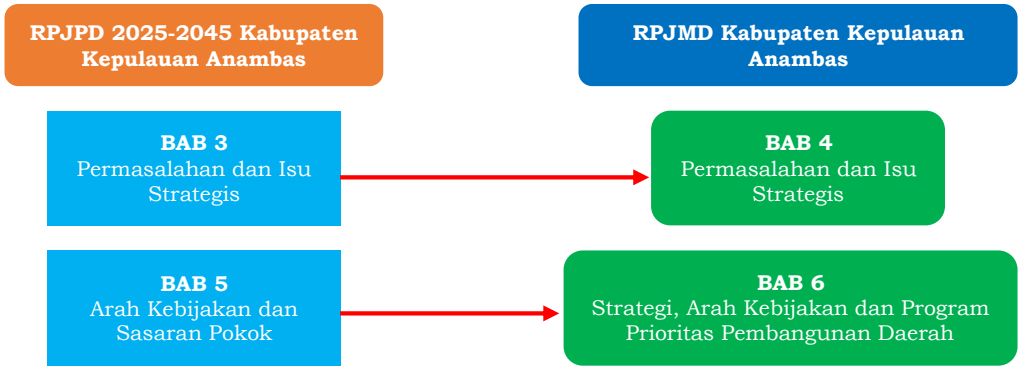

Gambar 1.2. Penyelarasan Muatan RPJPD 2025-2045 kedalam dokumen RPJMD
Sumber: Surat Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda

1.3.2. Hubungan RPJMN 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat evaluasi, tantangan, dan sasaran makro pembangunan, transformasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, agenda pembangunan, arah pembangunan

wilayah dan dukungan sarana prasarana, serta kerangka implementasi (kaidah pelaksanaan) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMN menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas harus merujuk dan selaras dengan RPJMN untuk memastikan keselarasan kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah.

RPJMN dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam konteks perencanaan pembangunan. RPJMN memberikan kerangka kebijakan nasional yang harus diikuti oleh RPJMD di tingkat daerah. Hal Ini memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas selaras dengan tujuan dan prioritas nasional. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas harus mengintegrasikan kebijakan, program, dan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Ini mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya fokus pada isu-isu lokal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui RPJMN dan RPJMD memastikan bahwa pembangunan di tingkat daerah berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, ada beberapa hal penting dari dokumen RPJMN yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah sub bab arah pembangunan wilayah dan dukungan sarana prasarana yang sudah dibagi berdasarkan wilayah. Pembangunan wilayah dan sarana prasarana merupakan wadah dan instrumen dalam pelaksanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah dan sarana prasarana adalah untuk mengurangi kesenjangan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Strategi dalam mengurangi kesenjangan KBI dilakukan melalui penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah, pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi, serta pembangunan kluster unggulan wilayah. Penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah merupakan prasyarat perlu yang diterapkan di seluruh wilayah, sementara pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi serta pembangunan kluster unggulan wilayah diterapkan pada wilayah-wilayah tertentu. Strategi tersebut didukung oleh penguatan sarana prasarana dan konektivitas pendukung transformasi yang tentunya berdampak pada pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sebagai upaya kunci untuk mendorong peningkatan pembangunan di seluruh wilayah, ditetapkan highlight intervensi umum dan khusus pembangunan wilayah dan sarana prasarana tahun 2025-2029 yang

disusun berdasarkan pulau. Tema pembangunan Wilayah Sumatera periode 2025-2029 adalah "Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan", sedangkan tema pembangunan untuk Provinsi Kepulauan Riau adalah "Beranda Maritim Indonesia Bagian Barat dan Pusat Ekonomi Biru Sumatera." Highlight intervensi untuk Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1. *Highlight* indikasi intervensi umum dan khusus di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025-2029

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi Khusus
Kawasan afirmasi	Pengembangan perguruan tinggi vokasi dan/atau akademi komunitas terbuka guna meningkatkan kualitas SDM setempat secara inklusif sesuai potensi unggulan setempat • Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Pengembangan SPAM Perkotaan Tarempa • Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan/Preservasi jalan Anambas • Penguatan Anambas sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah • Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan dan pariwisata bahari • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Tarempa (Program Hasil Terbaik Cepat) • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Tarempa • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: Jemaja Barat, Jemaja, Siantan Selatan, Siantan Utara, Kute Siantan

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi Khusus
Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Natuna-Anambas	• Pengembangan Pelabuhan Perikanan Tarempa • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan pelabuhan bongkar muat Siantan Selatan.
Highlight Indikasi **Intervensi Umum**: • lndikasi Daerah Prioritas lntervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (Program Hasil Terbaik Cepat). • Indikasi Proyek Strategis Nasional: Ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat, Layanan irigasi pendukung lumbung pangan nasional, Peningkatan produksi daging sapi dan susu sapi, Pembangunan 3 juta rumah. • Kegiatan Prioritas Utama: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas. • Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045. • Sekolah Rakyat yang merupakan perwujudan Asta Cita nomor empat untuk memastikan akses layanan dasar utama seperti pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin.	

Sumber: RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029, Mendagri Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Bappenas Nomor 3 Tahun 2025

1.3.3. Hubungan RTRW dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas 2023-2043 adalah dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. RTRW berfungsi sebagai pedoman

utama dalam pemanfaatan ruang yang optimal, terstruktur, dan berkelanjutan. RTRW mencakup berbagai aspek seperti zonasi, penggunaan lahan, serta pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, RTRW memiliki peran penting karena setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan harus sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Kesesuaian ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan ruang yang berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diacu dalam penyusunan RPJMD dari RTRW yakni kebijakan penataan ruang. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 kebijakan penataan ruang daerah meliputi:

a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata di seluruh Wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya;
b. Pengembangan terintegrasi sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan fasilitas serta utilitas permukiman;
c. Pemanfaatan Kawasan yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung Wilayah kepulauan;
d. Pelestarian dan peningkatan fungsi Kawasan Lindung dan daya dukung Lingkungan Hidup serta melestarikan warisan budaya Daerah;
e. Pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor minyak dan gas, sumber daya bahari, Pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan pembangunan
f. Berkelanjutan; dan
g. Pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan.

Selain itu, RTRW menyediakan pedoman untuk pengembangan kawasan strategis dan kawasan pertumbuhan, yang harus diakomodasi dalam program dan kegiatan yang direncanakan di RPJMD. RTRW memberikan landasan spasial yang jelas dan terstruktur untuk semua kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD. Dengan memastikan bahwa RPJMD mengacu pada RTRW, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mengimplementasikan pembangunan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1.3.4. Hubungan KLHS dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi bagian yang tidak terpisah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu dimaksudkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Penyelarasan

KLHS kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas telah diatur dan merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyelarasan KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas dimaksudkan untuk mengantisipasi lebih jauh dampak perencanaan pembangunan terhadap lingkungan hidup serta menjamin nilai manfaat pembangunan dengan telah mempertimbangkannya aspek lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kedalam perencanaan jangka panjang pembangunan daerah.

Adapun muatan KLHS yang perlu diperhatikan mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, isu strategis dan rekomendasi sebagai bentuk komitmen dan langkah strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rekomendasi KLHS dimanfaatkan sebagai penyusunan pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Adapun mekanisme integrasi secara lebih rinci telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 600.11.2/8755/Bangda Tahun 2023.

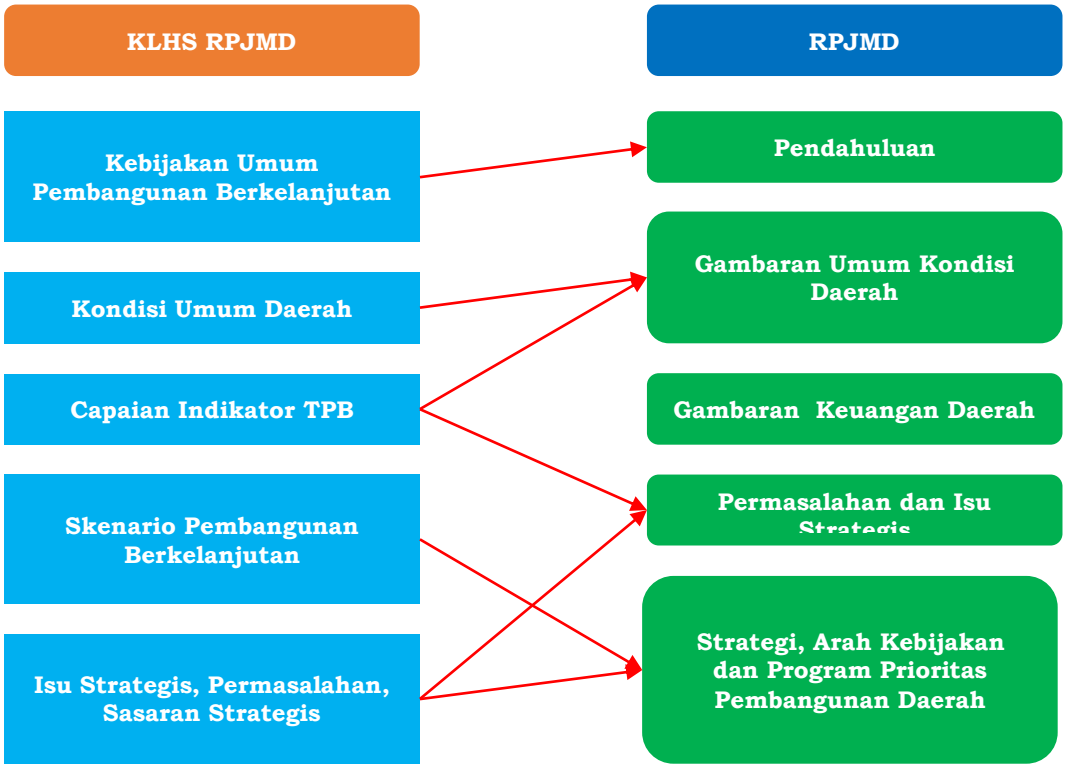

Gambar 1.3. Penyelarasan Muatan KLHS kedalam dokumen RPJMD
Sumber: Kemendagri, 2023

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah tersusunnya pedoman pembangunan Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran Visi Misi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2030. Adapun tujuan dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan atau pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan untuk berpartisipasi dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kepulauan Anambas:
2. Menjadi dasar atau acuan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029; dan
3. Menjadi dasar atau acuan dalam evaluasi capaian kinerja pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 meliputi:

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3. Aspek Daya Saing
2.4. Aspek Pelayanan Umum
2.5. Gambaran Keuangan Daerah
2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB 3. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Visi dan Misi
2.2. Tujuan dan Sasaran
2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
2.4. Program-Program Prioritas Daerah

BAB 4. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 5. PENUTUP

BAB 2.GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1.Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau resmi berdiri pada tanggal 24 Juni 2008. Pembentukannya didasarkan pada Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Kepulauan Riau. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Natuna. Pemekaran ini menjadi tahap awal bagi Kabupaten Kepulauan Anambas untuk berkembang sebagai kabupaten yang mandiri. Kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang unik memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari yang menarik dan pusat ekonomi di wilayah Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bagian dari gugusan pulau-pulau terluar yang memiliki perbatasan laut dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Posisinya juga terletak diantara pulau besar Kalimantan dan Sumatera yang menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki lokasi strategis yang menguntungkan.

Kabupaten Kepulauan Anambas terletak pada posisi strategis, sebagai beranda depan Indonesia. Letaknya membentang di antara 2˚10’0” - 3˚40’0” Lintang Utara dan 105˚15’0” - 106˚45’0” Bujur Timur. Posisi ini menjadikannya gerbang penting di wilayah Indonesia karena berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara yang merupakan jalur pelayaran internasional yang ramai. Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah penting bagi Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, keamanan, maupun geopolitik. Secara lebih rinci, batas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Laut Natuna Utara
- Selatan : Berbatasan dengan Kepulauan Tambelan
- Barat : Berbatasan dengan Laut Natuna Utara
- Timur : Berbatasan dengan Laut Natuna

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki total luas wilayah sebesar 590,14 km2 yang didominasi oleh wilayah lautan sebesar 98,64% (46.029,27 km2), sementara sisanya 1,36% (634,37 km2) merupakan daratan. Wilayah daratan tersebut terbagi menjadi 10 kecamatan dan 52 desa serta 2 kelurahan dengan luas wilayah yang beragam. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Jemaja Timur sebesar 146,98 km2 (23,15%). Sementara kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Jemaja Barat yaitu 17,67 km2 (2,78%). Kemudian berdasarkan Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 239 pulau, 29 pulau berpenghuni oleh penduduk dan 5 pulau kecil terluar yaitu Pulau Damar, Mangkai, Tokong Berlayar, Tokong Malang Biru, dan Tokong Nanas. Pergerakan yang menghubungkan antar wilayah/pulau saat ini didukung oleh transportasi laut dan udara.

Kecenderungan umum menunjukkan bahwa wilayah yang dekat dengan ibukota kabupaten umumnya mengalami perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan wilayah yang lebih jauh. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu aksesibilitas, konsentrasi fasilitas, dan perhatian pemerintah. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Jemaja dan Jemaja Barat (71,67 km). Sementara itu, kecamatan yang paling dekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Siantan Timur (10,30 km). Secara rinci luas wilayah pada setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.1** berikut.

Tabel 2.1. Daftar Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Jumlah Pulau	Jumlah Desa/ Kelurahan	Persentase Luas Wilayah (%)
1	Jemaja	Letung	71,76	-	6	12,77
2	Jemaja Barat	Impol	64,27	-	3	2,78
3	Jemaja Timur	Ulu Maras	69,21	-	4	23,15
4	Siantan Selatan	Air Bini	12,71	-	7	15,83
5	Siantan	Tarempa	0,00	-	7	8,31
6	Siantan Timur	Nyamuk	16,30	-	6	13,90
7	Siantan Tengah	Air Asuk	9,33	-	6	4,40
8	Palmatak	Tebang	15,30	-	7	9,18
9	Siantan Utara	Mubur	15,25	-	3	6,01
10	Kute Siantan	Payalaman	14,30	-	5	3,66
Kepulauan Anambas		Tarempa	0,00	239	54	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024; Statistik Sektoral Kabupaten Kepulauan Anambas 2023; Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki posisi geostrategis yang sangat penting sebagai gerbang utama maritim Indonesia. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara serta berdekatan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini strategis dalam mendukung kepentingan nasional di bidang ekonomi, diplomasi, dan pertahanan. Jarak dari Kecamatan Siantan (Tarempa) ke Singapura tercatat sekitar 202,29 mil, ke Johor (Malaysia) 205,97 mil, dan ke Kuching (Malaysia) 318,91 mil, yang seluruhnya lebih dekat dibandingkan dengan jarak ke Ibu Kota Negara, Jakarta, yakni sekitar 640,72 mil. Kedekatan geografis ini membuka peluang yang besar bagi peningkatan kerjasama lintas negara serta memperlancar akses dan mobilitas antarwilayah. Di samping itu, posisi strategis tersebut menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, mendukung pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan, serta mencegah dan menanggulangi praktek penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1. Topografi dan Jenis Tanah

Topografi diartikan sebagai gambaran permukaan bumi dengan parameter tertentu seperti perbedaan ketinggian lokasi diatas permukaan laut, bentuk wilayah, dan kemiringan lereng. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki topografi yang beragam, dengan sebagian besar wilayah daratannya (48,06%) berada pada ketinggian rendah antara 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Wilayah lainnya (51,94%) memiliki ketinggian yang lebih tinggi, mulai dari 110 meter hingga lebih dari 500 meter. Dilihat dari bentuk wilayahnya, Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi oleh daerah bergelombang hingga berbukit miring dengan kemiringan lereng antara 8-15% (38,18%) dan 15-25% (41,36%). Secara rinci perbedaan ketinggian, bentuk wilayah, dan kemiringan lereng disajikan pada **Tabel 2.2** berikut.

Tabel 2.2. Kondisi Topografi di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Ketinggian	Luas (km²)	Persentase (%)
1	0-100 mdpl	303,87	48,06
2	110-200 mdpl	190,88	30,19
3	210-300 mdpl	92,58	14,64
4	310-400 mdpl	36,55	5,78
5	410-500 mdpl	8,28	1,31
6	>500 mdpl	0,06	0,01
No	**Kemiringan lereng**	**Luas (km²)**	**Persentase (%)**
1	0 - 3 %	3,78	0,60
2	3 - 8 %	10,31	1,63
3	8 - 15 %	241,38	38,18
4	15 - 25 %	261,52	41,36
5	> 25 %	115,24	18,23

Sumber: Data DEMNAS diolah, 2019

Kepulauan Anambas tersusun atas berbagai jenis batuan, dengan batuan metamorf berunsur partier sebagai yang paling dominan. Selain itu, terdapat pula batuan sedimen, endapan aluvial, batuan Trias dan Permokarbon, sekis, granit, dioriet, hiporit, dan batuan hasil erupsi kuarter. Struktur batuan ini menghasilkan berbagai jenis tanah mineral, seperti Kambisol, Aluvial, Regosol, Gleisol, dan Podsolik. Banyaknya endapan sedimen dari sungai menyebabkan wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi oleh jenis tanah aluvial sebesar 48,06% dari total wilayahnya. Adapun masing-masing jenis tanah tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. **Kambisol**

Kambisol adalah jenis tanah yang terbentuk dari batuan tua, seperti batuan liat dan batuan vulkanik masam dengan tingkat curah hujan tinggi. Ciri khas tanah ini adalah adanya penumpukan liat di lapisan B-2, meskipun tidak cukup tebal untuk dikategorikan sebagai horison argilik (karena peningkatan kadar liat kurang dari 1,2 kali lipat dibandingkan lapisan atasnya). Kambisol memiliki kemiripan dengan tanah Podsolik, namun lebih gembur dan memiliki pH yang lebih tinggi. Jenis tanah

Kambisol Distrik yang berasosiasi dengan tanah Gleisol umumnya digunakan sebagai lahan persawahan, sedangkan Kambisol Distrik yang berasosiasi dengan tanah Podsolik banyak dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering dan perkebunan. Kambisol terbilang cukup luas di Kabupaten Kepulauan Anambas, mencakup 22,23% dari total wilayahnya.

2. Aluvial

Tanah Aluvial terbentuk dari endapan aluvial atau lumpur sungai pada dataran rendah. Tanah Aluvial di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan jenis tanah yang paling luas. Kesuburan tanah ini terbilang tinggi karena kaya akan unsur hara sehingga cukup ideal untuk pengembangan lahan pertanian.

3. Regosol

Komposisi tanah regosol didominasi oleh pasir (lebih dari 60%) dan menghasilkan tekstur yang sangat kasar. Tanah ini tergolong tanah muda yang masih dalam tahap perkembangan. Regosol terbentuk dari endapan pasir pantai, khususnya pasir kuarsa (pasir putih). Jenis tanah ini terbilang cukup luas di Kepulauan Anambas, mencakup 27,47% dari total wilayahnya.

4. Gleisol

Jenis tanah ini dicirikan dengan adanya lapisan gleisol berwarna abu-abu/keabu-abuan. Tanah ini terbentuk akibat pengaruh air, sehingga lapisan tanah atasnya (horizon A) mengalami pencucian liat dan unsur hara. Gleisol umumnya ditemukan di wilayah Aluvial dan Marin, serta terasosiasi dengan Tuf Masam dan Dataran. Tanah ini awalnya terpengaruh oleh air, baik tergenang permanen maupun periodik. Namun, dengan pembuatan saluran drainase/kanal, Gleisol dapat diubah menjadi lahan kering atau kondisi airnya bisa dikontrol. Gleisol, terutama yang telah dikeringkan, banyak dimanfaatkan sebagai lahan sawah, dan di area yang sudah kering digunakan untuk pertanian tanaman pangan lahan kering dan perkebunan (karet, sawit, dll.). Gleisol merupakan jenis tanah yang paling sedikit di Kepulauan Anambas, hanya mencakup 0,86% dari total wilayahnya.

5. Podsolik

Tanah ini tergolong tua dan memiliki tingkat perkembangan lanjut. Ciri khas tanah ini adalah lapisan atasnya (horizon A) yang telah mengalami pencucian liat dan unsur hara, serta tekstur yang lebih kasar dibandingkan lapisan bawahnya (horizon B). Secara umum, Podsolik tergolong tanah yang kurang subur karena sifatnya yang masam, namun memiliki daya retensi dan fiksasi terhadap hara yang tinggi. Jenis tanah ini banyak dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering, perkebunan, dan tanaman kehutanan. Podsolik di Kepulauan Anambas terbilang sedikit, hanya sekitar 1,38% dari total wilayahnya.

2.1.2.2. Geologi

Struktur geologi memberikan gambaran mengenai formasi batuan penyusun objek diatas permukaan bumi. Formasi ini menunjukkan susunan batuan yang memiliki kesamaan ciri-ciri geologis yang terdiri dari satu macam jenis atau lebih yang terletak di bawah maupun diatas permukaan bumi. Kabupaten Kepulauan Anambas

memiliki formasi dari masa Tersier dan Kuarter. Sementara berdasarkan data dari Pusat Pengembangan dan Teknologi Geologi tahun 2017 formasi geologi di Kabupaten Kepulauan Anambas dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. **Bancuh Telen-Kelinjau (Jkm)**

Formasi ini merupakan campuran antara batuan alih asal dan tetap asal yang terdiri atas ultramafik, batusabak, rijang, spilit, batugamping beliolites berumur Devon, batupasir malih, sekis, genes, dan granit berfoliasi. Bersentuhan sesar dengan Formasi Telen. Keberadaanya di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlalu luas (5,03%).

2. **Batuan Mafik dan Ultramafik (Jmu)**

Formasi ini tersusun oleh batuan Diorit, Andesit, Gabro, Gabro forfir, Diabas dan Basal dan bersisipan Rijang radiola. Andesit memiliki warna gelap tersingkap di Pulau Matak bagian tengah dan selatan, Pulau Siantan bagian tengah dan di pulau-pulau kecil di timur Siantan. Selanjutnya, batuan Diabas tersingkap setempat di ujung selatan Pulau Siantan. Sementara batuan Basal bersisipan rijang radiola dijumpai di beberapa tempat di Pulau Siantan bagian barat dan utara. Formasi ini di Kabupaten Kepulauan Anambas keberadaanya relatif kecil yaitu 11,62% dari wilayahnya.

3. **Granit Anambas (Kag)**

Formasi ini tersusun oleh batuan Granit, Granodiorit, dan Sienit. Batuan ini pada umumnya memiliki warna kelabu, coklat, dan merah muda. Wilayah Anyer Rajah (Jemaja) dan di sebelah barat Tarempa (Siantan) granitnya mengandung pirit, arsenopirit, dan hematit. Pada beberapa tempat dijumpai senolit andesit, diorit, dan bahan terkersikkan. Granit di Kabupaten Kepulauan Anambas diduga terdiri dari pluton yang hampir sama dengan granit sejenis di Kep. Tambelan dan Natuna. Formasi ini merupakan yang paling dominan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 83,35% dari wilayahnya.

2.1.2.3. Hidrologi

Aspek hidrologi sangat erat kaitannya terhadap ketersediaan sumberdaya air, dimana Daerah Aliran Sungai atau *catchment area* memiliki peranan penting dalam menjaga ketersediaan sumberdaya air tersebut. Sumber air baku di Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan berasal dari beberapa sumber diantaranya sungai, bendung (Bendung Matan, Bendung Jetis, dan Bendung Dapit), serta embung (Embung Gunung Samak, Embung Matak, Embung Telaga, dan Embung Gunung Lintang). Air sungai yang bersumber dari beberapa air terjun seperti Air Terjun Temburun dan Air Terjun Neraja di Jemaja dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan sebagai objek wisata. Sementara, sumber air tanah diperoleh dari sumur. Kedalaman muka air tanah pada wilayah daratan berkisar antara 1-3 m, sedangkan untuk daerah dengan topografi berbukit kedalaman muka air tanahnya antara 1-7 m. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 304 tahun 2018 telah ditetapkan jumlah DAS yang ada di Kabupaten Kepulauan

Anambas sejumlah 25 DAS yang tersebar di seluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.3. Daftar Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Nama DAS	Luas (km²)	Persentase (%)
1	Jemaja	207,49	32,82
2	Keramut	6,60	1,04
3	Impul	6,81	1,08
4	Kiabu	25,96	4,11
5	Temiang	5,03	0,80
6	Mengkait	0,09	0,01
7	Telaga	12,41	1,96
8	Telaga Kecil	1,77	0,28
9	Genting Uyut	5,48	0,87
10	Lingai	2,87	0,45
11	Siantan	105,28	16,65
12	Batu Belah	1,30	0,21
13	Bakau	3,37	0,53
14	Munjan	4,97	0,79
15	Pemutus	1,21	0,19
16	Nyamuk	22,50	3,56
17	Mubur	36,82	5,82
18	Punjung	6,24	0,99
19	Risan	2,36	0,37
20	Belibak	0,94	0,15
21	Batu Garam	10,77	1,70
22	Air Asuk	2,81	0,44
23	Lidi	0,73	0,12
24	Matak	82,45	13,04

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Setiap lokasi di permukaan bumi, baik berupa lahan pertanian, perkebunan, persawahan, kawasan hutan, tambak, permukiman, fasilitas sosial, perkantoran, pasar, hingga infrastruktur seperti jalan, secara ekologis dan hidrologis merupakan bagian integral dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS), sub-DAS, atau sub-sub DAS. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat beberapa aliran DAS yang kesemuanya berada di wilayah kerja BPDAS KEPRI. Sedangkan yang termasuk kedalam DAS di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 8 aliran DAS yaitu; DAS Air Abu, DAS Anambas, DAS Bajau, DAS Jemaja, DAS Matak, DAS Mubur, DAS Siantan, dan DAS Telaga. Sebaran DAS yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Gambar 2.1**.

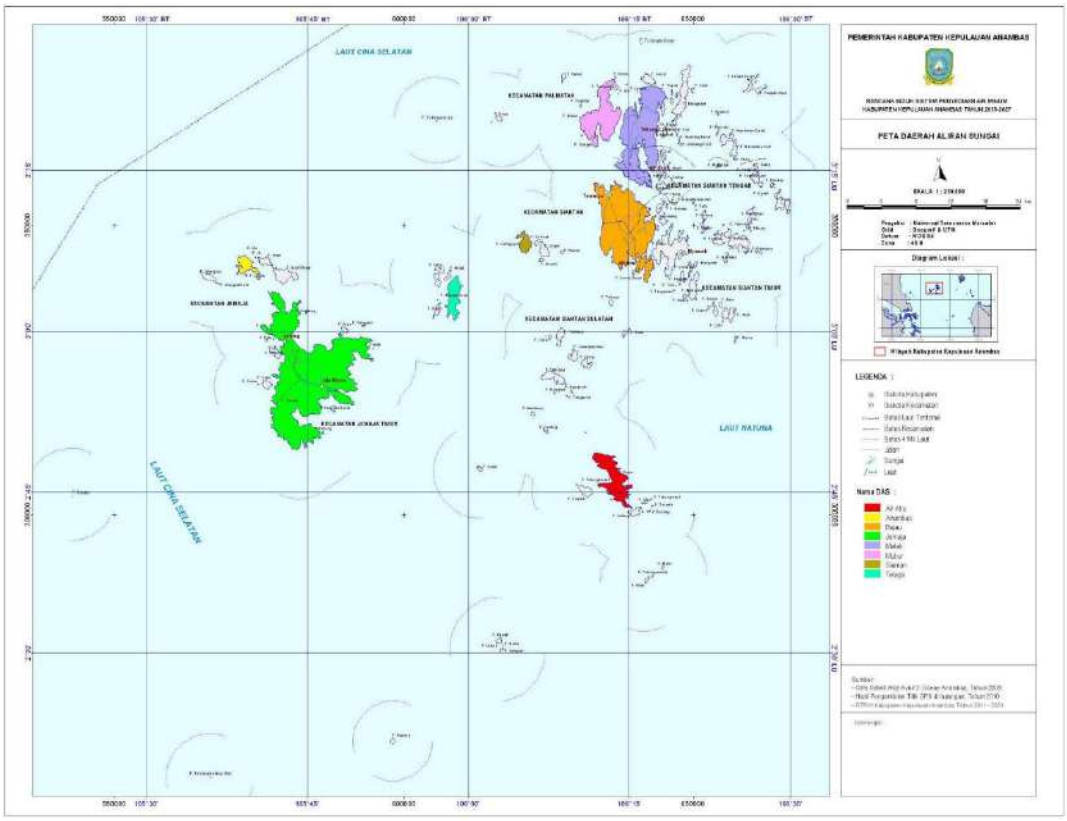

Gambar 2.1. Peta DAS di Kabupaten Kepulauan Anambas
Sumber: Dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2039

2.1.2.4. Klimatologi

Iklim mikro yang terbentuk di Kabupaten Kepulauan Anambas dipengaruhi oleh kondisi suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, kecepatan angin, arah angin dan lamanya penyinaran matahari. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 menunjukkan bahwa

Sepanjang tahun, suhu udara rata-rata menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, dengan kisaran antara 27,2°C hingga 29,6°C. Suhu tertinggi tercatat pada bulan Juli dan September sebesar 34,8°C, sementara suhu terendah terjadi di bulan Juni, yaitu 23°C. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Januari sebesar 412,80 mm dengan 27 hari hujan, menunjukkan bahwa awal tahun merupakan periode puncak musim hujan. Sebaliknya, bulan Juli menjadi bulan terkering dengan hanya 32 mm curah hujan dan 5 hari hujan. Tingkat kelembapan udara cenderung tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata berkisar antara 76% hingga 86%, dan mencapai kelembapan maksimum 100% pada bulan Desember.

Sebagai wilayah yang dikelilingi oleh lautan lepas menyebabkan kondisi arah angin dan kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pergerakan angin tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan kecepatan maksimum mencapai 26 m/detik, sementara kecepatan angin terendah (0 m/detik) tercatat merata di seluruh bulan sebagai nilai minimum harian. Penyinaran matahari mengalami variasi cukup signifikan, dengan intensitas tertinggi tercatat pada bulan Maret sebesar 194%, mencerminkan periode cuaca cerah. Sebaliknya,

bulan Januari dan Desember menunjukkan tingkat penyinaran yang paling rendah, masing-masing 64% dan 71%, yang beriringan dengan tingginya curah hujan dan kelembapan pada periode tersebut. Adapun kondisi klimatologi Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 disajikan pada **Tabel 2.4** berikut.

Tabel 2.4. Kondisi klimatologi di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024

No	Parameter	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Suhu Udara (°C)	27,2	27,8	28,3	29,1	29,2	29,1	29,6	28,7	29	28,6	27,5	27,3
	Terendah	24,2	24	24	25	24,4	23	24,2	24,4	24	24	23,2	23,8
	Tertinggi	30	32,4	32,8	33,6	34,6	34,4	34,8	34,6	34,8	34,4	33,5	31,6
2	Curah Hujan (mm)	412.80	40.00	65.70	64.90	199.60	145.70	32.00	90.40	148.30	195.70	304.10	371.00
	Hari Hujan	27	8	4	10	14	13	5	11	8	18	20	17
3	Kelembapan Udara (%)	86	82	81	82	82	80	76	80	78	81	85	86
	Terendah	69	66	60	65	55	56	52	51	56	58	58	66
	Tertinggi	98	94	94	94	95	95	97	97	97	97	98	100
4	Kecepatan Angin (m/det)	4,8	4,3	3,4	2,7	2,9	3,1	2,9	3	3,9	2,9	2,3	4,3
	Terendah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tertinggi	22	22	15	11	14	24	26	18	25	16	8	24
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	64	153	194	180	140	151	186	111	142	149	131	71

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.1.2.5. Kondisi Tutupan Lahan

Data tutupan lahan tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Anambas diklasifikasikan menjadi 10 jenis. tutupan lahan tersebut diantaranya yaitu Hutan Lahan Kering Sekunder , Hutan Mangrove Sekunder, Belukar, Belukar Rawa, Pertanian Lahan Kering, Badan Air, Pertanian Lahan Kering Campur, Permukiman, Bandara / Pelabuhan, dan Tanah Terbuka. Tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi oleh kawasan berhutan, terutama Hutan Lahan Kering Sekunder yang mencakup luas sekitar 42.395,92 hektar atau 67,42% dari total wilayah daratan. Selain itu, tutupan lahan berupa belukar juga cukup signifikan dengan luas 7.588 hektar (12,07%), serta Pertanian Lahan Kering Campur seluas 9.183,98 hektar (14,61%). Ketiga kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Anambas masih berupa lahan alami dan semi-alami.

Lahan terbangun dan aktivitas manusia hanya mengambil porsi kecil dari total wilayah, di mana kawasan permukiman hanya mencakup 934,98 hektar (1,49%), tanah terbuka 1.183,16 hektar (1,88%), dan infrastruktur seperti bandara/pelabuhan hanya 123,35 hektar (0,20%). Sementara itu, kawasan ekosistem penting seperti hutan mangrove sekunder dan badan air masing-masing mencakup 1.055,76 hektar (1,68%) dan 149,49 hektar (0,24%). Komposisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki ekosistem yang relatif utuh dan berpotensi besar untuk pengembangan berkelanjutan berbasis konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Secara lebih rinci luas masing-masing tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 disajikan pada **Tabel 2.5** berikut.

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lahan Kering Sekunder	42.395,92	67,42%
2	Belukar	7.588,00	12,07%
3	Pemukiman	934,98	1,49%
4	Tanah Terbuka	1.183,16	1,88%
5	Badan Air	149,49	0,24%
6	Hutan Mangrove Sekunder	1.055,76	1,68%
7	Belukar Rawa	61,78	0,10%
8	Pertanian Lahan Kering	203,55	0,32%
9	Pertanian Lahan Kering Campur	9.183,98	14,61%
10	Bandara/Pelabuhan	123,35	0,20%

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2024

2.1.2.6. Pengembangan Potensi Wilayah

Perencanaan potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043. Adapun sektor yang dapat dikembangkan potensinya yaitu perikanan, pertanian, pariwisata, industri, dan pertambangan. Masing-masing sektor diuraikan sebagai berikut.

A. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas mengingat sebagian besar wilayahnya berada di kawasan pesisir. Lahan yang diperuntukkan sebagai pengembangan perikanan terpadu seluas 300 ha berada di Teluk Rambut Kecamatan Siantan Selatan. Pengembangan ini didukung oleh sarana penunjang penangkapan ikan diantaranya:

1. Terdapat tiga lokasi pabrik es yaitu berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Antang dengan kapasitas 15 ton, Pabrik Es Tolam Tarempa Timur dan pada tahun 2025 terdapat tambahan satu pabrik es di temburun.
2. *Cold Storage* di Anambas per tahun 2024 sebanyak 7 *cold storage* yang tersebar di Jemaja Timur 1 dengan kapasitas 60 ton, Siantan 4 dengan jumlah kapasitas total 270 ton, Siantan Timur 1 kapasitas 100 ton dan Siantan Tengah milik Dodo dengan nama Cold Storage Sejahtera berkapasitas 80 ton (sumber data: Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, 2024).
3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebanyak 6 PPI yang tersebar di kecamatan Jemaja (Letung), Jemaja Timur (Kuala Maras), Siantan Timur (Nyamuk), Siantan Tengah (Air Sena), Siantan Selatan (Kiabu), Palmatak (Ladan).
4. Lokasi pengembangan perikanan budidaya air laut tersebar di 10 kecamatan. Lokasi pengembangan perikanan budidaya air tawar tersebar di 4 kecamatan yaitu, Jemaja, Jemaja Timur, Siantan dan Kute Siantan.

Selanjutnya, pengembangan kawasan perikanan dapat melalui beberapa jenis diantaranya yaitu penetapan kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, Kawasan Minapolitan, dan kawasan pelabuhan ikan.

1. Lokasi pengembangan kawasan perikanan budidaya air laut: Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan, Tengah, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Jemaja Timur.
2. Lokasi pengembangan perikanan budidaya air tawar: Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur.
3. Lokasi pengembangan kawasan minapolitan: Kecamatan Siantan Tengah (Desa Air Sena, Desa Liuk, Desa Lidi, dan Desa Air Asuk), Kecamatan Palmatak (Desa Tebang Ladan, Desa Candi, Desa Putik, Desa Langir, dan Desa Piabung), Kecamatan Siantan Timur (Desa Nyamuk, Desa Batu Belah, Desa Serat, Desa Air Putih, dan Desa Temburun).
4. Lokasi pengembangan kawasan pelabuhan perikanan:
    a. Pelabuhan Perikanan Nusantara di wilayah Kabupaten;
    b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di Antang Desa Tarempa Timur Kecamatan Siantan; dan
    c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
        1. PPI Letung berada di Kecamatan Jemaja;
        2. PPI Kuala Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur;
        3. PPI Nyamuk berada di Kecamatan Siantan Timur;
        4. PPI Air Sena berada di Kecamatan Siantan Tengah;
        5. PPI Kiabu berada di Kecamatan Siantan Selatan; dan
        6. PPI Ladan berada di Kecamatan Palmatak.
    d. pangkalan pengawasan perikanan berada di Siantan Timur.

B. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan pada pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

1. Kawasan budidaya tanaman pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan yang akan dikembangkan memiliki luas kurang lebih 342 ha terdapat di Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

a) Pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 99,8 (sembilan puluh sembilan koma delapan) hektar meliputi Kecamatan Jemaja; Kecamatan Jemaja Timur; dan kecamatan Palmatak;

b) Pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 2.890 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh) hektar meliputi Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja Timur;

c) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 99,8 (sembilan puluh sembilan koma delapan) hektar meliputi Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur; dan

d) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua) hektar meliputi Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur; dan

2. Kawasan Budidaya Hortikultura

Peruntukan hortikultura direncanakan dengan luas kurang lebih 2.247 (dua ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Tengah, dan Kecamatan Siantan Timur.

3. Kawasan Budidaya Perkebunan

Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah perkebunan rakyat yang dikelola secara tradisional antara lain terdiri dari komoditi cengkeh, kelapa dan karet merupakan komoditi perkebunan yang dominan ditanam di Kabupaten Kepulauan Anambas selain komoditi perkebunan lainnya seperti lada, kopi, pinang, sagu dan lain-lainnya yang diusahakan secara turun-temurun. Potensi luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan perkebunan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah seluas kurang lebih 24.323 ha meliputi:

a. Lahan budidaya kelapa 9.785 hektar meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Jemaja Barat;
b. Lahan budidaya karet 2.696 hektar meliputi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Jemaja Barat;
c. Lahan budidaya cengkeh 1.601 hektar meliputi seluruh kecamatan; dan
d. Lahan budidaya sagu di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 seluas 229 Ha (Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan, 2024).

4. Kawasan Budidaya Peternakan

Kawasan peternakan diarahkan berada di seluruh kecamatan, dengan arahan pengembangan meliputi:

a. Ternak hewan besar berupa sapi potong berada di seluruh kecamatan dengan jumlah 2.153 ekor (BPS 2024);

b. Ternak hewan kecil berupa kambing berada di seluruh kecamatan dengan jumlah 227 ekor (BPS 2024); dan

c. Ternak unggas berupa ayam kampung yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah 22.700 ekor, ayam petelur yang berada di Kecamatan Siantan dan Siantan Timur dengan jumlah 5.100 ekor, ayam pedaging yang berada di Kecamatan Siantan dengan jumlah 32.000 ekor, dan itik berada di Kecamatan Siantan sebanyak 200 ekor (BPS 2024).

C. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas kurang lebih 4.674 ha. Pengembangan tersebut dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kawasan peruntukan pariwisata dengan luas kurang lebih 4.674 (empat ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi: Kawasan pariwisata alam, Kawasan pariwisata budaya, Kawasan pariwisata minat khusus, dan Kawasan pariwisata buatan
2. Kawasan pariwisata alam meliputi: kawasan wisata alam air terjun, kawasan pariwisata *marine eco tourisme*, kawasan wisata pantai, dan kawasan wisata konservasi penyu.
3. Kawasan pariwisata budaya meliputi: Keramat Siantan berada di kecamatan Siantan Tengah, Keramat Gunung Telaga berada di Kecamatan Siantan Selatan, Keramat Gunung Kute berada di Kecamatan Palmatak, Kuku dan Air Raya berada di Kecamatan Jemaja, dan Keramat Nek Bebet berada di Kecamatan Siantan Tengah.
4. Kawasan pariwisata minat khusus meliputi: Kawasan Pulau Penjalin, Pulau Kelong, Pulau Tokong Belayar, Pulau Durai dan Pulau Piacuk berada di Kecamatan Palmatak, Pulau Semut dan Selat Rangsang berada di Kecamatan Siantan Timur, Pulau Berhala, Pulau Mangkai dan Tokong Atap (Pulau Damar) berada di Kecamatan Jemaja, dan Kawasan Gugusan Pulau Bawah, Pulau Telibang, Pulau Lingai (Karang Sengka), Pulau Teloyan dan Pulau Telaga dan Pulau Kiabu berada di Kecamatan Siantan Selatan.
5. Kawasan pariwisata buatan berada di Pulau Siantan.

D. Potensi Pengembangan Kawasan Industri

Jenis industri yang direncanakan untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain industri kecil (khususnya industri makanan yang merupakan pengolahan dari hasil laut) dan alat angkut dimana lokasi dari rencana pengembangan kawasan industri tersebut sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 1.985 hektar meliputi:
   a) Kawasan Industri pendukung pertambangan migas lepas pantai dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) Hektar berada di Kecamatan Palmatak, dan
   b) Pengembangan Kawasan Industri *Ship Service* dengan luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Hektar berada di Kecamatan Jemaja.
2. Pengembangan Industri kecil dan mikro meliputi:
   a) Industri rumah tangga berupa industri pengolahan hasil tangkapan laut meliputi: Desa Tarempa Barat, Kelurahan Letung, Desa Tarempa Timur, dan Desa Bayat.
   b) Industri kerajinan rumah tangga untuk mendukung pariwisata meliputi: Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Selatan, dan Kecamatan Palmatak.

c) Industri pembuatan kapal kecil berada di seluruh kecamatan.
d) Industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan berada di Desa Letung Kecamatan Jemaja, Desa Bayat Kecamatan Palmatak, dan Dusun Antang Kecamatan Siantan.

E. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral non logam, dan pertambangan mineral logam. Masing-masing diuraikan sebagai berikut.

1. Kawasan peruntukan pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Potensi minyak dan gas bumi yang tersedia jumlahnya relatif besar, Minyak dan gas bumi merupakan wilayah kerja minyak dan gas bumi di perairan lepas pantai Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam

a) Granit merupakan salah satu mineral andalan mengingat jumlah cadangan yang relatif besar yaitu 19.662.288.605 ton. Lokasi dari penambangan Granit tersebar di beberapa pulau dengan luas kurang lebih 509 ha, dan untuk penempatan lokasinya harus melalui studi khusus agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan maupun sosial ekonomi. Adapun lokasi pertambangan batu granit terletak di Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, dan Kecamatan Jemaja.

b) Galian C

Potensi bahan galian C cukup besar dan bervariasi berupa pasir laut, pasir darat dan batu. Jumlah cadangan pasir darat sebesar 16.800.000 ton sedangkan untuk pasir laut sebesar 7.164.348.267 ton. Untuk lokasi galian pasir ini dapat ditetapkan melalui peraturan daerah agar dapat menetapkan pulau-pulau kecil yang dapat dieksplorasi pasirnya untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas agar tidak mempunyai dampak yang buruk terhadap lingkungan.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas dilihat berdasarkan hubungan antara karakteristik ekoregion dan tutupan lahan. Hubungan keduanya memiliki fungsi ekologis tertentu sebagai jasa lingkungan penyediaan, pengaturan, pemeliharaan, budaya, dan pendukung.

2.1.3.1. Jasa Lingkungan Penyediaan

a. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki hamparan lahan pertanian tidak cukup luas. Lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dibagi menjadi beberapa

ekoregion sesuai dengan ciri-ciri dan kenampakan alamiahnya. Masing-masing ekoregion umumnya memiliki ciri khas yang berbeda termasuk dalam penyediaan bahan pangan bagi manusia.

Secara umum di Kabupaten Kepulauan Anambas, lahan yang mampu menyediakan bahan pangan dapat dibagi menjadi lahan berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi tinggi hingga sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan seluas 9.360,43 hektar atau sekitar 15,08 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sementara apabila dilihat lebih detail ditingkat kecamatan luas lahan kategori tinggi hingga sangat tinggi terhampar di Kecamatan Jemaja seluas 2.580,45 hektar, Kecamatan Palmatak seluas 1.662,71 hektar dan Kecamatan Siantan Timur seluas 1,379.97 hektar. Merujuk pada definisi operasional maka wilayah yang memiliki klasifikasi jasa penyedia pangan tinggi sampai dengan sangat tinggi dapat diartikan sebagai wilayah yang memiliki potensi untuk pengembangan tanaman pangan.

Lahan yang berpotensi sedang dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 31.702,08 hektar atau sekitar 51,06 %. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah hingga sangat rendah dalam penyediaan bahan pangan bagi manusia memiliki luasan sebesar 21.022,63 hektar atau sekitar 33,86 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong kategori rendah sampai sangat rendah terhampar di Kecamatan Jemaja Timur seluas 8.464,33 hektar, Kecamatan Siantan Selatan seluas 2.374,10 hektar dan Kecamatan Siantan seluas 2.287,45 hektar. Ilustrasi potensi jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Gambar 2.2** berikut.

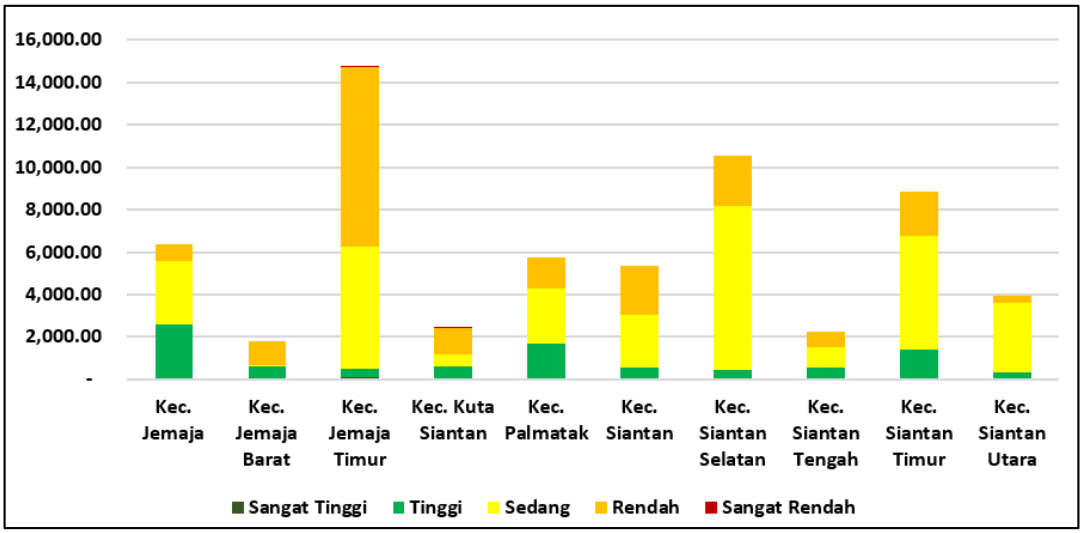

Gambar 2.2. Potensi jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

b. Air Bersih

Air bersih merupakan bagian sumberdaya yang tidak kalah penting bagi kehidupan manusia. Ketersediaannya dapat dihasilkan secara alami dari ekosistem yang baik seperti mata air, air tanah, air permukaan, sungai, danau, maupun sumber air

lainnya. Karakteristik ekoregion yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas akan menentukan potensi ketersediaan air bersih yang akan dihasilkan.

Secara umum potensi sangat tinggi hingga tinggi dalam menyediakan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 30.951,89 hektar atau sekitar 13 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong tinggi hingga sangat tinggi kemampuan penyediaan air bersihnya terdapat di Kecamatan Siantan Selatan seluas 7.692,61 hektar, Kecamatan Siantan Timur seluas 5.263,90 hektar dan Kecamatan Jemaja Timur seluas 5.421,45 hektar. Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dominan memiliki kemampuan menyediakan air bersih dominan berimbang antara kategori tinggi dan rendah. Luas lahan dengan kemampuan menyediakan air kategori rendah dan sangat rendah seluas 30.248,45 hektar atau 48,72% dari luas Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong rendah hingga sangat rendah kemampuan penyediaan air bersihnya terdapat yang tersebar di Kecamatan Jemaja Timur seluas 8.866,69 hektar, Kecamatan Siantan Timur seluas 3.467,14 hektar dan Kecamatan Jemaja seluas 3.375,56 hektar. Ilustrasi potensi jasa lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Gambar 2.3** berikut.

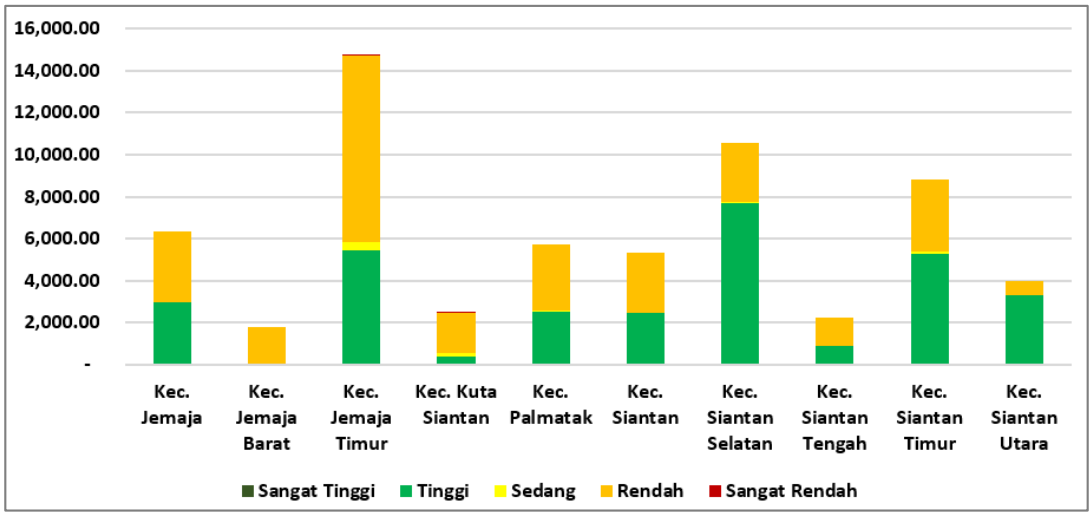

Gambar 2.3. Potensi jasa lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

2.1.3.2. Jasa Lingkungan Pengaturan

a. Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrem dan gelombang panas.

Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang memberikan manfaat berupa pengaturan iklim dengan baik maupun tidak. Secara umum di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat wilayah-wilayah yang dapat memberikan pengaturan iklim berpotensi tinggi, sedang, rendah hingga sangat rendah. Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dominan berpotensi tingkat tinggi dalam jasa pengaturan iklim yaitu seluas 30.919,33 hektar atau sekitar 49,80 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong tingkat tinggi kemampuan pengaturan iklimnya terdapat di Kecamatan Siantan Selatan seluas 7.692,61 hektar, Kecamatan Jemaja Timur seluas 5.421,45 hektar dan Kecamatan Siantan Timur seluas 5.263,90 hektar.

Lahan yang memiliki potensi tingkat rendah hingga sangat rendah dalam tata pengaturan iklim menempati luas 30.385 hektar atau 48,94 % dan dominan tertinggi terdapat di Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Timur dan Kecamatan Jemaja. Sedangkan wilayah yang berpotensi sedang dalam pengaturan tata iklim memiliki luasan sebesar 780,80 hektar atau sekitar 1,26 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ilustrasi potensi jasa lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Gambar 2.4** berikut.

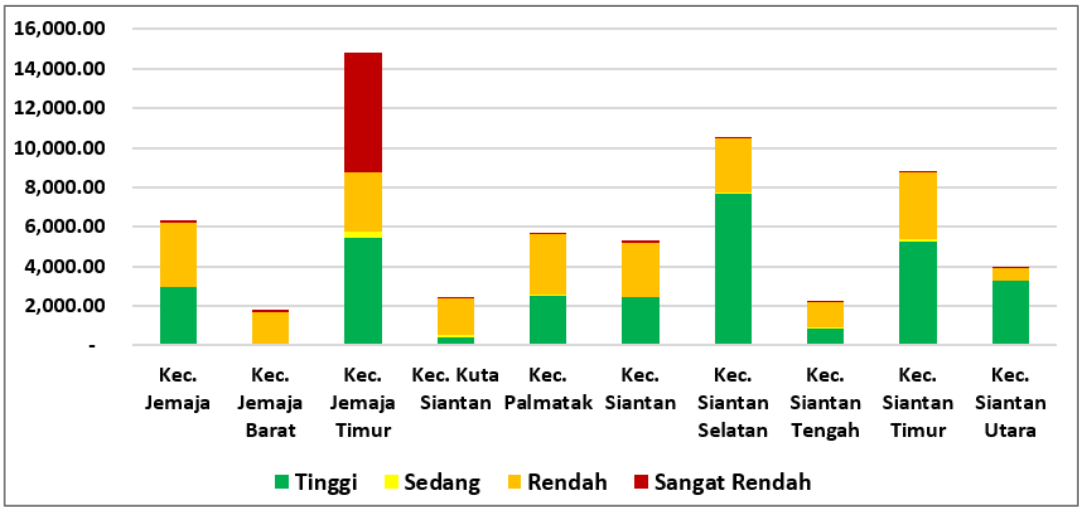

Gambar 2.4. Potensi jasa lingkungan pengaturan iklim di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

b. Tata Air dan Banjir

Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Jasa lingkungan yang demikian termasuk dalam jenis jasa pengaturan tata aliran air dan banjir.

Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang memberikan manfaat berupa pengaturan tata air dan pengendalian banjir dengan baik maupun tidak. Secara umum di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat wilayah-wilayah yang dapat memberikan pengaturan tata air dan pengendalian banjir berpotensi

sangat tinggi hingga yaitu seluas 31.702,08 hektar atau sekitar 51,06 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong tingkat tinggi hingga sangat tinggi kemampuan pengaturan tata air dan pengendalian banjirnya terdapat di Kecamatan Siantan Selatan seluas 7.709,41 hektar, Kecamatan Jemaja Timur seluas 5.423,40 hektar dan Kecamatan Siantan Timur seluas 5.352,43 hektar.

Lahan yang memiliki potensi tingkat sedang dalam pengaturan tata air dan banjir menempati luas 23.549,93 hektar atau 37,93 % dan dominan terdapat di Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Sedangkan wilayah yang berpotensi rendah dalam pengaturan tata air dan banjir memiliki luasan sebesar 6.833,12 hektar atau sekitar 1,05 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ilustrasi mengenai potensi jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Gambar 2.5** berikut.

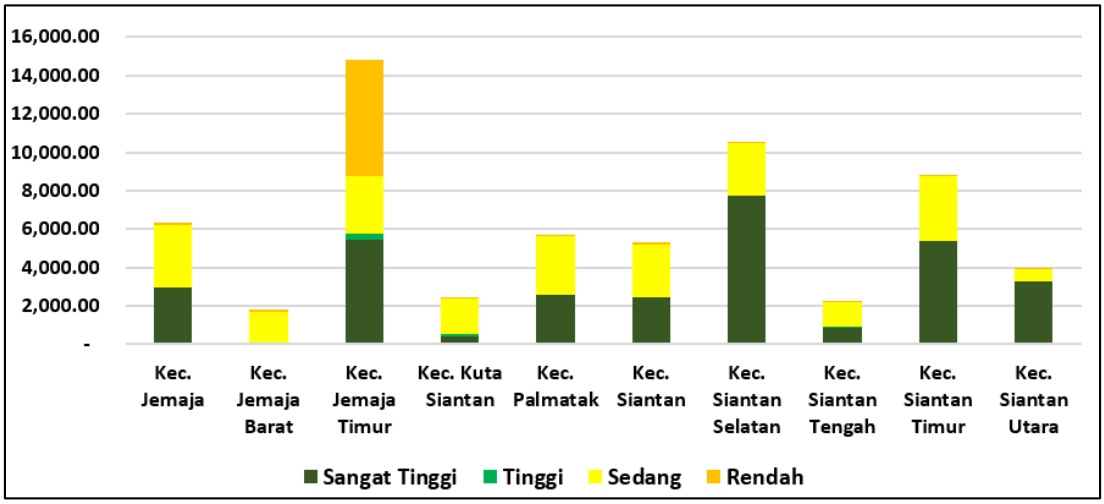

Gambar 2.5. Potensi jasa lingkungan pengaturan tata air dan banjir di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

2.1.3.3. Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana

Ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dengan morfologi perbukitan.

Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dominan berpotensi tingkat tinggi hingga sangat tinggi dalam jasa pengaturan dan perlindungan terhadap bencana yaitu seluas 31.732,69 hektar atau sekitar 51,11 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong tingkat tinggi hingga sangat tinggi kemampuan pengaturan dan pengendalian terhadap bencananya terdapat di Kecamatan Siantan Selatan seluas 7.737,28 hektar, Kecamatan Jemaja Timur seluas 5.740,77 hektar dan Kecamatan Siantan

Timur seluas 5.375,48 hektar. Sementara lahan yang memiliki potensi tingkat sedang dalam pengaturan dan pencegahan terhadap bencana menempati luas 23.519,32 hektar atau 37,88 % dari luas Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan wilayah yang berpotensi rendah dalam pengaturan dan pencegahan terhadap bencana memiliki luasan sebesar 6.833,12 hektar atau sekitar 11,01 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara lebih detail potensi tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2.6**.

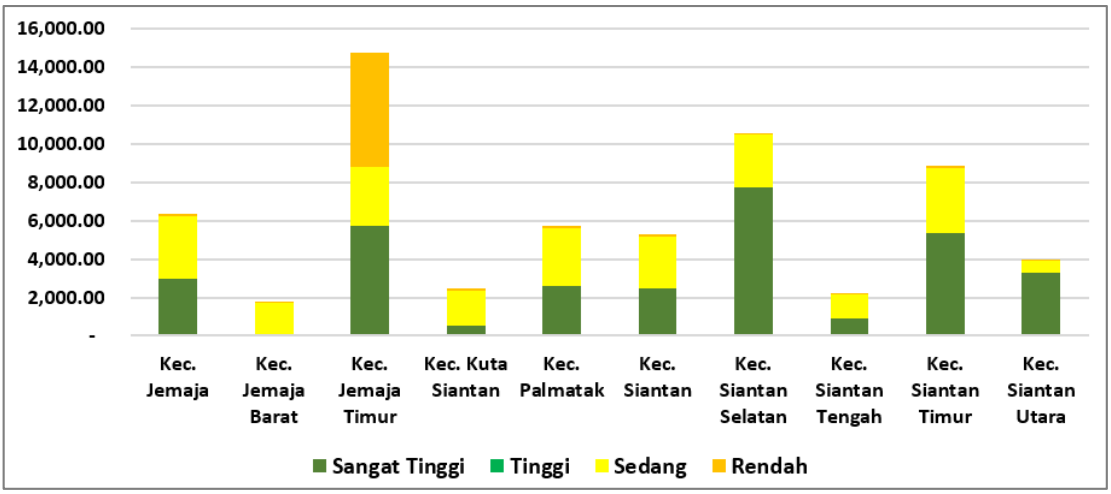

Gambar 2.6. Potensi jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

a. Pengolahan dan Pengurai Limbah

Jasa lingkungan memiliki kapasitas dalam menetralisir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir zat organik yang ada dalam air limbah dengan dibantu oleh berbagai macam mikroba. Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang dapat memberikan manfaat berupa pengolahan dan pengurai limbah dengan baik maupun tidak.

Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dominan berpotensi tingkat sedang dalam jasa pengolahan dan pengurai limbah yaitu seluas 54.438,65 hektar atau sekitar 87,68 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong tingkat sedang kemampuan pengolah dan pengurai limbahnya terdapat di Kecamatan Siantan Selatan seluas 10.454,62 hektar, Kecamatan Siantan Timur seluas 8.621,77 hektar dan Kecamatan Jemaja Timur seluas 8.437,75 hektar.

Lahan yang memiliki potensi tingkat rendah dalam pengaturan pengurai limbah menempati luas 6.833,12 hektar atau 11,01 % dari luas Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan wilayah yang berpotensi tinggi hingga sangat tinggi dalam pengaturan pemurnian air memiliki luasan sebesar 813,36 hektar atau sekitar 1,36 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Potensi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada **Gambar 2.7** berikut.

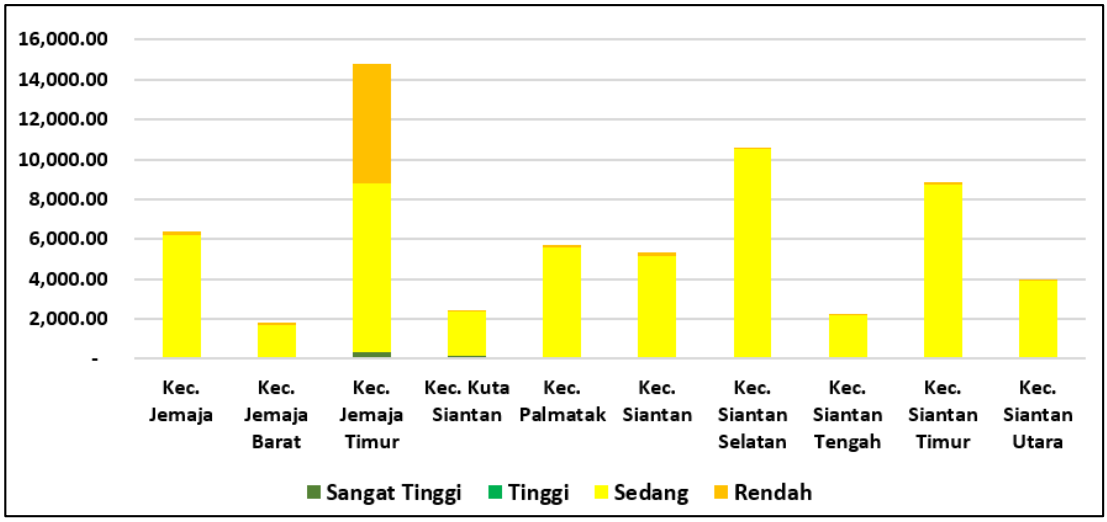

Gambar 2.7. Potensi jasa lingkungan pengaturan pengolahan dan pengurai limbah
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

2.1.3.4. Jasa Lingkungan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Vegetasi yang rapat memungkinkan proses fotosintesis berlangsung secara masif dan menghasilkan oksigen ke udara.

Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang dapat memberikan manfaat berupa jasa pemeliharaan kualitas udara dengan baik maupun tidak. Secara umum Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dominan berpotensi tinggi dalam jasa pemeliharaan kualitas udara yaitu seluas 31.573,44 hektar atau sekitar 50,86 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong tingkat tinggi kemampuan pemelihara kualitas udaranya terdapat di Kecamatan Siantan Selatan seluas 7.720,48 hektar, Kecamatan Jemaja Timur seluas 5.740,77 hektar dan Kecamatan Siantan Timur seluas 5.286,95 hektar.

Lahan yang memiliki potensi tingkat sangat rendah hingga rendah dalam pemelihara kualitas udara menempati luas 30.385 hektar atau 48,94 % dari luas Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan wilayah yang berpotensi sedang dalam pemeliharaan kualitas udara memiliki luasan sebesar 126,69 hektar atau sekitar 0,20 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berbagai potensi tersebut secara lebih rinci disajikan pada **Gambar 2.8** berikut.

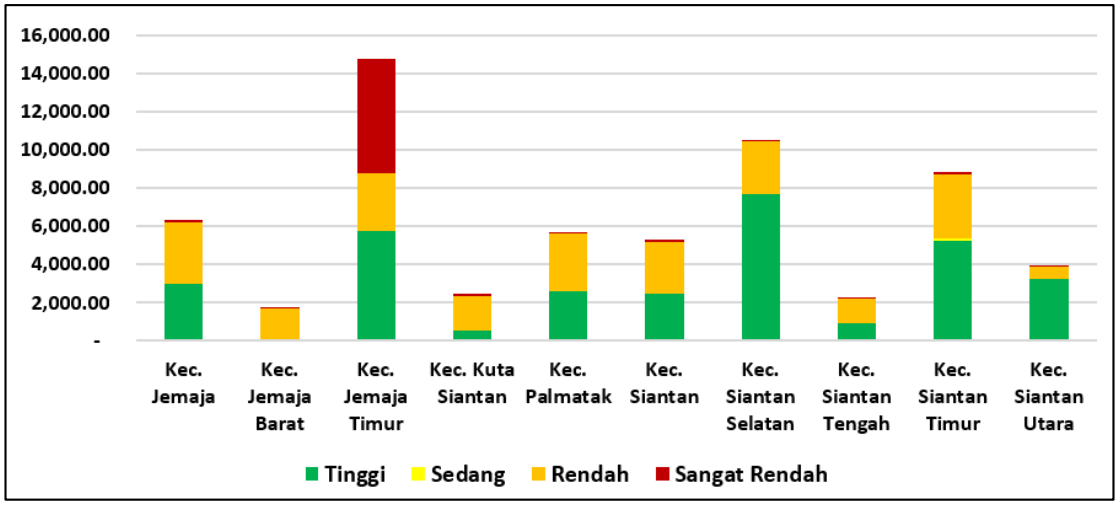

Gambar 2.8. Potensi jasa lingkungan pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

2.1.3.5. Jasa Lingkungan Budaya (*Culture*)

Jasa lingkungan kultural merupakan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan hidup yang dapat mendukung manusia dalam menopang kehidupan sosial dan budaya. Lingkungan hidup memiliki daya dukung bagi manusia dalam memanfaatkan jasa ekosistem bagi tujuan sosial budaya tersebut, dan pada saat yang bersamaan juga menyerap limbah dari kegiatan sosial dan budaya tersebut.

a. Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.

Ekoregion yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas ada yang dapat memberikan manfaat berupa budaya tempat tinggal dan ruang hidup dengan baik maupun tidak. Secara umum Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dominan berpotensi tingkat sedang dalam budaya tempat tinggal dan ruang hidup yaitu seluas 55.341,44 hektar atau sekitar 89,14 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong tingkat sedang dalam budaya tempat tinggal dan ruang hidup terdapat di Kecamatan Siantan Selatan seluas 10.501,24 hektar, Kecamatan Jemaja Timur Seluas 8.849,57 hektar dan Kecamatan Siantan Timur seluas 8.733,35 hektar.

Lahan yang memiliki potensi tingkat rendah dalam budaya tempat tinggal dan ruang hidup menempati luas 6.050,48 hektar atau 9,75 % dari luas Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan wilayah yang berpotensi sangat tinggi dalam budaya tempat tinggal dan ruang hidup memiliki luasan sebesar 693,22 hektar atau sekitar 1,12 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Potensi tersebut selengkapnya disajikan pada **Gambar 2.9** berikut.

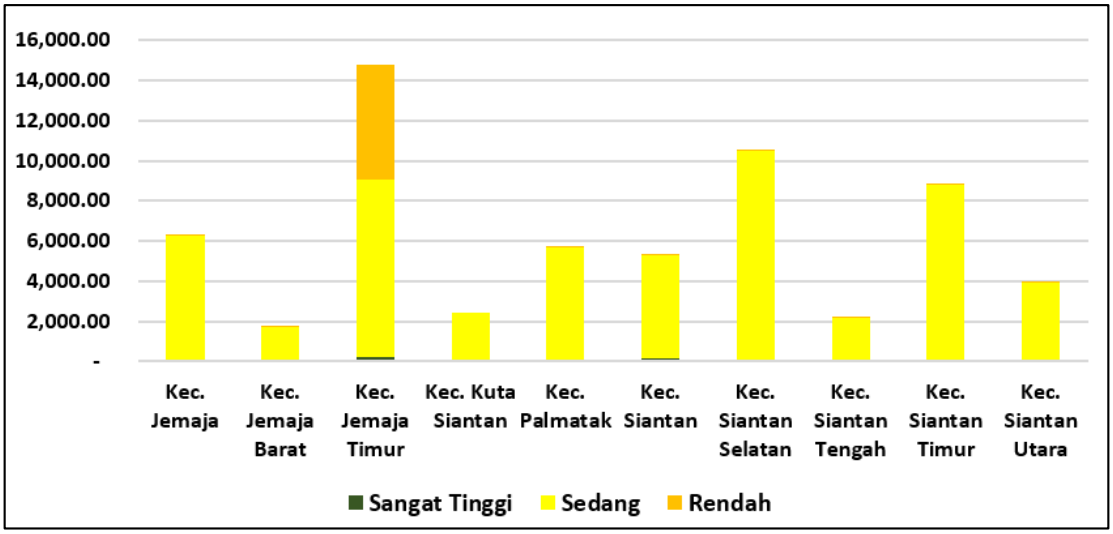

Gambar 2.9. Potensi jasa lingkungan budaya sebagai tempat tinggal dan ruang hidup Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

2.1.3.6. Jasa Lingkungan Pendukung

Jasa Lingkungan Pendukung adalah jasa lingkungan yang diperlukan untuk menghasilkan jasa lingkungan lainnya. Ada empat jenis jasa lingkungan dalam kelompok jasa lingkungan pendukung ini yaitu jasa pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan, jasa siklus hara, jasa produksi primer dan jasa biodiversitas.

a. Siklus Hara (*Nutrient cycle*)

Hara diperlukan untuk produksi bahan organik baik pada tingkat tropik produser ataupun konsumer yang umumnya berada dalam lingkungan abiotik dengan konsentrasi yang lebih rendah dari pada yang dibutuhkan untuk aktivitas pertumbuhan.

Berdasarkan hasil analisis daya dukung pendukung siklus hara, maka diperoleh jasa lingkungan pembentukan siklus hara, dimana setiap kecamatan (10 kecamatan) yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas semuanya memiliki potensi jasa lingkungan siklus hara baik menurut klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, maupun tinggi hingga sangat tinggi.

Lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dominan berpotensi tingkat tinggi hingga sangat tinggi dalam siklus hara yaitu seluas 31.372,69 hektar atau sekitar 51,11 % dari keseluruhan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara kecamatan, luas lahan yang tergolong tingkat tinggi hingga sangat tinggi dalam siklus hara terdapat di Kecamatan Siantan Selatan seluas 7.720,48 hektar, Kecamatan Jemaja Timur seluas 5.740,77 hektar dan Kecamatan Siantan Timur seluas 5.286,95 hektar. Sementara lahan yang memiliki potensi tingkat sedang dalam siklus hara menempati luas 23.519,32 hektar atau 37,88 % dari luas Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan wilayah yang berpotensi rendah hingga sangat rendah dalam siklus hara memiliki luasan sebesar 6.833,13 hektar atau sekitar 38,02 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan

Anambas. Secara lebih lengkap potensi tersebut disajikan pada **Gambar 2.10** berikut.

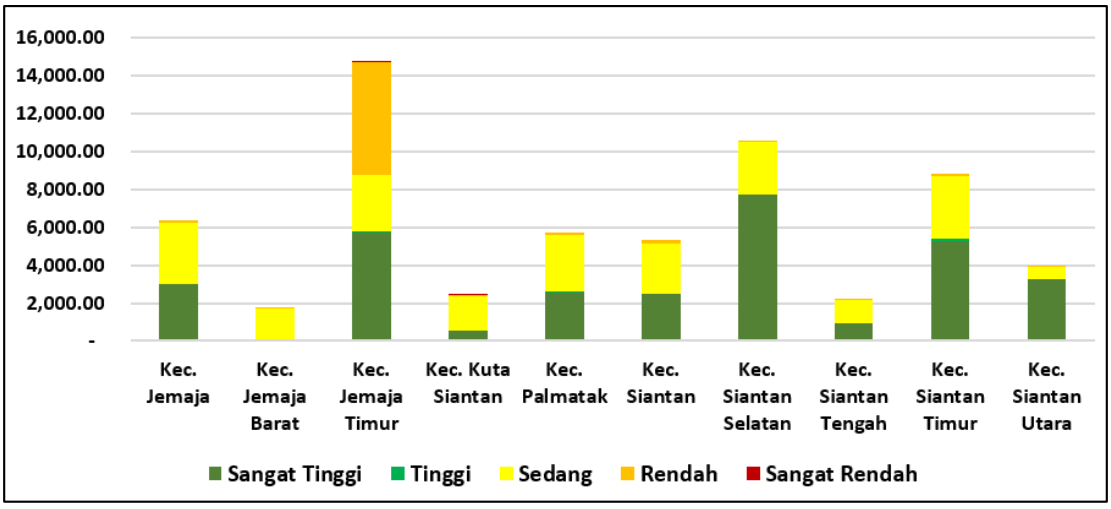

Gambar 2.10. Potensi jasa lingkungan pendukung siklus hara Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, 2024

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang nilai siklus haranya tingkat sedang tersebar pada ekoregion lembah antar perbukitan/pegunungan denudasional dan lereng kaki perbukitan/pegunungan denudasional. Siklus hara ini menopang kegiatan pertanian, karena dengan siklus hara yang baik, kesuburan lahan pertanian terpelihara baik pula, dan pada akhirnya menghasilkan jasa ekosistem yang lainnya seperti jasa pangan, jasa serat, energi, pengaturan iklim, pemeliharaan kualitas udara dan jasa lingkungan lainnya. Dengan informasi ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki daya dukung dan daya tampung yang medium atas jasa siklus hara, yang tentunya secara berkelanjutan dapat menopang produksi pertanian bila daya dukung dan daya tampung ini terpelihara.

2.1.4. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan

Kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya dapat dilihat dari nilai Indeks Ketahanan Panganan (IKP). Nilai tersebut merupakan salah satu indikator yang dibuat pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan sebagian dari target SDG's. Target tersebut diantaranya untuk mengatasi kemiskinan, mengakhiri kelaparan,

mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. IKP disusun berdasarkan 9 (sembilan) indikator yaitu:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih;
2. Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan;
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik;
5. Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun;
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga Kesehatan terhadap Tingkat kepadatan penduduk;
8. Persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (*stunting*); dan
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

IKP memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. IKP dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga bisa tepat sasaran. Adapun dinamika IKP di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.6** berikut. Nilai persentase skor IKP semakin tinggi menunjukkan suatu wilayah tersebut memiliki ketahanan pangan yang tinggi, namun sebaliknya nilai IKP yang rendah menunjukkan wilayah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. Standar nilai IKP Nasional dikategorikan menjadi 6 (enam) kelas seperti tabel berikut.

Tabel 2.6. Kategori nilai Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk kabupaten dan kota

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	<= 41,52	<=28,84
2	> 41,52 - 51,42	> 28,84 - 41,44
3	> 51,42 - 59,58	> 41,44 - 51,29
4	> 59,58 - 67,75	> 51,29 - 61,13
5	> 67, 75 - 75,68	> 61,13 - 70,64
6	> 75,68	> 70,64

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Meskipun nilai IKP masih di bawah rata-rata provinsi, namun peningkatan yang konsisten menunjukkan upaya nyata dalam memperbaiki kondisi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Meskipun tergolong belum aman, peningkatan IKP ini menjadi tanda kemajuan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Informasi terkait dinamika Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas sejak tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada **Gambar 2.11**.

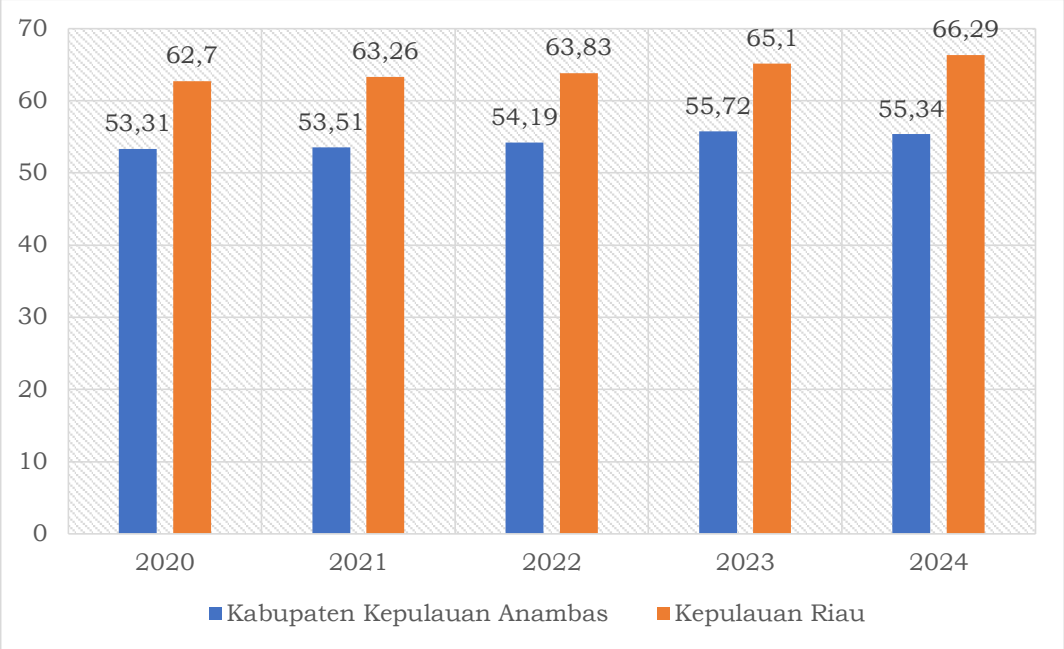

Gambar 2.11. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional, 2020-2024

2.1.4.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang asupan energinya secara terus-menerus berada di bawah kebutuhan minimum energi pangan yang ditentukan. Indikator ini mencerminkan tingkat kerawanan pangan kronis yang dapat berdampak pada kesehatan, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan oleh FAO, prevalensi kurang dari 5% dikategorikan sebagai sangat rendah, 5–14,9% sebagai sedang, 15–24,9% sebagai tinggi, dan di atas 25% sebagai sangat tinggi.

Berdasarkan data pada tabel, terlihat bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2023, yakni dari 7,24% pada 2020 menjadi 13,71% pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan memburuknya kondisi ketahanan pangan dalam periode tersebut, dari kategori sedang mendekati kategori tinggi. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 9,04%, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses atau distribusi pangan. Meski demikian, angka tahun 2024 masih berada dalam kategori sedang dan lebih tinggi dibandingkan awal periode (2020), sehingga tetap memerlukan perhatian dan intervensi berkelanjutan untuk menurunkan prevalensi ke tingkat yang lebih aman. Informasi terkait dinamika prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment*) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024 disajikan pada **Gambar 2.12**.

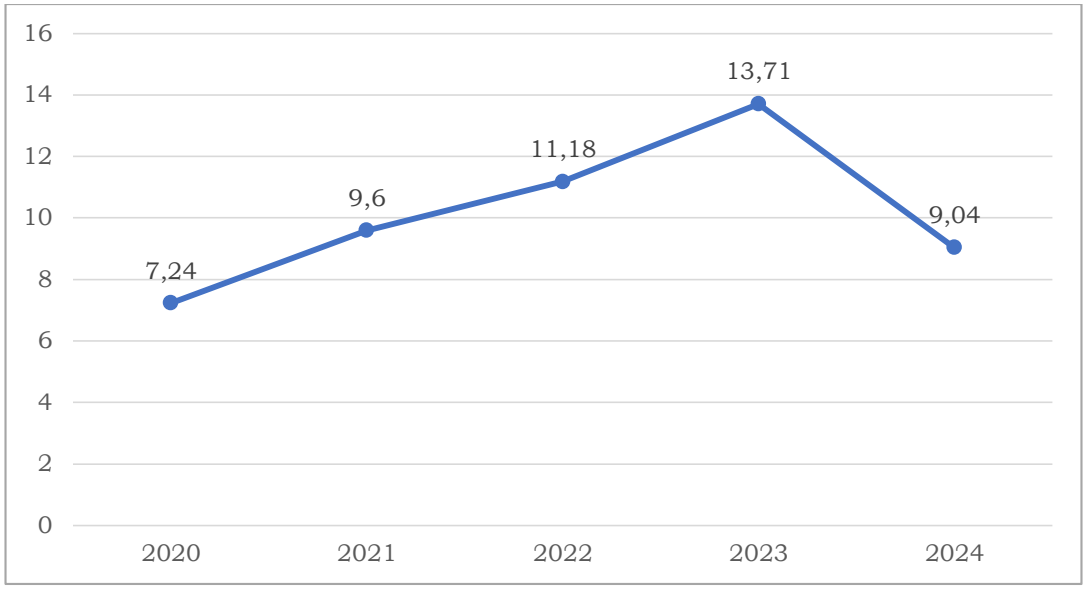

Gambar 2.12. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional, 2020-2024

2.1.4.3. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan ukuran rata-rata penggunaan energi listrik oleh setiap individu dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun dan dinyatakan dalam kilowatt jam (kWh). Indikator ini mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan, kualitas hidup, serta akses masyarakat terhadap energi. Semakin tinggi konsumsi listrik per kapita, umumnya menunjukkan semakin baiknya akses terhadap infrastruktur, teknologi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, konsumsi tercatat sebesar 595,34 kWh dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 731,68 kWh pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan dari kebutuhan energi listrik yang didorong oleh perkembangan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, atau ekspansi infrastruktur dan layanan publik, namun tetap perlu disertai dengan pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan dan efisien. Informasi terkait dinamika Konsumsi listrik per Kapita di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024 disajikan pada **Gambar 2.13**.

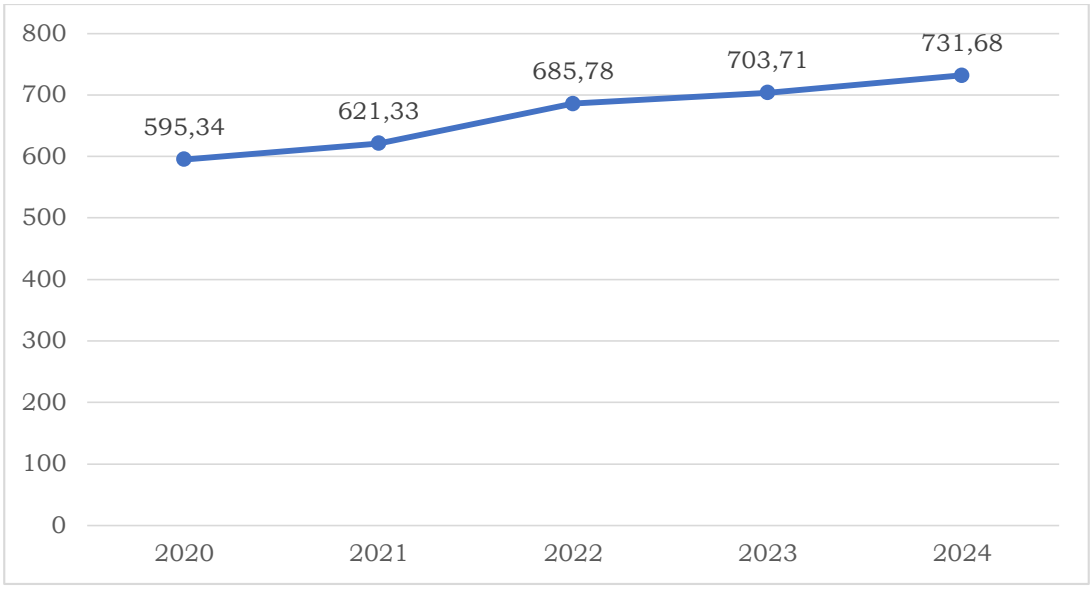

Gambar 2.13. Konsumsi Listrik per Kapita di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.1.4.4. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak merupakan indikator penting untuk menilai tingkat layanan dasar yang diterima masyarakat, khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan. Sumber air minum layak meliputi fasilitas yang terlindungi dari kontaminasi, seperti air leding, sumur bor terlindung, mata air terlindung, dan air kemasan, sesuai standar dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki akses, semakin baik pula kualitas lingkungan hidup dan potensi pencegahan penyakit berbasis air. Idealnya, persentase ini terus meningkat mendekati 100% sebagai cerminan dari pemerataan pembangunan dan layanan dasar.

Berdasarkan data di Kabupaten Kepulauan Anambas, Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian akses masih relatif rendah, masing-masing sebesar 12,32% dan 12,23%, mencerminkan keterbatasan infrastruktur atau layanan air bersih pada masa tersebut. Peningkatan substansial terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 28,56%, yang kemudian berlanjut menjadi 28,96% pada tahun 2023, menunjukkan adanya intervensi atau perbaikan akses air minum yang cukup efektif. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 24,65%, yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya hambatan dalam kesinambungan layanan atau pemeliharaan infrastruktur. Informasi terkait Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024 disajikan pada **Gambar 2.14**.

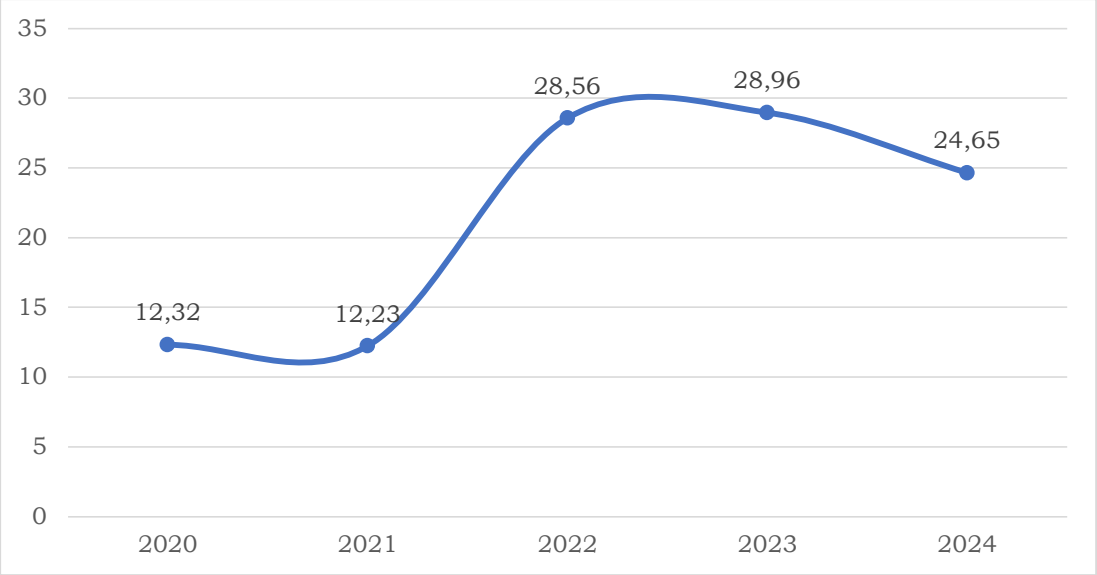

Gambar 2.14. Persentase RT yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Lingkungan yang berkualitas dapat tercipta dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang baik. Hal ini dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. IKLH menjadi tolok ukur bagi semua pihak dalam mengevaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH melibatkan tiga komponen utama yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun Kategori penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai berikut.

Tabel 2.7. Kategori Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≥ 100
2	Baik	70 ≤ x < 90
3	Sedang	50 ≤ x < 70
4	Kurang	25 ≤ x < 50
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, IKA stabil di angka 66,67, kemudian meningkat menjadi 70,00 pada tahun 2021, tetapi turun drastis ke 50,00 di tahun 2022—angka terendah dalam enam tahun terakhir. Pemulihan terjadi pada tahun 2023 dengan kembali ke 70,00, namun kembali menurun menjadi 60,00 di tahun 2024. Ketidakstabilan ini mengindikasikan kerentanan kualitas air terhadap faktor eksternal seperti limbah domestik, aktivitas perikanan,

atau perubahan iklim. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) justru menunjukkan tren yang lebih positif, dengan peningkatan dari 88,61 pada tahun 2020 menjadi 94,45 di tahun 2024—nilai tertinggi dalam kurun waktu tersebut. Konsistensi IKU di atas 87,00 mencerminkan kualitas udara yang relatif baik, didukung oleh faktor geografis kepulauan yang memungkinkan dispersi polutan lebih efektif dibandingkan wilayah daratan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan signifikan dari 63,56 pada tahun 2020 menjadi 83,27 di tahun 2021–2022, dan mencapai puncaknya di angka 90,45 pada tahun 2023. Kestabilan di kisaran 90,40 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan lahan telah berhasil dipertahankan. Lonjakan IKL ini mungkin dipengaruhi oleh intervensi kebijakan seperti rehabilitasi lahan, pengendalian alih fungsi lahan, atau program konservasi. Namun, meskipun IKL menunjukkan kemajuan, fluktuasi IKA yang masih tinggi mengisyaratkan perlunya pendekatan terintegrasi antara pengelolaan lahan dan sumber daya air. Disparitas antara kinerja IKU (sangat baik) dan IKA (fluktuatif) juga menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan di Anambas tidak merata di semua sektor, sehingga memerlukan strategi yang lebih holistik untuk memastikan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Tabel 2.8. Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	66,67	70,00	50,00	70,00	60,00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,61	87,04	89,94	89,37	94,45
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63,56	83,27	83,27	90,45	90,40
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,01	79,81	73,46	82,32	80,61

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren positif secara keseluruhan selama periode 2020-2024, dengan peningkatan dari 72,01 pada tahun 2020 menjadi 80,61 di tahun 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 82,32, mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun, pola fluktuasi terlihat jelas dengan penurunan sementara di tahun 2022 menjadi 73,46 setelah sebelumnya mencapai 79,81 di tahun 2021. Dinamika ini mencerminkan kerentanan sistem lingkungan Anambas terhadap berbagai tekanan, baik faktor alamiah maupun antropogenik. Peningkatan IKLH secara umum didorong oleh membaiknya kualitas lahan (IKL) yang konsisten naik sejak 2021 dan kualitas udara (IKU) yang terus mengalami peningkatan, meskipun diimbangi dengan ketidakstabilan kualitas air (IKA) yang cenderung fluktuatif.

Pencapaian IKLH di atas 80 pada tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas telah berhasil mempertahankan status lingkungan hidup yang baik, didukung oleh komitmen pengelolaan lingkungan yang semakin matang. Namun, penurunan nilai IKLH dari 82,32 (2023) menjadi 80,61 (2024) perlu menjadi perhatian khusus, karena mengindikasikan potensi tantangan keberlanjutan. Analisis komponen penyusun IKLH mengungkapkan bahwa meskipun kualitas udara dan lahan menunjukkan performa yang stabil dan baik, kualitas air yang

tidak konsisten menjadi faktor pembatas utama. Kondisi ini menyiratkan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih terfokus pada pengelolaan sumber daya air terpadu, sambil mempertahankan capaian positif di sektor pengelolaan udara dan lahan, untuk memastikan peningkatan IKLH yang berkelanjutan di masa depan. Adapun dinamika nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Gambar 2.15** berikut.

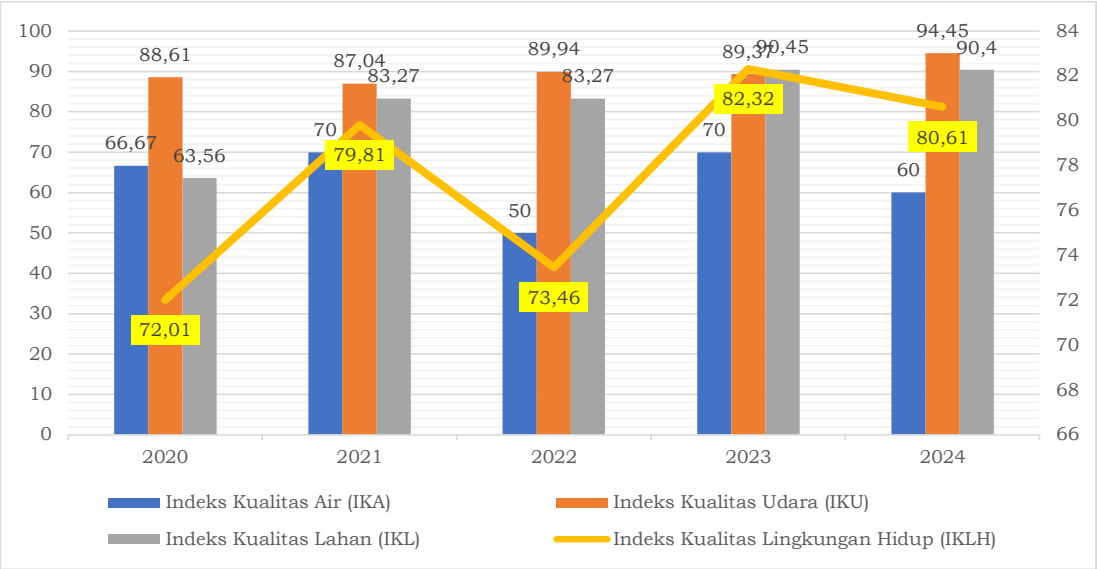

Gambar 2.15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.1.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak merupakan indikator penting untuk menilai kondisi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Sanitasi layak mengacu pada fasilitas pembuangan kotoran yang higienis, seperti jamban sehat dengan tangki septik, sistem pembuangan air limbah yang aman, serta fasilitas yang mencegah kontaminasi lingkungan dan sumber air. Indikator ini digunakan secara luas oleh lembaga nasional maupun internasional, termasuk dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Idealnya, persentase ini mendekati 100% untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap lingkungan yang bersih dan aman.

Data di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir terkait akses sanitasi layak. Pada tahun 2020, 23,51% rumah tangga memiliki akses sanitasi layak, kemudian meningkat signifikan menjadi 32,9% pada 2021. Namun, setelah itu terjadi penurunan bertahap hingga mencapai 26,55% pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit peningkatan di tahun 2023, tren keseluruhan menunjukkan belum tercapainya perbaikan berkelanjutan. Penurunan ini dapat mengindikasikan tantangan dalam pemeliharaan fasilitas sanitasi, urbanisasi yang tidak seimbang, atau keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur sanitasi baru. Informasi Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak di kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024 disajikan pada **Gambar 2.16**.

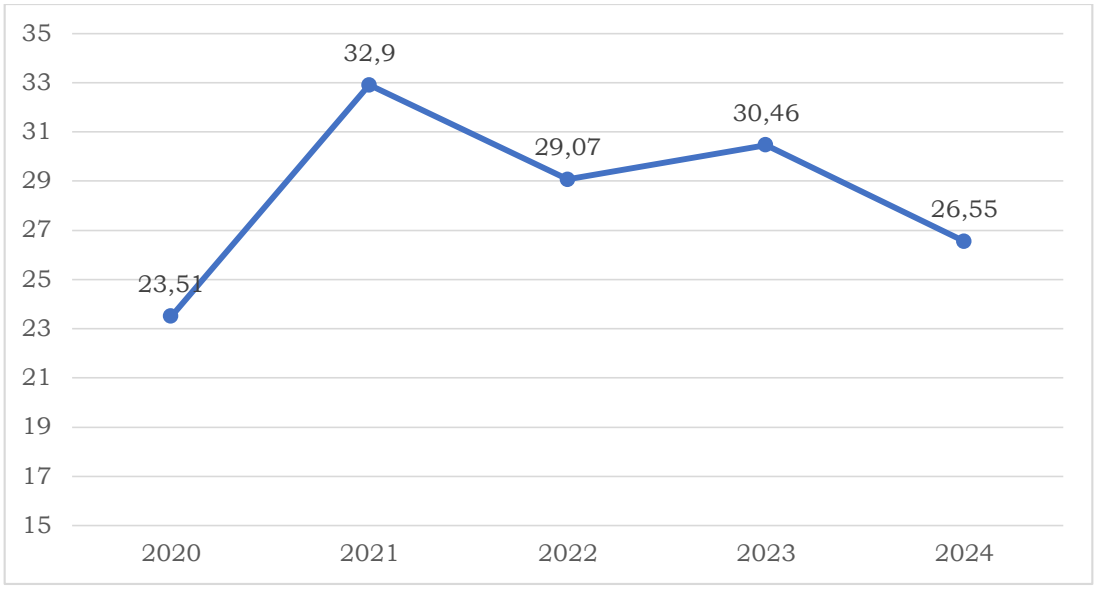

Gambar 2.16. Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses sanitasi layak di kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.1.5.3. Kondisi Persampahan

Data timbulan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3% per tahun. Pada tahun 2020, volume sampah tercatat sebesar 4.645,98 ton/tahun, kemudian terus meningkat hingga mencapai 5.375,79 ton/tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam. Namun, di sisi lain, upaya pengurangan sampah justru menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan persentase tertinggi hanya mencapai 6,36% pada tahun 2023. Gap yang cukup lebar antara peningkatan timbulan sampah dan efektivitas program pengurangan mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum optimal dalam menekan laju pertumbuhan sampah. Hal ini diperparah oleh minimnya upaya daur ulang dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sehingga beban lingkungan terus meningkat seiring waktu.

Penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami fluktuasi yang cukup ekstrem selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase penanganan mencapai 6,99%, tetapi turun drastis menjadi 0,96% di tahun 2022, sebelum melonjak tajam menjadi 58,64% di tahun 2024. Lonjakan terakhir ini mungkin disebabkan oleh intervensi program khusus atau peningkatan anggaran, namun ketidakkonsistenan tersebut justru memperlihatkan gap dalam perencanaan berkelanjutan. Di sisi lain, persentase sampah terkelola (gabungan pengurangan dan penanganan) tetap rendah, dengan rata-rata di bawah 12% dalam lima tahun terakhir. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah masih dibuang secara konvensional, seperti ditimbun atau dibakar, yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Ketidakmampuan sistem pengelolaan sampah dalam menyeimbangkan pertumbuhan timbulan sampah dengan kapasitas penanganan menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi.

Selama lima tahun terakhir, persentase sampah tidak terkelola di Kabupaten Kepulauan Anambas tetap sangat tinggi, berkisar antara 88,37% hingga 95,19%. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari 90% sampah yang dihasilkan tidak melalui proses pengelolaan yang memadai, sehingga berpotensi mencemari ekosistem darat dan laut. Gap yang sangat besar antara timbulan sampah dan kapasitas pengelolaan mencerminkan lemahnya infrastruktur persampahan, seperti keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan sistem pengumpulan sampah yang efektif. Meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam penanganan sampah pada tahun 2024 (58,64%), persentase sampah tidak terkelola tetap mencapai 93,79%, yang menunjukkan bahwa upaya tersebut belum menyentuh akar permasalahan. Kondisi ini diperkirakan akan semakin membebani lingkungan jika tidak diikuti dengan perbaikan sistem pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan regulasi yang mendukung ekonomi sirkular. Berikut adalah tabel kondisi persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024.

Tabel 2.9. Kondisi Persampahan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah	Ton/Tahun	4.702,70	4.759,97	4.818,00	4.876,80	5.375,79
Pengurangan Sampah	%	4,64	4,81	5,96	6,36	6,21
Penanganan Sampah	%	6,99	2,52	0,96	5,48	58,64
Sampah Terkelola	%	11,63	4,81	5,96	6,36	6,21
Sampah Tidak Terkelola	%	88,37	95,19	94,04	93,64	93,79

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.1.6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim global membawa konsekuensi serius bagi berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satu dampak yang paling terasa adalah perubahan pola cuaca yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan berbagai gangguan, seperti:

1. Curah hujan tidak merata dan tidak sesuai jadwal

Hal ini berakibat pada musim hujan yang berkepanjangan dengan angin dan gelombang laut kencang, yang menyulitkan nelayan untuk melaut dan berakibat pada penurunan hasil tangkapan. Di sisi lain, musim kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan dan mengganggu sektor pertanian, serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen.

2. Ketersediaan air bersih

Perubahan pola hujan berdampak pada ketersediaan air tanah, sungai, dan danau, yang merupakan sumber air baku bagi masyarakat.

3. Ancaman bencana

Perubahan iklim meningkatkan risiko berbagai bencana alam, seperti banjir, abrasi pantai, dan badai. Bencana ini dapat merusak infrastruktur, mengganggu kehidupan masyarakat, dan menyebabkan kerugian ekonomi.

4. Dampak sosial dan ekonomi

Penurunan hasil panen dan tangkapan ikan menyebabkan berkurangnya pendapatan petani dan nelayan. Hal ini dapat memicu konflik sosial, meningkatkan angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial.

Menghadapi berbagai ancaman tersebut memerlukan upaya antisipasi dan adaptasi yang komprehensif dari semua pihak. Beberapa Langkah yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Pemerintah

- Membuat kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim;
- Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim dan dampaknya;
- Mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim; dan
- Memberikan bantuan dan pelatihan kepada petani dan nelayan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.

b. Masyarakat

- Mengubah pola hidup dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan;
- Berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon dan reboisasi hutan;
- Menggunakan air secara hemat dan bijak; dan
- Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

c. Pihak Swasta

- Mendukung program-program pelestarian lingkungan dan penanggulangan perubahan iklim;
- Mengembangkan produk dan layanan yang ramah lingkungan; dan
- Meningkatkan edukasi dan kesadaran karyawan tentang perubahan iklim.

Perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh seluruh dunia, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, diharapkan dampak negatif perubahan iklim dapat diminimalisir dan masa depan yang lebih berkelanjutan dapat terwujud.

Perubahan iklim membawa konsekuensi berupa berbagai bencana alam. Dampak dan risiko bencana ini dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB). IRB adalah alat yang mengukur tingkat risiko suatu wilayah terhadap bencana. IRB merupakan alat penting untuk memahami dan mengelola risiko bencana. Indeks Risiko Bencana dibangun oleh tiga komponen penyusun yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) dalam menghadapi bencana. Komponen bahaya (*hazard*) akan berkaitan dengan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan dari sebuah fenomena bencana. Sementara komponen kerentanan (*vulnerability*) akan berkaitan dengan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Selanjutnya kemampuan (*capacity*) akan dinilai menggunakan tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana berdasarkan prioritasnya yaitu:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistic;

4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis bencana alam yang dapat terjadi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bencana tersebut diantaranya banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Masing-masing bencana tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat risikonya. Risiko rendah menunjukkan kemungkinan terjadinya bencana rendah dan menimbulkan dampak yang minimal. Risiko sedang memiliki kemungkinan terjadinya bencana sedang dan dampaknya bervariasi. Sementara risiko tinggi memiliki kemungkinan bencana yang tinggi dan dampak yang sangat besar.

2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, nilai indeks tercatat sebesar 112,40 dan menurun menjadi 103,40 pada tahun 2021. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan angka 95,77, dan mencapai titik terendahnya pada tahun 2023 sebesar 89,41. Namun, pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan nilai indeks menjadi 90,50. Meskipun kenaikan ini tidak signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum memiliki tingkat risiko bencana multi ancaman dalam kategori “sedang” selama tahun 2020 - 2024. Namun demikian tidak dengan bencana tanah longsor dan gelombang ekstrem serta abrasi yang cenderung memiliki risiko tinggi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena letak geografisnya yang merupakan daerah kepulauan dengan topografi yang cukup beragam. Untuk bencana kebakaran hutan, kekeringan dan cuaca ekstrem cenderung mengalami tingkat perubahan risiko dari tinggi menjadi sedang. Meskipun risikonya secara umum sedang, bukan berarti Kepulauan Anambas bebas dari ancaman bencana. Ancaman perubahan iklim global yang tidak dapat diprediksi harus tetap diwaspadai. Oleh karena itu, upaya antisipasi dan kesiapsiagaan terhadap berbagai jenis bencana harus terus dilakukan. Secara lebih rinci indeks risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Gambar 2.17**.

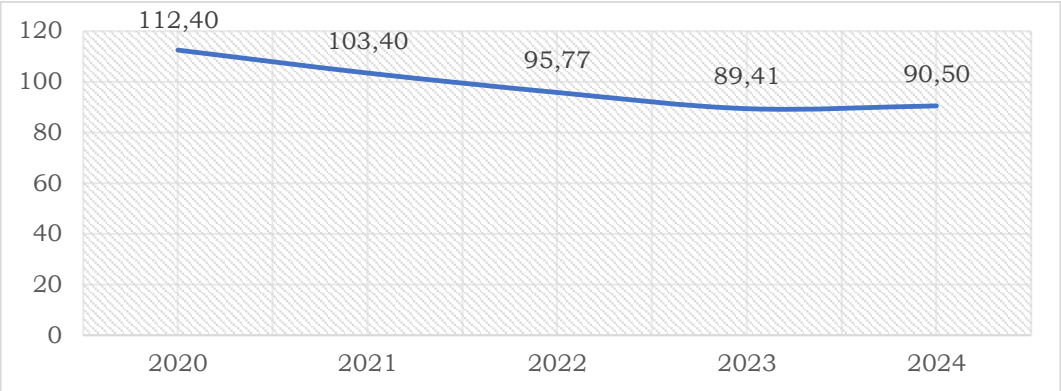

Gambar 2.17. Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Berdasarkan kejadian bencana pada beberapa tahun terakhir maka telah teridentifikasi lokasi-lokasi yang perlu diantisipasi terhadap kejadian bencana tersebut. Kawasan yang rawan terhadap bencana angin puting beliung, gelombang pasang, dan abrasi berada di sepanjang wilayah pesisir. Sementara kawasan yang rawan terhadap bencana banjir berada di Kecamatan Siantan dan Kecamatan Jemaja Timur. Selanjutnya daerah yang rawan terhadap bencana longsor berada di Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Selatan, dan Kecamatan Siantan Timur. Kebakaran hutan pada beberapa tahun terakhir sering terjadi di Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, dan Siantan Timur. Kebakaran hutan sering terjadi pada lahan gambut. Hal itu menjadi pemicu utama karena lahan gambut memiliki kandungan bahan organik yang tinggi lebih dari 65%. Kemampuan yang rendah dalam mengatur keluar masuknya air menyebabkan tanah gambut memiliki kelembapan rendah terutama saat musim kemarau, akibatnya lahan tersebut mudah terbakar. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan Kepulauan Anambas dapat menjadi daerah yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana alam.

2.1.7. Demografi

2.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih berusia 15 tahun. Pola perkembangan penduduknya lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal dan lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan masih minimnya infrastruktur dan peluang di daerah tersebut. Pergerakan penduduk di setiap kecamatan memiliki pola yang berbeda, dengan faktor utama adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Kecamatan Siantan dan Palmatak menjadi tujuan utama migrasi karena menawarkan peluang kerja yang lebih baik dibandingkan kecamatan lain. Sementara, Kecamatan Jemaja Timur dan Siantan Selatan memiliki sensitivitas yang rendah terhadap pengaruh eksternal seperti migrasi. Hal ini dikarenakan minimnya aktivitas ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan pertambangan di kedua kecamatan tersebut.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebesar 49.738 jiwa, terdiri dari 25.706 laki-laki dan 24.032 perempuan, dengan sex rasio sebesar 107. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,30% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 49.100 jiwa. Persebaran penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak merata di seluruh kecamatan. Dua kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Siantan dengan 13.920 jiwa (27,98%) dan Kecamatan Palmatak dengan 7.709 jiwa (15,50%). Tarempa, yang berada di Kecamatan Siantan, selain menjadi ibu kota kecamatan juga berfungsi sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas dan menjadi pusat utama kegiatan ekonomi, jasa, serta pemerintahan di wilayah tersebut. Secara lebih

rinci distribusi dan kepadatan penduduk pada setiap kecamatan disajikan pada **Tabel 2.10** berikut.

Tabel 2.10. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rasio L/P	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
				Laki-Laki	Perempuan	Total		
1	Jemaja	Letung	81,08	3.120	3.110	6.230	100	91,97
2	Jemaja Barat	Impol	17,67	560	500	1.060	111	57,73
3	Jemaja Timur	Ulu Maras	146,98	1.470	1.300	2.770	113	19,14
4	Siantan Selatan	Air Bini	100,54	2.080	1.880	3.970	111	37,47
5	Siantan	Tarempa	52,78	7.290	6.920	14.200	105	282,19
6	Siantan Timur	Nyamuk	88,28	2.410	2.220	4.630	108	49,11
7	Siantan Tengah	Air Asuk	27,95	1.820	1.670	3.490	109	159,36
8	Palmatak	Tebang	58,32	3.990	3.790	7.770	105	150,09
9	Siantan Utara	Mubur	38,15	1.010	980	1.980	103	49,44
10	Kute Siantan	Payalaman	23,21	2.300	1.960	4.260	118	133,04
Kepulauan Anambas		Tarempa	634,96	26.050	24.330	50.360	107,13	80,31

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Apabila dilihat secara deret waktu, dinamika jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk per tahunnya rata-rata 3,28 persen. Kondisi tersebut menyebabkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun tersebut juga meningkat sebesar 11,35 persen. Setelah tahun 2020 peningkatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas terlihat tidak terlalu besar dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 1,39 persen.

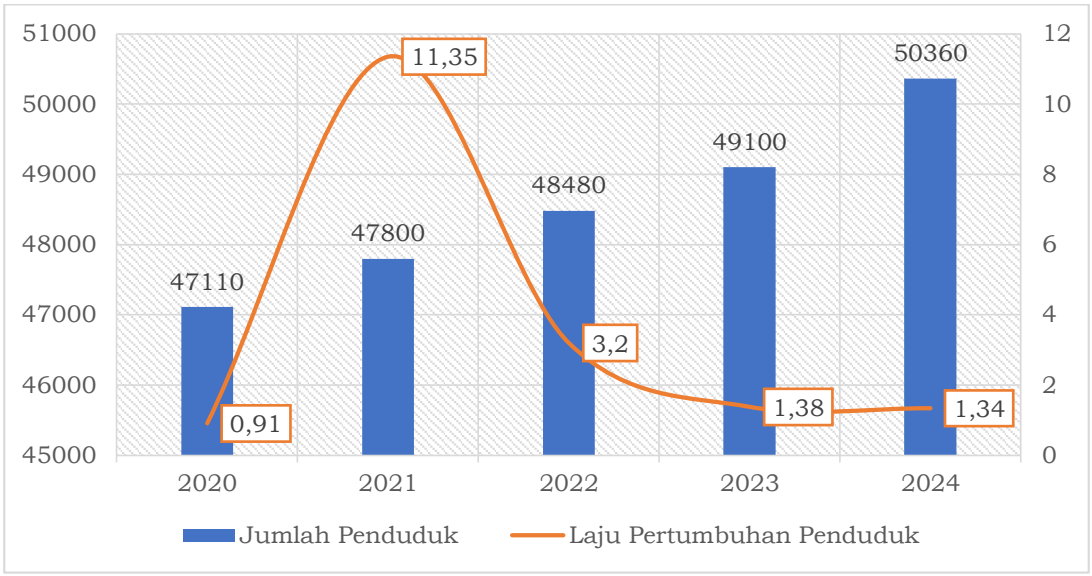

Gambar 2.18. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

2.1.7.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dianalisis berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Analisis ini penting untuk memahami keseimbangan antara penduduk laki-laki dan perempuan, serta karakteristik demografis lainnya. Manfaat informasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk:

i. Mengetahui rasio jenis kelamin

Rasio ini akan menunjukkan proporsi penduduk laki-laki terhadap Perempuan, dan menjadi indikator penting untuk menilai keseimbangan gender dalam populasi.

ii. Membantu membuat perencanaan pembangunan

Data komposisi penduduk menjadi dasar untuk merencanakan pembangunan di berbagai bidang, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur. Informasi mengenai kebutuhan spesifik setiap kelompok usia dan jenis kelamin membuat pembangunan dapat dilakukan secara lebih adil dan tepat sasaran.

iii. Merumuskan kebijakan yang responsif gender

Data ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang adil dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi Perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan mewujudkan kesetaraan gender.

Berdasarkan data BPS yang dihimpun sejak tahun 2020-2024, komposisi jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kepulauan Anambas selalu lebih banyak dibandingkan perempuan dengan selisih rata-rata 3 persen. Rasio jenis kelamin pun mengalami peningkatan dari 107 persen pada 2020 dan bertahan sampai tahun 2024, artinya bahwa terdapat 107 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kesetaraan gender yang menjadi tantangan pemerintah daerah Dalam hal ini pemerintah perlu memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembangunan sehingga diskriminasi dan marginalisasi perempuan dalam pembangunan dapat dikurangi. Perbandingan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada **Gambar 2.19** berikut.

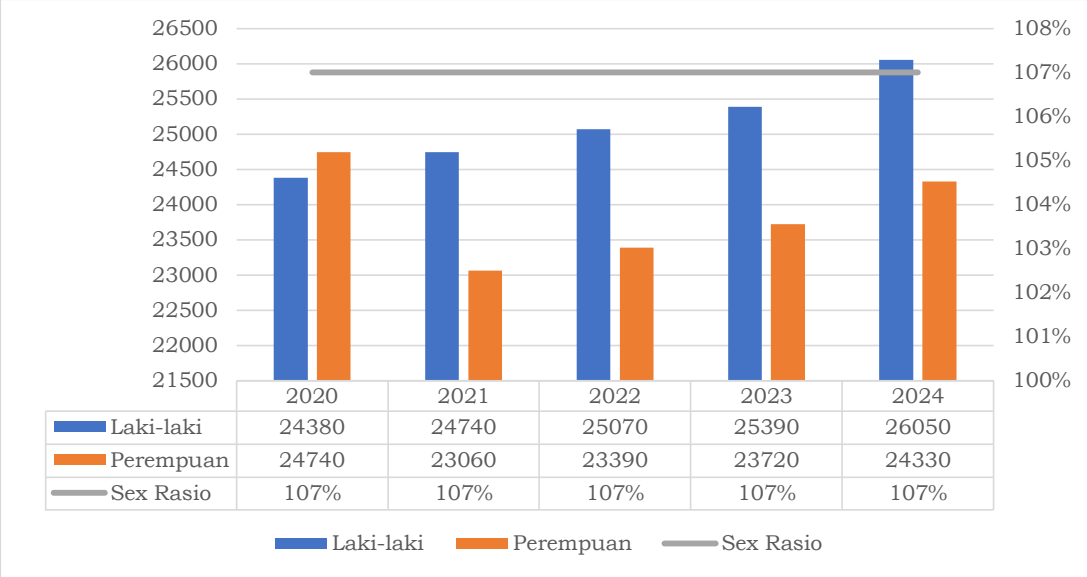

	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	24380	24740	25070	25390	26050
Perempuan	24740	23060	23390	23720	24330
Sex Rasio	107%	107%	107%	107%	107%

Gambar 2.19. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2024

Selain berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas juga diidentifikasi menurut kelompok umur. Tiga kelompok utama yang diidentifikasi adalah 0-14 tahun (belum produktif), 15-64 tahun (produktif), dan >65 tahun (tidak produktif). Penduduk usia 0-14 tahun merupakan penduduk usia muda yang masih dalam tahap pendidikan dan belum memasuki usia kerja. Sementara usia 15-64 tahun merupakan penduduk usia kerja yang menjadi tenaga produktif bagi daerah. Usia lebih dari 65 tahun merupakan penduduk lanjut usia yang umumnya sudah tidak bekerja dan perlu mendapatkan perhatian dan layanan khusus. Informasi penduduk berdasarkan kelompok umur ini penting untuk memahami struktur demografis dan potensi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Disisi lain juga penting untuk menentukan kebijakan dan program yang tepat dan efisien, menyiapkan infrastruktur yang sesuai khususnya untuk lansia, serta untuk mempersiapkan generasi muda dalam memasuki dunia kerja.

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terlihat bahwa komposisi penduduk usia 15-64 tahun lebih besar daripada kelompok usia lainnya. Hal ini merupakan kesempatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menikmati bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada usia non produktif (0-14 tahun, >65 tahun) yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap usia produktif. Selama lima tahun terakhir angka ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mengalami fluktuasi yang begitu nyata, berada pada angka 47-48 persen. Angka ini tidak dapat digunakan untuk menilai secara absolut mengenai baik atau buruknya suatu wilayah. Angka ketergantungan yang rendah menunjukkan beban tanggungan terhadap penduduk usia produktif lebih kecil dan berpotensi memiliki surplus tenaga kerja. Sementara jika angka ketergantungan tinggi, berarti tanggungan terhadap penduduk usia produktif lebih besar dan bisa berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja dalam berbagai bidang. Meskipun sempat mengalami penurunan angka

ketergantungan sebesar 1 persen pada tahun 2020 ke 2021 namun pada tahun 2023 dan 2024 meningkat kembali angka ketergantungannya menjadi 48 persen. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan usia belum produktif (0-14 tahun) yang lebih besar dibandingkan dua kelompok usia lainnya. Secara lebih rinci dinamika komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024 disajikan pada **Gambar 2.20.**

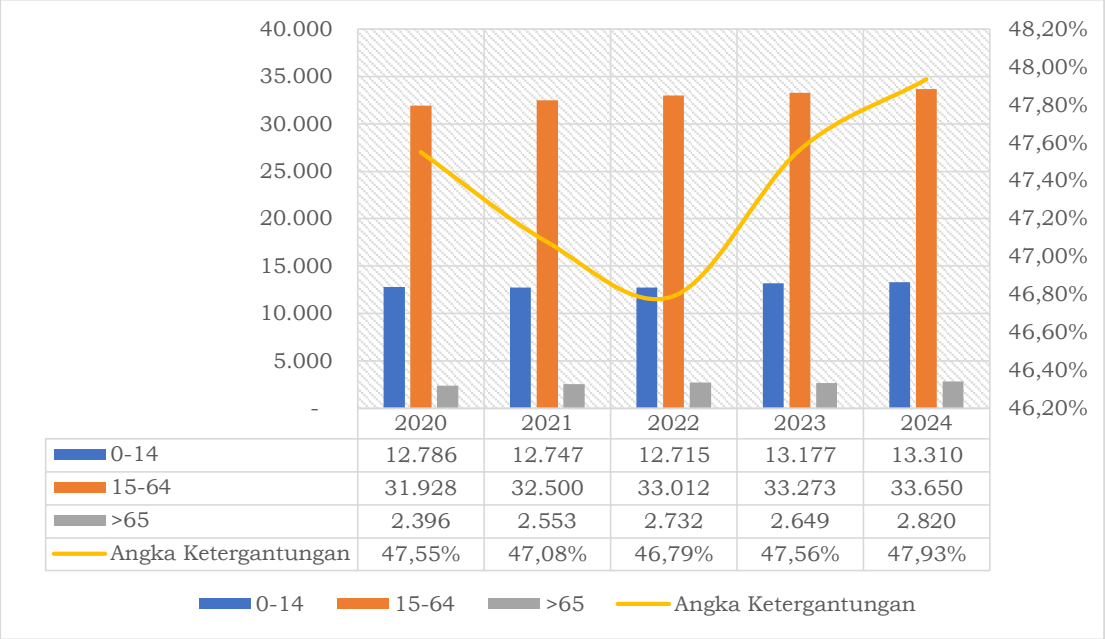

	2020	2021	2022	2023	2024
0-14	12.786	12.747	12.715	13.177	13.310
15-64	31.928	32.500	33.012	33.273	33.650
>65	2.396	2.553	2.732	2.649	2.820
Angka Ketergantungan	47,55%	47,08%	46,79%	47,56%	47,93%

Gambar 2.20. Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2024

2.1.7.3. Proyeksi Demografi Tahun 2025-2029

Data proyeksi penduduk yang disajikan bersumber pada publikasi BPS terkait proyeksi penduduk kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau 2020-2035 dengan data acuan hasil sensus penduduk 2020. Berdasarkan data tersebut populasi di Kabupaten Kepulauan Anambas diprediksikan akan terus bertambah hingga tahun 2029. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas akan mencapai 50.390 jiwa meningkat 2,54 persen dari tahun 2023. Pola distribusi penduduk yang terjadi memiliki kesamaan seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana Kecamatan Siantan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2025 sebesar 13.614 jiwa. Sementara jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Jemaja Barat sebesar 1.122 jiwa. Untuk mendukung dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 maka perlu dilakukan proyeksi penduduk pada periode tersebut, sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.11**. Selama periode tersebut diketahui bahwa selalu terjadi peningkatan jumlah penduduk dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahun sebesar 1,17 persen. Dengan demikian maka tahun 2029 diperkirakan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 52.750 jiwa.

Tabel 2.11. Proyeksi Penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Jumlah Penduduk (jiwa)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jemaja	6.230	6.313	6.388	6.466	6.537	6.609	6.674
2	Jemaja Barat	1.060	1.122	1.135	1.149	1.161	1.174	1.178
3	Jemaja Timur	2.770	2.746	2.779	2.813	2.844	2.875	2.946
4	Siantan Selatan	3.970	4.039	4.087	4.137	4.182	4.228	4.318
5	Siantan	14.200	13.969	14.136	14.307	14.465	14.623	14.915
6	Siantan Timur	4.630	4.582	4.637	4.693	4.745	4.797	4.883
7	Siantan Tengah	3.490	3.547	3.590	3.633	3.673	3.713	3.784
8	Palmatak	7.770	7.915	8.009	8.106	8.196	8.285	8.371
9	Siantan Utara	1.980	2.080	2.104	2.130	2.154	2.177	2.195
10	Kute Siantan	4.260	4.078	4.126	4.176	4.222	4.269	4.460
Jumlah		50.360	50.391	50.991	51.610	52.179	52.750	53.724

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020

Sebagaimana data eksisting, proyeksi juga dilakukan untuk kepadatan penduduk selama periode RPJMD 2025-2029. Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk memiliki hubungan erat dengan berbagai aspek pembangunan seperti, penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, akses terhadap sumberdaya alam, potensi konflik dan ketidakstabilan sosial, serta peningkatan kualitas kehidupan.

Tingkat kepadatan penduduk yang ada di setiap kecamatan tidak sama. Hal ini karena dipengaruhi oleh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari gugus pulau dan wilayah kepulauan. Kepadatan penduduk akan sangat dipengaruhi oleh luas suatu wilayah. Wilayah dengan luas yang lebih kecil relatif lebih padat dibandingkan wilayah lainnya. Hasil proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwa selama periode 2025-2029 selalu mengalami peningkatan sebagaimana jumlah penduduknya. Tingkat kepadatan per kecamatan setiap tahun juga memiliki pola yang mirip. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas berkisar antara 79-83 jiwa/km^2, bertambah 1 penduduk per km^2 setiap tahun. Kecamatan Siantan diperkirakan menjadi wilayah terpadat hingga tahun 2029 dibandingkan kecamatan lainnya dengan tingkat kepadatan antara 265-277 jiwa/km^2. Hal ini dipengaruhi karena faktor luas wilayah yang relatif lebih kecil yaitu 52,78 km^2 (8 persen) namun populasi penduduknya tinggi. Sementara wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah berada di Kecamatan Jemaja Timur selama periode yang sama berkisar antara 19-20 jiwa/km^2. Secara lengkap hasil proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.12**.

Tabel 2.12. Proyeksi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Luas (km²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km²)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jemaja	81,08	78	79	80	81	82	82
2	Jemaja Barat	17,67	63	64	65	66	66	67
3	Jemaja Timur	146,98	19	19	19	19	20	20
4	Siantan Selatan	100,54	40	41	41	42	42	43
5	Siantan	52,78	265	268	271	274	277	283
6	Siantan Timur	88,28	52	53	53	54	54	55
7	Siantan Tengah	27,95	127	128	130	131	133	135
8	Palmatak	58,32	136	137	139	141	142	144
9	Siantan Utara	38,15	55	55	56	56	57	58
10	Kute Siantan	23,21	176	178	180	182	184	192
Kep. Anambas		634,96	79	80	81	82	83	85

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, Hasil AnalisiS 2024

A. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin diartikan sebagai komposisi penduduk menurut gender yaitu laki-laki dan perempuan yang dihitung untuk memperkirakan jumlahnya pada lima tahun ke depan. Data proyeksi ini memberikan gambaran tentang proporsi laki-laki dan perempuan yang dapat memberikan indikasi tentang adanya ketidakseimbangan gender di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam perencanaan lima tahun ke depan informasi ini dapat digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif gender dan tepat sasaran.

Hasil proyeksi penduduk tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 52 persen. Komposisi tersebut lebih tinggi 3 persen dibandingkan penduduk perempuan. Selama periode tersebut terjadi peningkatan penduduk laki-laki sebesar 1.830 jiwa atau meningkat sebesar 7 persen dari jumlah pada tahun 2023. Sementara itu jumlah penduduk perempuan mengalami peningkatan sebesar 1.810 jiwa atau sebesar 8 persen. Adapun rasio jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023. Namun selama rentang waktu 2025-2029 jenis jenis kelamin relatif tetap. Kondisi ini mengartikan bahwa komposisi antara penduduk laki-laki dan perempuan selama lima tahun ke depan tidak banyak berubah. Secara lebih rinci hasil proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.13.**

Berdasarkan kondisi tersebut Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki beberapa dampak positif dalam hal ketersediaan tenaga kerja laki-laki, kekuatan dukungan keluarga, dan potensi jumlah wirausahawan. Namun manfaat tersebut masih bersifat teoritis dan adanya faktor lain yang bisa mempengaruhi kondisi tersebut seperti tingkat pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu dalam perencanaan lima tahun ke depan penting untuk mempertimbangkan semua faktor secara holistic, termasuk memberikan aksesibilitas terhadap layanan dasar dan infrastruktur dasar bagi seluruh

penduduk termasuk bagian dari kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Tabel 2.13. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	26.050	26.002	26.312	26.632	26.926	27.220	27.759
Perempuan	24.330	24.388	24.678	24.978	25.254	25.530	25.965
Sex Rasio (%)	107,04	106,62	106,62	106,62	106,62	106,62	106,91

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS, 2025, Hasil Analisis 2024

B. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Bonus Demografi, dan Angka Ketergantungan

Hasil proyeksi penduduk yang dikeluarkan oleh BPS dari hasil sensus 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini menunjukkan piramida penduduk ekspansif, dimana komposisi penduduk muda lebih banyak dari pada penduduk usia tua. Namun disisi lain juga terus terjadi peningkatan penduduk usia lanjut hingga tahun 2029. Perbedaan komposisi penduduk menurut kelompok umur dari tahun 2023 hingga 2029 dapat dilihat pada **Gambar 2.21** dibawah ini.

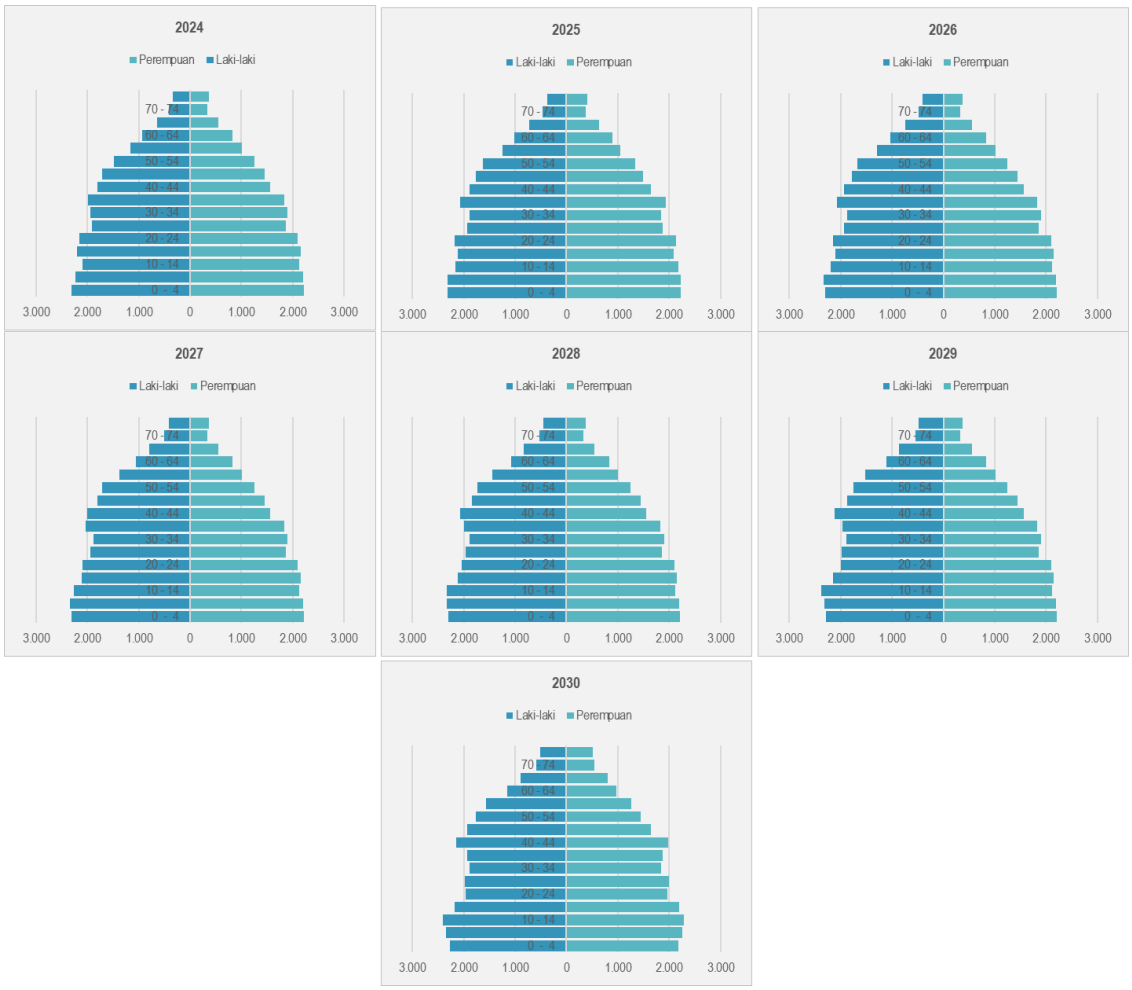

Gambar 2.21. Proyeksi Struktur Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024-2030
Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020-2035
Hasil Sensus Penduduk 2020, Hasil Analisis 2024

Sebagaimana data eksisting, proyeksi penduduk untuk lima tahun ke depan juga dilakukan berdasarkan kelompok umur. Adapun kriterianya juga sama dibagi menjadi tiga yaitu kelompok umur belum produktif (0-14 tahun), kelompok umur produktif (15-64 tahun), dan kelompok tidak produktif (>65 tahun). Dari ketiga kelompok tersebut proporsi yang paling besar saat ini adalah kelompok usia produktif sebesar 33.280 jiwa atau 68 persen. Mengacu pada data eksistingnya maka jumlah penduduk untuk kelompok umur tersebut dalam lima tahun ke depan diperkirakan proporsinya tidak jauh berbeda yaitu 67 persen. Meskipun mengalami penurunan dalam proporsi terhadap jumlah total penduduk namun penduduk usia produktif pada tahun 2029 diperkirakan meningkat menjadi 35.370 jiwa dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 1 persen. Selanjutnya, kelompok umur usia tidak produktif memiliki proporsi yang paling rendah yaitu sekitar 5 persen (2.650 jiwa) dari total penduduk. Pada tahun 2029 diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 3.670 jiwa dengan laju rata-rata per tahun sebesar 7 persen. Pada kelompok umur belum produktif proporsinya sekitar 26 persen (13.180 jiwa), tahun 2029 meningkat menjadi 13.710 jiwa dengan laju peningkatan per tahun sebesar 1 persen. Pada tahun 2030 diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 3.850 jiwa dengan laju rata-rata per tahun sebesar 7 persen. Pada kelompok umur belum produktif proporsinya sekitar 26 persen (13.310 jiwa), tahun 2030 meningkat menjadi 13.740 jiwa dengan laju peningkatan per tahun sebesar 1 persen. Berdasarkan kondisi tersebut diketahui bahwa laju peningkatan penduduk usia tidak produktif merupakan yang paling besar. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Kepulauan Anambas akan mengalami peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) yang berimplikasi pada bertambahnya jumlah lansia. Kondisi tersebut akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena permintaan layanan kesehatan akan meningkat dan akan diimbangi oleh kelompok usia produktif yang masih dominan. Hal ini akan menjadi kekuatan bagi Kabupaten Kepulauan Anambas karena memiliki bonus demografi.

Bonus demografi di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjadi pendorong utama bagi peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk mencapai potensi tersebut diperlukan upaya serius dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM, menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal tersebut dapat mengantisipasi adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya bonus demografi seperti meningkatnya pengangguran, kriminalitas, menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Fenomena bonus demografi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas akan mempengaruhi angka ketergantungan. Angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) menjadi salah satu indikator demografi yang menunjukkan proporsi penduduk non produktif terhadap penduduk usia produktif. Semakin rendah angka ketergantungan (<50%) yang terbentuk maka semakin baik artinya beban penduduk usia produktif semakin rendah. Namun sebaliknya jika angka ketergantungan tinggi

(>64%) maka beban tanggungan usia produktif semakin berat. Hasil proyeksi BPS menunjukkan angka ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Anambas menuju tahun 2029 terus mengalami peningkatan. Angka ketergantungan berkisar antara 47,57 persen pada kondisi eksisting sampai 49,24 persen pada tahun 2030. Kondisi tersebut diartikan bahwa untuk lima tahun ke depan di dalam 100 penduduk usia produktif terdapat 47 sampai 49 penduduk usia tidak produktif yang harus ditanggung. Meskipun demikian secara umum angka ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih terbilang rendah karena nilainya di bawah 50 persen. Meningkatnya usia produktif di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan peluang besar untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada lima tahun yang akan datang. Namun tetap perlu antisipasi dalam menghadapi peluang negatif yang mungkin terjadi agar potensi bonus demografi dapat termanfaatkan secara maksimal. Secara lebih lengkap proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan angka ketergantungannya disajikan pada **Tabel 2.14**.

Tabel 2.14. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-14 Tahun	13.310	13.420	13.510	13.610	13.680	13.710	13.740
15-64 Tahun	33.650	34.000	34.350	34.700	35.010	35.370	35.720
> 65 Tahun	2.820	2.970	3.130	3.300	3.490	3.670	3.850
Angka Ketergantungan (%)	47,93	48,21	48,44	48,73	49,04	49,14	49,24

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, Hasil Analisis 2025

2.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Data BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas, baik dengan maupun tanpa migas, menunjukkan tren yang cenderung menurun. Penurunan terbesar dalam laju pertumbuhan PDRB migas dan PDRB non-migas terjadi pada tahun 2020, yaitu -3,3 persen (PDRB non-migas) dan -7,83 persen (PDRB migas). Hal ini disebabkan oleh pengaruh pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas mulai meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 4,12 persen (PDRB non-migas) dan 0,62 persen (PDRB migas). Namun pada tahun 2024, pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas kembali mengalami pertumbuhan negatif. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas selengkapnya disajikan pada **Gambar 2.22** dan **Tabel 2.15**.

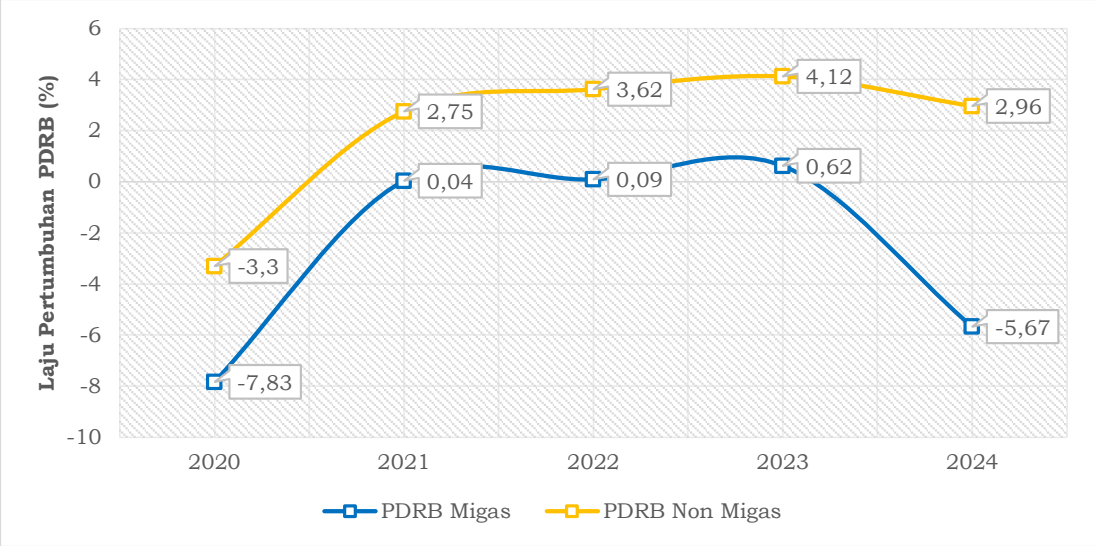

Gambar 2.22. Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan PDRB Non-Migas di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Tabel 2.15. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,15	0,76	1,68	2,77	0,49
Pertambangan dan Penggalian	-8,76	-0,55	-0,72	-0,21	-7,81
Industri Pengolahan	2,4	2,18	3,13	1,47	-0,2
Pengadaan Listrik dan Gas	2,24	2,94	2,83	2,83	2,65
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,56	-1,57	3,75	2,28	0,68
Konstruksi	-5,67	6,58	2,87	5,51	2,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,21	2,66	10,16	6,05	9,02
Transportasi dan Pergudangan	-35,96	6,69	10,44	4,45	-1,77
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,71	8,32	10,95	5,28	4,28
Informasi dan Komunikasi	5,59	6,4	3,17	9,43	4,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	1,44	1,25	3,35	0,05
Real Estate	-3,35	4,42	3,2	0,35	3,18
Jasa Perusahaan	-2,38	1,31	3,34	0,81	-0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	-3,75	3,07	2,76	3,07
Jasa Pendidikan	3,4	-1,86	3,88	3,72	3,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,4	3,9	5,46	-6,83	0,64
Jasa Lainnya	-10,46	2,4	8,68	1,92	13,2
Produk Domestik Regional Bruto	**-7,83**	**0,04**	**0,09**	**0,62**	**-5,67**
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	-3,3	2,75	3,62	4,12	2,96

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami perlambatan pada tahun 2024, yaitu sebesar -5,67 persen. Di sisi lain, Kota Bintan mencatat laju

pertumbuhan PDRB tertinggi pada tahun 2024 sebesar 8,89 persen. Secara keseluruhan, tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat COVID-19. Namun, laju pertumbuhan PDRB mulai meningkat kembali secara bertahap di seluruh kabupaten/kota dari tahun 2021 hingga 2023. Kabupaten Kepulauan Anambas memulai tahun 2021 dengan angka LPE yang sangat rendah, yaitu -7,83%. Namun, melalui berbagai upaya dan intervensi ekonomi yang dilakukan, kabupaten ini berhasil mencatatkan peningkatan hingga mencapai 0,04% pada akhir tahun yang sama. Meski demikian, pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Anambas kembali mengalami kontraksi ekonomi yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan PDRB yang tercatat hampir mendekati kondisi pada masa awal pandemi, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi pemulihan ekonomi yang telah diterapkan.

Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 (Persen)

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	-3,59	2,37	4,38	5,5	6,45
Bintan	-4,28	0,23	4,44	6,14	8,89
Natuna	-4,29	0,02	0,11	0,94	-3,57
Lingga	-0,68	1,95	3,74	4,3	4,42
Kepulauan Anambas	**-7,83**	**0,04**	**0,09**	**0,62**	**-5,67**
Batam	-2,55	4,75	6,84	7,04	6,69
Tanjungpinang	-3,45	0,59	4,12	4,92	3,78
Kepulauan Riau	-3,8	3,43	5,09	5,20	4,98

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.2.1.2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk miskin dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam suatu populasi yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Data pada **Tabel 2.17** menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2024, Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung mengalami peningkatan persentase penduduk miskin yang semula 6,56 persen pada tahun 2020 menjadi 6,67 persen pada tahun 2024. Peningkatan angka persentase kemiskinan menandakan penurunan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kondisi ini dipengaruhi oleh melemahnya ekonomi, meningkatnya pengangguran, atau melonjaknya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada peringkat tertinggi ketiga di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.17. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Wilayah	Persentase penduduk miskin (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	6,83	6,85	6,87	5,95	5,78
Bintan	6,36	6,42	6,44	5,90	5,44
Natuna	4,43	4,95	5,32	5,25	5,04
Lingga	13,85	13,93	14,05	11,26	9,99
Kepulauan Anambas	**6,56**	**7,09**	**7,51**	**6,95**	**6,67**
Batam	4,75	5,05	5,19	5,02	4,85
Tanjungpinang	9,37	9,57	9,85	7,95	6,68
Kepulauan Riau	5,92	6,12	6,24	5,69	5,37

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.2.1.3. Rasio Kesenjangan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang mencerminkan rasio kesenjangan kemiskinan atau *poverty gap*, menggambarkan seberapa besar rata-rata kesenjangan pengeluaran tiap individu miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar jarak antara pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang ditetapkan. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan potensi ekonomi yang lebih besar untuk mengalokasikan dana bantuan secara efektif berdasarkan karakteristik individu miskin yang teridentifikasi serta sasaran yang ditetapkan untuk program bantuan.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,96. Lima tahun setelahnya, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan tersebut cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kondisi yang semakin baik dalam hal pengentasan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan provinsi (0,82) tercatat lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, pada tahun 2024 terjadi perubahan posisi, di mana nilai indeks provinsi lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kepulauan Anambas. Selengkapnya tersaji pada gambar berikut.

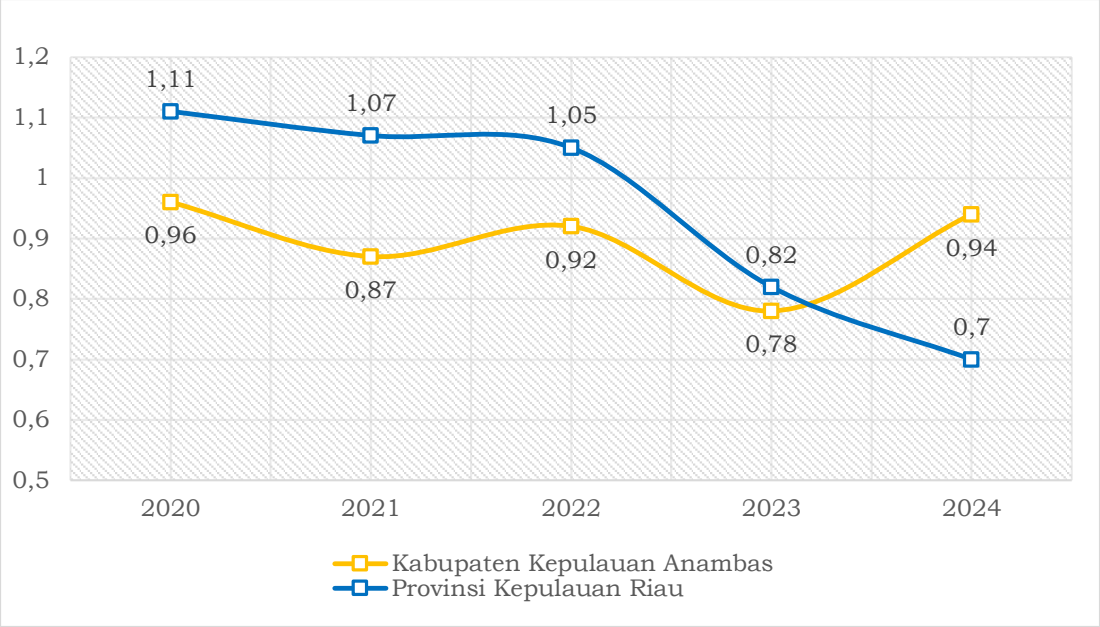

Gambar 2.23. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita didapatkan melalui pembagian antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu, sehingga nilai PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dinamika besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah.

Selama periode 2020–2024, PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Anambas (dengan migas) atas dasar harga berlaku menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 PDRB per Kapita (ADHB) di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 0,31 miliar, angka ini terus meningkat hingga pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi Rp0,36 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketidakstabilan dalam kinerja ekonomi wilayah terhadap jumlah penduduknya.

Berbeda dengan tren harga berlaku, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (dengan migas) justru mengalami penurunan selama enam tahun terakhir. Nilainya menurun dari Rp0,24 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp0,21 miliar pada tahun 2024. Informasi lebih lengkap terkait dinamika PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024 (Milyar rupiah)

PDRB per Kapita ADHB	Harga Berlaku				
	PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per Kapita	0,31	0,35	0,41	0,39	0,36
PDRB per Kapita Tanpa Migas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07

PDRB per Kapita ADHK	Harga Konstan 2010				
	PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHK (Milyar Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per Kapita	0,24	0,23	0,23	0,23	0,21
PDRB per Kapita Tanpa Migas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Berdasarkan perbandingan nilai PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas meraih PDRB per kapita ADHB tertinggi sejak tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi penyumbang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sekitar Rp 300-400 juta rupiah/orang/tahun, sementara kabupaten/kota lain hanya berkisar di bawah Rp 300 juta/orang/tahun. Gambaran PDRB per kapita menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada gambar di bawah ini.

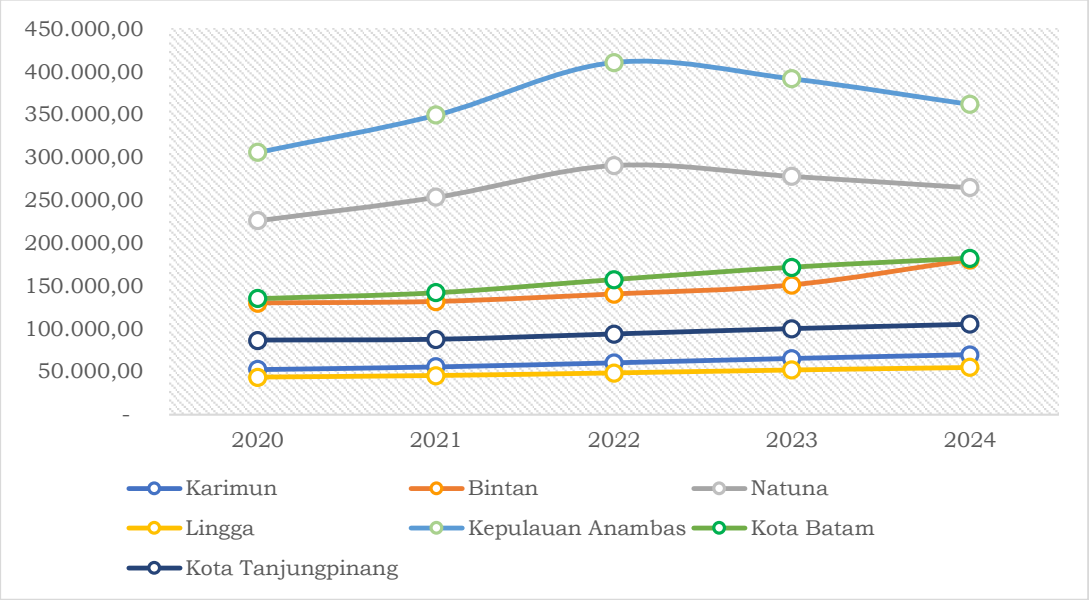

Gambar 2.24. PDRB per Kapita ADHB (dengan migas) Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah) Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Selanjutnya, perbandingan antara PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dan nasional disajikan pada **Gambar 2.25**. Berdasarkan gambar tersebut, posisi PDRB per kapita ADHB Kabupaten Kepulauan Anambas berada jauh di atas Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Tingginya PDRB per kapita di Kabupaten Kepulauan Anambas salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah lainnya, serta didorong oleh kontribusi berbagai lapangan usaha di sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah besar, terutama migas di sektor pertambangan.

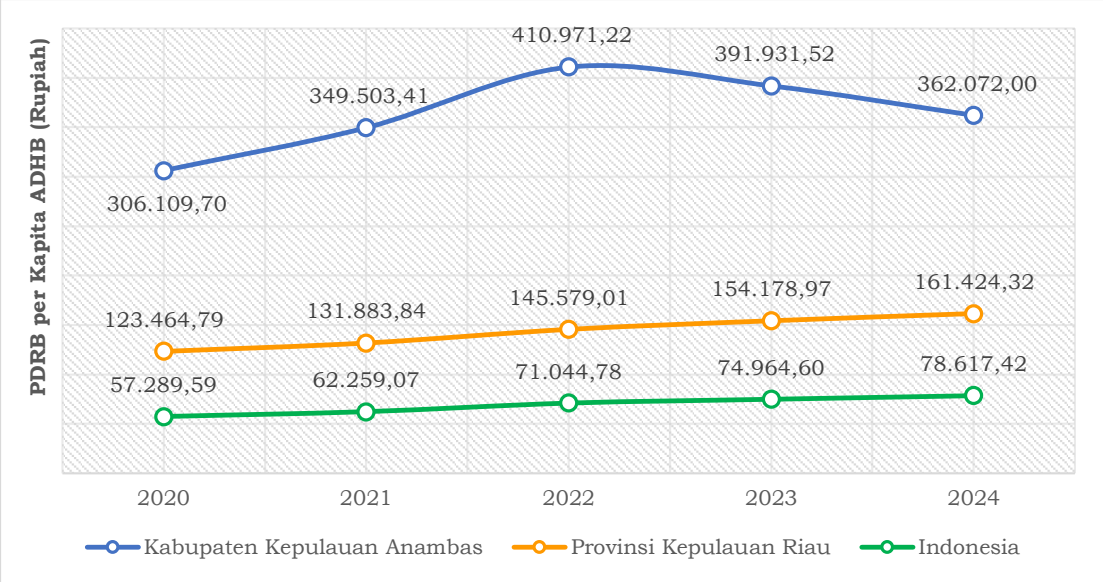

Gambar 2.25. PDRB per Kapita ADHB di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Indonesia, 2025; BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi nilai TPT menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja dalam suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara semakin rendah nilai TPT mencerminkan indikator positif dalam konteks ketenagakerjaan dan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Kepulauan Anambas bernilai fluktuatif selama kurun waktu enam tahun sejak tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPT bernilai 3,44 persen, sementara pada tahun 2024 menjadi 2,38 persen.

Berdasarkan data TPT kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi kabupaten yang memiliki nilai TPT terendah sejak tahun 2020. Sementara Kota Batam menjadi kota dengan TPT tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 7,68 persen pada tahun 2024. Nilai TPT selengkapnya disajikan pada **Tabel 2.19** berikut.

Tabel 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	8,36	7,2	6,87	6,02	5,52
Bintan	8,86	8,62	6,91	5,43	4,53
Natuna	4,1	5,15	4,15	4,05	3,89
Lingga	4,41	4,23	3,09	3,52	3,38
Kepulauan Anambas	**3,44**	**1,27**	**2,15**	**2,55**	**2,38**
Batam	11,79	11,64	9,56	8,14	7,68
Tanjungpinang	9,3	6,31	5,27	4,76	4,69
Kepulauan Riau	10,34	9,91	8,23	6,80	6,39

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.2.1.6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan oleh BPS sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai Indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Data pada **Tabel 2.20** menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu dari 0,296 menjadi 0,328. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 0,296. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih tergolong rendah. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Wibowo (2016) bahwa Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Sementara Provinsi Kepulauan Riau memiliki Indeks Gini sebesar 0,325 yang berarti bahwa ketimpangan wilayah di Kepulauan Riau termasuk kategori ketimpangan sedang. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Indeks Gini Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Gini				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	0,315	0,307	0,288	0,271	0,286
Bintan	0,305	0,272	0,288	0,279	0,290
Natuna	0,337	0,300	0,291	0,309	0,285
Lingga	0,281	0,289	0,277	0,326	0,309
Kepulauan Anambas	**0,296**	**0,304**	**0,313**	**0,328**	**0,296**
Batam	0,323	0,334	0,336	0,338	0,348
Tanjungpinang	0,345	0,347	0,347	0,339	0,347
Kepulauan Riau	0,339	0,343	0,325	0,340	0,357

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut mencakup berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kualitas hidup. Nilai IPM yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya kualitas hidup manusia di suatu wilayah. Sementara nilai IPM yang semakin rendah maka kualitas hidup manusia di suatu wilayah akan semakin rendah.

Berdasarkan **Tabel 2.21**, nilai IPM Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan peningkatan yaitu dari 71,50 (2020) menjadi 73,47 (2024). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai aspek pembangunan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan secara keseluruhan. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi kabupaten dengan nilai IPM tertinggi keenam dari tujuh kabupaten/kota. Kota Batam menjadi kota dengan IPM tertinggi di Provinsi

Kepulauan Riau, sementara Kabupaten Lingga menjadi kabupaten dengan nilai IPM terendah. Selengkapnya tersaji pada **Tabel 2.21** berikut.

Tabel 2.21. IPM Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	72,85	73,11	73,96	74,70	75,49
Bintan	76,04	76,48	76,80	77,50	77,96
Natuna	77,03	77,33	77,59	78,23	78,60
Lingga	70,38	70,82	71,48	72,23	73,05
Kepulauan Anambas	**71,50**	**71,86**	**72,15**	**72,80**	**73,47**
Batam	81,81	81,82	82,25	82,64	83,32
Tanjungpinang	79,96	79,98	80,58	81,14	81,58
Kepulauan Riau	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.2.2. Kesehatan untuk Semua

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Peningkatan usia harapan hidup sering kali dianggap sebagai indikator keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan gizi, dan kemajuan dalam teknologi medis. Data dalam **Tabel 2.22** menunjukkan peningkatan angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 hingga 2024, yaitu 72,98 tahun menjadi 73,77 tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang ditopang oleh berbagai aspek, seperti kesehatan, gizi, pendidikan, lingkungan, hingga kesejahteraan sosial. Sebagai indikator komposit, UHH tidak hanya menggambarkan capaian sektor kesehatan semata, tetapi juga hasil sinergi dari berbagai bidang urusan pemerintahan yang saling berkaitan, mulai dari pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, penanggulangan kemiskinan, hingga jaminan sosial. Peningkatan UHH juga berkontribusi positif terhadap naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)	Tahun				
	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Usia Harapan Hidup (tahun)	72,98	72,98	73,13	73,50	73,77

Keterangan: * hasil LF SP2020
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.2.2.2. Prevalensi Stunting

Data prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika penurunan dan kenaikan yang perlu dicermati secara mendalam. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 21,7%, kemudian berhasil ditekan secara signifikan menjadi 14,0% pada tahun 2022.

Namun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan nilai prevalensi stunting yaitu menjadi 15,2 (2023) dan 15,8 (2024).

Kenaikan prevalensi stunting pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya dinamika dalam faktor-faktor determinan stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor dari bidang kesehatan maupun lintas sektor lainnya. Dari sisi kesehatan, hal ini terkait dengan keterbatasan akses pangan bergizi, penurunan kualitas layanan kesehatan dasar, serta belum optimalnya pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang secara langsung menargetkan penyebab utama masalah gizi pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), seperti suplementasi zat gizi, promosi ASI eksklusif, pemberian MP-ASI bergizi, dan tata laksana gizi buruk.

Sementara itu, dari sisi lintas sektor, belum optimalnya intervensi gizi sensitif yang meliputi perbaikan sanitasi dan air bersih, peningkatan ketahanan pangan, perlindungan sosial, pendidikan gizi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dan perempuan turut menjadi kendala. Selain itu, ketidakstabilan sosial ekonomi pascapandemi dan potensi penurunan alokasi anggaran untuk program gizi semakin memperlemah upaya perbaikan gizi. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23. Prevalensi Stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	15,64	21,7	14,0	15,2	15,8

Sumber: DINKESPPKB, 2025

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator RLS dihitung dengan cara menggabungkan lama waktu yang dihabiskan oleh individu dalam berbagai tingkatan pendidikan. **Tabel 2.24** menunjukkan indikator RLS Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa indikator RLS penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,17 tahun. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2024 mencapai 7,53 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan formal.

Tabel 2.24. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,17	7,34	7,12	7,40	7,53

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan komponen metode baru perhitungan IPM yang sebelumnya merupakan indikator angka melek huruf. Indikator HLS mengacu pada perkiraan jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang individu pada suatu titik waktu tertentu, seperti saat lahir atau pada usia tertentu. **Tabel 2.25** menunjukkan angka HLS Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020-2024. Terlihat bahwa angka HLS Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan secara bertahap sejak tahun 2020 yaitu sebesar 12,81 tahun sampai tahun 2024 yaitu sebesar 13,05 tahun. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan serta meningkatnya harapan untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.25. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,81	12,88	12,89	13,05	13,05

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.2.3.3. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi/numerasi merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar, memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Literasi dan numerasi merupakan dua keterampilan dasar yang sangat penting dalam pendidikan yang harus dikuasai dan dipelajari terutama anak-anak di usia sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Skor kemampuan literasi/numerasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat disajikan pada **Tabel 2.26** berikut.

Tabel 2.26. Kemampuan Literasi dan Numerasi di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Jenjang	2020		2021		2022		2023		2024	
	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi	Literasi	Numerasi
SD	*	*	*	*	56,34	49,99	66,75	53,56	62,60	52,07
SMP	*	*	*	*	68,56	63,41	71,48	64,90	70,25	60,77

* : pengukuran tidak dilakukan pada tahun berkenaan.

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024; Lampiran Surat Mendikdasmen, 2025

Data menunjukkan bahwa secara umum, terlihat adanya fluktuasi capaian skor dari indikator kemampuan literasi dan numerasi pada masing-masing jenjang SD dan SMP. Pada jenjang SD, skor literasi mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke 2023, yaitu dari 56,34 menjadi 66,75. Namun, capaian ini menurun pada tahun 2024 menjadi 62,60. Tren serupa juga terjadi pada skor numerasi, yang meningkat dari 49,99 (2022) menjadi 53,56 (2023), lalu kembali menurun menjadi 52,07 pada tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat

perbaikan dalam kemampuan dasar siswa, keberlanjutan dan efektivitas intervensi pendidikan yang dilakukan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pada jenjang SMP, skor literasi menunjukkan kecenderungan peningkatan yang relatif stabil, dari 68,56 (2022) menjadi 71,48 (2023), kemudian sedikit menurun menjadi 70,25 pada 2024. Sementara itu, capaian numerasi cenderung stagnan dengan peningkatan moderat dari 63,41 ke 64,90, sebelum mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 60,77 pada tahun 2024. Dibandingkan dengan jenjang SD, peserta didik SMP menunjukkan tingkat literasi dan numerasi yang lebih tinggi secara konsisten, namun tren penurunan di tahun terakhir juga mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan capaian yang telah diraih.

2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengukur tingkat pembangunan literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan. IPLM mencakup dua elemen utama, yaitu unsur masyarakat dan aspek pengembangan literasi di tingkat masyarakat. Indeks ini diukur berdasarkan tujuh komponen, yakni: pemerataan akses layanan perpustakaan, kecukupan jumlah koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan yang memadai, rata-rata kunjungan harian masyarakat, jumlah perpustakaan yang telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi literasi, serta jumlah anggota perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2020).

Penilaian IPLM didasarkan pada lima kriteria, yaitu:

a. Sangat rendah (0-29,9)
b. Rendah (30-49,9)
c. Sedang (50-79,9)
d. Tinggi (80-89,9)
e. Sangat tinggi (90-100)

Tabel 2.27 menunjukkan bahwa IPLM Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki nilai IPLM sebesar 59,33. Nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan nilai IPLM Provinsi Kepulauan Riau dan rata-rata nasional. Tahun berikutnya, nilai IPLM Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebesar 73,67, yang sudah melampaui rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (62,52) maupun rata-rata nasional (68,19). Peningkatan ini berlanjut secara signifikan pada tahun 2024, di mana nilai IPLM Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat menjadi 92,9. Kenaikan nilai IPLM tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif peningkatan literasi di tingkat lokal, seperti penguatan peran perpustakaan desa, penyediaan akses baca yang lebih merata, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.

Tabel 2.27. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kepulauan Anambas	*	*	59,33	73,67	92,9
Provinsi Kepulauan Riau	*	*	72,87	62,52	74,24

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	*	*	64,48	68,19	73,52

* : pengukuran tidak dilakukan pada tahun berkenaan.
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025

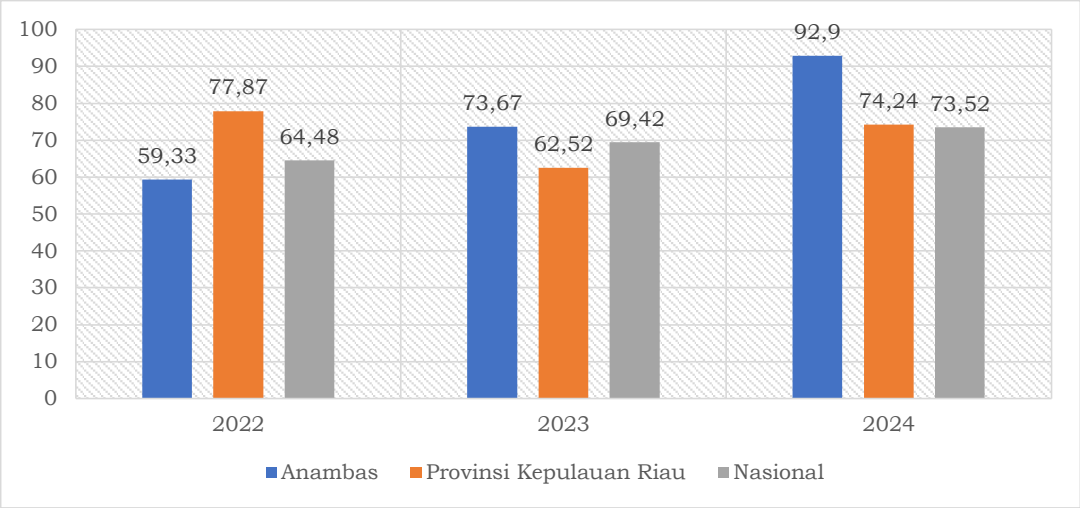

Gambar 2.26. IPLM di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional pada Tahun 2022-2024
Sumber: Perpustakaan Nasional, 2025

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial yang bersifat adaptif, yang dirancang untuk memberikan jaminan dan keamanan bagi para tenaga kerja. Berdasarkan data pada **Tabel 2.28**, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2023. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 82,03%, kemudian meningkat menjadi 89,00% di tahun 2022, dan mencapai 96,10% pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan sosial bagi tenaga kerja, baik melalui sosialisasi, regulasi, maupun kemudahan akses terhadap layanan jaminan sosial ketenagakerjaan. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak-hak pekerja, terutama dalam aspek jaminan sosial yang berkaitan dengan keselamatan kerja, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua.

Tabel 2.28. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)	79,59	82,03	89,00	96,10	96,10

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antar umat beragama di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IKUB, semakin menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki kondisi sosial yang inklusif dan mendukung kehidupan beragama yang damai dan saling menghormati. Pada tahun 2023, Kementerian Agama mencatat nilai IKUB Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 90, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian ini mencerminkan tingkat kerukunan umat beragama yang sangat baik di wilayah tersebut. Nilai yang tinggi juga menunjukkan adanya tingkat kepercayaan dan kolaborasi antar kelompok keagamaan yang kuat, serta minimnya konflik berbasis identitas agama.

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas diproyeksikan menjadi ke dalam dua indikator yaitu persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran, dan persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.

Data pada **Tabel 2.29** menunjukkan bahwa persentase penetapan terhadap total pendaftaran untuk kategori benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya tercatat 0%, yang menunjukkan belum adanya objek budaya berwujud yang secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pihak berwenang. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya upaya perlindungan dan pelestarian terhadap aset budaya fisik di wilayah tersebut, baik dari segi identifikasi, dokumentasi, maupun penetapan hukum.

Sementara itu, capaian pada kategori warisan budaya tak benda lebih menunjukkan kemajuan, meskipun masih terbatas, dengan 17% dari total pencatatan telah ditetapkan secara resmi. Hal ini mencerminkan adanya inisiatif dalam menjaga dan mengakui ekspresi budaya lokal yang bersifat tak kasat mata, seperti tradisi lisan, upacara adat, atau pengetahuan lokal. Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar warisan budaya tak benda masih belum mendapatkan status penetapan formal. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.29. Indikator Proksi Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

Uraian	Tahun
	2023
Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	0%
Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	17%

Sumber: Disparbud Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan gambaran kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, yaitu rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Nilai IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pembangunan perempuan hampir setara dengan laki-laki, meskipun nilai tinggi IPG tidak selalu mencerminkan tingkat pencapaian IPM yang tinggi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tinggi rendahnya nilai IPG bisa disebabkan oleh kombinasi IPM yang tinggi untuk kedua jenis kelamin atau rendahnya IPM untuk keduanya. Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam IPG tidak bisa dipisahkan dari tingkat pencapaian IPM untuk laki-laki dan perempuan.

Data IPG Kabupaten Kepulauan Anambas pada **Tabel 2.30** menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap dari tahun 2020 yaitu sebesar 90,27, hingga mencapai 91,58 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesetaraan gender laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, nilai IPG tertinggi terdapat di Kota Tanjungpinang, dengan nilai IPG tahun 2034 sebesar 97,02. Sementara nilai IPG terendah dimiliki oleh Kabupaten Lingga yaitu sebesar 91,12 pada tahun 2024. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30. IPG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	91,25	91,00	91,12	91,33	91,61
Bintan	93,12	93,53	93,78	93,93	94,05
Natuna	91,67	91,95	91,86	92,07	91,82
Lingga	89,25	89,73	90,48	90,75	91,12
Kepulauan Anambas	**90,27**	**90,30**	**91,14**	**91,25**	**91,58**
Batam	94,43	94,51	94,75	94,95	95,72
Tanjungpinang	96,79	97,14	97,14	96,96	97,02
Kepulauan Riau	93,31	93,49	93,50	93,96	94,20

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.2.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, politik, dan manajerial. IDG menggunakan tiga indikator yaitu persentase kontribusi perempuan terhadap pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di level manajerial, profesional, administratif, dan teknis. Nilai tertinggi IDG adalah 100 yang menunjukkan pemberdayaan gender di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 2.31 menunjukkan nilai IDG menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020-2024. Terlihat bahwa nilai IDG Kabupaten Kepulauan Anambas

sejak tahun 2020 mengalami peningkatan dari 62,57 menjadi 67,36 pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 hingga 2024 terjadi penurunan sehingga nilai IDG menjadi 58,30. Hal ini mengindikasikan menurunnya tingkat partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan.

Apabila melihat nilai IDG di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024, Kabupaten Bintan menjadi kota dengan nilai IDG tertinggi, sementara Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki nilai terendah seprovinsi Kepulauan Riau setelah Kabupaten Natuna. Nilai IDG selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31. IDG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	64,05	63,89	63,47	57,07	58,34
Bintan	69,64	73,04	71,98	71,93	74,62
Natuna	42,99	42,95	42,96	50,13	43,86
Lingga	48,52	48,50	48,44	48,94	60,98
Kepulauan Anambas	**62,57**	**67,66**	**67,36**	**62,29**	**58,30**
Batam	59,10	58,38	58,65	58,26	61,31
Tanjungpinang	76,44	76,64	76,68	76,97	70,28
Kepulauan Riau	62,02	58,97	59,05	58,83	65,21

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender adalah sebuah indikator yang menilai sejauh mana ketimpangan gender mempengaruhi ketidakoptimalan dalam pembangunan manusia, dengan mempertimbangkan kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi sebagai aspek utamanya. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan menunjukkan tingkat kesetaraan yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan.

Data pada Tabel 2.32 menunjukkan bahwa nilai IKG Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung konstan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu 0,49. Nilai ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan data provinsi. Nilai IKG 0,49 mengindikasikan kesenjangan yang cukup nyata antara laki-laki dan perempuan, namun belum termasuk kategori tinggi. Data selengkapnya disajikan pada **Tabel 2.32** berikut.

Tabel 2.32. IKG menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	0,4	0,34	0,23	0,4	0,49
Bintan	0,42	0,41	0,45	0,36	0,36
Natuna	0,84	0,82	0,83	0,53	0,81

Wilayah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lingga	0,58	0,56	0,57	0,53	0,49
Kepulauan Anambas	**0,49**	**0,47**	**0,49**	**0,48**	**0,49**
Batam	0,41	0,34	0,34	0,31	0,19
Tanjungpinang	0,26	0,29	0,12	0,11	0,13
Kepulauan Riau	0,42	0,39	0,4	0,35	0,31

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

2.3.Aspek Daya Saing Daerah

Regional Competitiveness atau daya saing daerah merupakan salah satu *key factor* dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Daya saing daerah senantiasa berkaitan erat dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada daya saing daerah, sehingga sesuai dengan potensi dan kekhasan yang menjadi unggulan daerah. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, aspek daya saing daerah menjadi salah satu aspek penting untuk menggambarkan kondisi daerah. Pada surat edaran tersebut, aspek daya saing daerah terdiri dari daya saing sumber daya manusia (SDM), Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, dan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Indikator dari setiap variabel aspek daya saing daerah diuraikan sebagai berikut.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan atau rasio ketergantungan merupakan salah satu tolak ukur daya saing SDM yang digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk usia kerja yang dianggap produktif adalah penduduk dengan usia 15-65 tahun. Sementara itu, penduduk yang tergolong tidak produktif adalah penduduk muda yang berusia di bawah 15 tahun dan penduduk yang berusia di atas 64 tahun. Penduduk usia di bawah 15 tahun digolongkan ke dalam penduduk tidak produktif, sebab penduduk pada usia tersebut masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya, sehingga masih tergolong belum produktif. Penduduk yang berusia lebih dari 64 tahun juga tergolong dalam usia tidak produktif, sebab penduduk pada usia tersebut sudah melewati masa pensiun.

Dependency ratio atau angka ketergantungan ini dapat menjadi indikator yang mampu menunjukkan kualitas atau daya saing SDM suatu wilayah. Semakin tinggi angka atau rasio ketergantungan, maka menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, jika persentase *dependency ratio* semakin rendah, maka menunjukkan semakin rendahnya beban yang

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Besarnya rasio atau angka ketergantungan diperoleh dari perbandingan antara penduduk usia <15 tahun + usia >64 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Angka ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini.

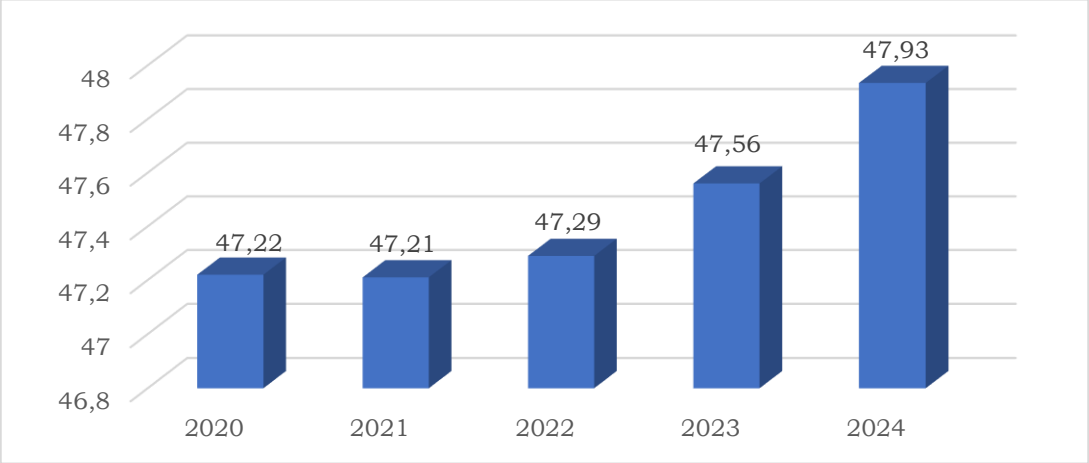

Gambar 2.27. Angka Ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025, diolah

Tabel 2.33. Angka Ketergantungan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	12.865	12.997	13.197	13.170	13.310
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	2.411	2.603	2.836	2.650	2.820
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	15.276	15.600	16.033	15.820	16.130
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	32.126	33.137	34.263	33.260	33.650
5	Rasio ketergantungan (3)/(4)	47,22	47,21	47,29	47,56	47,93

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025, diolah

Gambar dan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata angka ketergantungan selama tahun 2020-2024 sebesar 47 per tahun. Pada periode tahun tersebut, angka ketergantungan paling rendah sebesar 47,21 yang terjadi pada tahun 2021. Sementara itu, angka ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2024, yaitu sebesar 47,93. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, beban yang ditanggung penduduk produktif untuk menanggung kehidupan penduduk belum produktif dan tidak produktif tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya.

2.3.1.2. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satunya dapat digambarkan oleh besarnya rasio lulusan S1/S2/S3 yang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Adapun jumlah lulusan S3 di kabupaten ini belum tersedia datanya, sehingga kualitas tenaga kerja dihitung berdasarkan data jumlah lulusan

S1 dan S2. Data terkait jumlah lulusan S1/S2 dan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada **Tabel 2.34**.

Tabel 2.34. Jumlah Lulusan S1/S2 di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah lulusan S1/S2	3.187	3.170	3.419	3.022	3.179
Jumlah Penduduk	47.110	47.800	48.460	49.100	49.730

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2025

Pendidikan tinggi yang ditempuh oleh penduduk di Kepulauan Anambas sebagai pendidikan terakhirnya terdiri atas program sarjana (S1) dan program pascasarjana (S2). **Tabel 2.34** menunjukkan bahwa jumlah lulusan S1/S2 di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan dari 3.187 orang di tahun 2020 menjadi 3.194 orang di tahun 2024. Selanjutnya, angka rasio lulusan S1/S2 di Kabupaten Kepulauan Anambas yang disajikan pada **Gambar 2.28**. di bawah ini, dihitung berdasarkan data jumlah lulusan S1/S2 yang ada.

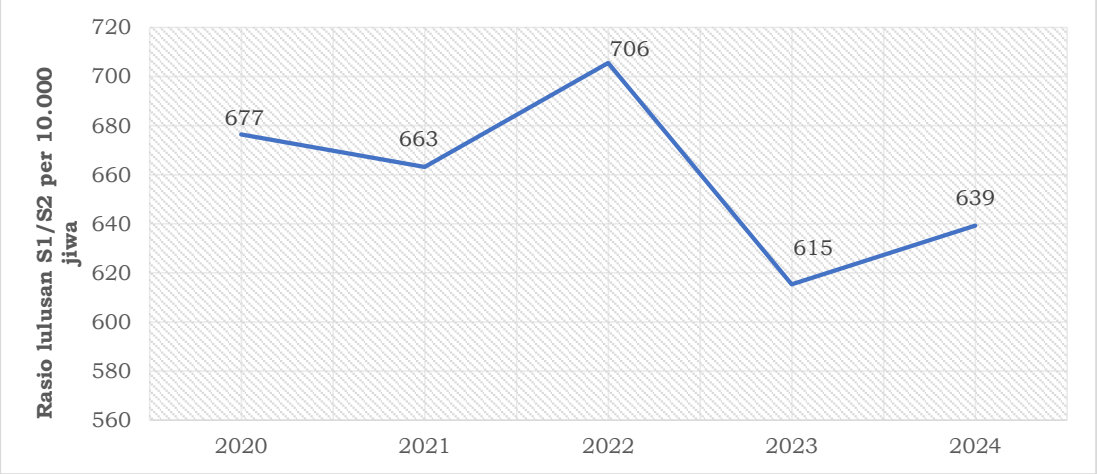

Gambar 2.28. Rasio Lulusan S1/S2 di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2020-2024

Sumber: Analisis 2025

Berdasarkan gambar di atas, rasio lulusan S1/S2 tertinggi periode tahun 2020-2024, adalah sebesar 706 orang per 10.000 jiwa penduduk (tahun 2022) dan rasio lulusan S1/S2 terendah sebesar 615 orang per 10.000 jiwa penduduk (tahun 2023). Rasio lulusan S1/S2 pada tahun 2022 menempati urutan tertinggi dalam lima tahun terakhir, karena jumlah lulusan S1/S2 pada tahun 2022 meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 3.419 orang. Sementara jumlah lulusan S1/S2 di tahun 2023 hanya sebesar 3.022 orang, sehingga angka rasio lulusan S1/S2 pada tahun tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya rasio lulusan S1/S2 di tahun 2022 menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja semakin meningkat dan lebih unggul daripada sebelumnya, sebab sudah mulai banyak tenaga kerja yang merupakan lulusan dari pendidikan tinggi seperti lulusan S1 maupun S2. Namun demikian, jumlah lulusan S1/S2 dalam rentang waktu lima tahun terakhir masih kurang dari 10 persen, sehingga rasio lulusan dari pendidikan tinggi masih perlu

ditingkatkan lagi di masa depan agar tercipta kualitas SDM lokal yang unggul, produktif, dan inovatif.

Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki pendidikan terakhir dari pendidikan tinggi di masa depan diharapkan dapat mendukung rencana pengembangan beberapa sektor unggulan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama pada *cluster* sektor perikanan dan kelautan, pariwisata, dan pertambangan. Dengan semakin meningkatnya rasio lulusan S1/S2 dan juga S3 di masa depan, maka beragam pusat inovasi pada ketiga sektor unggulan tersebut diharapkan akan semakin produktif, maju dan berkembang pesat.

2.3.1.3. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang berkedudukan strategis dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu dibangun dengan berdasarkan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Hasil pembangunan di bidang pendidikan tercermin dari Indeks pendidikan. Indeks pendidikan juga menggambarkan kondisi kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam menentukan tingkat produktivitas suatu wilayah. Dinamika perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada **Gambar 2.29** berikut.

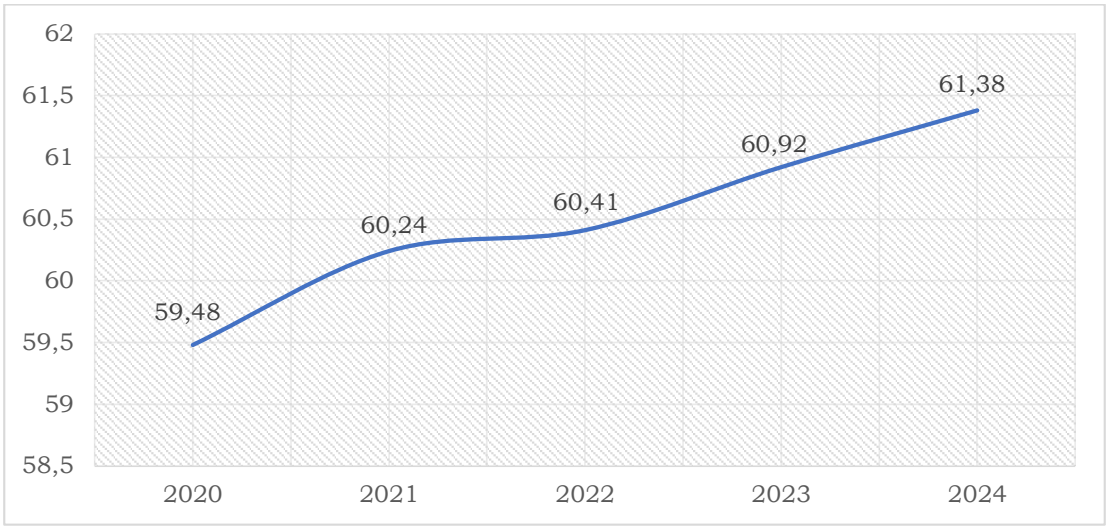

Gambar 2.29. Indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Berdasarkan gambar grafik di atas, indeks pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren yang positif, dengan ditandainya nilai indeks yang meningkat dari 59,48 pada tahun 2020 menjadi sebesar 61,38 pada tahun 2024. Meningkatnya nilai indeks pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwa akses pendidikan mengalami perbaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

2.3.1.4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*manpower*) adalah

penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 15 tahun ke atas dan masuk sebagai golongan penduduk usia kerja. Berdasarkan data tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 226 orang terdaftar sebagai pencari kerja dan penempatan tenaga kerja 21 orang. Dari jangka waktu 2020 sampai dengan 2023 pencari kerja terdaftar mengalami penurunan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024. Jumlah pencari kerja terdaftar dan penempatan kerja disajikan pada **Tabel 2.35**.

Tabel 2.35. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2024

Jumlah Pencari Terdaftar dan Penempatan Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
Pencari Kerja Terdaftar (orang)	131	122	185	40	226
Penempatan Tenaga Kerja (orang)	15	28	30	7	21
Persentase Pencari Kerja ditempatkan (%)	11,5	23	16,2	17,5	9,3

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Rasio PDRB industri pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha industri pengolahan dalam ekonomi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, sub sektor industri pengolahan belum banyak berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kontribusi sekitar 0,13-0,16 persen terhadap keseluruhan PDRB ADHB. Pada tahun 2024, tercatat rasio PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB ADHB sebesar 0,16 persen dengan nilai 27,46 miliar rupiah.

Tabel 2.36. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (miliar rupiah)	23,19	24,08	25,95	27,11	27,46
Total PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	14.453,58	16.697,53	19.909,09	19.241,49	17.654,14
Rasio PDRB Industri Pengolahan	0,16	0,14	0,13	0,14	0,16

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

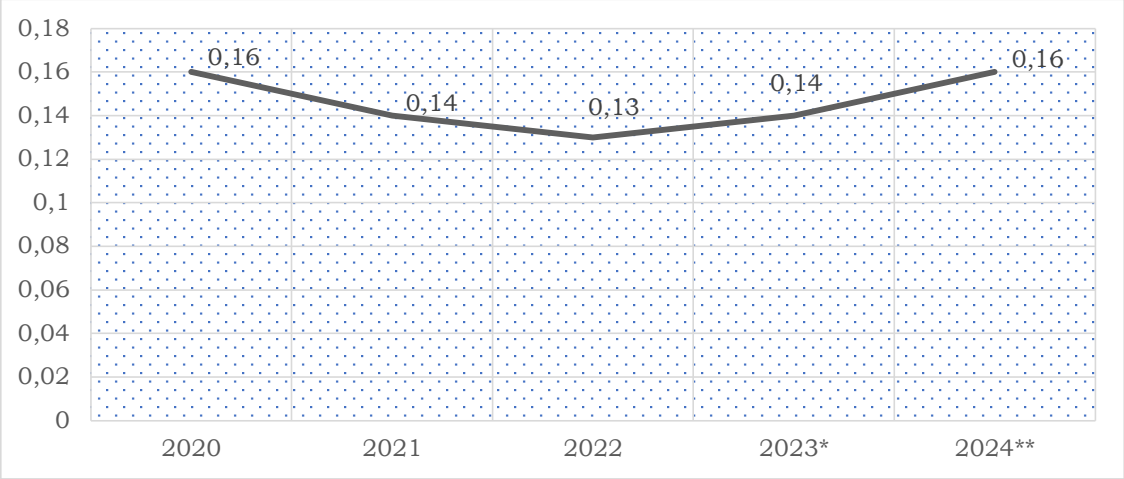

Gambar 2.24 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Penguatan sub sektor industri pengolahan terhadap penerimaan PDRB di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu terus diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil industri primer seperti perikanan, pertanian dan peternakan.

2.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi makan dan minum

Sektor Akomodasi makanan dan minuman menyumbang 0,09-0,12 persen terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada periode tahun 2020 hingga 2024, rasio PDRB Akomodasi makan dan minum tertinggi terdapat pada tahun 2024 yaitu 0,12 persen terhadap total PDRB. Peningkatan usaha akomodasi, makanan dan minuman perlu terus ditingkatkan sejalan dengan upaya peningkatan potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas agar bisa menjadi salah satu sektor unggulan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

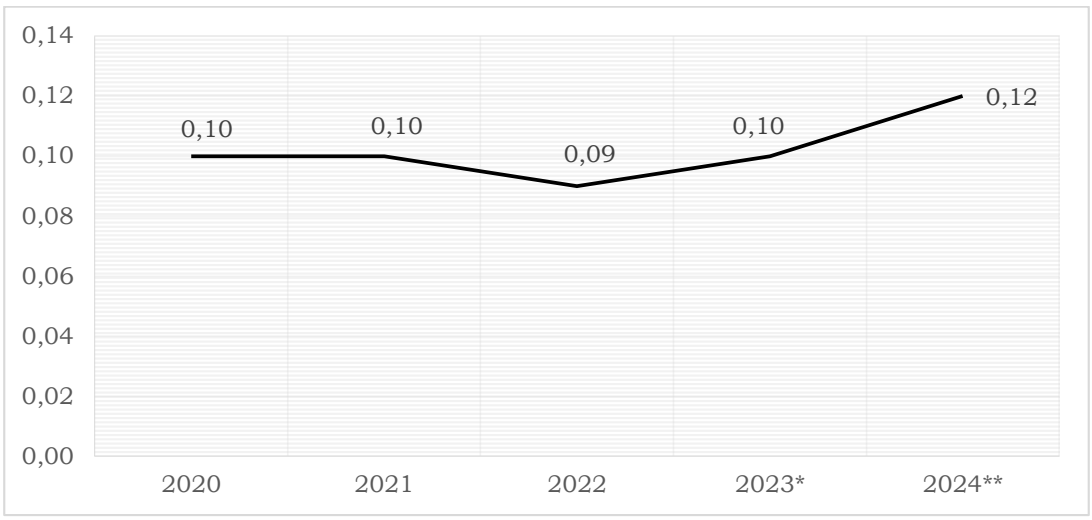

Gambar 2.25 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.3.2.3. Kondisi PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut harga berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan sebesar 22,14% dari Rp 14453,58 miliar menjadi Rp 17654,14miliar. Namun demikian, selama lima tahun terakhir, PDRB menurut harga konstan (PDRB ADHK) mengalami penurunan sebesar 4,96% dari Rp 11104,45 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 10553,18 miliar pada tahun 2024. Dinamika total PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada **Gambar 2.30**.

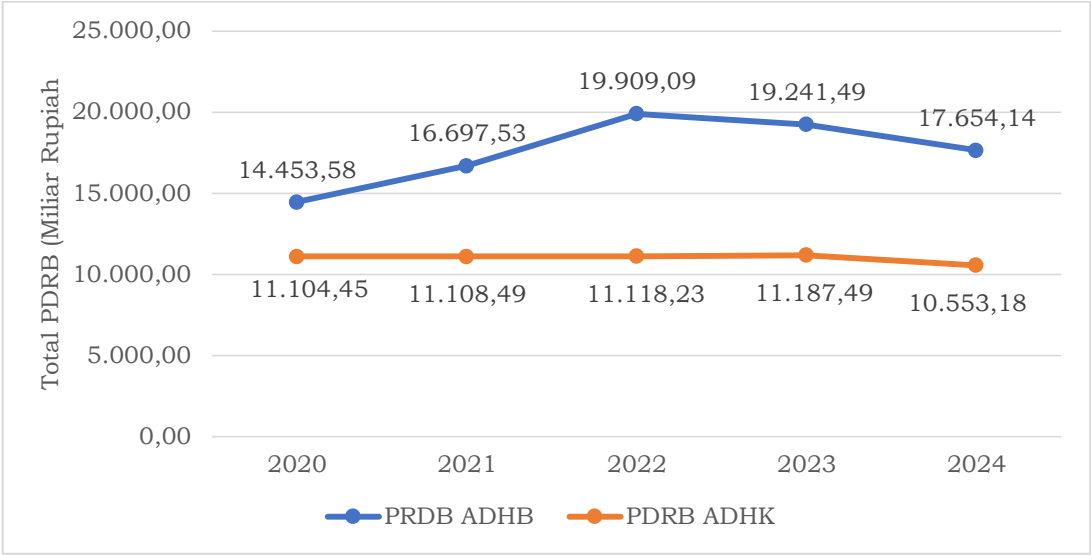

Gambar 2.30. Total PDRB di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Secara lebih detail, rincian PDRB ADHB dan PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada periode tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2.37** dan **Tabel 2.38** sebagai berikut.

Tabel 2.37. Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	880.951	923.246	991.788	1.062,69	1081,16
Pertambangan dan Penggalian	11.572.286	13.671,15	16.652,61	15.737,41	14.004,60
Industri Pengolahan	23,188	24,077	25,946	27,11	27,46
Pengadaan Listrik dan Gas	9,594	9,959	10,377	10,72	11,30
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,404	0,402	0,436	0,45	0,46
Konstruksi	888,097	960,094	1.019,90	1.095,65	1136,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	415,358	442,127	506,814	560,19	617,74
Transportasi dan Pergudangan	20,875	22,687	26,6	29,24	29,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15.016	16,61	18.822	20,18	21,46
Informasi dan Komunikasi	74,973	79,614	82,594	91,42	96,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	21,72	21,918	22,19	23,08	23,38

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Real Estate	97,296	103,076	110,336	114,32	119,23
Jasa Perusahaan	0,028	0,029	0,03	0,03	0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351,053	337,117	348,144	375,81	387,14
Jasa Pendidikan	35,789	35,794	38,533	40,53	41,96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,724	38,886	42,061	40,17	41,19
Jasa lainnya	10,229	10,687	11,909	12,49	14,66
Produk Domestik Regional Bruto	**14.453,58**	**16.697,53**	**19.909,09**	**19.241,49**	**18.005,12**
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	**2.895,38**	**3.041,67**	**3.272,53**	**3.493,36**	**3.666,86**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Tabel 2.38. Produk Domestik Regional Bruto Kepulauan Anambas Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	629,887	634,702	645,373	663,24	666,46
Pertambangan dan Penggalian	9.106,80	9.056,29	8.991,52	8.972,86	8.272,41
Industri Pengolahan	15,732	16,075	16,577	16,82	16,79
Pengadaan Listrik dan Gas	6,513	6,705	6,894	7,09	7,28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,328	0,323	0,335	0,34	0,35
Konstruksi	626,536	667,745	686,892	724,74	744,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	256,05	262,867	289,562	307,1	334,79
Transportasi dan Pergudangan	13,374	14,269	15,758	16,46	16,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,742	11,635	12,91	13,59	14,17
Informasi dan Komunikasi	62,689	66,701	68,813	75,31	78,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	16,416	16,653	16,861	17,43	17,43
Real Estate	70,854	73,987	76,354	76,62	79,06
Jasa Perusahaan	0,021	0,021	0,022	0,022	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	232,438	223,732	230,61	236,99	244,27
Jasa Pendidikan	23,73	23,29	24,194	25,09	25,90
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,42	26,412	27,853	25,95	26,12
Jasa Lainnya	6,919	7,085	7,7	7,84	8,88
Produk Domestik Regional Bruto	**11.104,45**	**11.108,49**	**11.118,23**	**11.187,49**	**10.553,18**
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	**2.007,64**	**2.062,92**	**2.137,60**	**2.207,54**	**2.291,40**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.3.2.4. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Distribusi persentase PDRB menunjukkan sumbangan atau kontribusi dari setiap sektor lapangan usaha terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persen (%). Data statistik menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, terdapat tiga kontributor terbesar yang menopang PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu (1) Pertambangan dan penggalian, (2) Konstruksi, dan (3) Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan. Distribusi PDRB ADHB pada setiap jenis lapangan usaha selama lima tahun terakhir disajikan pada **Tabel 2.39**.

Tabel 2.39. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,1	5,53	4,98	5,52	6,12
Pertambangan dan Penggalian	80,07	81,88	83,64	81,79	79,33
Industri Pengolahan	0,16	0,14	0,13	0,14	0,16
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,06	0,05	0,06	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0	0	0	0	0
Konstruksi	6,14	5,75	5,12	5,69	6,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,87	2,65	2,55	2,91	3,50
Transportasi dan Pergudangan	0,14	0,14	0,13	0,15	0,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,1	0,1	0,09	0,10	0,12
Informasi dan Komunikasi	0,52	0,48	0,41	0,48	0,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,15	0,13	0,11	0,12	0,13
Real Estate	0,67	0,62	0,55	0,59	0,68
Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,43	2,02	1,75	1,95	2,19
Jasa Pendidikan	0,25	0,21	0,19	0,21	0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	23	0,21	0,21	0,23
Jasa Lainnya	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	**20,03**	**18,22**	**16,44**	**18,15**	**20,66**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.39**, selama lima tahun terakhir, pertambangan dan penggalian menjadi sektor atau lapangan usaha yang paling berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu hingga mencapai 79-83 persen selama periode tahun 2020 hingga 2024. Konstruksi serta pertanian, kehutanan dan perikanan secara berurutan menempati peringkat kedua dan ketiga sebagai kontributor PDRB tertinggi di kabupaten ini, yang menyumbang sekitar empat hingga enam persen terhadap PDRB. Perbandingan distribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PDRB kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir selengkapnya disajikan pada **Tabel 2.40**.

Tabel 2.40. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota (Persen) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	5,28	5,25	5,09	5,12	5,19
Bintan	8,22	7,86	8,02	8,27	8,60
Natuna	7,3	7,72	7,94	7,08	6,43
Lingga	1,70	1,66	1,59	1,58	1,59
Kepulauan Anambas	**5,73**	**6,17**	**6,51**	**5,79**	**5,10**

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Batam	63,97	63,91	63,73	65,07	66,01
Tanjungpinang	7,80	7,43	7,13	7,09	7,09

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

Pada periode tahun 2020-2024, PDRB ADHB di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami fluktuatif dengan persentase berkisar antara 5,10-6,51% terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2024, PDRB ADHB di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 5,84%, menempati urutan ke-lima jika dibandingkan dengan PDRB ADHB di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. PDRB ADHB di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan distribusi di tahun 2023. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase distribusi PDRB ADHB di tahun berikutnya agar eksistensi perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas semakin maju dan tidak tertinggal dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau Angka Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Pembangunan daerah perlu didukung oleh partisipasi Angkatan kerja. Peningkatan SDM yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan TPAK di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk total suatu daerah. Nilai TPAK selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada **Gambar 2.31** berikut.

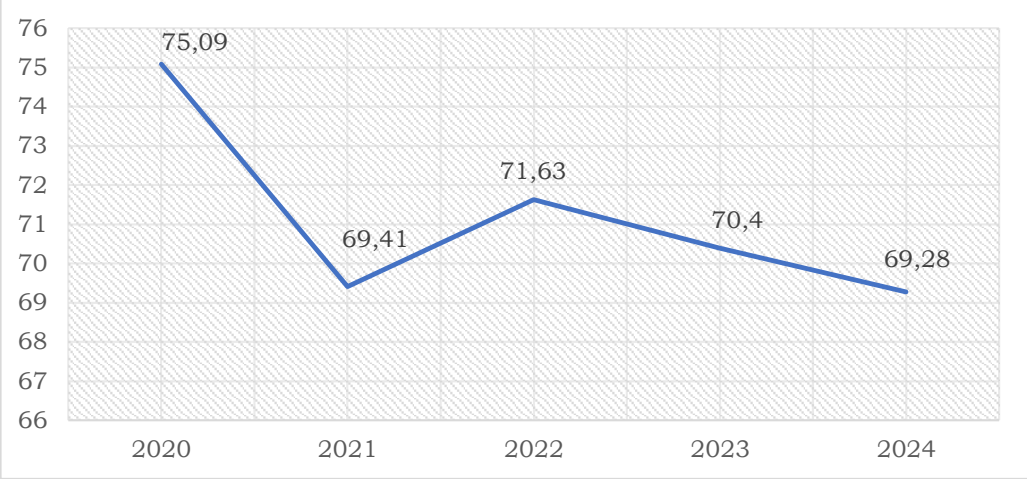

Gambar 2.31. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Tabel 2.41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Klasifikasi Ketenagakerjaan	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia 15 tahun ke atas (orang)	31.430	31.881	32.388	36.012	36.520
Angkatan Kerja (orang)	21.499	22.412	23.202	25.354	25.300
Bekerja (orang)	20.759	22.128	22.704	24.707	24.700
Pengangguran (orang)	740	284	498	647	600
Bukan Angkatan Kerja (orang)	9.931	9.469	9.186	10.658	11.220
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	75,09	69,41	71,63	70,4	69,28

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Berdasarkan data di atas, angka TPAK di Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum cenderung menurun selama periode 2020 hingga 2024. TPAK pada tahun 2020 sebesar 75,09 turun menjadi 69,28 pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa dalam suatu kegiatan perekonomian telah menurun dari tahun 2020 ke tahun 2024. Menurunnya TPAK juga menggambarkan adanya penurunan kesempatan kerja bagi masyarakat.

2.3.2.6. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja menggambarkan perbandingan antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir, rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami fluktuasi. Pada tahun 2024, total rasio penduduk yang bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai 97,63%. Secara umum, penduduk laki-laki menunjukkan persentase yang lebih tinggi dalam hal kepartisipasian kerja dibandingkan penduduk perempuan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.42. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Kelamin	Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)
2020	Laki-laki	96,64
	Perempuan	96,4
	Total	**96,56**
2021	Laki-laki	98,63
	Perempuan	98,88
	Total	**98,73**
2022	Laki-laki	97,83
	Perempuan	97,89
	Total	**97,85**
2023	Laki-laki	97,61
	Perempuan	97,15
	Total	**97,44**
2024	Laki-laki	97,19
	Perempuan	98,30
	Total	**97,63**

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2024

2.3.2.7. Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan menjadi penopang suatu daerah dalam mendorong penyediaan lapangan pekerjaan kepada generasi pemuda dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Penciptaan inovasi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat dapat dibangun melalui kewirausahaan. Oleh sebab itu, kewirausahaan para generasi pemuda di masa depan perlu menjadi perhatian, salah satunya melalui penguatan kewirausahaan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penguatan kewirausahaan dan UMKM ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan daya saing perekonomian. Kewirausahaan dan UMKM merupakan sendi-sendi perekonomian yang potensial untuk meningkatkan kondisi ekonomi daerah serta meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan kewirausahaan dan pengembangan UMKM di daerah salah satunya dapat diwujudkan dengan meningkatkan nilai indikator rasio kewirausahaan. Dinamika dan perkembangan nilai rasio kewirausahaan selama tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada **Gambar 2.32** berikut.

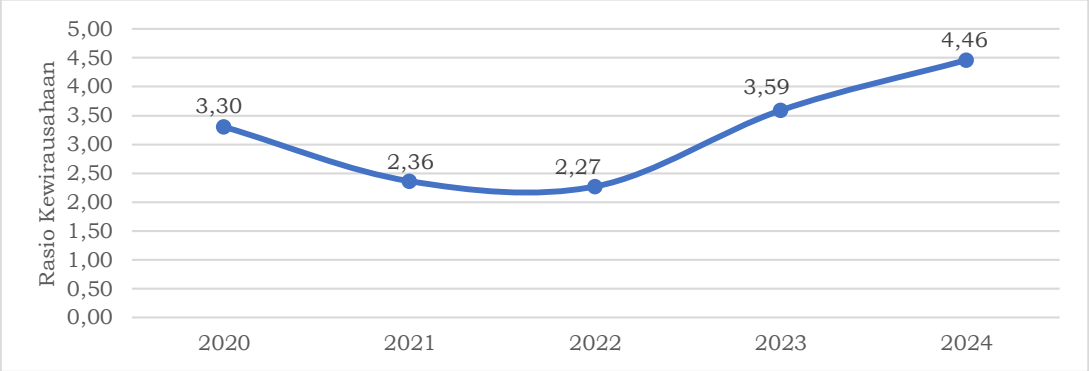

Gambar 2.32. Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2024

Rasio kewirausahaan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020-2024 berkisar antara 2,27 hingga 4,46. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadi penurunan rasio kewirausahaan di Kabupaten Kepulauan Anambas dari 3,30 pada tahun 2020 menjadi 2,27 pada tahun 2022. Hal tersebut terjadi pada masa pandemi covid 19. Namun dengan membaiknya kondisi ekonomi, terjadi peningkatan rasio kewirausahaan menjadi sebesar 3,59 pada tahun 2023 dan sebesar 4,46 pada tahun 2024. Rasio kewirausahaan pada tahun 2024 sudah berada di atas di bawah target nasional sebesar 3,95 pada tahun 2024. Peningkatan nilai rasio kewirausahaan tetap perlu dilakukan melalui optimalisasi terhadap peningkatan kewirausahaan/UMKM, khususnya pada sektor yang menjadi keunggulan Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti sektor perikanan dan kelautan serta pariwisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung perekonomian daerah di masa depan.

2.3.2.8. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah alat untuk mengukur tingkat inovasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Indeks tersebut dapat mencakup berbagai faktor yang mencerminkan kemampuan dan potensi inovatif

Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa faktor yang diukur dalam Indeks Inovasi Daerah melibatkan aspek ekonomi, pendidikan, riset dan pengembangan, kolaborasi antara sektor swasta dan publik, serta adopsi teknologi. Pada tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat peningkatan signifikan dalam indeks inovasi daerahnya. Dari angka sebelumnya sebesar 33,28 pada tahun 2022, Kabupaten Anambas berhasil melonjak menjadi 42,97 pada tahun 2023. Peningkatan yang cukup mencolok ini menunjukkan komitmen serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam mendorong inovasi di berbagai sektor. Dengan meningkatnya indeks inovasi, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah dalam kancah regional maupun global. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan indeks inovasi daerah menjadi 41,36. Nilai indeks inovasi daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Gambar 2.33** berikut.

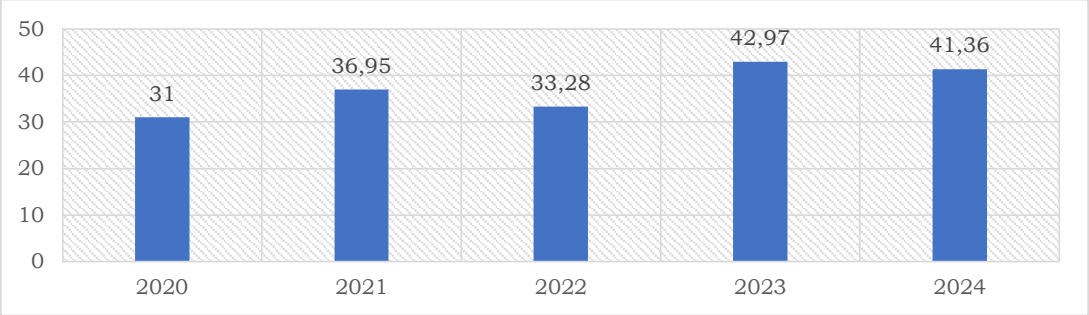

Gambar 2.33. Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024
Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2025

2.3.3. Transformasi Digital

2.3.3.1. Literasi Digital Masyarakat

Kondisi literasi digital masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas digambarkan melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), yang merupakan instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan pembangunan digital yang masih ada. Masyarakat Digital adalah Sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. IMDI tidak hanya memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia, tetapi juga mendukung upaya akselerasi transformasi digital yang merata dan inklusif. IMDI memiliki peran penting dalam mendukung Visi Indonesia Digital (VID) 2045, yang menjadikan masyarakat digital sebagai pilar utama transformasi menuju Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. IMDI di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 tercatat sebesar 40,40, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan nilai sebesar 46,51. IMDI Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 merupakan paling rendah di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana disajikan dalam **Tabel. 2.36**

Tabel 2.43. IMDI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Masyarakat Digital Indonesia		
	Tahun 2022	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**
Kab. Bintan	42,19	40,84	47,78
Kab. Karimun	39,67	44,39	46,97
Kab. Kepulauan Anambas	**37,85**	**46,51**	**40,40**
Kab. Lingga	46,13	43,96	45,21
Kab. Natuna	45,3	49,21	45,76
Kota Batam	44,08	43,38	48,19
Kota Tanjung Pinang	48,17	44,24	43,74

Sumber : Badan Pengembangan KOMDIGI, Tahun 2025

Mengacu pada dimensi pembentuk IMDI tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat 2 (dua) pilar yang masih memerlukan upaya peningkatan yaitu:

1. Pilar Pemberdayaan, merujuk pada kondisi yang mencerminkan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan. Pilar ini merepresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan tingkat keterampilan digital yang ditujukan dengan keterlibatan individu dalam aktivitas digital; dan
2. Pilar Pekerjaan, yang berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan, di mana digitalisasi akan menciptakan tugas-tugas dan jenis pekerjaan baru yang menuntut keahlian baru.

Tabel 2.44. Pilar IMDI Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

Wilayah	Pilar Infrastruktur & Ekosistem	Pilar Keterampilan Digital	Pilar Pemberdayaan	Pilar Pekerjaan
Kabupaten Kepulauan Anambas	53,09	53,53	21,67	35,13

Sumber : Badan Pengembangan KOMDIGI, Tahun 2025

2.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.4.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal (aset tetap) yang memiliki umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB merupakan investasi dalam bentuk aset tetap, yang mencakup penambahan aset tetap seperti bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan.

Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB di Kabupaten Anambas mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 21,91% menjadi 17,87% pada tahun 2022. Kemudian nilai PMTB meningkat menjadi 20,49% pada tahun 2023 dan 24,05% pada tahun 2024. Namun secara nilai pengeluaran, jumlah PMTB meningkat setiap tahun dari tahun 2020 hingga 2024, dimana pada tahun 2020

jumlah PMTB sebesar 3.167,50 (juta rupiah) menjadi 4.330,13 (juta rupiah) pada tahun 2024.

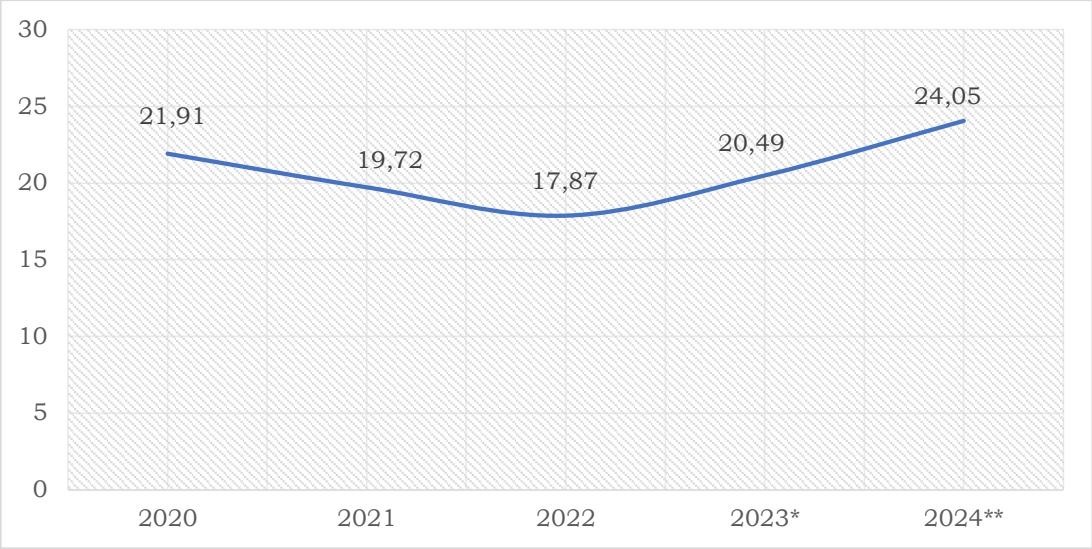

Gambar 2.32 Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto dalam PDRB Kabupaten Anambas Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran pada Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Tabel 2.45. Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto dalam PDRB Kabupaten Anambas Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran pada Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	3.167,50	3.292,42	3.556,76	3.942,92	4.330,13
Produk Domestik Regional Bruto ADHB menurut pengeluaran (Juta Rupiah)	4.453,58	16.697,53	19.909,09	19.242,47	18.005,12

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.3.4.2. Eksport Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain. Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Kepulauan Anambas dari luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap ekonomi atau produk wilayah lain.

Ekspor bersih perdagangan merupakan nilai total ekspor dikurangi dengan nilai total impor dari wilayah tertentu. Nilai ekspor bersih positif mengindikasikan terjadi surplus perdagangan sedangkan nilai ekspor bersih negatif mengindikasikan terjadi defisit perdagangan. Perkembangan ekspor dan impor dalam kurun waktu tahun 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.46. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Anambas ADHB Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2020–2024

Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2258,45	2358,38	2622,14	2896,97	3153,37
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,75	11,96	12,35	13,62	14,35
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1512,07	1552,41	1479,81	1597,81	1693,31
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3167,5	3292,42	3556,76	3942,92	4330,13
Perubahan Inventori	5,14	21,99	127,41	149,29	21,95
Net Ekspor Barang dan Jasa	**7498,66**	**9460,37**	**12110,62**	**10641,86**	**8792,02**
Produk Domestik Regional Bruto	14453,58	16697,53	19909,09	19242,47	18005,12

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa perkembangan ekspor dan impor di Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara umum baik ekspor maupun impor mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2020 hingga 2022, kemudian menurun kembali pada tahun 2023 hingga 2024. Keseluruhan nilai bernilai positif atau terjadi surplus perdagangan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sementara dari segi volume dan nilai ekspor berdasarkan jenis komoditi, yang paling banyak diekspor oleh Kabupaten Anambas berupa Bahan bakar mineral, yang diikuti oleh ekpor ikan dan udang. Volume Bahan bakar mineral yang diekpor pada tahun 2024 dibanding tahun 2023, dimana pada tahun 2023 sebesar 2.584.297,34 ton turun menjadi 2.151.872,99 ton pada tahun 2024. Volume ikan dan Udang yang dikepor dari Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat dari tahun 2024 dibanding tahun 2023, dimana pada tahun 2023 volume ekspor ikan dan udang sebesar 187,7 ton meningkat menjadi 229,4 ton pada tahun 2024. Pekembangan volume dan nilai ekspor menurut jenis komoditi di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada **Tabel 2.47.**

Tabel 2.47. Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023 dan 2024

Jenis Komoditi	Volume/Volume (ton)		Nilai FOB/FOB Value (US $)	
	2023	2024	2023	2024
Bahan Bakar Mineral	2.584.297,34	2.151.872,99	1.455.797.302,00	1.265.347.917,00
Benda-benda dari Besi dan Baja	-	-	-	-
Besi dan Baja	-	-	-	-
Ikan dan Udang	187,7	229,4	1.258.600,00	1.102.800,00
Kapal Laut	-	-	-	-
Perabot, Penerangan Rumah	-	-	-	-
Lokomotif dan Peralatan Kereta	-	-	-	-

Jenis Komoditi	Volume/Volume (ton)		Nilai FOB/FOB Value (US $)	
	2023	2024	2023	2024
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	50,3	-	1.857.093,00	
Perangkat Optik	0,12		37.785,00	
Total	**2.922.533,83**	**2.152.102,39**	**1.458.950.780,00**	**1.265.347.917,00**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.5.1. Transportasi Darat

Peningkatan ekonomi di suatu wilayah salah satunya sangat bergantung pada transportasi darat yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat maju dan berkembang di wilayah yang memiliki jaringan transportasi darat memadai, dibandingkan dengan wilayah yang terpencil dengan aksesibilitas yang sulit. Mengingat ketersediaan sarana transportasi darat dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah merupakan hal yang penting, maka diperlukan indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi transportasi darat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa indikator yang diperlukan untuk menggambarkan kondisi transportasi darat diantaranya panjang jalan, jumlah kendaraan, dan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1.1.1.1.1 Panjang Jalan

Jalan memiliki fungsi strategis sebagai penghubung satu daerah dengan daerah lain, sehingga menjadi prasarana penting dalam transportasi darat. Peningkatan perekonomian suatu wilayah perlu didorong oleh aksesibilitas jalan yang memadai agar konektivitas antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran dapat terintegrasi dengan mudah dan lancar. Gambaran tentang panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan menurut jenis permukaan, kondisi jalan, dan tingkat kewenangan pemerintah. Panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas menurut jenis permukaan jalan pada tahun 2020-202 4 pada **Tabel 2.48** berikut ini.

Tabel 2.48. Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Jenis Permukaan Jalan	2020	Jenis Permukaan Jalan	2021	2022	2023	2024
Aspal	59,35	Aspal	59,43	64,74	65,44	81,63
Perkerasan Beton/ Kerikil	40,15	Kerikil	43,93	43,93	0,1	0,0
		Beton	43,93	41,74	40,66	36,32
Tanah	194,63	Tanah	50,64	187,55	187,93	132,8
Lainnya	-	Lainnya	-	-	-	
Jumlah	**294,1**	**Jumlah**	**294,13**	**294,13**	**293,13**	**250,75**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Jenis permukaan jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas jalan aspal, jalan kerikil, beton, tanah dan jalan lainnya. **Tabel 2.48** menunjukkan bahwa jalan aspal di Kepulauan Anambas meningkat dari 59,35 km pada tahun 2020 menjadi 81,63 km pada tahun 2024. Pada tahun 2024, masih terdapat jalan tanah sepanjang 132,80 km yang belum diaspal. Berdasarkan data kondisi permukaan jalan di atas, maka proyek pengaspalan jalan perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengingat peranan jalan dalam pembangunan ekonomi wilayah cukup signifikan.

Kondisi jalan terbagi atas empat kategori, yaitu jalan dengan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Jalan yang memiliki kondisi baik dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam dan selama dua tahun mendatang tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan. Jalan dengan kondisi sedang diartikan sebagai jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40-60 km per jam dan selama satu tahun mendatang tanpa rehabilitasi pada pengerasan jalan. Pada kondisi rusak, jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20-40 km per jam dan perlu perbaikan pondasi jalan. Selanjutnya untuk jalan rusak berat, maka jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 0-20 km per jam. Jenis kondisi jalan pada tahun 2020-2024 di masing-masing kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada **Tabel 2.49**.

Tabel 2.49. Panjang Jalan (km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	69,8	88,21	93,61	93,31	101,48
Sedang	15,48	12,3	7,96	8,48	11,09
Rusak	18,69	45	5,01	4,4	4,72
Rusak Berat	194,06	148,62	187,55	187,94	133,46
Jumlah	**293,13**	**294,13**	**294,13**	**294,13**	**250,75**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas senantiasa melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan. Data di atas menunjukkan bahwa panjang jalan dengan kondisi baik terus meningkat selama lima tahun terakhir. Kondisi jalan yang baik meningkat dari 69,8 km di tahun 2020 menjadi 101,48 km di tahun 2024, sehingga terjadi peningkatan sekitar 31,68 km dalam lima tahun pada jalan yang memiliki kondisi baik. Selain memiliki kondisi jalan yang baik dan sedang, Kabupaten Kepulauan Anambas juga masih memiliki jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Hingga tahun 2024, kondisi jalan yang rusak sepanjang 4,72 km dan rusak berat sepanjang 133,46 km. Kondisi jalan yang tergolong rusak berat tersebut sudah cukup berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2020, dimana jalan rusak panjangnya sejauh 18,69 km. Perbaikan kondisi jalan perlu terus ditingkatkan pemerintah daerah agar aksesibilitas transportasi darat dapat lebih baik dan memadai, sehingga dapat mendukung aktivitas dan perekonomian daerah.

Selanjutnya, jika berdasarkan tingkat kewenangannya, Kabupaten Kepulauan Anambas dilalui oleh jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara (jalan nasional). Jalan nasional terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Sementara itu, jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Selanjutnya, jalan kabupaten didefinisikan sebagai jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi. Adapun jalan negara (nasional), jalan provinsi, dan jalan kabupaten yang melalui Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada **Tabel 2.50** di bawah ini.

Tabel 2.50. Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah Tahun 2020-2024, di Kabupaten Kepulauan Anambas

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten/kota	294,13	294,13	294,13	294,13	250,75
Provinsi	51,00	51,00	51,00	48,54	48,54
Negara	30,93	30,93	27,19	27,19	27,19
Jumlah	**376,06**	**375,52**	**375,52**	**369,90**	**326,52**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Berdasarkan **Tabel 2.50**, total panjang jalan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 hingga 2022 sekitar 375-376 km, kemudian pada tahun 2024 menurun menjadi 326,52 km. Menurut tingkat kewenangan pemerintah, pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas dilalui oleh jalan kabupaten sepanjang 250,75 km, jalan provinsi sepanjang 48,54 km, dan jalan negara atau jalan nasional sepanjang 27,19 km.

1.1.1.1.2 Jumlah Kendaraan

Salah satu sarana penting dari sub sektor angkutan darat adalah kendaraan. Perkembangannya yang cepat dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sub sektor angkutan atau transportasi darat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi darat. Kondisi ini sejalan dengan mobilitas penduduk yang juga semakin tinggi. Jenis kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi darat dapat meliputi mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya disajikan pada **Tabel 2.51**.

Tabel 2.51. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas

Jenis kendaraan	2020	2021	2022	2023	**2024**
Mobil Penumpang	27	97	0	0	0
Bus	58	4	0	0	0
truck	37	47	0	0	0
Sepeda motor	2.318	3.162	3.083	3.727	3.938
Total	**2.440**	**3.310**	**3.083**	**3.727**	**3.938**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, UPTD PPD KKA, 2025

Permintaan terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada periode tahun 2020 hingga 2023, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan dari 3310 unit pada tahun 2020 menjadi 3727 unit pada tahun 2023. Kendaraan yang paling banyak digunakan di Kabupaten Anambas yaitu jenis sepeda motor yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024 terjadi perubahan dalam sistem pendataan yang dilakukan BPS, dimana padah tahun 2024 pendataan dilakukan hanya pada kendaraan yang membayar pajak. Sehingga terjadi ketimpangan jumlah kendaraan pada tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari data BPS diketahui bahwa pada tahun 2024 jumlah kendaraan yang membayar pajak sebanyak 502 unit. Namun diperoleh data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) (Samsat) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2024 jumlah kendaraan yang teregistrasi/terdaftar yaitu sebanyak 3.938 unit.

Tabel 2.52. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan yang Membayar Pajak Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas

Jenis kendaraan	2024
Mobil Penumpang	4
Bus	6
Truck	8
Sepeda motor	484
Total	502

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.1.1.1.3 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan juga termasuk dalam salah satu indikator untuk menilai kinerja transportasi darat sebagai bagian dari daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung melalui perbandingan antara total panjang jalan dalam satuan kilometer dengan jumlah kendaraan dalam satuan unit, sehingga output rasio dalam satuan km/unit kendaraan. Panjang jalan yang diperhitungkan dalam rasio ini merupakan gabungan panjang jalan menurut kewenangan yang melalui Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu terdiri atas jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Hasil perhitungan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan digunakan untuk mengetahui Tingkat ketersediaan jalan yang dapat memberikan akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) dapat dilihat pada **Tabel 2.53** di bawah ini.

Tabel 2.53. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang jalan (km)	Jumlah kendaraan (unit)	Rasio (km/unit)
2020	376,06	2.440	0,154
2021	375,52	3.310	0,113
2022	375,52	3.083	0,122
2023	369,9	3.727	0,099
2024	326,52	3.938	0,083

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024, UPTD PPD KKA 2025

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan, yaitu dari 0,154 km/unit kendaraan di tahun 2020 menjadi 0,009 km/unit di tahun 2023. Penurunan angka rasio ini disebabkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Anambas pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi perubahan sistem pendataan kendaraan dari BPS yang hanya mendata jumlah kendaraan yang membayar pajak. Sehingga angka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2024 belum dapat dihitung karena hingga penyusunan dokumen ini belum tersedianya data jumlah total kendaraan. Namun diperoleh data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) (Samsat) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2024 jumlah kendaraan yang teregistrasi/terdaftar yaitu sebanyak 3.938 unit sehingga Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 adalah sebesar 0,083 km/unit.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih di batas wajar, sehingga kapasitas jalan saat ini masih sangat memadai. Angka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di kabupaten ini juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya, di samping itu jumlah penduduk di wilayah ini juga masih rendah. Dengan demikian, kapasitas jalan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini masih mampu menampung jumlah kendaraan yang ada.

1.1.1.2. Transportasi Laut

Sebagai wilayah kepulauan, transportasi laut menjadi sarana transportasi utama di Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana mobilitas penduduk setempat lebih intensif dilakukan di air dibandingkan di darat. Pelabuhan dan dermaga baik dalam skala besar maupun kecil yang tersebar di seluruh kecamatan berperan penting dalam melayani arus penumpang dan bongkar muat barang. Adapun armada kapal yang tersedia di pelabuhan/dermaga Kabupaten Kepulauan Anambas mencakup angkutan kapal antar pulau di dalam Kabupaten Kepulauan Anambas maupun angkutan kapal antar provinsi (skala nasional). Tidak hanya di lingkup nasional, saat ini wilayah Kepulauan Anambas mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri.

Peningkatan daya saing ekonomi dan konektivitas dengan wilayah sekitar kabupaten ini perlu ditopang oleh sistem pengangkutan dengan moda transportasi laut yang terkelola secara baik dan efisien. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa indikator yang berkaitan dengan transportasi laut untuk menggambarkan dinamika dan perkembangan kondisi transportasi laut di kabupaten setempat. Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi dan sistem transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Anambas dijelaskan lebih detail sebagai berikut.

1.1.1.2.1 Pelabuhan

Pelabuhan merupakan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut, sehingga peranannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, seperti Kabupaten Kepulauan Anambas. Penggerak roda perekonomian di kabupaten ini salah satunya adalah pelabuhan,

sebab keberadaannya memudahkan distribusi hasil-hasil produksi dan aktivitas perekonomian lainnya baik antar pulau di dalam wilayah Kepulauan Anambas, antar kabupaten/kota lainnya maupun antar provinsi. Pelabuhan secara lebih luas menjadi titik simpul pusat hubungan dari suatu daerah pendukung (*hinterland*) dan penghubung dengan daerah luar lainnya.

Berdasarkan statusnya, tipe pelabuhan terdiri atas pelabuhan perintis, pelabuhan penumpang, pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan ASDP, pelabuhan regional, dan pelabuhan tarsus. Ketersediaan pelabuhan sebagai bagian dari sistem transportasi laut perlu diketahui update perkembangannya agar daya saing fasilitas/infrastruktur di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas dapat lebih terukur. Jumlah dan status pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.54. Jumlah Pelabuhan per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 - 2024

Status Pelabuhan	2020	2021	2022	2023	2024
Perintis	0	0	0	0	0
Penumpang	0	0	0	0	0
Pengumpan Lokal	50	149	149	149	149
ASDP	0	1	2	2	2
Regional	2	2	3	3	1
Tersus	2	2	2	2	2
Total	54	154	156	156	154

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DISHUBLH) Kabupaten Kepulauan Anambas

Jumlah pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas terus meningkat hampir tiga kali lipat, yaitu dari 54 unit pada tahun 2020 menjadi 154 pada tahun 2024. Hal ini dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk sehingga mobilitas penduduk semakin tinggi terutama dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Jenis atau status pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan ASDP, pelabuhan regional, dan pelabuhan tersus. Jenis atau status pelabuhan yang paling banyak di kabupaten ini adalah pelabuhan pengumpan lokal, dimana pelabuhan ini merupakan pelabuhan pengumpan sekunder yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut regional dalam jumlah kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama dan/atau pelabuhan regional. Jumlah pelabuhan pengumpan lokal meningkat dari 50 unit pada tahun 2020 menjadi 149 unit pada tahun 2024. Adapun ketersediaan pelabuhan ASDP, regional, dan tersus di kabupaten ini masing-masing berkisar antara 1-3 unit pelabuhan. Pada tahun 2022-2024 terdapat 2 pelabuhan ASDP. Pelabuhan ASDP ini merupakan pelabuhan untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang dikelola perusahaan pengelola pelabuhan dan pengelola kapal. Pelabuhan regional jumlahnya mengalami penurunan dari 2 unit pada tahun 2020, menjadi 1 unit padat tahun 2024. Pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dalam jumlah yang relatif kecil serta merupakan pengumpan pada pelabuhan utama. Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki pelabuhan tersus sebanyak 2 unit dari tahun 2020-2024. Pelabuhan tersus menjadi terminal khusus yang difungsi sebagai pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan

usaha yang bersangkutan, dimana terminal ini terletak Di Luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP).

1.1.1.2.2 Jumlah Orang Melalui Pelabuhan

Peran moda transportasi laut sangat penting untuk mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas, terlebih lagi wilayah kabupaten ini terdiri atas pulau-pulau kecil yang tidak bisa dijangkau dengan moda darat maupun udara, sehingga aksesibilitas bertopang pada jalur laut. Penggunaan jasa angkutan laut tercermin dari banyaknya jumlah penumpang atau orang yang datang dan berangkat melalui pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.55**.

Tabel 2.55. Jumlah Penumpang/Orang yang Datang dan Berangkat Melalui Pelabuhan/Dermaga Tahun 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tahun	Jumlah Penumpang (Orang)	
		Datang	Berangkat
1	2020	23.364	17.035
2	2021	27.362	21.515
3	2022	32.504	32.986
4	2023	34.477	36.427
5	2024	30.110	28.064
Rata-rata		**29.563**	**27.205**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Rata-rata jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan/dermaga di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun terakhir sebesar 29.563 orang/tahun dan rata-rata jumlah penumpang yang berangkat sebesar 27.205 orang/tahun.

1.1.1.2.3 Jumlah Barang Melalui Pelabuhan

Kapal yang digunakan untuk bongkar muat barang melalui pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas dua jenis, yaitu kapal dalam negeri (kapal antar pulau) dan kapal luar negeri. Jumlah bongkar muat barang dengan menggunakan kapal antar pulau dapat dilihat pada **Tabel 2.56**.

Tabel 2.56. Jumlah Bongkar Muat Barang Menggunakan Kapal Antar Pulau yang Melalui Pelabuhan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tahun	Jumlah Barang (ton)	
		Bongkar	Muat
1	2020	50.110	8.898
2	2021	51.001	9.672
3	2022	138.880	9.935
4	2023	73.529	13.468
5	2024	94.551	20.935
Rata-rata		**81.614**	**12.582**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Berdasarkan **Tabel 2.56**, rata-rata jumlah bongkar barang yang menggunakan kapal antar pulau di pelabuhan Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) adalah sebesar 81.614 ton per tahun dan rata-rata jumlah muat barang untuk pelayaran dalam negeri sebesar 12,582 ton per tahun.

1.1.1.2.4 Kunjungan Kapal

Kunjungan kapal di pelabuhan merupakan salah satu indikator yang diperlukan untuk mengetahui aktivitas pelabuhan-pelabuhan di suatu wilayah. Beberapa tahun terakhir, pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak hanya dikunjungi oleh kapal dalam negeri, namun juga kapal luar negeri mulai banyak yang berkunjung di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah kunjungan kapal baik dalam negeri dan luar negeri yang melalui pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode tahun 2020-2023 disajikan pada **Tabel 2.57**.

Tabel 2.57. Jumlah Kunjungan Kapal (Dalam Negeri dan Luar Negeri) Melalui Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Kapal (unit)	
		Dalam Negeri	**Luar Negeri**
1	2020	1.060	45
2	2021	1.210	22
3	2022	1.349	75
4	2023	1.274	91
5	2024	1.198	112
Rata-rata		**1.218**	**83**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2024

Tabel 2.57 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kunjungan kapal melalui pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2020 hingga 2024 sebesar 1.285 unit kapal per tahun untuk kunjungan kapal dalam negeri dan 83 unit kapal per tahun untuk kunjungan kapal luar negeri. Kunjungan kapal dalam negeri tertinggi yang melalui pelabuhan Kepulauan Anambas terjadi pada tahun 2022 saat awal pasca COVID-19, yaitu sebesar 1,349 unit. Sementara itu, kunjungan kapal luar negeri tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu hingga mencapai 161 unit kapal dari luar negeri.

1.1.1.2.5 Kapal Perikanan

Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai nelayan. Oleh sebab itu, kapal perikanan menjadi moda transportasi utama sekaligus sebagai sarana penangkapan ikan para nelayan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jenis kapal perikanan sangat beragam, terdiri dari: a) kapal motor (KM) ukuran <5GT, 5-10 GT, 10-20 GT, dan 20-30 GT, b) perahu motor tempel (PTM) ukuran 5 GT dan 5-10 GT, serta c) perahu tanpa motor (PTM). Jumlah kapal perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan ukuran kapal adalah sebagai berikut.

Tabel 2.58. Jumlah Kapal Perikanan Berdasarkan Ukuran Kapal di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

No	Jenis Kapal Perikanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapal Motor (KM) <=5 GT	2.599	2.397	2.418	2.443	2.609
2	Kapal Motor (KM) 6-10 GT	58	36	36	38	38
3	Kapal Motor (KM) 11-20 GT	18	18	18	19	19
4	Kapal Motor (KM) 21-30 GT	2	0	0	1	0
5	Perahu Motor Tempel (MT) <5 GT	14	0	0	0	0
6	Perahu Motor Tempel (MT) 5-10 GT	1	0	0	0	0
7	Perahu Tanpa Motor (PTM)	507	472	451	484	626
Total		3.199	2.923	2.923	2.985	3.292

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023 dan Dinas Perikanan, Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Jenis kapal perikanan yang paling banyak digunakan oleh nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kapal motor (KM). Jenis kapal motor yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan sebagian besar berukuran <=5 GT. Penggunaan kapal motor berukuran <5 GT menurun dari 2.599 unit pada tahun 2020 menjadi 1.967 unit pada tahun 2024. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 hanya sebagian kecil nelayan yang menggunakan kapal motor berukuran 6-10 GT, 11-20 GT, dan 21-30 GT. Selain kapal motor, cukup banyak nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor (PTM) dalam menangkap ikan di laut, yaitu sekitar + 451-507 unit selama tahun 2020-2023. Tidak hanya kapal motor dan perahu tanpa motor, ada beberapa nelayan yang juga menggunakan perahu motor tempel (MT) berukuran <5GT dan 5-10 GT untuk menangkap ikan di laut. Pada tahun 2020, PTM ukuran <5GT sejumlah 14 unit dan 5-10 GT sebesar 1 unit. Namun demikian, pada tahun 2021 hingga 2022, jenis perahu motor tempel sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh nelayan. Pada tahun 2024 banyak data tidak dapat ditampilkan karena keterbatasan data.

1.1.1.3. Transportasi Udara

Transportasi udara juga berperan penting untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjalankan aktivitasnya. Transportasi darat, laut, dan udara saling terkoneksi di wilayah kepulauan ini. Peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat setempat telah meningkatkan permintaan terhadap jasa transportasi udara seiring dengan berjalannya waktu. Bandar Udara Letung menjadi sarana utama transportasi udara di Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa indikator yang berkaitan dengan bandar udara (bandara) dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi transportasi udara dan aktivitas di dalamnya, seperti jumlah orang dan bandara yang melalui bandara dan kunjungan pesawat yang dijelaskan dengan lebih detail sebagai berikut.

1.1.1.3.1 Jumlah Orang Melalui Bandara

Selama periode tahun 2020-2024, jumlah orang yang melalui bandara di Kabupaten Kepulauan Anambas pada disajikan pada **Tabel 2.59**.

Tabel 2.59. Jumlah Penumpang/Orang yang Datang dan Berangkat melalui Bandara Tahun 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tahun	Jumlah Penumpang (Orang)	
		Datang	Berangkat
1	2020	7.926	7.018
2	2021	6.582	5.983
3	2022	7.926	7.791
4	2023	10.163	9.594
5	2024	8.995	8.431
Rata-rata		**8.318**	**7.763**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Rata-rata jumlah orang yang datang melalui bandara dalam lima tahun terakhir sebesar 8.318 orang per tahun, dan rata-rata yang berangkat sekitar 7.763 orang per tahun. Puncak tertinggi jumlah penumpang yang datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas melalui bandara terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 10.163 orang. Puncak tertinggi penumpang yang berangkat keluar kabupaten melalui bandara juga terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 9.594 orang.

1.1.1.3.2 Kunjungan Pesawat

Banyaknya pesawat yang datang dan berangkat di Bandara Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020-2023 disajikan pada **Tabel 2.60**.

Tabel 2.60. Kunjungan Pesawat di Bandara Letung Tahun 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Pesawat (unit)	
		Datang	**Berangkat**
1	2020	159	159
2	2021	145	145
3	2022	233	233
4	2023	278	278
5	2024	296	296
Rata-rata		**208**	**208**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2025

Rata-rata jumlah pesawat yang berangkat dan datang di Bandara Letung selama tahun 2020-2024 sekitar 208 unit pesawat per tahun. Jumlah pesawat yang datang dan berangkat melalui Bandara Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas paling tinggi adalah tahun 2024 sebanyak 296 kunjungan pesawat. Kunjungan pesawat di Bandara Letung mengalami penurunan drastis pada saat terjadi pandemi COVID-19, dimana jumlah kunjungan pesawat pada tahun 2020 hingga 2021 di bawah rata-rata, yaitu hanya sekitar 145 dan 159 kedatangan pesawat.

1.1.1.4. Perbankan

Peranan lembaga keuangan seperti bank sangat penting dalam mendukung pergerakan ekonomi dan pembangunan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Informasi terkait fasilitas perbankan dapat dilihat pada **Gambar 2.34**.

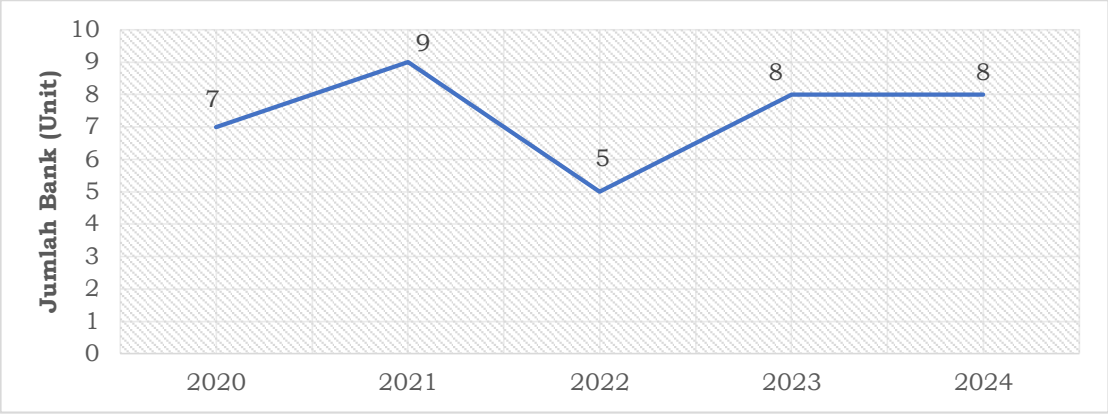

Gambar 2.34. Jumlah Bank di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, rata-rata jumlah bank di Kepulauan Anambas sebesar 7 unit bank per tahun. Fasilitas kantor bank paling sedikit terjadi pada tahun 2022, yaitu hanya terdapat 5 unit bank di Kabupaten Kepulauan Anambas. Lokasi kantor bank sebagian besar berada di Kecamatan Siantan. Berdasarkan jenisnya, kelompok bank terdiri atas Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah, Bank Pemerintah, Bank Swasta, dan Bank Umum Syariah. Setiap jenis bank tersebut memiliki Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). Jumlah dan jenis bank di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 dapat dilihat pada **Tabel 2.61**.

Tabel 2.61. Jumlah dan jenis bank di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025

Kelompok Bank Bank Group	2024				
	KP	KC	KCP	KK	Total
Bank Persero	-	-	2	-	2
Bank Pembangunan Daerah	-	-	4	-	4
Bank swasta	-	-	-	-	-
Bank asing	-	-	-	-	-
Bank Umum Syariah	-	-	2	-	2
Kepulauan Anambas	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025

1.1.1.5. Restoran

Perkembangan restoran atau rumah makan di Kabupaten Kepulauan Anambas berawal dari kedai-kedai kopi di sekitar pasar Tarempa. Jumlah restoran atau rumah makan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada **Gambar 2.35** di bawah ini.

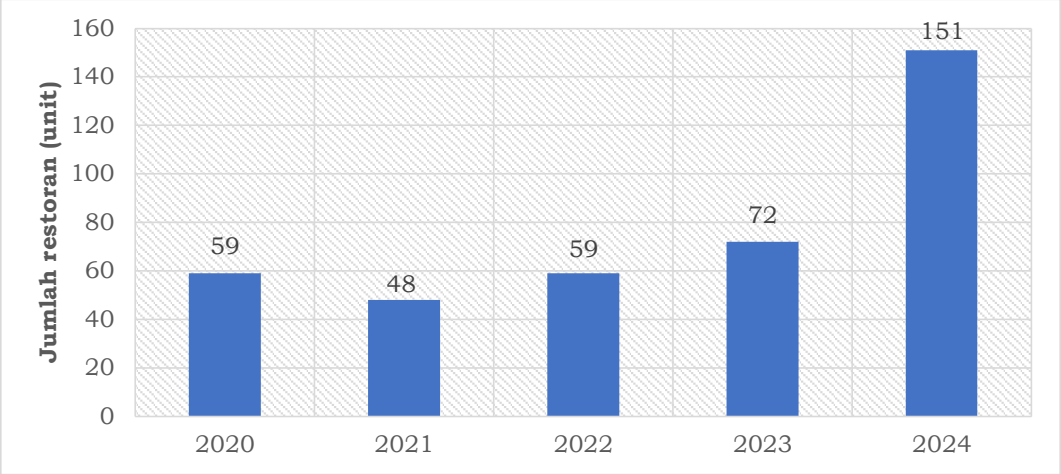

Gambar 2.35. Jumlah Restoran atau Rumah Makan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2025

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Selama periode tahun 2020-2024, jumlah restoran paling sedikit adalah 48 unit restoran pada tahun 2021. Pada periode tahun 2021 hingga hingga tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah rumah makan di Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana pada tahun 2021 terdapat 48 unit restoran dan rumah makan, meningkat menjadi 151 unit pada tahun 2024

Kecamatan Siantan merupakan wilayah perkotaan yang menjadi pusat kegiatan dan pemerintahan di kabupaten ini, sehingga sejak tahun 2010 sudah berdiri berbagai tipe restoran/rumah makan. Sejak tahun 2020 hingga 2024, sebagian besar restoran berlokasi di Kecamatan Siantan, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Palmatak. Jumlah restoran atau rumah makan menurut kecamatan disajikan pada **Tabel 2.62**.

Tabel 2.62. Jumlah Restoran atau Rumah Makan Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Jemaja	13	13	13	15	24
Jemaja Barat*)	0	0	0	0	2
Jemaja Timur	1	1	1	1	4
Siantan Selatan	0	0	0	0	5
Siantan	38	24	26	39	73
Siantan Timur	0	0	2	0	7
Siantan Tengah	0	0	2	0	3
Palmatak	7	6	10	14	15
Siantan Utara*)	0	0	0	0	15
Kute Siantan*)	0	4	5	3	3

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

1.1.1.6. Hotel/Penginapan

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu didukung melalui pengembangan subsektor perhotelan atau penginapan. Lapangan usaha perhotelan juga menjadi salah satu sektor penyokong pertumbuhan dan perkembangan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah hotel di kabupaten ini selama tahun 2020-2024 disajikan pada **Gambar 2.36**.

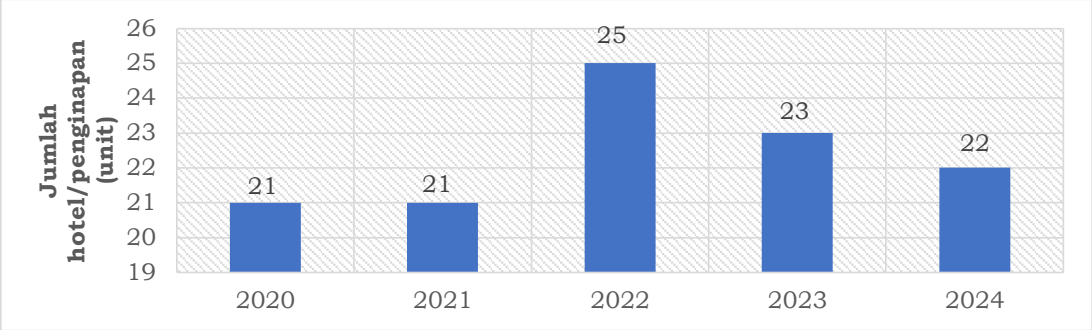

Gambar 2.36. Jumlah Hotel di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2021-2025

Pada periode tahun 2020-2024, rata-rata jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 22 unit hotel per tahun dengan tipe hotel berupa hotel non bintang. Fasilitas jumlah hotel paling sedikit sebanyak 21 unit pada tahun 2020 dan 2021. Data statistik pada sektor perhotelan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwa pengunjung yang datang berwisata ke kepulauan ini sebagian besar adalah pengunjung domestik dengan rata-rata lama menginap di hotel atau penginapan sebanyak 1 hari, tingkat penghunian kamar sebesar 24 persen. Tipe hotel berbintang belum tersedia di wilayah kepulauan ini, sehingga diperlukan pembangunan hotel bintang agar menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun asing. Peningkatan kualitas hotel sangat diperlukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan, khususnya pada sektor pariwisata.

1.1.1.7. Listrik

Sumber penerangan di Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari listrik PLN, listrik non-PLN, dan bukan listrik. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki satu Unit Pelayanan Terpadu (UPT) PLN yang sebagian besar pelanggannya berasal dari rumah tangga. Distribusi persentase ketersediaan daya listrik berdasarkan sumber penerangannya disajikan pada **Tabel 2.63**.

Tabel 2.63. Distribusi Persentase RT Menurut Sumber Penerangan

Sumber Penerangan	2020	2021	2022	2023	2024
Listrik PLN	78,6	92,9	92,9	97,2	99,00
Listrik Non PLN	19,9	7	6,7	2,6	0,4
Bukan Listrik	1,5	0,1	0,4	0,2	0,5
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2025

Listrik PLN menjadi sumber penerangan utama bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga yang menggunakan daya listrik yang bersumber dari listrik PLN telah mencapai 99 persen.

Beberapa indikator lainnya yang berkaitan dengan daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, belum dapat dijelaskan karena keterbatasan data yang tersedia.

1.1.1.8. Rumah tangga dengan akses hunian layak

Rumah tangga yang memiliki akses hunian layak di Kabupaten Anambas masih rendah mengalami fluktuasi setiap tahun dari tahun 2023. Pada tahun 2019 sebesar 5,81 persen menurun menjadi 4,8 persen pada tahun 2023. Sementara data 2024 belum ada data. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan. Kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Sementara Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam kerangka kerja monitoring SDGs menggunakan lima kriteria yaitu (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas tempat tinggal; (3) akses air minum layak; (4) akses ; dan (5) keamanan bermukim.

Tabel 2.64. Rumah Tangga dengan akses hunian layak

	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	4,52	7,84	5,76	4,8	3,30

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2025

1.1.1.9. Persentase desa mandiri

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75

Nilai IPD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di Kabupaten Kepulauan Anambas, namun belum mencapai indeks yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh Penginputan Data IDM (Indeks Desa Membangun) karena sebagian desa tidak didukung sinyal telekomunikasi yang baik, belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat, belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa, belum tersedianya data potensi desa yang komprehensif, lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi, belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuh kembangkan perekonomian desa, rendahnya kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna, masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan, data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif, belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan, belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat, belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan dan belum Optimalnya

Pengembangan Sistem Informasi Desa. Sementara itu, persentase desa mandiri meningkat setiap tahun di Kabupaten Anambas, dinama pada tahun 2020 terdapat 1,92 % meningkat menjadi 21, 15 persen pada tahun 2024. Nilai IPD dan Persentase Desa Mandiri Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.65.**

Tabel 2.65. Indeks Perkembangan Desa (Indeks Desa Membangun) dan Persentase Desa mandiri di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Desa (Indeks Desa Membangun)	0,6517	0,6623	0,6946	0,7087	0,7294
Persentase Desa Mandiri	1,92% (1 Desa)	1,92% (1 Desa)	9,62% (5 Desa)	15,38% (8 Desa)	21,15% (11 Desa)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kepulauan Anambas 2025

1.1.2. Stabilitas Ekonomi Makro

1.1.2.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. **Gambar 2.37** rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan persentase kontribusi penerimaan pajak terhadap total output ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari gambar, terlihat bahwa rasio pajak terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat rendah, mulai dari 0,0070% pada tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 0,0081% pada tahun 2024. Rasio ini terus mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Meskipun ada kenaikan pada beberapa tahun, rasio keseluruhan tetap rendah, yang bisa mengindikasikan potensi ruang peningkatan dalam pengumpulan pajak di daerah ini untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Meskipun ada kenaikan signifikan pada beberapa tahun, rasio keseluruhan tetap rendah, yang bisa mengindikasikan potensi ruang peningkatan dalam pengumpulan pajak di daerah ini untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

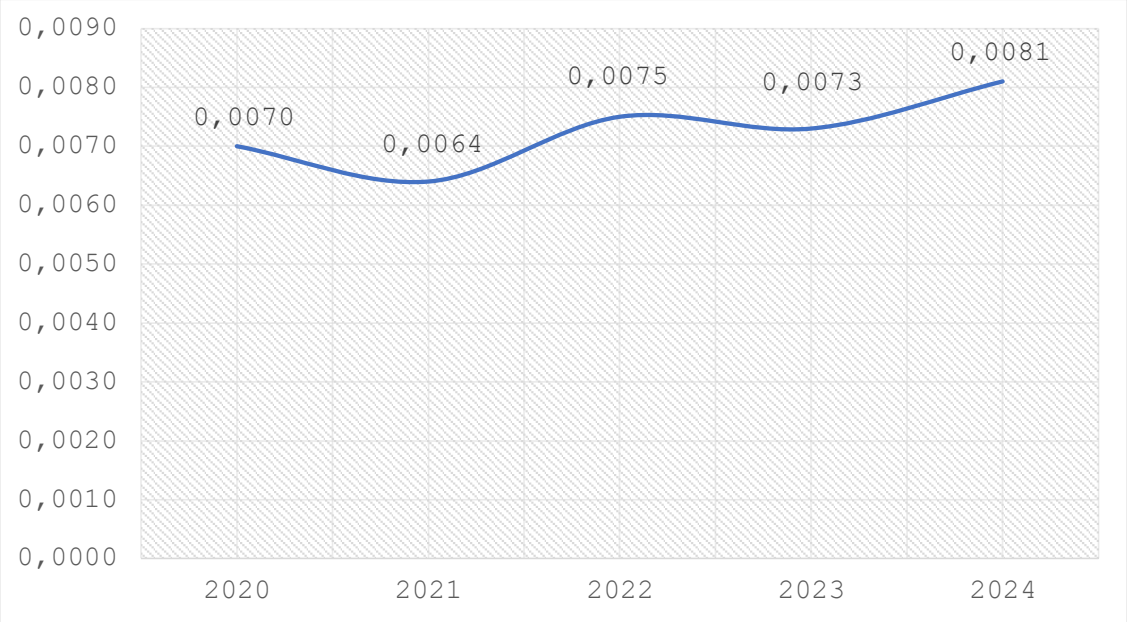

Gambar 2.37. Rasio pajak terhadap PDRB (%) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2025

1.2.Aspek Pelayanan Umum

1.2.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1.2.1.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Salah satu indeks yang menunjukkan penggunaan komunikasi dan informatika di tingkat sistem pemerintahan ditunjukkan dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengukur sejauh mana suatu pemerintahan telah mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama kurun waktu empat tahun terakhir. Berdasarkan data, indeks SPBE pada tahun 2021 berada pada angka 2,03. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai indeks menjadi 1,85, yang merepresentasikan penurunan sebesar 0,18 poin. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya hambatan atau stagnasi dalam implementasi kebijakan digitalisasi pemerintahan pada tahun tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan dalam indeks SPBE menjadi 2,51. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan ini mencerminkan selisih positif sebesar 0,66 poin, menunjukkan adanya perbaikan yang cukup substansial dalam tata kelola pemerintahan digital. Kenaikan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari perbaikan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, atau reformasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Pada tahun 2024, indeks kembali meningkat menjadi 3,04, yang berarti terdapat kinerja positif sebesar 0,53 poin dibandingkan

tahun 2023. Tren positif ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis elektronik, serta adanya komitmen berkelanjutan terhadap transformasi digital.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, tren indeks SPBE dari 2021 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan positif secara agregat. GAP kumulatif dari tahun 2021 ke 2024 adalah sebesar +1,01 poin. Hal ini mencerminkan arah pembangunan SPBE yang semakin progresif dan menunjukkan respons pemerintah dalam mengatasi tantangan digitalisasi dengan pendekatan strategis dan berkelanjutan. Selengkapnya Indeks SPBE di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada gambar berikut.

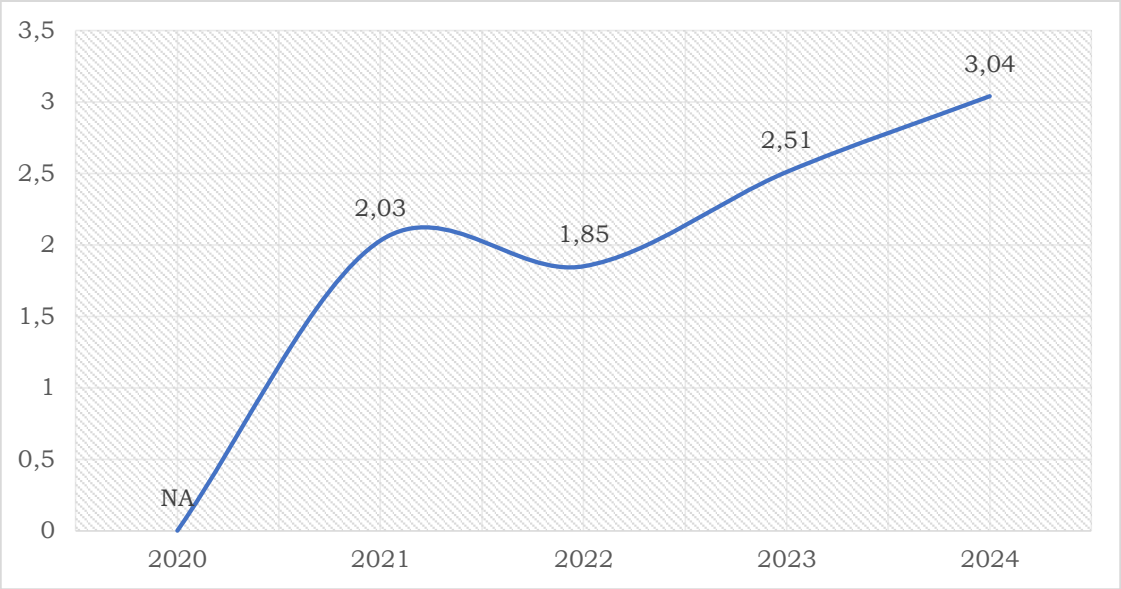

Gambar 2.38. Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2024
Sumber: Kementerian PAN RB, 2025

1.2.1.2. Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik menggambarkan sejauh mana kebijakan yang ada mendukung penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas mulai dilaksanakan pada tahun 2022-2024. Hal ini berimplikasi dengan tersedianya (N/A) data capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) untuk tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2022, nilai IPP tercatat sebesar 3,76 dari skala maksimal 5,00, yang dikategorikan B (Baik). Capaian ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan pemenuhan terhadap sebagian besar aspek standar pelayanan yang ditetapkan.

Selanjutnya pada tahun 2023, nilai IPP tercatat sebesar 2,80, yang masuk dalam kategori C (Cukup). Penurunan capaian ini menjadi refleksi atas perlunya penguatan lebih lanjut terhadap sejumlah aspek pelayanan, antara lain konsistensi penerapan standar pelayanan, kualitas SDM, serta peningkatan sarana pendukung. Meski demikian, kondisi tersebut telah menjadi momentum evaluatif bagi perangkat

daerah untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan guna mendorong peningkatan kinerja pelayanan yang lebih optimal di tahun-tahun berikutnya.

Sebagai tindak lanjut atas upaya perbaikan yang telah dilakukan, pada Tahun 2024 capaian IPP meningkat signifikan menjadi 4,19, yang termasuk dalam kategori A– (Sangat Baik). Peningkatan ini merupakan hasil dari komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus menjaga tren positif ini melalui inovasi dan penguatan tata kelola pelayanan yang berkelanjutan.

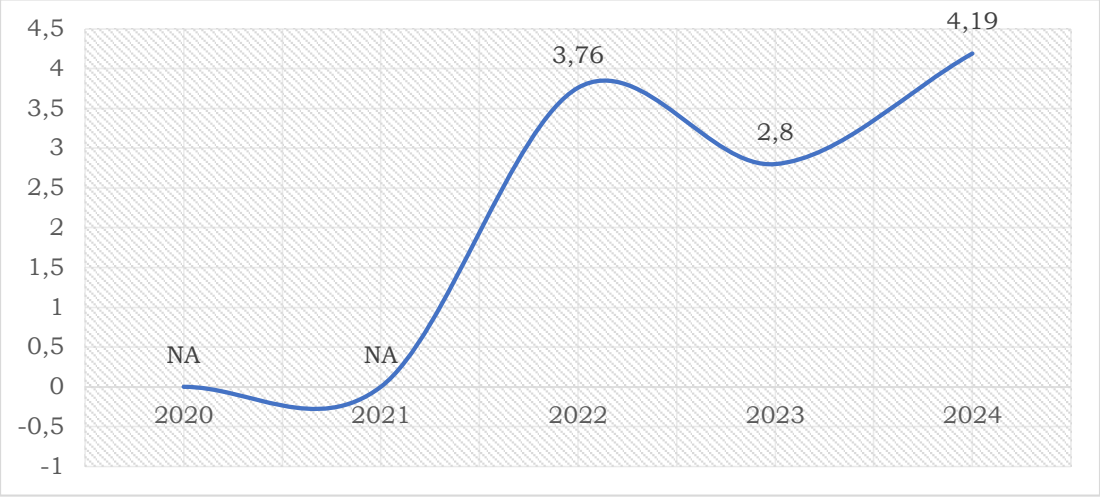

Gambar 2.39. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: Kementerian PAN RB, 2025

1.2.1.3. Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas mencerminkan upaya konkret pemerintah daerah dalam membangun sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem hukum, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Berdasarkan data yang tersedia, indeks ini baru mulai terukur secara kuantitatif sejak tahun 2022, dengan nilai awal sebesar 52,35. Nilai tersebut mencerminkan titik awal implementasi agenda reformasi hukum yang masih berada pada tahap penguatan dasar dan penyusunan kebijakan.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan pada nilai indeks menjadi 87,61. Kenaikan sebesar 35,26 poin menunjukkan *gap* positif yang besar, mencerminkan akselerasi dalam pelaksanaan reformasi hukum. Lonjakan ini dapat diatribusikan pada faktor-faktor seperti pembaruan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta penguatan instrumen pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Perubahan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menata ulang sistem hukum nasional agar lebih responsif dan transparan.

Tren positif berlanjut pada tahun 2024 dengan peningkatan nilai indeks menjadi 98,2. Meskipun *gap* dari tahun sebelumnya lebih kecil, yaitu 10,59 poin, hal ini

menandakan bahwa reformasi hukum telah mencapai fase pematangan, di mana capaian indikator hampir menyentuh angka maksimal. Secara keseluruhan, dalam rentang waktu tiga tahun (2022–2024), indeks mengalami peningkatan kumulatif sebesar 45,85 poin. Hal ini merefleksikan keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan reformasi hukum secara bertahap namun terukur, sekaligus menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif yang dijalankan telah menghasilkan perubahan struktural yang signifikan dalam sistem hukum nasional.

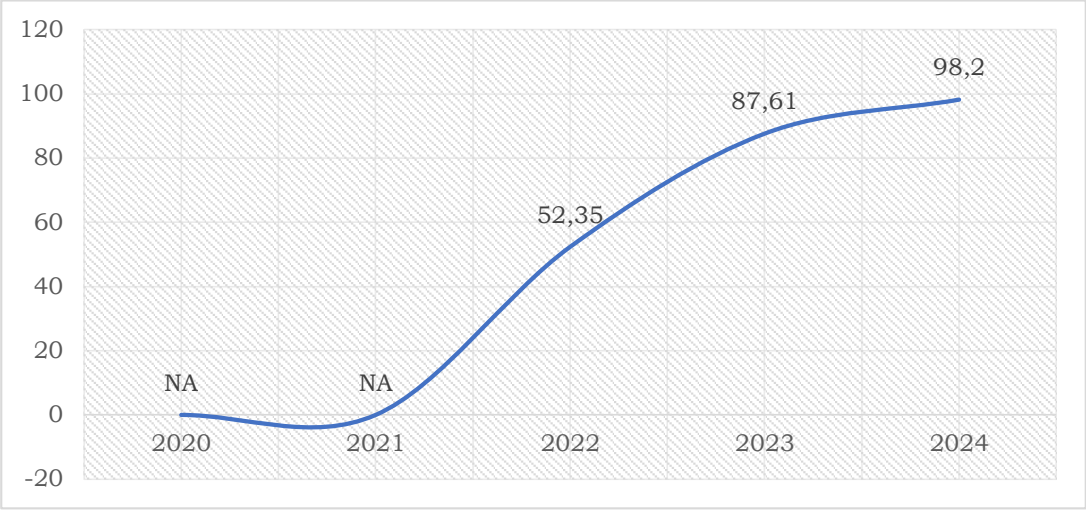

Gambar 2.40. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.1.4. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Di tingkat daerah, capaian reformasi birokrasi menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, turut mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara bertahap. Analisis terhadap capaian nilai dan predikat Reformasi Birokrasi selama periode 2020 hingga 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan, tantangan, serta konsistensi pemerintah daerah dalam mengakselerasi transformasi birokrasi yang adaptif dan berdaya saing

Capaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data nilai Reformasi Birokrasi, pada tahun 2020 Anambas memperoleh nilai sebesar 51,76 dengan predikat “CC”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih berada pada tahap dasar dengan perbaikan yang terbatas dalam aspek-aspek tata kelola pemerintahan. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 54,27, dengan predikat masih sama seperti tahun 2020 yakni “CC”.

Tren positif ini tidak berlanjut pada tahun 2022. Nilai Reformasi Birokrasi turun menjadi 57,01 dengan predikat kembali turun ke “CC”. *Gap* negatif sebesar 18,74 poin dari tahun sebelumnya menandakan adanya penurunan kualitas dalam

implementasi program reformasi birokrasi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya monitoring dan evaluasi internal, keterbatasan kapasitas SDM, atau perubahan prioritas kebijakan daerah yang berdampak pada konsistensi pelaksanaan reformasi. Penurunan predikat ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap aspek-aspek kelembagaan dan tata kelola yang belum optimal.

Pada tahun 2023, capaian kembali mengalami perbaikan. Nilai meningkat menjadi 72,34 dan predikat kembali naik ke "BB". *Gap* positif sebesar 15,33 poin dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengembalikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi ke jalur yang benar. Perbaikan ini mengindikasikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang telah diterapkan sebelumnya mulai membuahkan hasil, termasuk penguatan sistem merit, pengelolaan kinerja yang lebih transparan, dan penerapan sistem digitalisasi dalam administrasi pemerintahan.

Capaian paling tinggi terjadi pada tahun 2024, dengan nilai mencapai 74,27 dan predikat meningkat menjadi "B". Kenaikan dari tahun sebelumnya mencerminkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara komprehensif, mulai dari peningkatan efektivitas struktur organisasi, perbaikan proses bisnis, hingga pelayanan publik yang lebih responsif dan partisipatif. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami fluktuasi, capaian lima tahun terakhir menunjukkan tren progresif, yang menjadi landasan kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 2.66. Nilai Reformasi Birokrasi dan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Reformasi Birokrasi	51,76	54,27	57,01	72,34	74,27
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	BB	BB

Sumber: Kementerian PAN RB, 2025

1.2.1.5. Nilai AKIP

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan ukuran tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah, yang dinilai melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana instansi mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil (*outcome-based*). Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian nilai AKIP dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif yang perlu dianalisis lebih lanjut, baik dari aspek kesenjangan antar tahun maupun kontribusinya terhadap peningkatan mutu pelayanan publik.

Pada tahun 2020, capaian nilai AKIP sebesar 53,38 menandai awal yang perlu penguatan serius dalam sistem manajemen kinerja instansi pemerintah daerah. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan nilai mencapai 55,62, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaporan

kinerja, meskipun kesenjangan sebesar 2,24 poin dari tahun sebelumnya mencerminkan adanya lompatan sistemik yang memerlukan konsistensi tindak lanjut. Data tahun 2021 ke 2022 menunjukkan peningkatan yang sangat kecil, yaitu 4,49 poin, sehingga menunjukkan potensi stagnasi yang mengindikasikan bahwa reformasi sistem kinerja perlu didukung oleh pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai AKIP meningkat menjadi 61,27, dan tahun 2024 mencapai 61,96, dengan pertumbuhan yang stabil meski tidak signifikan. Pola peningkatan ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah mulai masuk dalam fase pemantapan sistem akuntabilitas kinerja, namun tetap menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen kinerja yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik. Peningkatan antar tahun yang hanya berada di kisaran 0,6–0,7 poin menandakan kebutuhan untuk inovasi dalam pelaksanaan AKIP, termasuk penguatan budaya kinerja di seluruh tingkatan organisasi.

Bila dikaitkan dengan prinsip pelayanan publik prima, nilai AKIP yang semakin membaik memberikan dasar bagi penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik prima tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kepuasan pengguna layanan, tetapi juga oleh akuntabilitas internal instansi sebagai penyedia layanan. Capaian nilai AKIP yang meningkat mencerminkan kesadaran organisasi terhadap pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban kinerja. Oleh karena itu, peningkatan nilai ini harus dibarengi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik secara nyata, seperti kemudahan akses layanan, kecepatan proses, kepastian prosedur, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kinerja birokrasi tidak hanya terukur secara administratif tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh publik secara langsung.

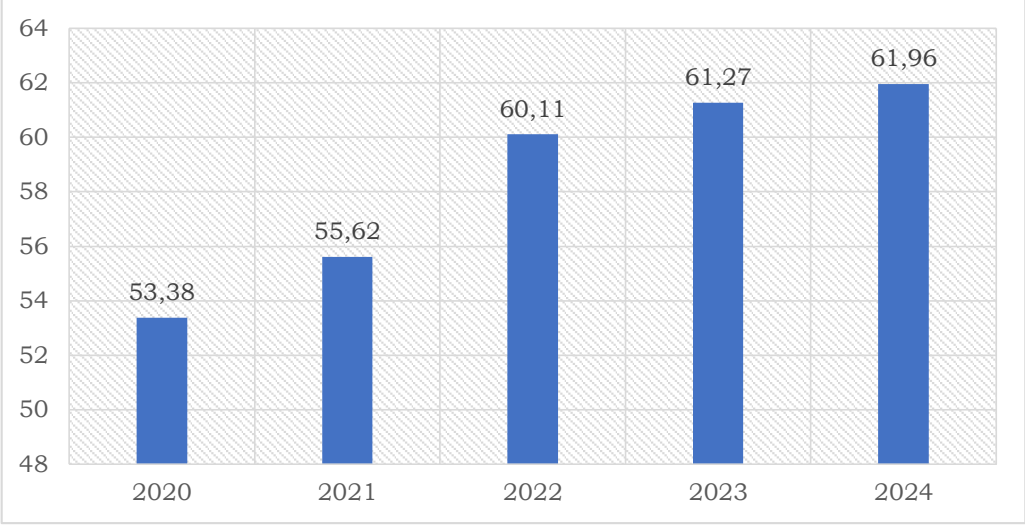

Gambar 2.41. Nilai AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

Capaian Predikat AKIP di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai AKIP tercatat sebesar 53,38 dengan predikat “CC”.

Predikat ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih tergolong rendah, dengan kelemahan pada aspek perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan penganggaran dan pelaporan. Tahun 2021 mencatatkan peningkatan kecil menjadi 55,62 dengan predikat "CC" yang sama, menghasilkan *gap* positif sebesar 2,24 poin, yang meskipun menunjukkan perbaikan, namun belum cukup signifikan untuk mendorong perubahan klasifikasi predikat.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2022, di mana nilai AKIP meningkat menjadi 60,11 dan predikat naik menjadi "B". Kenaikan sebesar 4,49 poin dari tahun sebelumnya mencerminkan adanya upaya yang lebih serius dalam penyusunan perencanaan berbasis kinerja, penguatan indikator kinerja, serta peningkatan efektivitas evaluasi internal. Predikat "B" menandakan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang cukup baik, meskipun masih memerlukan konsistensi dan penguatan sistem pengendalian internal serta penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, nilai AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebesar 61,27 dengan predikat "B". Nilai ini mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 61,96 dengan predikat "B. Terjadi kenaikan sebesar 0,69 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja pemerintah daerah. Meski demikian, peningkatan perlu lebih dioptimalkan. Analisis *gap* ini menunjukkan bahwa meskipun arah perbaikan sudah tepat, namun laju peningkatan masih lambat dan perlu didorong dengan strategi yang lebih efektif dan terukur agar hasil yang dicapai lebih signifikan di masa mendatang.

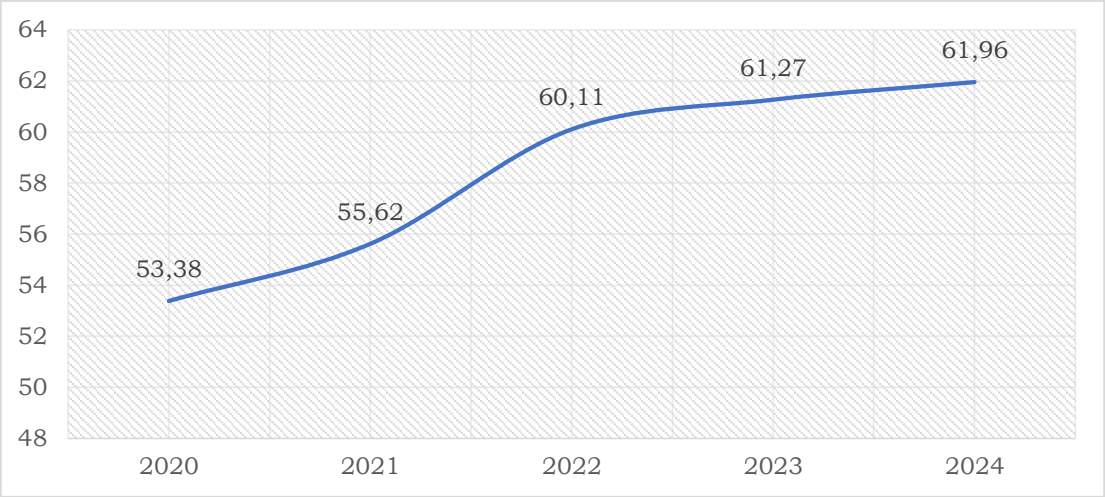

Gambar 2.42. Nilai SAKIP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.1.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator penting untuk mengukur persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian IKM selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang konsisten meningkat, mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun

2021, IKM tercatat sebesar 81,27, menandakan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Peningkatan terjadi pada tahun 2022 dengan nilai IKM mencapai 84,88, menunjukkan *gap* positif sebesar 3,61 poin. Kenaikan ini dapat diasosiasikan dengan peningkatan kualitas pelayanan di berbagai sektor, termasuk kemudahan akses informasi, kecepatan pelayanan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana pelayanan. Perbaikan ini mencerminkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masukan masyarakat, serta adanya upaya sistematis untuk membenahi prosedur pelayanan dan meningkatkan sarana prasarana pendukung.

Pada tahun 2023, capaian IKM naik tipis menjadi 85,16, hanya meningkat 0,28 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik tetap dipertahankan pada level yang tinggi, terdapat tantangan dalam menghasilkan terobosan baru yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat. Hal ini menunjukkan kecenderungan stabilitas, namun sekaligus menuntut inovasi lebih lanjut agar kepuasan masyarakat tidak stagnan.

Tahun 2024 mencatatkan IKM sebesar 86,8, dengan peningkatan 1,64 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun tidak sebesar capaian tahun 2022, tren ini tetap menggambarkan arah positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara kumulatif, terdapat peningkatan IKM sebesar 5,53 poin dalam empat tahun. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah berhasil menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten, yang berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat utama layanan pemerintahan.

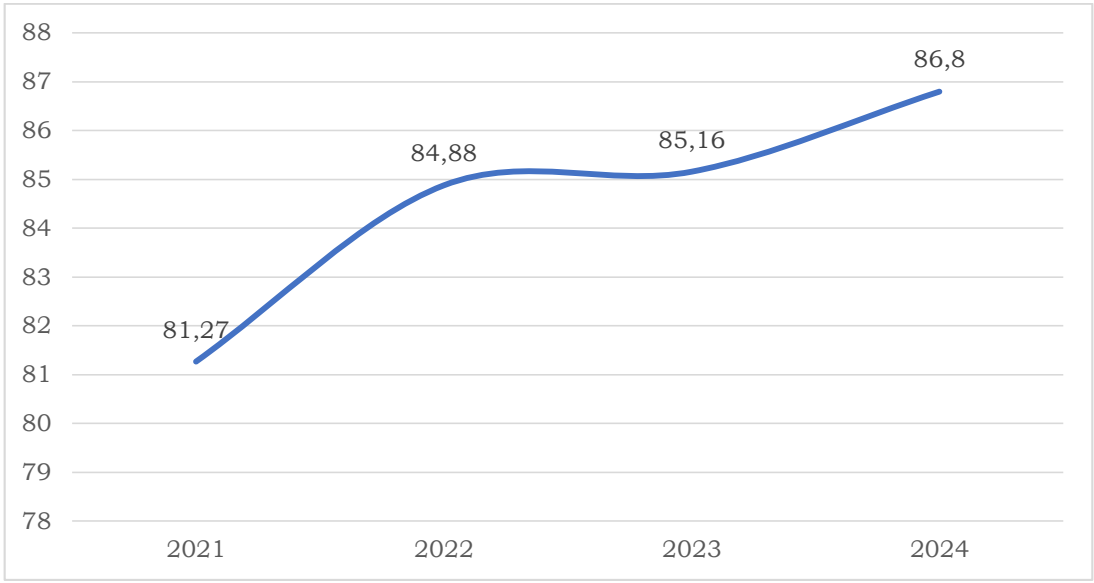

Gambar 2.43. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2024

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.1.7. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas

pemerintahan dan pelayanan publik. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian indeks ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada pada level tinggi, yakni 97,3, yang menggambarkan ASN dengan kompetensi, integritas, dan komitmen kinerja yang sangat baik. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 81,46, dengan *gap* negatif sebesar 15,84 poin, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan standar profesionalitas, baik dari sisi pelatihan, sistem merit, maupun disiplin kerja.

Pemulihan terlihat pada tahun 2022, di mana indeks profesionalitas ASN meningkat drastis menjadi 98,8. Kenaikan sebesar 17,34 poin menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil melakukan perbaikan signifikan, kemungkinan melalui peningkatan kualitas pelatihan ASN, penguatan manajemen kinerja, dan penerapan sistem merit yang lebih ketat. Capaian ini merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan, dan menjadi indikator keberhasilan program pengembangan sumber daya aparatur yang efektif dan terukur.

Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 2023, indeks kembali turun tajam menjadi 64,39, mencatat GAP negatif sebesar 34,41 poin. Penurunan drastis ini menunjukkan adanya kemunduran signifikan dalam aspek profesionalitas ASN, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rotasi pegawai yang tidak berbasis kompetensi, lemahnya pengawasan, serta berkurangnya investasi dalam pengembangan kapasitas. Penurunan ini menjadi peringatan serius terhadap keberlangsungan kualitas tata kelola birokrasi jika tidak segera dilakukan langkah korektif yang terstruktur.

Pada tahun 2024, terjadi sedikit pemulihan dengan indeks naik menjadi 76,44, atau *gap* positif sebesar 12,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun belum kembali pada capaian optimal seperti tahun 2020 atau 2022, peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menstabilkan kembali sistem pembinaan dan pengembangan ASN. Secara keseluruhan, fluktuasi yang terjadi selama lima tahun terakhir menujukkan pentingnya konsist dalam manajemen sumber daya aparatur. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi jangka panjang dan berkelanjutan untuk menjaga serta meningkatkan profesionalitas ASN demi mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kredibel.

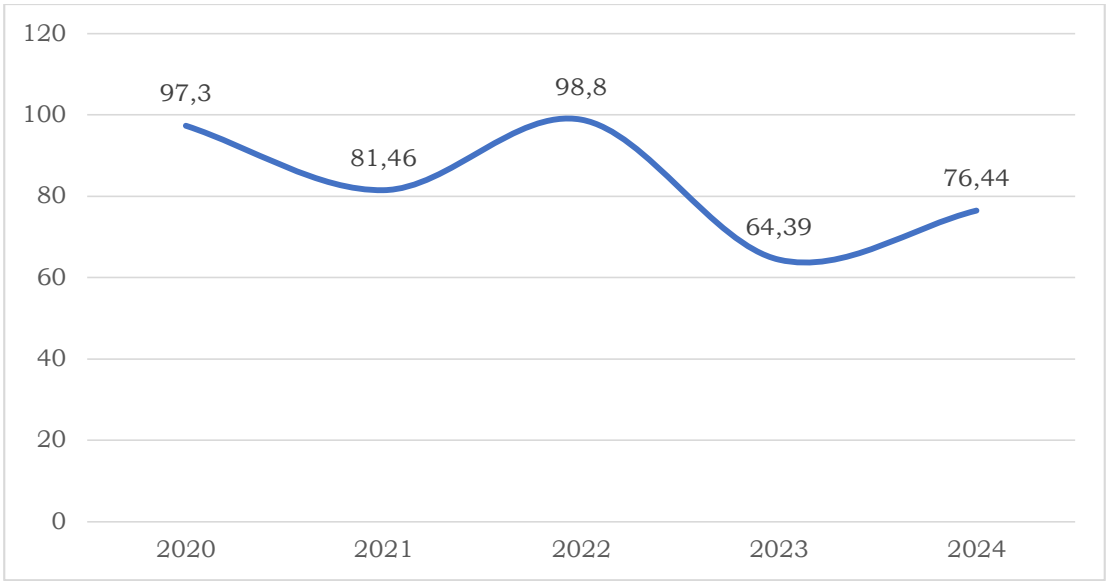

Gambar 2.44. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

1.2.2.1. Angka Kriminalitas

Daya saing iklim berinvestasi salah satunya diukur melalui angka kriminalitas. Perhitungan angka kriminalitas didasarkan pada data jumlah tindak kriminal tertentu dalam 1 tahun dan jumlah penduduk. Jenis kriminal yang diperhitungkan selama setahun antara lain meliputi berbagai kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang.

Angka kriminalitas ini menjadi indikator penting yang berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada **Gambar 2.45.**

ingkat angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, angka kriminalitas tercatat sebesar 3,59 per 1.000 penduduk, dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 4,92. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan angka tertinggi selama periode lima tahun, yaitu sebesar 5,57. Tren peningkatan ini dapat mencerminkan berbagai faktor seperti meningkatnya pelaporan masyarakat, keterbatasan penegakan hukum, atau munculnya permasalahan sosial baru akibat tekanan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, mulai tahun 2023, angka kriminalitas mulai menunjukkan penurunan dengan capaian sebesar 5,5, dan penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024 menjadi 3,7. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, baik melalui kebijakan preventif maupun penegakan hukum yang lebih responsif. Meskipun demikian, penting bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempertahankan tren penurunan

tersebut, sekaligus menangani akar penyebab kriminalitas secara sistematis dan berkelanjutan.

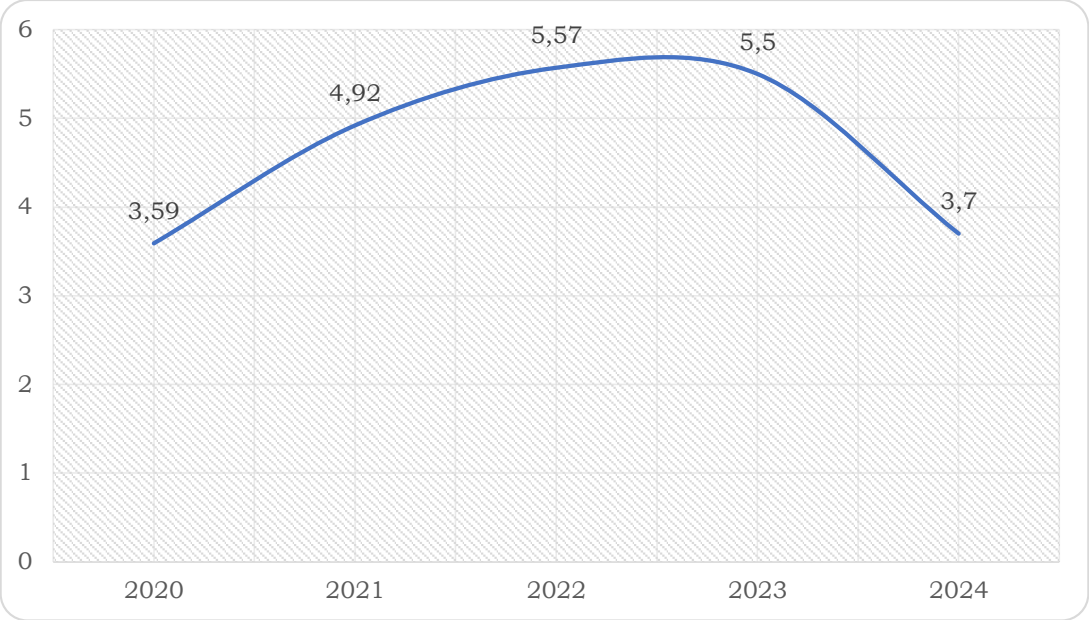

Gambar 2.45. Angka Kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2025

Angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Anambas di masa yang akan datang perlu diturunkan dan diantisipasi oleh aparat pemerintah dan perangkat keamanan kabupaten setempat agar tingkat keamanan masyarakat semakin meningkat dan tindak kriminalitas di masa depan dapat terkendali dengan baik.

1.2.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1.2.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator komposit yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan melalui efektivitas kebijakan publik, efisiensi birokrasi, dan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh skor 2,68, yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan Riau (3,38) dan skor nasional (3,44). Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Anambas masih relatif rendah jika dibandingkan dengan level provinsi maupun nasional.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan IDSD Anambas menjadi 2,97, dengan GAP positif sebesar 0,29 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun masih berada di bawah angka provinsi (3,40) dan nasional (3,43), peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek pendukung daya saing, seperti infrastruktur, kualitas pelayanan publik, serta efisiensi tata kelola daerah. Secara relatif, selisih antara Anambas dan nasional menurun dari 0,76 poin (2023) menjadi 0,46 poin (2024), menunjukkan bahwa Anambas perlahan mengejar ketertinggalan.

Meskipun terjadi peningkatan, kesenjangan antara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Provinsi Kepulauan Riau maupun nasional tetap signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan struktural dan geografis seperti keterisolasian

wilayah, keterbatasan konektivitas, serta rendahnya akses sumber daya masih menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan daya saing secara optimal. Oleh karena itu, intervensi strategis dari pemerintah daerah sangat diperlukan, khususnya dalam peningkatan kualitas SDM, efisiensi birokrasi, dan perbaikan infrastruktur dasar.

Secara umum, tren positif yang dicapai oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2023 ke 2024 mencerminkan adanya kemajuan yang patut diapresiasi, meskipun laju peningkatannya masih perlu dipercepat. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam menyusun strategi pembangunan yang berfokus pada keunggulan lokal akan menjadi kunci dalam memperkuat posisi daya saing Anambas di tingkat regional maupun nasional. Tanpa strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, capaian positif ini berisiko stagnan atau bahkan menurun kembali di tahun-tahun mendatang.

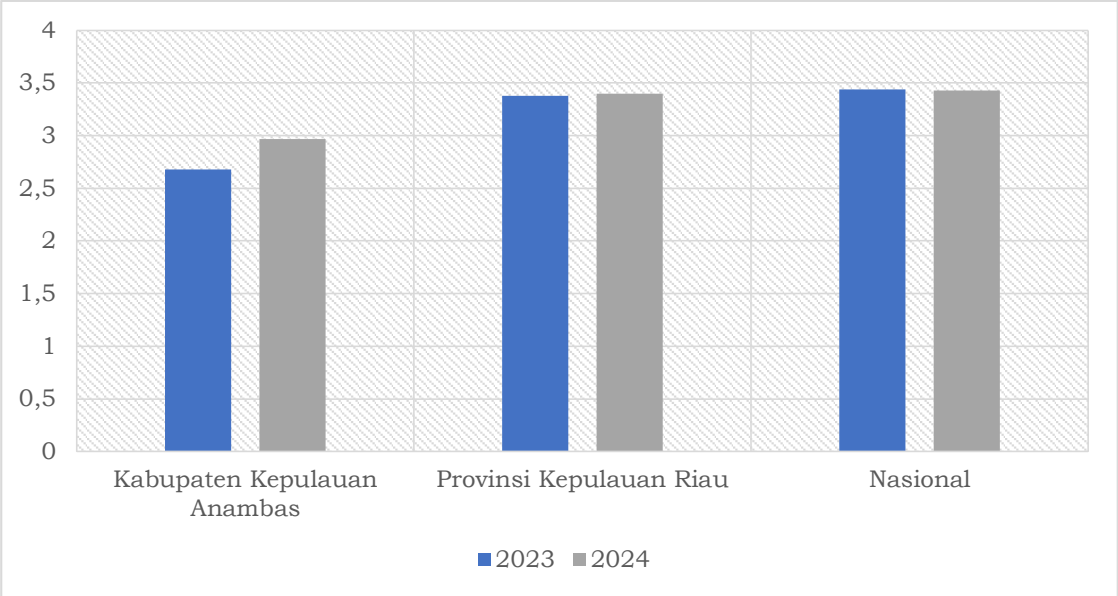

Gambar 2.46. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional pada Tahun 2023-2024
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025
Keterangan: data tahun 2020-2022 tidak tersedia

1.2.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1.2.4.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama dinyatakan dalam persen. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Kondisi APK tahun 2020–2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67. Persentase Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
<7 Tahun	39	38,67	64,79	64,12	67,27
7 – 12 Tahun	105,16	105,16	103,99	104,17	107,63
13 – 15 Tahun	106,28	106,28	103,17	96,95	89,8
16 – 18 Tahun	95,83	95,83	96,46	94,89	92,82

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Selama sembilan tahun terakhir, dapat dilihat bahwa APK Kabupaten Kepulauan Anambas untuk sekolah PAUD terjadi penurunan tren terutama untuk empat tahun terakhir, sedangkan untuk SD/MI/Paket A selalu melebihi angka 100 %. Begitu juga dengan nilai APK SMP/MTs/Paket B menunjukkan angka partisipasi diatas 100 persen. Kondisi ini dikarenakan proporsi yang digunakan adalah murid pada jenjang tertentu berapapun umurnya, turut dihitung. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah murid dari jenjang ini selalu melebihi jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama. Dengan demikian, indikasi partisipasi penduduk dalam pendidikan di jenjang ini memberikan gambaran yang baik, karena kondisi ini menunjukkan bahwa semua penduduk dalam usia jenjang pendidikan ini sedang bersekolah. Gambar 2.47 menunjukkan tren atau perubahan nilai APK dari tahun 2019-2023.

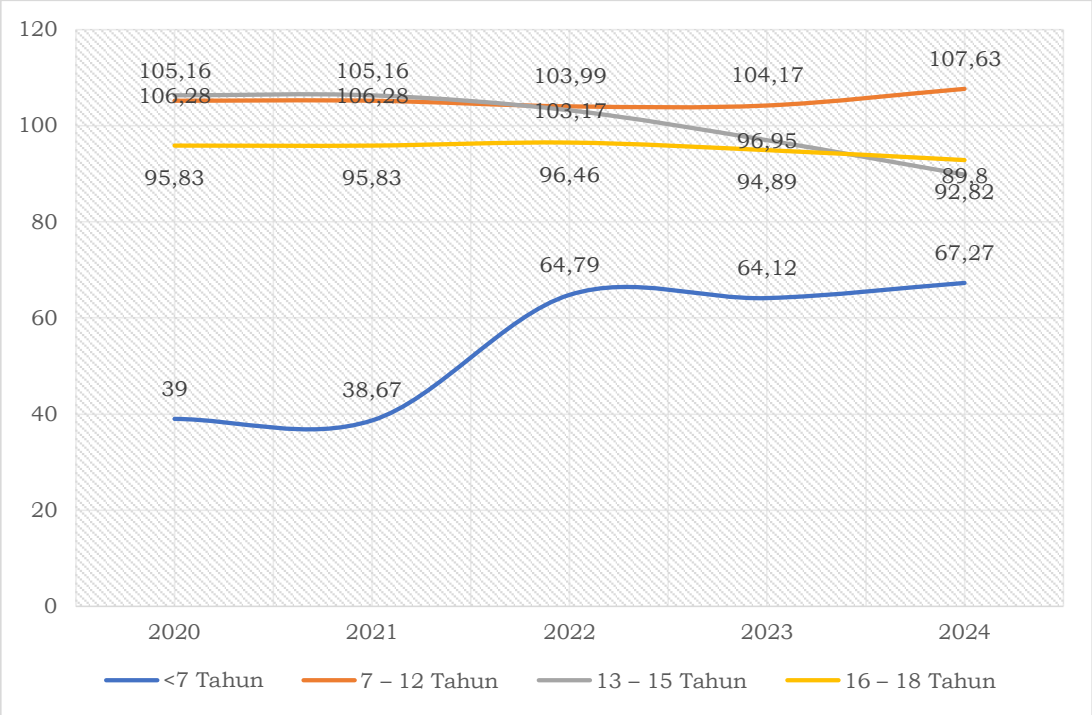

Gambar 2.47. Tren Angka Partisipasi Kasar Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

B. Angka Partisipasi Murni

Pada kelompok umur 7–12 tahun, yang merepresentasikan jenjang pendidikan dasar (SD/sederajat), APM relatif tinggi dan stabil dari tahun 2020 hingga 2023, berada di atas 95% dengan puncaknya pada tahun 2023 sebesar 99,8%. Namun,

terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 83%. Ini menunjukkan adanya GAP sebesar 16,8 poin dari tahun sebelumnya, yang dapat mengindikasikan adanya gangguan besar dalam akses atau partisipasi pendidikan dasar, seperti dampak sosial-ekonomi atau transisi kebijakan pendidikan yang mempengaruhi keterlibatan siswa usia sekolah dasar.

Untuk kelompok umur 13–15 tahun (jenjang SMP/sederajat), tren APM cenderung stagnan dari 2020 hingga 2022 di kisaran 87%, tetapi mulai menurun pada tahun 2023 menjadi 83,88%, dan jatuh lebih tajam lagi pada tahun 2024 menjadi 69%. Dengan demikian, GAP antara tahun 2022 dan 2024 mencapai 18,35 poin. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin sedikit anak usia SMP yang berpartisipasi dalam pendidikan formal, yang bisa diakibatkan oleh meningkatnya angka putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan lanjutan, atau keharusan bekerja lebih dini pada usia remaja.

Kelompok umur 16–18 tahun, yang mewakili jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK/sederajat), memiliki APM yang stagnan dan relatif rendah sepanjang lima tahun terakhir, berkisar di angka 77%. APM hanya sedikit berubah dari 77,33 pada tahun 2020 menjadi 77,67 pada tahun 2023, dan tahun 2024 sebesar 79,89. Berikut adalah kondisi APM Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2020 hingga tahun 2024.

Tabel 2.68. Persentase APM di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
7 – 12 Tahun	95,84	95,84	99,39	99,8	98,47
13 – 15 Tahun	87,63	87,63	87,35	83,88	86,61
16 – 18 Tahun	77,33	77,33	77,28	77,67	79,89

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

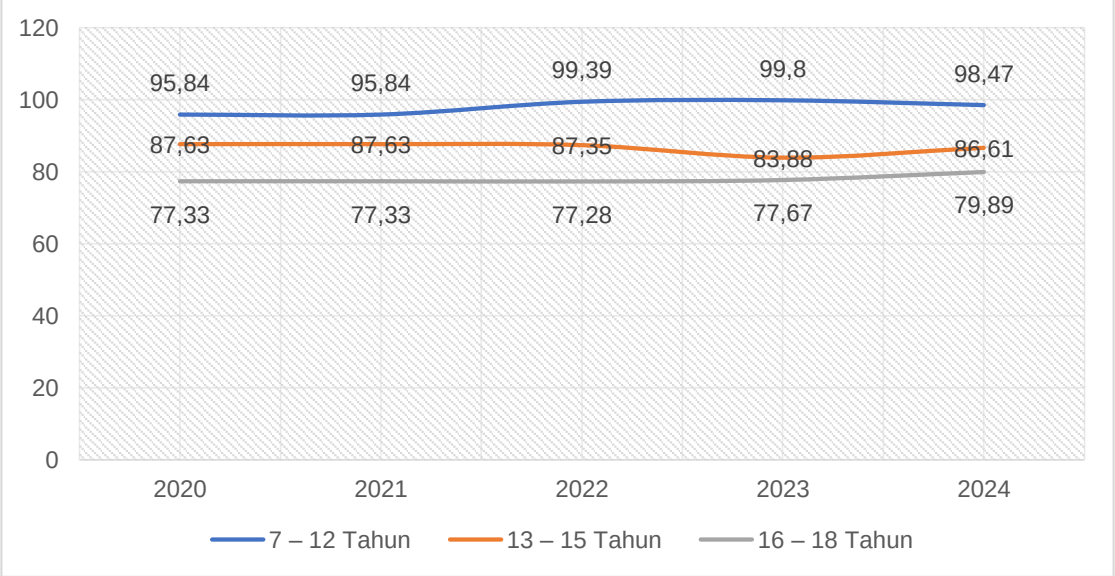

Gambar 2.48. APM Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa APM untuk jenjang SD/MI (7-12 tahun) mendominasi dengan pencapaian lebih dari 90 % selama 4 tahun terakhir. Adapun

APM jenjang SMP/MTS (13-15 tahun) menunjukkan tren yang cukup stabil di kisaran lebih dari 80 % sejak tahun 2020-2023 kemudian turun menjadi 69% di tahun 2024. Sementara APM jenjang SMA (16-18 tahun) memiliki tren yang cenderung positif hingga tahun 2023 namun tetap berada dibawah nilai APM lainnya.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Seperti terlihat pada Tabel 2.69 bahwa menunjukkan data persentase partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur dari tahun 2020 hingga 2024. Untuk kelompok usia 7–12 tahun, tingkat partisipasi sekolah sangat tinggi dan cenderung stabil, selalu berada di atas 98%. Bahkan pada tahun 2023, partisipasi mencapai puncaknya sebesar 99,8%, sebelum sedikit menurun menjadi 98,76% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar mengikuti pendidikan secara konsisten.

Kelompok usia 13–15 tahun juga menunjukkan tingkat partisipasi sekolah yang tinggi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan kelompok sebelumnya. Dalam rentang lima tahun, persentase berkisar antara 97,51% hingga 99,47%. Tahun 2024 mencatat angka tertinggi, yaitu 99,47%, yang menunjukkan adanya peningkatan akses atau keikutsertaan remaja tingkat sekolah menengah pertama.

Sebaliknya, kelompok usia 16–18 tahun memiliki tingkat partisipasi sekolah yang lebih rendah dibanding dua kelompok lainnya. Meskipun relatif stabil di kisaran 88% pada tahun 2020 hingga 2023, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 85,18%. Penurunan ini bisa menjadi indikator meningkatnya jumlah remaja yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas, baik karena faktor ekonomi, sosial, atau pilihan lain seperti memasuki dunia kerja.

Tabel 2.69. Persentase APS di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
7 – 12 Tahun	98,86	99,16	99,39	99,8	98,76
13 – 15 Tahun	97,58	97,91	97,69	97,51	99,47
16 – 18 Tahun	88,9	88,98	88,25	88,36	85,18

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

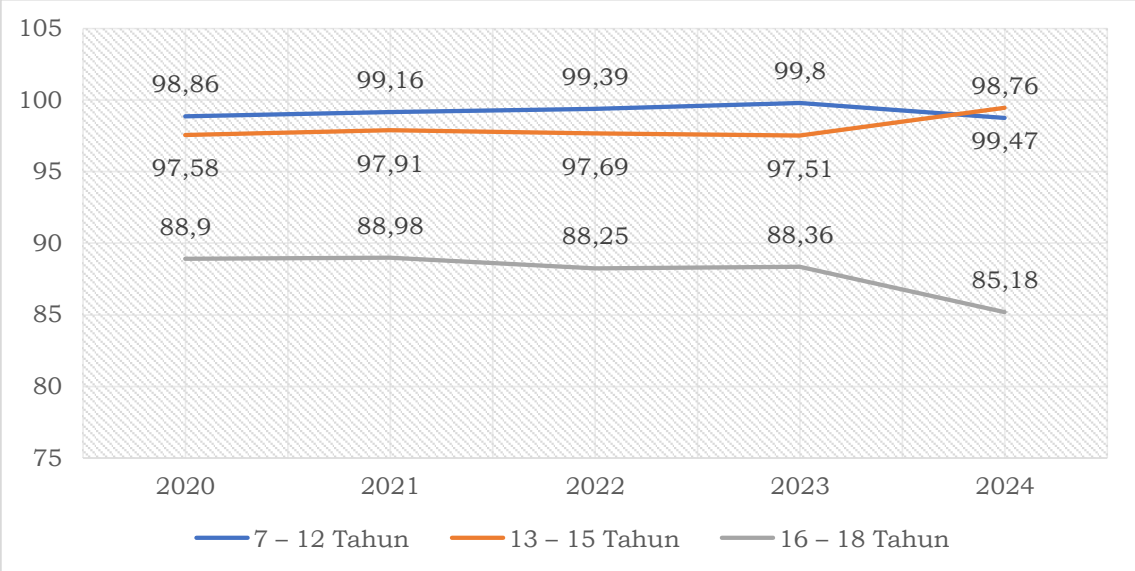

Gambar 2.49. APS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2025

D. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Berikut adalah kondisi angka putus sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas selama tahun 2020-2024 untuk jenjang wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 2.70. Persentase Angka putus sekolah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
7 – 12 Tahun	0,13	0,06	0,30	0	0,02
13 – 15 Tahun	1,28	0,48	0,66	0	0,48

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2025

Tabel 2.70 menampilkan data persentase anak yang tidak bersekolah berdasarkan kelompok umur dari tahun 2020 hingga 2024. Untuk kelompok usia 7–12 tahun, angka ketidakbersekolahan sangat rendah, selalu berada di bawah 0,5%. Bahkan pada tahun 2023, tidak tercatat adanya anak yang tidak bersekolah di kelompok umur ini (0%), menandakan keberhasilan dalam menjamin akses pendidikan dasar. Tahun dengan persentase tertinggi adalah 2022 (0,30%), tetapi masih tergolong sangat kecil.

Sementara itu, kelompok usia 13–15 tahun menunjukkan angka ketidakbersekolahan yang relatif lebih tinggi dibanding kelompok usia sebelumnya. Pada tahun 2020, tercatat 1,28% anak usia ini tidak bersekolah, dan meskipun angka tersebut menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya, fluktuasi tetap terjadi. Misalnya, setelah menyentuh angka 0% pada 2023, jumlah anak yang tidak bersekolah kembali meningkat menjadi 0,48% pada 2024. Meskipun trennya menurun secara umum, keberadaan anak usia SMP yang tidak bersekolah masih menjadi perhatian.

Dari data ini, terlihat bahwa program pendidikan dasar tampaknya telah berhasil menjangkau hampir seluruh anak usia 7–12 tahun. Namun, pada usia 13–15 tahun, walaupun situasinya membaik dari tahun ke tahun, masih ada tantangan dalam mempertahankan anak-anak agar tetap berada dalam sistem pendidikan. Ini bisa menjadi indikasi adanya faktor ekonomi, sosial, atau geografis yang menyebabkan sebagian kecil remaja berhenti sekolah di usia tersebut.

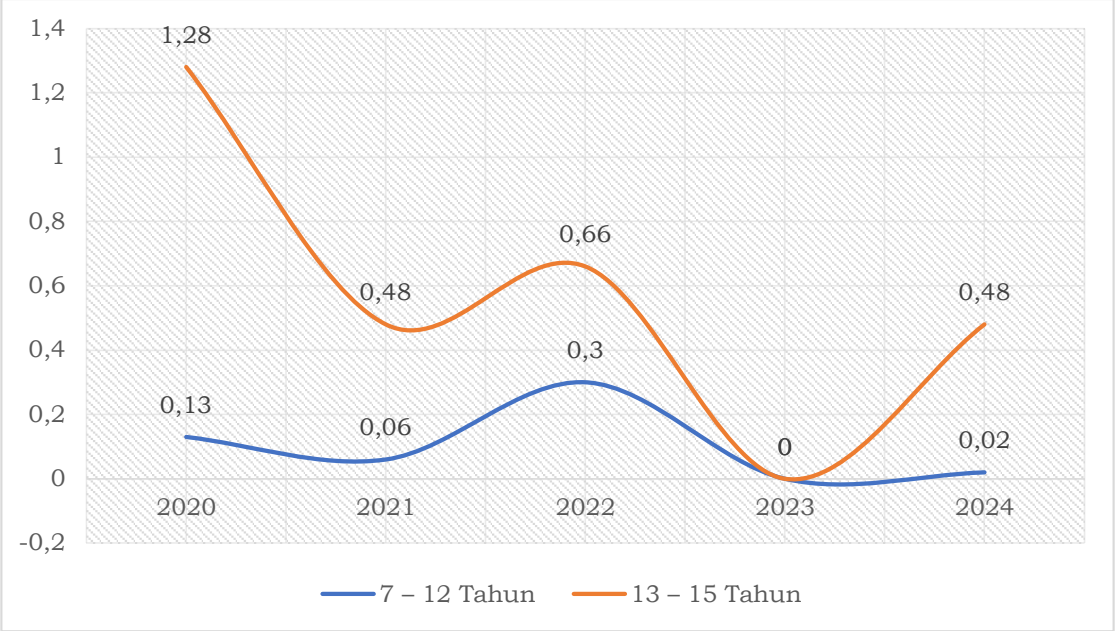

Gambar 2.50. Angka Putus Sekolah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2025

E. Akreditasi Sekolah

Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dengan terus meningkatkan sekolah yang terakreditasi. **Tabel 2.71** menunjukkan perkembangan persentase sekolah yang telah terakreditasi di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020–2024. Secara umum, terlihat adanya peningkatan signifikan dari tahun ke tahun di semua jenjang pendidikan, terutama pada jenjang PAUD dan TK. Pada tahun 2020, jumlah PAUD yang terakreditasi masih sangat rendah, yakni hanya 25,80%, namun melonjak drastis menjadi 100% pada tahun 2022. Meskipun sempat menurun menjadi 88,63% di tahun 2023, angka ini kembali naik ke 97,61% pada 2024. Artinya, dalam waktu lima tahun, ada lompatan besar dalam pencapaian akreditasi PAUD.

Untuk jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), tren yang serupa juga terlihat. Dari 48,14% pada 2020, akreditasi meningkat secara bertahap hingga mencapai 100% pada tahun 2022. Walau sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 92,85% pada 2023, seluruh TK kembali berhasil meraih status terakreditasi pada tahun 2024. GAP antara 2020 dan 2024 sebesar 51,86% mencerminkan peningkatan kinerja akreditasi yang cukup solid di jenjang ini, menunjukkan intervensi atau kebijakan yang berhasil mendorong proses akreditasi sekolah.

Jenjang Sekolah Dasar (SD) menunjukkan kenaikan akreditasi yang lebih stabil. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase sekolah terakreditasi tetap di angka 88,24%. Setelah itu, terjadi kenaikan bertahap hingga mencapai 100% di tahun 2024. Dengan GAP sebesar 11,76% dalam lima tahun, pencapaian ini menggambarkan bahwa sebagian besar SD sudah berada pada posisi yang baik sejak awal, namun tetap memerlukan waktu untuk memastikan semua sekolah memenuhi standar akreditasi.

Sementara itu, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencatat capaian tertinggi dan paling konsisten dibanding jenjang lainnya. Sejak tahun 2022, seluruh SMP di Kabupaten Kepulauan Anambas telah berstatus terakreditasi 100%, setelah sebelumnya bertahan di angka 94,81% selama dua tahun berturut-turut (2020 dan 2021). GAP sebesar 5,19% dari tahun 2020 ke 2022 ini menunjukkan bahwa sebagian besar SMP sudah sangat siap dalam proses akreditasi sejak awal, dan hanya perlu sedikit perbaikan untuk mencapai angka sempurna. Keseluruhan data ini memperlihatkan kemajuan signifikan dalam kualitas lembaga pendidikan di Anambas, dengan capaian akhir 2024 yang menunjukkan hampir seluruh lembaga pendidikan telah memenuhi standar mutu nasional.

Tabel 2.71. Sekolah yang berakreditasi di Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2023

Sekolah yang sudah terakreditasi	2020	2021	2022	2023	2024
Paud	25,80	36,07	100	88,63	97,61
TK	48,14	51,85	100	92,85	100
SD	88,24	88,24	92,96	95,58	100
SMP	94,81	94,81	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2025

F. Rasio Murid dan Guru

Berdasarkan data lapangan, jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 terdiri dari 31 PAUD, 21 TK, 58 SD, 27 SMP, dan 13 SMA. Penyebaran sarana pendidikan di wilayah ini cukup baik karena jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP sudah tersebar di seluruh kecamatan, sementara jenjang pendidikan SMA/SMK sudah tersebar di sembilan kecamatan. Kondisi fasilitas pendidikan untuk jenjang SD hingga SMA lebih dari 90% berada dalam kondisi baik berdasarkan data tahun 2020 (Tabel 2.53). Selain itu, wilayah ini juga memiliki lembaga pendidikan lainnya sebagai sarana peningkatan dan pengembangan pendidikan bagi siswa di luar pendidikan formal.

Untuk jenjang SD, rasio murid-guru adalah 8:1. Untuk jenjang SMP, rasio murid-guru adalah 7:1. Untuk jenjang SMA, rasio murid-guru adalah 9:1 (Tabel 2.54). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa setiap SD/MI harus memiliki satu guru untuk setiap 32 siswa dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 siswa, rasio guru terhadap murid di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dikatakan ideal. Rasio murid dan guru di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72. Rasio Murid dan Guru di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2023

Jenjang Pendidikan		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI						
	Rasio Murid-Guru	16	16	8	8	8
SMP/MTs						
	Rasio Murid-Guru	11	11	7	7	7
SMA/MA						
	Rasio Murid-Guru	8	8	9	9	9

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2024

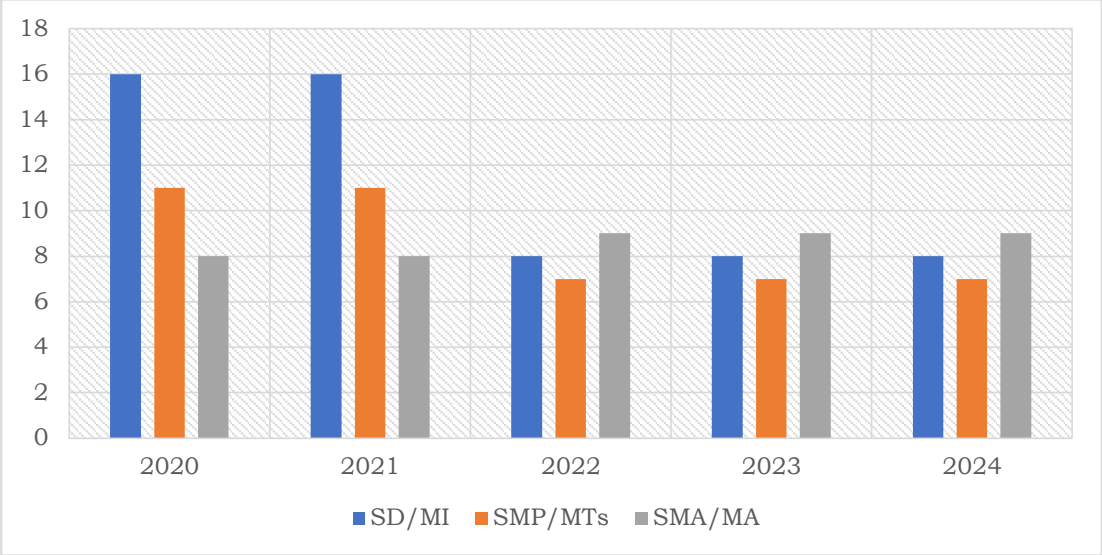

Gambar 2.51. Rasio Murid dan Guru di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2020-2025

1.2.4.2. Kesehatan

Selama lima tahun terakhir, jumlah rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Anambas tetap stagnan sebanyak 3 unit, tanpa ada penambahan dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun tidak ada peningkatan kuantitas, rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 1,20, setelah sebelumnya stabil di kisaran 0,62–0,63. Hal ini bisa mengindikasikan adanya penurunan jumlah penduduk atau peningkatan daya layanan rumah sakit yang memengaruhi rasio tersebut.

Jumlah puskesmas mengalami peningkatan dari 8 unit pada 2020–2021 menjadi 10 unit sejak tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya penguatan layanan kesehatan dasar. Namun, rasio puskesmas per satuan penduduk menunjukkan anomali: dari 1,39 (2020) dan 1,35 (2021) menurun drastis menjadi 0,2 (2022–2023), lalu melonjak tajam menjadi 4,01 di tahun 2024. GAP ini menunjukkan kemungkinan adanya perubahan cara perhitungan atau perubahan signifikan pada jumlah penduduk, dan perlu verifikasi data lebih lanjut untuk memastikan validitas tren tersebut.

Fasilitas pendukung lainnya mengalami dinamika yang menarik. Jumlah puskesmas keliling, yang sangat penting untuk wilayah kepulauan, tetap di angka 18 unit dari 2020 hingga 2023, namun turun drastis menjadi 5 unit pada 2024. Sebaliknya, jumlah puskesmas pembantu sempat menurun dari 40 (2020–2021) ke 38 (2022–2023), lalu naik menjadi 44 unit pada 2024. Balai Pengobatan Umum tetap 3 unit selama empat tahun, lalu bertambah menjadi 6 unit pada 2024, menunjukkan peningkatan layanan non-rawat inap. Sementara itu, jumlah Posyandu konsisten di 68 unit, menunjukkan keberlanjutan layanan kesehatan ibu dan anak. Secara keseluruhan, fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan kemajuan dalam jumlah dan kapasitas pada tahun 2024, meskipun terdapat beberapa penurunan signifikan di jenis layanan tertentu seperti

puskesmas keliling. Berikut adalah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024:

Tabel 2.73. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3
2	Jumlah Puskesmas	8	8	10	10	10
3	Jumlah Puskesmas Keliling	18	18	18	18	5
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	40	40	38	38	44
5	Balai Pengobatan Umum	3	3	3	3	6
6	Posyandu	68	68	68	68	68
7	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,63	0,62	0,62	0,62	1.20
8	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1,39	1,35	0,2	0,2	4,01

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan dinamika yang cukup bervariasi. Dokter umum, sebagai garda depan layanan medis, mengalami fluktuasi kecil dari tahun 2020 hingga 2023, yakni berada di kisaran 47–49 orang, namun turun drastis menjadi 40 orang pada 2024. Sementara itu, jumlah dokter spesialis meningkat signifikan pada 2021 dari 7 menjadi 14, dan tetap stabil hingga 2024. Untuk dokter gigi, terjadi penurunan dari 10 orang pada 2021 menjadi 6 orang sejak 2022 hingga 2024, yang menandakan keterbatasan layanan kesehatan gigi di daerah ini.

Profesi tenaga kesehatan lain seperti perawat dan bidan menunjukkan peningkatan berarti. Jumlah perawat naik dari 162 orang (2020) menjadi 258 orang pada 2024, menunjukkan upaya penguatan tenaga keperawatan. Demikian pula, bidan meningkat dari 107 menjadi 188 orang dalam kurun waktu yang sama. Profesi farmasi juga bertumbuh dari 13 menjadi 29 orang, sedangkan jumlah ahli gizi mengalami pertumbuhan dari 14 (2020) menjadi 23 orang pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 21 pada 2024.

Namun, yang paling mencolok adalah penurunan drastis pada rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2024. Rasio dokter turun dari 1,1 (2023) menjadi hanya 0,121, dan rasio tenaga medis dari 8,69 menjadi 0,987. GAP ini sangat besar dan tampaknya tidak sejalan dengan jumlah absolut tenaga kesehatan yang justru meningkat (kecuali dokter umum). Hal ini dapat mengindikasikan perubahan besar dalam jumlah penduduk, metode perhitungan rasio, atau potensi kesalahan pencatatan data. Fenomena ini perlu ditindaklanjuti secara serius untuk memastikan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas tetap terjaga.

Tabel 2.74. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter Umum	49	47	51	49	40
Dokter Spesialis	7	14	14	13	14
Dokter Gigi	7	10	7	6	6
Perawat	162	225	225	205	258

Bidan	107	154	158	148	188
Farmasi	13	14	27	27	29
Ahli gizi	14	20	23	23	21
Rasio dokter per satuan penduduk	1,33	1,50	1,1	1,1	0,121
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	6,24	8,47	8,69	8,69	0,987

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan jumlah kasus beberapa jenis penyakit di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, tren penyakit menular seperti malaria menunjukkan perbaikan signifikan. Kasus malaria, misalnya, menurun drastis dari 32 kasus pada 2020 menjadi 0 kasus mulai tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pencegahan dan pengendalian malaria di wilayah tersebut.

Namun, berbeda dengan malaria, kasus TB Paru justru menunjukkan peningkatan sejak 2021. Setelah sempat turun dari 287 kasus pada 2020 menjadi 58 kasus di 2021, angka ini kembali naik secara bertahap hingga mencapai 119 kasus pada 2024. Kenaikan ini dapat menjadi indikator meningkatnya pelaporan atau deteksi kasus, atau justru lemahnya pengendalian penyakit menular saluran pernapasan ini. Demikian pula dengan kasus pneumonia, yang sempat tinggi pada 2021 (187 kasus) namun menurun drastis menjadi hanya 1 kasus pada 2024.

Penyakit diare dan DBD (Demam Berdarah Dengue) juga memperlihatkan fluktuasi yang cukup tinggi. Diare merupakan penyakit dengan jumlah kasus tertinggi dalam lima tahun, dimulai dari 923 kasus di tahun 2020 dan meskipun menurun di tahun-tahun berikutnya, angkanya tetap signifikan (240 kasus di 2024). Untuk DBD, peningkatan tajam terjadi pada tahun 2022 dengan 58 kasus, kemudian mengalami penurunan hingga 30 kasus di 2024. Ini menandakan bahwa sanitasi dan pengendalian vektor masih menjadi tantangan penting.

Sementara itu, penyakit kusta meskipun jumlahnya kecil, mengalami kenaikan dari hanya 1 kasus pada 2020 dan 2021 menjadi 4 kasus pada 2024. Terjadinya lonjakan kasus kusta di Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2020–2024 dapat dikaitkan dengan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan khusus dalam aspek kesehatan masyarakat. Kondisi geografis yang terisolasi dan tersebar di pulau-pulau kecil menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, baik dalam hal jarak, sarana transportasi, maupun ketersediaan tenaga medis yang terampil dalam mendeteksi dini penyakit kusta. Selain itu, faktor sosial budaya seperti rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala awal kusta serta adanya stigma yang melekat terhadap penderita turut menghambat upaya deteksi dan pengobatan sejak dini. Sedangkan campak hanya muncul pada 2022 dengan 5 kasus. Tidak tercatat adanya kasus tetanus selama lima tahun tersebut, yang merupakan pencapaian positif. Untuk AIDS, data bersifat kumulatif dan cukup berfluktuasi, dengan 37 kasus tercatat pada 2024. Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pengendalian penyakit tertentu, seperti malaria dan pneumonia, beberapa penyakit menular lainnya seperti TB Paru dan diare tetap memerlukan perhatian dan intervensi serius.

Tabel 2.75. Jumlah kasus penyakit yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Kasus penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
Malaria	32	18	0	0	0
TB Paru	287	58	75	88	119
Pneumonia	0	187	22	13	1
Kusta	1	1	0	2	4
Tetanus	0	0	0	0	0
Campak	0	0	5	0	0
Diare	923	401	242	193	240
DBD	7	8	58	44	30
AIDS (Kumulatif)	44	15	18	3	14

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam tiga tahun pertama. Tahun 2020 tercatat sebesar 114, melonjak drastis menjadi 344 pada 2021, sebelum menurun menjadi 252 pada 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, angka kematian ibu dilaporkan nol, yang dapat mencerminkan keberhasilan besar dalam pelayanan kesehatan ibu, meskipun juga patut ditelaah apakah angka tersebut mencerminkan realitas atau adanya potensi kekurangan pelaporan.

Prevalensi stunting pada balita, yang merupakan indikator penting status gizi masyarakat, menunjukkan tren perbaikan. Dimulai dari 21,7% pada 2021, prevalensinya menurun menjadi 14% pada 2022, sempat naik sedikit menjadi 15,2% pada 2023, dan 15,8% pada 2024. Sejalan dengan upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan bertahap dari 90% pada 2020 menjadi 96% pada 2023. Pada tahun 2024 mencapai 99,2% angka ini menunjukkan perbaikan akses dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan formal. Hal ini berkontribusi besar dalam menekan angka kematian ibu dan perbaikan status gizi balita, yang terlihat nyata dari data yang tersedia. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menunjukkan progres positif yang signifikan dalam kualitas layanan kesehatan dasar di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.76. Angka Kematian Ibu, Prevalensi Stunting, dan Persentase angka melahirkan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	344	252	0	0
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	-	21,7	14	15,2	15,8
Persentase angka melahirkan yang ditolong tenaga kesehatan	90	93	93	96	99,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Tabel 2.77. Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2023

Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan	2020	2021	2022	2023
Tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro) (kondom)	10	3	11	11

HIV/AIDS	10	0	34	0

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sangat penting agar fasilitas infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana visi penataan ruang yang dituangkan dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kebijakan terkait tata ruang diarahkan untuk mewujudkan misi penataan ruang, yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Perumahan dan permukiman akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Secara umum kondisi perumahan dan permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas relatif baik, meskipun masih terdapat kantong-kantong kawasan perumahan yang kondisinya cukup memprihatinkan, seperti permukiman nelayan. Kepadatan bangunan rumah di wilayah ini bervariasi, kepadatan perumahan padat berada pada pusat-pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang mengelompok dalam suatu kawasan. Sedangkan kepadatan sedang hingga rendah berada di wilayah perdesaan yang menyebar pada blok-blok kawasan.

Indikator Perumahan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tabel 2.77 menampilkan perkembangan indikator luas lantai rumah < 20 m² menunjukkan tren yang cukup positif pada periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan luas lantai di bawah 20 m² tercatat sebesar 3 persen, dan mengalami penurunan secara bertahap hingga hanya 0,2 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas hunian masyarakat, baik melalui peningkatan daya beli rumah tangga maupun melalui intervensi pemerintah dalam program perumahan layak huni. Indikator ini penting karena luas lantai rumah yang memadai merupakan salah satu standar minimum dalam penilaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota juga memperlihatkan perkembangan signifikan selama periode yang sama. Pada tahun 2020, tingkat kemantapan jalan berada di angka 34,02 persen dan relatif stagnan hingga tahun 2023 dengan kenaikan yang kecil. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang cukup besar hingga mencapai 46,38 persen. Perbaikan ini mencerminkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun terakhir periode pengamatan. Kemantapan jalan yang lebih tinggi tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas penduduk, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan konektivitas wilayah, distribusi barang dan jasa, serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, indikator persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, angka ini hanya 0,01 persen, namun meningkat drastis pada tahun 2021 hingga 14,11 persen. Setelah itu, pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 13,23 persen dan 13,16 persen, sebelum kembali meningkat ke 14,66 persen pada tahun 2024. Fluktuasi ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan keberlanjutan sistem layanan air limbah, baik

dari aspek ketersediaan infrastruktur, pengelolaan teknis, maupun partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengalami kemajuan di beberapa aspek infrastruktur dasar dan kualitas hunian masyarakat. Peningkatan signifikan dalam indikator luas lantai rumah dan tingkat kemantapan jalan mencerminkan keberhasilan pembangunan pada aspek fisik. Namun, masih terdapat tantangan dalam konsistensi pelayanan pengolahan air limbah domestik yang memerlukan penguatan regulasi, pendanaan, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penguatan sektor infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pelayanan publik agar dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Indikator Perumahan di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.78**.

Tabel 2.78. Indikator Perumahan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Lantai < 20 m² (%)	3	2	2,5	0,9	0,2
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	34,02	34,17	34,53	34,61	46,38
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,01	14,11	13,23	13,16	14,66

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga mencakup ketersediaan tempat pemakaman umum. Tabel di bawah ini menyajikan data rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk (%) di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2023 dan 2024. Data menunjukkan bahwa pendataan baru dimulai pada tahun 2023, sehingga tidak terdapat nilai untuk tahun 2020 hingga 2022. Rasio ini penting sebagai indikator ketersediaan lahan pemakaman yang layak sesuai dengan jumlah penduduk di tiap kecamatan.

Dari seluruh kecamatan yang tercatat, Jemaja Barat memiliki rasio TPU tertinggi yakni 0,38% pada tahun 2023 dan tetap stabil pada 2024. Disusul oleh Siantan Utara dengan rasio 0,30%, serta Siantan Tengah dan Jemaja Timur yang masing-masing berada pada angka 0,23% dan 0,22%. Ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut relatif memiliki ketersediaan TPU yang lebih memadai dibanding kecamatan lain.

Sementara itu, kecamatan Siantan memiliki rasio terendah yaitu 0,04% pada 2023 dan hanya naik sedikit menjadi 0,06% pada 2024, yang mengindikasikan potensi kekurangan lahan pemakaman umum di wilayah tersebut. Kecamatan Kute Siantan dan Palmatak juga memiliki rasio cukup rendah, masing-masing 0,14% dan 0,17% pada 2024, yang mungkin perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah terkait penyediaan lahan pemakaman.

Secara keseluruhan, tidak ada perubahan signifikan antar tahun 2023 dan 2024 di sebagian besar kecamatan, menandakan bahwa kapasitas TPU relatif stagnan. Meskipun sebagian kecamatan telah memiliki rasio yang cukup tinggi, beberapa

lainnya masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan pembangunan TPU perlu menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah yang berkelanjutan, agar seluruh penduduk memiliki akses pemakaman yang layak. Rasio TPU per satuan penduduk disajikan pada **Tabel 2.79**.

Tabel 2.79. Rasio TPU per satuan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024 (%)

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jemaja	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21
2	Jemaja Timur	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22
3	Siantan Selatan	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20
4	Siantan	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06
5	Siantan Timur	0,18	0,19	0,20	0,20	0,19
6	Siantan Tengah	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23
7	Palmatak	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
8	Jemaja Barat	0,37	0,37	0,37	0,38	0,38
9	Siantan Utara	0,29	0,29	0,39	0,30	0,30
10	Kute Siantan	0,11	0,11	0,12	0,12	0,14

Sumber: Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat), 2025

Tabel 2.80 menunjukkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%) di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024. Rasio ini mencerminkan ketersediaan tempat ibadah yang proporsional terhadap jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Secara umum, hampir semua kecamatan menunjukkan tren yang cenderung stabil atau sedikit menurun, menandakan minimnya pembangunan tempat ibadah baru dalam lima tahun terakhir.

Kecamatan dengan rasio tertinggi secara konsisten adalah Siantan Selatan, dengan rasio berkisar antara 0,55% pada 2020 hingga 0,53% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa daerah ini relatif memiliki akses yang baik terhadap fasilitas tempat ibadah. Disusul oleh Jemaja Timur dan Siantan Timur, yang juga memiliki rasio di atas 0,4% sepanjang periode. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan, secara umum ketersediaan tempat ibadah di kecamatan-kecamatan ini tetap memadai.

Sebaliknya, kecamatan dengan rasio terendah adalah Palmatak, dengan angka yang stagnan di 0,22% sejak 2021 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan tempat ibadah di wilayah tersebut belum mengalami perubahan signifikan. Siantan Tengah dan Jemaja Barat juga memiliki rasio yang relatif rendah dan stabil, masing-masing di kisaran 0,26% dan 0,28%, yang bisa menjadi perhatian dalam pemerataan akses terhadap fasilitas keagamaan.

Menariknya, Siantan Utara sempat mengalami penurunan dari 0,36% pada 2020 menjadi 0,29% pada 2022, namun kembali naik ke 0,35% pada 2024, menunjukkan adanya peningkatan fasilitas keagamaan yang mungkin dibangun dalam dua tahun terakhir. Secara keseluruhan, meskipun tidak terdapat lonjakan signifikan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan telah memiliki rasio tempat ibadah yang stabil, namun tetap ada kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas tersebut di wilayah dengan rasio terendah demi pemerataan akses pelayanan keagamaan.

Tabel 2.80. Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024 (%)

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jemaja	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34
2	Jemaja Timur	0,46	0,45	0,43	0,44	0,43
3	Siantan Selatan	0,55	0,54	0,52	0,54	0,53
4	Siantan	0,30	0,29	0,28	0,28	0,27
5	Siantan Timur	0,44	0,43	0,41	0,42	0,41
6	Siantan Tengah	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
7	Palmatak	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22
8	Jemaja Barat	0,29	0,28	0,27	0,29	0,28
9	Siantan Utara	0,36	0,30	0,29	0,30	0,35
10	Kute Siantan	0,36	0,32	0,31	0,34	0,33

Sumber: Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat), 2025

1.2.4.4. Ketenagakerjaan

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah pencari kerja terdaftar mengalami fluktuasi cukup tajam. Di tahun 2020 tercatat 131 orang, turun menjadi 122 orang pada 2021, lalu naik signifikan menjadi 185 orang pada 2022. Uniknya, pada 2023 terjadi penurunan drastis hanya menjadi 40 orang, namun kemudian melonjak tajam menjadi 226 orang pada 2024, yang menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan tajam ini bisa mengindikasikan meningkatnya kesadaran pencari kerja untuk mendaftar secara resmi, atau bisa juga menunjukkan naiknya jumlah angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar.

Dari sisi penempatan tenaga kerja, tren juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Penempatan terbanyak terjadi pada tahun 2022 sebanyak 30 orang, sementara pada 2023 hanya 7 orang yang berhasil ditempatkan. Tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan menjadi 21 orang, namun jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang meningkat, angka ini masih tergolong rendah. Hal ini tergambar jelas dari persentase penempatan, yang hanya 10,76% di tahun 2024, lebih rendah dari capaian tahun 2021 yang sempat menyentuh 23%.

Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan jumlah pencari kerja yang terdaftar, sistem penempatan kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di daerah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan link and match antara pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja, serta dalam menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai agar daya serap tenaga kerja meningkat secara berkelanjutan.Jumlah pencari kerja terdaftar dan penempatan kerja disajikan pada **Tabel 2.81**.

Tabel 2.81. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Jumlah Pencari Terdaftar dan Penempatan Kerja	2020	2021	2022	2023	2024
Pencari Kerja Terdaftar (orang)	131	122	185	40	226
Penempatan Tenaga Kerja (orang)	15	28	30	7	21
Persentase Pencari Kerja ditempatkan (%)	11,5	23,0	16,2	5,7	10,76

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024; DKUMPP, 2025

1.2.4.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, menurunnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sepanjang periode 2020 hingga 2024, jumlah kursi DPRD yang diduduki oleh perempuan di Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung stabil dengan 3 kursi dari total 20 anggota, kecuali pada tahun 2022 yang sempat mengalami peningkatan menjadi 4 kursi. Dengan demikian, proporsi keterwakilan perempuan di DPRD selama lima tahun ini berkisar antara 15% hingga 20%.

Tahun 2022 menjadi capaian tertinggi dalam hal representasi gender di parlemen daerah, yaitu 20%, yang berarti 1 dari setiap 5 anggota DPRD adalah perempuan. Namun, capaian ini tidak berlanjut karena pada tahun berikutnya (2023 dan 2024) kembali turun ke angka 15%. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif belum stabil dan masih sangat bergantung pada dinamika politik dan kebijakan afirmatif partai politik pada saat pemilu.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah masih jauh dari proporsi ideal 30% sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan afirmatif nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik lokal, baik melalui penguatan kapasitas calon legislatif perempuan maupun dorongan kebijakan partai yang lebih inklusif terhadap perempuan.Perkembangan partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan dan swasta ditunjukkan pada **Tabel 2.82** dan **Tabel 2.83**.

Tabel 2.82. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	903	877	951	928	1360
Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta	3.456	3.587	4.144	4.868	5.863
jumlah pekerja perempuan	7.262	8.420	8.818	8.975	9.817
Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	47,59	42,60	46,99	54,23	59,72

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2024

Tabel 2.83. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	3	3	4	3	3
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	20	20	20	20	20
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	15	15	20	15	15

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.6. Pangan

Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkal/kap/hari. Jika konsumsi per kapita kurang atau lebih kecil dari 70 % dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; sekitar 70 %-90 % dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90 % dari AKG termasuk kategori rawan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 53,31 dan naik secara bertahap menjadi 53,51 pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2023 dengan nilai indeks mencapai 55,72, menandakan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Namun, pada tahun 2024, indeks sedikit menurun menjadi 55,34. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal, yang mengindikasikan bahwa secara umum, ketahanan pangan di Anambas mengalami kemajuan.

Di sisi lain, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) justru menunjukkan tren yang berlawanan. Pada tahun 2020, prevalensi masih tergolong rendah yaitu sebesar 7,24%, namun angka ini terus meningkat tajam dari tahun ke tahun. Pada 2021 naik menjadi 9,6%, dan terus melonjak hingga mencapai 13,71% pada tahun 2023, kemudian stagnan di angka yang sama pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan bahwa meskipun indeks ketahanan pangan secara umum membaik, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh konsumsi pangan yang cukup dan bergizi, baik karena masalah distribusi, daya beli, maupun keterbatasan sumber daya lokal.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara peningkatan sistem ketahanan pangan di tingkat makro dengan realitas konsumsi di tingkat rumah tangga. Dengan kata lain, perbaikan indeks belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kondisi konsumsi pangan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, ke depan perlu diambil langkah-langkah strategis yang lebih menyentuh aspek kerentanan sosial-ekonomi, seperti peningkatan aksesibilitas pangan, penguatan ekonomi keluarga, serta intervensi gizi masyarakat, guna menurunkan angka ketidakcukupan konsumsi pangan secara signifikan dan merata.

Tabel 2.84. Indeks ketahanan pangan dan Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan pangan	53,31	53,51	53,51	55,72	55,34
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,24	9,6	11,18	13,71	13,71

Sumber: Badan Ketahanan Pangan 2025

1.2.4.7. Pertanahan

Dalam periode empat tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat peningkatan signifikan dalam luas tanah yang telah memiliki sertifikat. Pada tahun 2020, luas lahan bersertifikat baru mencapai sekitar 8,36 juta m², yang setara

dengan hanya 1,42% dari total luas lahan. Namun, angka ini melonjak tajam pada tahun 2021 menjadi 41,64 juta m² atau 7,06%, menandai adanya program percepatan sertifikasi lahan yang cukup masif.

Peningkatan tersebut berlanjut di tahun 2022, dengan total luas lahan bersertifikat mencapai 75,04 juta m², sehingga persentasenya naik menjadi 12,72%. Ini merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan dan menunjukkan bahwa sebagian besar dari upaya sertifikasi lahan terjadi dalam kurun waktu dua tahun, yakni 2021 dan 2022. Progres ini sangat penting karena sertifikasi tanah berperan besar dalam kepastian hukum atas kepemilikan, pengembangan ekonomi lokal, serta akses masyarakat terhadap permodalan.

Pada tahun 2023, luas tanah bersertifikat di Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebesar 75.036.984 m², yang mewakili 12,68% dari total luas lahan yang ada. Angka ini menunjukkan kemajuan yang cukup stabil dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun jika dibandingkan dengan 2022, terjadi sedikit penurunan dari segi persentase (dari 12,72% ke 12,68%), meskipun secara volume luasan sertifikasi hampir stagnan. Ini menandakan bahwa tidak banyak lahan baru yang disertifikasi pada tahun tersebut atau adanya perubahan dalam total luas lahan terdaftar secara administratif.

Namun pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan baik secara nominal maupun persentase. Luas tanah bersertifikat meningkat menjadi 89.777.922 m², yang setara dengan 22,72% dari total luas lahan. Dibandingkan tahun 2023, terjadi peningkatan seluas 14.740.938 m² atau selisih 10,04 persen poin dalam persentase. Ini merupakan lonjakan yang besar dan menunjukkan adanya percepatan atau optimalisasi program sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tahun tersebut.

GAP antara tahun 2023 dan 2024, sebesar 10,04%, menandakan capaian yang sangat positif. Kemungkinan hal ini merupakan hasil dari program sertifikasi massal, penertiban aset tanah masyarakat, atau kolaborasi lintas sektor dalam percepatan legalisasi aset tanah. Peningkatan ini tentu berdampak langsung pada kepastian hukum kepemilikan tanah, peningkatan nilai ekonomi aset, serta memperkuat tata kelola pertanahan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.85**.

Tabel 2.85. Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas tanah bersertifikat (m²)	8.364.010	41.636.548	75.044.226	75.036.984	89.777.922
Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1,42	7,06	12,72	12,68	22,72

Sumber: BPN Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.8. Lingkungan Hidup

Data pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, baik dari sisi jumlah timbulan sampah maupun pengelolaannya. menunjukkan bahwa timbulan sampah di

Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 4.702,70 ton/tahun, dan meningkat menjadi 5.375,79 ton/tahun pada tahun 2024. GAP kenaikan timbulan sampah sebesar 673,09 ton (atau +14,3%) menunjukkan bahwa produksi sampah meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas konsumsi masyarakat.

Pada aspek pengurangan sampah, tren yang ditunjukkan cenderung positif. Persentase pengurangan meningkat dari 4,64% (2020) menjadi 6,21% (2024), sehingga terdapat GAP sebesar +1,57 poin persentase. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesadaran masyarakat, serta efektivitas program pengurangan sampah dari sumbernya seperti kegiatan daur ulang, edukasi 3R, dan kebijakan pengurangan penggunaan bahan sekali pakai. Meski demikian, peningkatan ini masih belum cukup untuk menekan laju pertambahan timbulan sampah secara keseluruhan.

Sebaliknya, penanganan sampah mengalami fluktuasi dan bahkan penurunan tajam. Pada tahun 2020, penanganan sampah mencapai 6,99%, namun turun drastis menjadi 0,96% pada 2022. Meskipun terjadi pemulihan menjadi 4,6% di 2024, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan titik awal pada 2020. GAP negatif sebesar –2,39 poin persentase antara 2020 dan 2024 menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam infrastruktur dan manajemen teknis pengumpulan dan pengolahan sampah, yang perlu segera dievaluasi dan diperkuat.

Akumulasi dari pengurangan dan penanganan menghasilkan nilai sampah terkelola, yang justru mengalami penurunan dari 11,63% (2020) menjadi 6,21% (2024), dengan GAP sebesar –5,42 poin persentase. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat inisiatif positif, secara keseluruhan pengelolaan sampah masih belum optimal. Dampaknya terlihat dari meningkatnya persentase sampah tidak terkelola, yang naik dari 88,37% pada 2020 menjadi 93,79% pada 2024 (GAP: +5,42 poin). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas belum tertangani secara sistematis, dan masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan lingkungan. Berikut adalah tabel kondisi persampahan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024.

Tabel 2.86. Capaian penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah	4.702,70	4.759,97	4.818,00	4.876,80	5.375,79
Pengurangan Sampah	4,64	4,81	5,96	5,25	6,21
Penanganan Sampah	6,99	2,52	0,96	3,65	4,6
Sampah Terkelola	11,63	4,81	5,96	5,25	6,21
Sampah Tidak Terkelola	88,37	95,19	94,04	94,75	93,79

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.9. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan beberapa pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dalam satu atap. Pelayanan yang dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam bentuk bidang kerja di mana di setiap bidang langsung dipimpin oleh Kepala Bidang. Seperti Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, dan Bidang Pengawasan serta Pelaporan.

Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan. Data di bawah ini menunjukkan capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024, dengan indikator utama meliputi kepemilikan KTP-el, akta kelahiran anak usia 0–18 tahun, dan Kartu Identitas Anak (KIA). Secara umum, ketiga indikator menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, menandakan adanya kemajuan dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah tersebut.

Kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) terus mengalami peningkatan dari 97% pada tahun 2020 menjadi 99,77% pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 99,46% di tahun 2024. GAP positif sebesar 2,77 poin dari 2020 ke 2023 mengindikasikan konsistensi pelayanan, sedangkan penurunan kecil di tahun 2024 (–0,31 poin) perlu dicermati, karena dapat disebabkan oleh pertambahan penduduk usia wajib KTP, perpindahan penduduk, atau gangguan teknis dalam sistem pencatatan.

Sementara itu, capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–18 tahun mengalami kemajuan signifikan. Dari 90% pada 2020, angkanya melonjak menjadi 98,02% pada 2021, dan terus meningkat hingga mencapai 99,20% pada 2024. Total GAP sebesar +9,2 poin dalam lima tahun menunjukkan keberhasilan kebijakan yang mendorong pencatatan kelahiran lebih awal dan mudah diakses. Lonjakan awal antara tahun 2020–2021 menjadi indikator kunci keberhasilan intervensi layanan dasar kependudukan.

Untuk indikator kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), tercatat peningkatan yang stabil dari 65% pada tahun 2020 menjadi 81,51% pada tahun 2024, dengan GAP sebesar +16,51 poin. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2022 ke 2023, yakni dari 70,46% ke 78,86%, yang menandakan adanya program khusus atau dorongan kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kepemilikan KIA. Walaupun capaian ini sudah cukup tinggi, masih terdapat peluang untuk mendorong cakupan yang lebih merata, terutama di wilayah terpencil atau akses terbatas.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan kinerja positif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap dokumen identitas resmi. Upaya ini berkontribusi penting terhadap tertib administrasi, perlindungan hak sipil, serta perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan yang akurat. Capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil selama periode 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2.87**.

Tabel 2.87. Kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020–2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kepemilikan KTP-el	97%	99,00 %	99.30%	99,77%	99,46%
2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	90%	98,02 %	98,86%	99,07%	99,20%
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	65%	72,11 %	70,46%	78,86%	81,51%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

1.2.4.10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten. Pada tahun 2020, IDM tercatat sebesar 0,6517, yang mencerminkan bahwa sebagian besar desa masih berada dalam kategori berkembang. Dalam lima tahun, indeks ini terus mengalami peningkatan: 0,6623 (2021), 0,6946 (2022), 0,7087 (2023), hingga mencapai 0,7294 pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan bahwa kualitas pembangunan desa di Anambas membaik secara bertahap, mencakup aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, serta dimensi sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Bersamaan dengan naiknya IDM, terjadi pula peningkatan jumlah desa mandiri secara signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, hanya ada 1 desa mandiri (1,92%) dari total 52 desa. Namun pada 2022, jumlahnya melonjak menjadi 5 desa (9,62%), kemudian bertambah menjadi 8 desa (15,38%) pada 2023, dan mencapai sekitar 11 desa (21%) pada tahun 2024. Pertumbuhan jumlah desa mandiri ini mengindikasikan bahwa sebagian desa mulai berhasil melepaskan ketergantungan pada intervensi eksternal dan mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan serta memberikan pelayanan dasar yang memadai kepada masyarakat.

Namun demikian, terdapat gap perkembangan antar desa yang perlu dicermati. Meskipun indeks dan persentase desa mandiri meningkat, sebagian besar desa di Anambas masih belum mencapai status mandiri. Dengan persentase desa mandiri hanya sebesar 21% pada 2024, berarti sekitar 79% desa masih berada dalam kategori berkembang atau tertinggal. Ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam capaian pembangunan antar wilayah desa, yang bisa disebabkan oleh faktor geografis (kepulauan dan keterpencilan), akses infrastruktur dasar yang belum merata, serta tingkat partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan desa yang bervariasi.

Tabel 2.88. Indeks Perkembangan Desa (Indeks Desa Membangun) dan Persentase Desa mandiri di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perkembangan Desa (Indeks Desa Membangun)	0,6517	0,6623	0,6946	0,7087	0,7294
Persentase Desa Mandiri	1,92%(1 Desa)	1,92%(1 Desa)	9,62%(5 Desa)	15,38%(8 Desa)	21,15% (11 Desa)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

1.2.4.11. Komunikasi dan Informatika

Kondisi komunikasi dan informatika di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan perkembangan persentase masyarakat yang menggunakan internet di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024. Data ini mencerminkan tren digitalisasi dan adopsi teknologi informasi di kalangan masyarakat setempat. Terlihat bahwa tingkat penggunaan internet mengalami peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, hanya 43,96% masyarakat yang menggunakan internet. Namun, angka ini naik menjadi 58,72% pada 2021, menunjukkan GAP peningkatan sebesar 14,76 poin persentase dalam satu tahun, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh percepatan digitalisasi selama masa pandemi COVID-19. Kenaikan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 64,54% pada 2022, 69,23% pada 2023, dan akhirnya 73,78% pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, GAP dari 2020 ke 2024 adalah sebesar 29,82 poin persentase, yang menunjukkan bahwa hampir tiga perempat penduduk Anambas kini telah terhubung dengan internet. Ini mencerminkan semakin membaiknya infrastruktur telekomunikasi, peningkatan literasi digital, serta meluasnya akses terhadap perangkat digital dan jaringan internet, termasuk di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Meskipun tren ini sangat positif, masih ada sekitar 26% masyarakat yang belum terhubung dengan internet pada tahun 2024. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, hambatan ekonomi, atau kurangnya literasi digital di kelompok usia tertentu. Oleh karena itu, upaya percepatan pemerataan akses dan peningkatan kapasitas pengguna internet masih perlu menjadi agenda pembangunan strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.89. Persentase masyarakat yang menggunakan internet di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase masyarakat yang menggunakan internet	43,96	58,72	64,54	69,23	73,78

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2025

1.2.4.12. Koperasi dan UKM

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah koperasi aktif tercatat stabil sebanyak 16 unit. Kemudian, terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 17 koperasi, namun angka ini justru mulai menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, koperasi aktif berkurang menjadi 14 unit, dan penurunan berlanjut hingga hanya tersisa 11 koperasi aktif pada tahun 2024.

Penurunan jumlah koperasi aktif ini dapat mencerminkan beberapa hal, di antaranya lemahnya daya tahan koperasi terhadap tantangan ekonomi, kurangnya inovasi dan digitalisasi, serta potensi lemahnya manajemen internal koperasi. Dalam konteks kabupaten kepulauan seperti Anambas, faktor geografis juga bisa menjadi kendala dalam pengembangan dan pembinaan koperasi secara menyeluruh

dan berkelanjutan. Gap antara potensi koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal dengan realisasi aktivitas yang rendah menunjukkan perlunya strategi revitalisasi koperasi yang lebih terfokus. Pada Tabel 2.90 menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif masih dibawah 20, hal ini masih perlu ditingkatkan untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas. Jumlah koperasi aktif yang disajikan pada **Tabel 2.90**.

Tabel 2.90. Koperasi Aktif di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koperasi Aktif	16	16	17	14	11

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.13. Penanaman Modal

Data penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai investasi mencapai Rp437,31 miliar, menjadi yang tertinggi selama periode ini. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, nilai tersebut menurun drastis masing-masing menjadi Rp68,42 miliar dan Rp56,88 miliar, mencerminkan penurunan minat atau realisasi investasi yang signifikan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi akibat pandemi global dan keterbatasan infrastruktur lokal.

Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam kontribusi. Pada 2020, PMA sebesar Rp6,66 miliar jauh lebih kecil dibanding PMDN yang mencapai Rp430,65 miliar, mengindikasikan bahwa investor lokal mendominasi kegiatan investasi. Pola serupa terjadi pada 2021 dan 2022, dengan PMA tetap rendah dan PMDN menurun. Namun, pada 2023 terjadi lonjakan drastis pada PMA yang mencapai Rp169,53 miliar, sedangkan PMDN justru turun menjadi Rp32,02 miliar. Perubahan ini menunjukkan adanya ketertarikan kembali dari investor asing, yang patut diperhatikan dan dimanfaatkan.

Meskipun nilai investasi pada 2023 belum menyamai capaian 2020, peningkatan kembali nilai investasi menjadi Rp201,55 miliar menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi dan daya tarik wilayah. Fluktuasi yang tajam menunjukkan bahwa iklim investasi di Anambas masih belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pemerintah daerah perlu memperkuat daya saing investasi melalui peningkatan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan promosi potensi lokal untuk memastikan pertumbuhan investasi yang lebih konsisten dan berkelanjutan ke depan.

Pada tahun 2024, total nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebesar Rp67.831.221.413. Dari jumlah tersebut, investasi terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp21.111.505.690 dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp46.719.715.723. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi PMDN mendominasi total investasi dengan porsi sekitar 69%, sementara PMA menyumbang sekitar 31%.Detail Nilai investasi, jumlah PMA/PMDN, dan perizinan dari tahun 2020-2024 ditunjukkan pada **Tabel 2.91**.

Tabel 2.91. Indikator penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Investasi	437.313.696.853	68.421.457.841	56.884.984.385	201.552.453.013	67.831.221.413
Jumlah PMA/PMDN	6.662.158.824/430.651.538.029	15.102.257.525/53.319.200.316	7.405.304.196/49.479.680.188	169.530.787.460,78/32.021.665.553	21.111.505.690/46.719.715.723

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.14. Persandian

Urusan persandian diperlukan untuk menjaga data dan informasi rahasia negara agar tidak bocor ke publik. Rahasia negara dijamin oleh Undang-Undang, dan barang siapa yang membocorkan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahun 2020 hingga 2024, terdapat 2 dokumen yang melewati proses persandian. Berikut jumlah jenis informasi yang diamankan melalui persandian dari tahun 2020-2024 di Kabupaten Kepulauan Anambas. Indikator urusan persandian disajikan pada **Tabel 2.92**.

Tabel 2.92. Indikator urusan Persandian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Jenis Informasi yang diamankan melalui Persandian	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2025

1.2.4.15. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil dengan beberapa fluktuasi pada subsektor tertentu. Secara umum, produksi perikanan total mengalami peningkatan dari 21.289,1 ton pada tahun 2020 menjadi 27.401,7 ton pada 2024, yang berarti terdapat kenaikan sebesar 6.112,6 ton atau sekitar 28,7%. Kenaikan ini sebagian besar disumbang oleh subsektor perikanan tangkap, yang secara konsisten menyumbang lebih dari 98% dari total produksi perikanan.

Sektor perikanan tangkap mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 21.110 ton pada 2020 menjadi 27.227,35 ton pada 2024, mencerminkan peningkatan produksi sebesar 6.117,35 ton atau sekitar 29%. Namun demikian, hal ini kontras dengan penurunan jumlah armada perikanan tangkap, dari 3.635 unit pada tahun 2020 menjadi 3.422 unit pada tahun 2024. Penurunan armada ini dapat mengindikasikan adanya efisiensi operasional atau peralihan ke kapal dengan kapasitas produksi yang lebih besar, namun tetap perlu ditinjau untuk memastikan bahwa hasil tangkapan tidak mengandalkan eksploitasi berlebihan.

Di sisi lain, subsektor perikanan budidaya menunjukkan ketidakstabilan. Produksi budidaya sempat meningkat dari 179,143 ton pada 2020 menjadi 225,555 ton pada 2021, tetapi kemudian turun menjadi 174,3 ton pada 2024. GAP negatif ini menunjukkan adanya tantangan dalam aspek budidaya seperti perubahan lingkungan perairan, keterbatasan teknologi, atau lemahnya dukungan fasilitas dan

pendampingan teknis. Penurunan ini menjadi perhatian karena sektor budidaya memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Terkait cakupan bina kelompok nelayan (budidaya), terjadi peningkatan dari 11 kelompok pada 2020 menjadi 22 kelompok pada 2024. Kenaikan ini menandakan adanya upaya intensifikasi pembinaan nelayan budidaya oleh pemerintah daerah. Meskipun jumlah kelompok bertambah, produksi budidaya justru menurun, yang menandakan adanya GAP antara pembinaan dengan hasil produksi. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan perlu dievaluasi kembali agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata pada produktivitas nelayan budidaya di Kabupaten Kepulauan Anambas..Indikator kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.93**.

Tabel 2.93. Indikator Kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi perikanan (ton)	21.289,1	24.254,6	24.180,2	27.145,7	27.401,7
Produksi perikanan budidaya (ton)	179,143	225,555	187,120	188,37	174,3
Produksi perikanan tangkap (ton)	21.110,00	24.029,00	23.993,05	26.957,34	27.227,35
Cakupan bina kelompok nelayan (nelayan budidaya	11	14	15	23	22
Jumlah Armada Perikanan Tangkap	3635	3631	3560	3634	3422

Sumber: Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (DP3) Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.16. Pariwisata

Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjang oleh sebagian besar potensi alam, khususnya potensi kelautan atau bahari. Potensi kelautan tersebut menjadi potensi utama dengan diperkaya oleh keanekaragaman serta keindahan pantai, terumbu karang, serta ekosistem laut lainnya. Selain wisata bahari, Kabupaten Kepulauan Anambas juga memiliki wisata alam dan budaya. Daerah-daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih banyak yang memerlukan pengelolaan agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari dalam dan luar negeri. Secara akumulatif nilai PAD sektor wisata memiliki pertumbuhan yang negatif karena tidak sebanding dengan jumlah dan lama kunjungan wisata yang meningkat.

Sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, terutama pasca pandemi. Pada tahun 2020, jumlah tamu mancanegara tercatat hanya 227 orang, dan sempat turun drastis menjadi 33 orang pada 2021 karena dampak pembatasan perjalanan global. Namun, sejak 2022 hingga 2024, angka tersebut melonjak tajam menjadi 2.131 orang pada 2024, menunjukkan pemulihan dan peningkatan daya tarik wisata Anambas di mata wisatawan asing.

Meskipun jumlah pengunjung meningkat, tren lama kunjungan wisatawan justru menurun. Dari rata-rata 2,02 hari pada 2020, durasi tinggal menurun menjadi hanya 1,1 hari pada 2023, dan sedikit meningkat menjadi 1,14 hari pada 2024. Penurunan lama kunjungan ini menjadi indikator penting bahwa meskipun

destinasi menarik minat kunjungan, kualitas pengalaman wisata atau fasilitas pendukung mungkin belum cukup mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama. Ini bisa menjadi peluang strategis bagi pengembangan sektor akomodasi, atraksi wisata tambahan, dan promosi paket wisata terpadu.

Namun, data rasio PDRB pariwisata pada 2024 terlihat sangat anomali, yakni 0,13, setelah sebelumnya mengalami peningkatan dari 15,02% pada 2020 menjadi 20,18% pada 2023. Penurunan drastis ini bisa mengindikasikan adanya kesalahan pencatatan atau penurunan signifikan dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah. Analisis GAP terhadap data ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara pertumbuhan jumlah wisatawan dan penurunan kontribusi ekonomi sektor tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya verifikasi data serta peninjauan ulang kebijakan ekonomi pariwisata agar pertumbuhan kunjungan wisatawan dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. paIndikator pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.94.**

Tabel 2.94. Indikator Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	227	33	558	1620	2131
Lama Kunjungan Wisata (hari)	2,02	1,6	1,2	1,1	1,14
Rasio PDRB Pariwisata	15,02	16,67	18,82	20,18	0,13

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025 dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

1.2.4.17. Pertanian

Produksi pangan utama di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, terutama pada komoditas padi, jagung, dan ubi kayu. Komoditas padi mengalami penurunan drastis baik dari sisi luas panen maupun hasil produksinya. Luas panen yang sempat mencapai 65,5 hektar pada tahun 2022 menyusut menjadi hanya 11,3 hektar pada 2024. Penurunan ini juga diikuti oleh produksi yang anjlok dari 190,24 ton menjadi 27,15 ton. Meskipun produktivitas sempat melonjak ke angka 11,11 kuintal/ha pada tahun 2023, namun pada tahun berikutnya turun signifikan menjadi hanya 3,93 kuintal/ha. GAP ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam proses budidaya yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti iklim, sarana produksi, atau konversi lahan.

Sementara itu, komoditas jagung menunjukkan tren yang relatif membaik. Luas panen mengalami peningkatan dari 6,39 hektar pada tahun 2021 menjadi 14,91 hektar di tahun 2024, seiring dengan kenaikan produksi dari 8,56 ton menjadi 33,65 ton. Meskipun produktivitas tertinggi tercapai pada 2023 sebesar 30,49 kuintal/ha, terjadi penurunan kembali menjadi 12,62 kuintal/ha di tahun 2024. Meski demikian, total produksi tetap meningkat karena didorong oleh penambahan luas tanam. GAP yang terlihat dalam produktivitas ini mencerminkan potensi perbaikan dalam kualitas hasil apabila dilakukan intervensi teknologi, peningkatan kualitas benih, dan pelatihan petani secara berkelanjutan.

Untuk komoditas ubi kayu, tren justru menunjukkan kemunduran dari berbagai aspek. Luas panen yang pada 2020 mencapai 34,8 hektar, turun menjadi 7,51

hektar pada 2024. Produksi pun mengalami penurunan signifikan dari 117,8 ton menjadi hanya 19,03 ton. Produktivitas sempat melonjak luar biasa pada 2023 hingga mencapai 102,91 kuintal/ha, namun pada 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 7,24 kuintal/ha. GAP ini memperlihatkan adanya ketidakteraturan dalam produktivitas, yang bisa jadi disebabkan oleh gangguan teknis, berkurangnya lahan tanam, atau menurunnya kualitas sarana dan prasarana pertanian.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sektor pertanian pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal konsistensi dan keberlanjutan produksi. Ketimpangan antara luas panen, jumlah produksi, dan produktivitas di setiap tahun mengindikasikan perlunya strategi peningkatan kapasitas petani, modernisasi pertanian, serta dukungan infrastruktur dan pasar yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020-2023 disajikan pada **Tabel 2.95**.

Tabel 2.95. Data Pangan utama di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Padi						
Luas Panen	Ha	32	59,25	65,5	22,25	11,3
Produksi	Ton	148,05	187,08	190,24	70,97	27,15
Produktivitas	Kuintal/Ha	4,63	5,69	5,29	11,11	3,93
Jagung						
Luas Panen	Ha	15,3	6,39	8,87	12,51	14,91
Produksi	Ton	35,73	8,56	16	27,4	33,65
Produktivitas	Kuintal/Ha	12,01	11,59	15,1	30,49	12,62
Ubi Kayu						
Luas Panen	Ha	34,8	15	15,32	7,25	7,51
Produksi	Ton	117,8	65,11	56,72	39,9	19,03
Produktivitas	Kuintal/Ha	33	38,95	54,84	102,91	7,24

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Pangan, 2025

1.2.4.18. Perdagangan dan Perindustrian

Sektor perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan dinamika yang cukup menarik dalam periode 2020–2024. Nilai ekspor bersih perdagangan mengalami peningkatan dari Rp.7,44 juta pada 2020 menjadi Rp.11,99 juta pada 2022, menunjukkan tren positif dalam kinerja ekspor daerah. Namun, pada tahun 2023, ekspor bersih sedikit menurun menjadi Rp.10,46 juta, yang masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan awal periode. Data untuk 2024 belum tersedia sepenuhnya, namun dari pola sebelumnya terlihat bahwa sektor perdagangan memiliki potensi yang cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sisi lain, jumlah UMKM mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari 4.536 unit pada 2020, angka ini terus menurun hingga menjadi 3.231 unit pada 2022, menunjukkan penurunan sekitar 29% dalam dua tahun. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak usaha

kecil terpaksa tutup atau menghentikan kegiatan usahanya. Tidak tersedianya data untuk tahun 2023 membuat analisis kurang lengkap, namun pada 2024 jumlah UMKM tercatat sedikit meningkat menjadi 3.619 unit, yang dapat menandakan awal dari proses pemulihan ekonomi sektor informal.

Analisis GAP antara peningkatan nilai ekspor dan penurunan jumlah UMKM menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Meskipun nilai ekspor meningkat, jumlah pelaku usaha yang berperan dalam aktivitas ekonomi justru menurun. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan ekspor mungkin tidak berasal dari sektor UMKM, melainkan dari pelaku usaha skala menengah atau besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengarahkan intervensi strategis untuk memperkuat UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal, termasuk akses permodalan, pelatihan digitalisasi, dan pembukaan akses pasar yang lebih luas, agar pertumbuhan sektor perdagangan dan perindustrian lebih inklusif dan merata. Jumlah ekspor bersih perdagangan dan jumlah UMKM dari tahun 2020-2024 ditunjukkan pada **Tabel 2.96**.

Tabel 2.96. Indikator perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Bersih perdagangan	IDR 7.443.333	IDR 9.444.684	IDR 11.993,706	IDR 10.460,869	
Jumlah UMKM	4.536	3.641	3.231	3.510	3.619

Sumber: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Perdagangan & Perindustrian, 2025, BPS 2024

1.2.4.19. Kepegawaian

Berdasarkan data jumlah pegawai non-PNS (PTT) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, jumlah pegawai non-PNS tercatat sebanyak 3.617 orang. Jumlah ini meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 4.067 orang, menunjukkan kenaikan sebanyak 450 pegawai atau sekitar 12,4%. Kenaikan ini bisa mencerminkan adanya kebutuhan tambahan tenaga kerja atau kebijakan perekrutan yang lebih longgar pada tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis menjadi 3.616 pegawai, atau turun 451 orang dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya pengurangan pegawai, diantarnya karena evaluasi efisiensi, kontrak yang tidak diperpanjang, atau adanya kebijakan penghematan anggaran. Gap yang cukup besar dari 2021 ke 2022 ini hampir mengembalikan jumlah pegawai ke posisi awal pada tahun 2020, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pegawai pada tahun sebelumnya tidak bersifat berkelanjutan.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi kenaikan kembali menjadi 3.950 pegawai, namun jumlah ini kembali turun pada tahun 2024 menjadi 3.675 pegawai. Pola ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai non-PNS tidak stabil dari tahun ke tahun dan mengalami siklus naik-turun. Analisis GAP ini memperlihatkan bahwa tidak ada tren pertumbuhan yang konsisten, melainkan lebih bersifat reaktif terhadap kebutuhan tahunan atau kebijakan tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan manajemen sumber daya manusia yang lebih terstruktur dan memperhatikan beban kerja serta penggunaan anggaran yang efisien di masa

mendatang. Berikut jumlah pegawai non PNS (PTT) di Pemerintah Kabupaten Kepulaua Anambas Tahun 2020-2024 **Tabel 2.98**.

Tabel 2.97. Jumlah Pegawai non-pns (PTT) di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pegawai non pns (PTT) di pemerintahan	3.617	4.067	3.616	3.950	3.675

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jabatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama pada kategori jabatan tertentu. Jumlah PNS di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, dari total 1.837 orang pada tahun 2020 menjadi 2.393 orang pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terjadi pada jabatan fungsional tertentu, yang naik signifikan dari 917 pada tahun 2020 menjadi 1.647 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya penguatan pada jabatan teknis dan profesional sesuai dengan arah reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi dan spesialisasi kinerja aparatur sipil negara.

Sementara itu, jumlah pegawai dalam jabatan fungsional umum relatif fluktuatif. Setelah menurun dari 485 (2020) menjadi 432 (2023), jumlahnya sedikit meningkat menjadi 448 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya upaya penyederhanaan jabatan administratif, yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi jabatan ke arah fungsional.

Pada kategori jabatan struktural, khususnya pada level eselon IV, terjadi penurunan yang cukup tajam dari 314 (2020) menjadi hanya 146 pada 2024. Penurunan ini juga tampak pada eselon III dan II meskipun tidak sebesar eselon IV. Penurunan jabatan struktural ini sejalan dengan kebijakan penghapusan eselonisasi di tingkat bawah, yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih ramping dan adaptif.

Analisis GAP menunjukkan adanya pergeseran struktur kepegawaian dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. GAP terbesar terjadi antara jabatan fungsional tertentu dan struktural, yang mencerminkan transformasi organisasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi teknis dan memperkuat pelayanan publik. Peningkatan jumlah PNS secara keseluruhan juga mengindikasikan kebutuhan SDM yang semakin besar seiring dengan bertambahnya kompleksitas pelayanan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel 2.98. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Jabatan	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Fungsional Tertentu	917	900	1218	1576	1647
Fungsional Umum	485	460	515	432	448
Struktural	435	400	274	299	298
Eselon IV	314	298	138	154	146

Jabatan	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Eselon III	100	82	109	115	123
Eselon II	21	20	27	30	29
Jumlah	**1837**	**1760**	**2007**	**2307**	**2393**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Berdasarkan **Tabel 2.99** terjadi peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2020 hingga 2024, khususnya dari segi tingkat pendidikan. Jumlah PNS meningkat dari 1.837 orang pada tahun 2020 menjadi 2.393 orang pada tahun 2024. Kenaikan ini paling mencolok pada kelompok berpendidikan tinggi (S1/S2/S3), yang naik dari 1.141 orang pada tahun 2020 menjadi 1.699 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan pergeseran kualitas SDM aparatur ke arah yang lebih profesional dan terdidik, sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Sementara itu, jumlah PNS dengan pendidikan rendah (SD dan SMP/sederajat) mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2020 terdapat 17 PNS dengan tingkat pendidikan sampai SMP, dan pada 2024 jumlah tersebut menurun menjadi hanya 8 orang. Penurunan ini mengindikasikan adanya proses regenerasi dan pembaruan dalam perekrutan ASN, dengan menitikberatkan pada kompetensi akademik yang lebih tinggi.

PNS dengan pendidikan menengah (SMA/sederajat) juga menunjukkan tren penurunan, meskipun tidak secepat kelompok pendidikan dasar. Dari 261 orang pada 2020 menjadi 232 orang pada 2024. Sedangkan kelompok lulusan Diploma I–III mengalami penurunan yang lebih moderat, dari 418 orang pada 2020 menjadi 454 pada 2023, dan turun menjadi 408 orang di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa lulusan diploma masih memiliki peran signifikan, meskipun secara bertahap mulai tergantikan oleh lulusan sarjana.

Analisis GAP menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok PNS berpendidikan tinggi dan rendah. GAP antara kelompok lulusan S1/S2/S3 dan kelompok lulusan SMA ke bawah memperlihatkan arah kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas birokrasi. Dengan demikian, transformasi SDM aparatur di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan kemajuan dalam membangun aparatur yang lebih kompeten dan profesional melalui penguatan basis pendidikan formal. Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan lebih lengkap disajikan pada **Tabel 2.99**.

Tabel 2.99. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sampai dengan SD	7	7	6	6	3
SMP/Sederajat	10	10	9	7	5
SMA/Sederajat	261	253	247	260	232
Diploma I, II/Akta I, II	67	63	59	56	46
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	351	345	385	454	408

Tingkat Pendidikan	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat S1/S2/S3	1.141	1.083	1301	1524	1699
Jumlah	**1.837**	**1.761**	**2007**	**2307**	**2393**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.20. Pengawasan

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dimuat di dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dapat memberikan 4 (empat) jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/U*nqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*), dan Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*). Pencapaian ini merupakan hasil dari strategi dan program yang disusun oleh pemerintah pada Tahun 2018. Opini WTP harus dipertahankan mengingat komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Hasil opini WTP saat ini dipertahankan hingga tahun 2024. Implikasinya yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Data menunjukkan bahwa persentase instansi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memperoleh skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di atas nilai B mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase instansi yang meraih skor > B berada di angka 53,38%, kemudian meningkat menjadi 55,62% di tahun 2021, 60,11% di tahun 2022, 61,27% di tahun 2023, dan mencapai 61,76% pada tahun 2024.

Peningkatan bertahap ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan kinerja instansi pemerintah daerah. Meskipun lonjakan tidak terlalu besar setiap tahunnya, tren yang terus naik menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kinerja birokrasi. Dari sudut pandang analisis GAP, jarak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang relatif stabil namun mulai melandai setelah 2022, menandakan bahwa upaya peningkatan kualitas manajemen kinerja perlu lebih ditingkatkan agar tidak stagnan di angka sekitar 61%. Hasil indikator pengawasan Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan pada **Tabel 2.100**.

Tabel 2.100. Indikator Pengawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) > B	53,38	55,62	60,11	61.27	61.76

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

Kinerja pengawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup mencolok, khususnya dalam aspek tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pada tahun 2020 dan 2021, persentase temuan yang ditindaklanjuti cukup stabil di kisaran 64%. Namun pada 2022 dan 2023 terjadi penurunan drastis hingga hanya 13,43% pada 2023. Angka ini menunjukkan lemahnya respons terhadap hasil audit atau evaluasi. Meski begitu, terjadi perbaikan pada tahun 2024 dengan capaian kembali naik ke 67,10%, yang menunjukkan adanya upaya pembenahan dalam proses pengawasan dan tindak lanjutnya.

Persentase perangkat daerah yang memperoleh nilai AKIP "CC" juga mengalami fluktuasi signifikan. Angka tertinggi tercapai pada 2020 sebesar 46%, namun terus menurun menjadi 12% pada 2023, sebelum sedikit meningkat ke 17,65% pada 2024. Ini menunjukkan masih rendahnya implementasi akuntabilitas kinerja di sebagian besar perangkat daerah. Hal ini selaras dengan penurunan nilai AKIP dari perangkat pengampu pengawasan, yang semula mencapai kategori "A" (80,00) pada 2020–2021, namun menurun ke "BB" pada tahun-tahun berikutnya, dengan nilai sekitar 72 pada 2023 dan 2024.

Sementara itu, dari sisi sistem pengendalian dan pengawasan internal, Kabupaten Kepulauan Anambas konsisten berada pada Level III untuk SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sepanjang lima tahun terakhir. Konsistensi ini menunjukkan bahwa tata kelola pengawasan internal berada pada level yang cukup memadai, namun belum mengalami peningkatan berarti. Untuk mendorong kualitas pengawasan yang lebih efektif, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem tindak lanjut audit, serta dorongan kinerja pada perangkat daerah agar lebih akuntabel dan transparan. Berikut adalah indikator urusan pengawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024 **Tabel 2.101**.

Tabel 2.101. Indikator bidang pengawasan di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Uraian	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti	64,32	64,44	40,15	13,43	67,10 %
Persentase Perangkat Daerah yang Nilai AKIPnya "CC"	46%	25%	33%	12%	17,65 %
Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	Level 3
Tingkat Kapabilitas APIP	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	LEVEL III	Level 3
Nilai AKIP Perangkat Daerah Pengampu Pengawasan	80,00 (A)	80,60 (A)	78,20 (BB)	72,16 (BB)	72,25 (BB)

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas, 2025

1.2.4.21. Kesatuan Bangsa dan Politik

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kesadaran politik dan keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di suatu daerah. Pada tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat tingkat partisipasi pemilih sebesar 81% dalam pelaksanaan pemilu. Angka ini

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap proses pemilihan umum dan mengambil bagian aktif dalam menentukan arah kepemimpinan serta kebijakan pemerintahan.

Tingginya partisipasi ini patut diapresiasi, terutama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2020–2023) yang tidak memiliki data partisipasi pemilih karena tidak dilangsungkannya pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat tetap terjaga meskipun terdapat jeda waktu antara pemilu sebelumnya dan pelaksanaan tahun 2024. Keberhasilan ini juga dapat dikaitkan dengan efektivitas sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga.

Lebih lanjut, capaian partisipasi sebesar 81% mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang berlangsung secara adil dan transparan. Partisipasi ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi merupakan hasil dari proses pembangunan demokrasi lokal yang berkelanjutan. Ke depan, capaian ini dapat menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas demokrasi yang lebih inklusif dan representatif di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta mendorong partisipasi politik yang lebih luas di kalangan masyarakat, termasuk kelompok pemilih pemula dan marjinal. Nilai capaian selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.102**.

Tabel 2.102. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Uraian	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	-	-	-	-	81

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

1.2.4.22. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam urusan pemerintahan daerah adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Daerah berhasil melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Rekap capaian IKK urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam **Tabel 2.103**.

Tabel 2.103. Capaian Indikator Kunci Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Urusan	IKK Outcome	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	50,27	96,45	64,79	64,12	85,83
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90,23	93,40	82,75	91,28	98,95
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	69,54	81,30	66,05	81,20	68,52
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,09	0,43	0,61	0,31	18,47
Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,20	0,27	9,62	4,19	4,14
Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	66,67	66,67	66,67	100,00	100,00
Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	79,74	74,01	80,62	97,95	96,66
Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	88,37	87,42	75,46	94,88	99,05
Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	82,66	83,64	84,36	91,47	93,49
Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	67,27	78,37	84,22	86,79	87,41
Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26,87	61,04	91,40	84,59	96,84
Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	65,83	63,44	57,06	68,29	77,74
Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	64,21	73,36	83,95	83,95	72,32
Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,08	90,07	88,70	83,96	90,39
Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,07	92,24	90,86	89,56	93,47
Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	81,58	100,00	100,00	100,00	100,00
Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00	100,00	35,86	100,00	100,00
Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100,00	93,75	77,26	93,78	100,00
Pekerjaan Umum dan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	95,90	0,04	0,00	13,50	13,50

Urusan	IKK Outcome	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penataan Ruang	di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota					
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	4,32*	4,55*	4,63	5,42	5,42
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	35,01*	35,24	8,50	8,50	36,39
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	60,08	60,08	90,90	93,61	93,61
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,01	14,11	13,23	13,16	14,66
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	34,02	34,17	34,53	34,61	46,38
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	52,38	100,00	96,00	100,00	100,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	83,00	55,33	67,54	77,19	77,19
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10,58	10,58	9,81	9,70	9,70
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	50,00	75,00	66,67	77,78
Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20.479,00	7.547,00	151,18	100,00	100,00

Urusan	IKK Outcome	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan Masyarakat						
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.557,00	7.547,00	11,55	100,00	100,00
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	14,00	7,33	10,00	7,40	19,20
Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisy ang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50*	50*	50*	50,00	16,67
Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	8,17	8,76	91,21	85,01	25,87
Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	51.651,00	522.520.352,62	921,29	517.699,47	139.095.558.191,64
Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100,00	100,00	46,25	34,25	12,44
Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	9,93	22,95	16,22	22,50	9,29
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	6,45	3,53	3,60	8,46	6,69
Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0,06	0,06	100,00	100,00	100,00

Urusan	IKK Outcome	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan Anak						
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,27	60,03	46,30	53,21	3,89
Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	667,89	48,37	47,66	0,05	52,33
Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,34	79,81	73,46	82,32	80,61
Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	90,14	85,00	85,00	85,00	85,00
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	96,86	99,71	98,01	99,50	98,24
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	63,79	73,67	67,80	74,99	78,17
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	95,63	97,10	93,76	99,18	99,20
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	22,58	9,68	33,33	28,13	20,59
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	33,33	16,67	100,00	100,00	100,00
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	15,38	5,56	15,15	22,86	75,00
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28	2,88	1,74	0,07	2,41
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,49	71,11	40,96	73,98	79,78

Urusan	IKK Outcome	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	16,11	16,69	0,24	2,30	1,72
Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	33,60	0,34	0,58	0,58	0,61
Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	2,50	1,00	1,00	0,24	N/A
Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80,65	83,87	91,18	73,53	85,29
Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	17,68	82,84	91,99	68,61	69,58
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	8,86	11,39	41,18	42,86	9,09
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wira usaha	0,05	40,66	2,09	2,09	0,16
Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	25,61	-52,48	-12,99	885,71	-63,55
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,08	15,59	15,48	26,75	8,44
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,65	12,26	6,63	18,59	100,00
Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	77,42	61,29	61,76	75,00	70,59
Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	87,10	61,29	61,76	75,00	70,59
Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	21,54	28,93	30,85	32,25	44,34
Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	52,54	62,96	74,07	81,48	85,19
Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	**	**	**	76,70	76,70
Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**	**	59,33	73,67	92,90
Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	0,25	25,00	25,00	25,00	25,00
Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	44.098,00	24.217,37	110,61	120,74	117,97

Urusan	IKK Outcome	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-63,68	-85,46	1.590,91	190,32	31,54
Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-86,65	68,00	12,33	-3,59	17,48
Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	27,92	24,83	27,58	28,85	29,83
Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,09	2,39	0,09	0,10	0,12
Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	21,78	25,65	41,54	47,11	55,84
Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	61,45	279,48	282,34	330,14	230,70
Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	13,59	45,82	84,85	20,79	17,18
Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	10,82	28,95	74,78	95,85	104,17
Perdagangan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	57,47	96,12	0,64	0,51	76,47
Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	48,44	21,54	15,21	33,64	8,91
Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	15.585	15.585	15.585	15.585	15.585
Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	20,17	15,91	17,59	13,25	17,03
Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	0,97	1,10	3,60	2,68	2,77
Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00	3,00	3,00	3,12	3,00
Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	59,64	82,29	86,09	63,44	71,06
Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	5,00	5,00	7,00	7,00	8,00
Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	0,59	7,49	94,01	94,82	69,12
Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	83,17	28,22	33,26	34,98	22,92
Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	44,87	96,45	4,34	442,19	-32,09

Urusan	IKK Outcome	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	305,59	27,82	75,32	75,83	78,99
Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,34	22,88	21,81	29,12	18,54
Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	56,52	85,92	77,56	61,11	18,54
Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	29,17	28,68	5,55	21,83	18,66
Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	26,95	12,82	28,38	36,41	30,44
Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	6,02	1,16	4,25	0,76	1,92
Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100,68	100,00	83,40	95,77	99,99
Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,00	100,00	100,00	75,00	66,67

* : data sementara.
** : pengukuran tidak dilakukan pada tahun berkenaan.
Sumber: LPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

1.3. Gambaran Keuangan Daerah

1.3.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

1.3.1.1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024

Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah adalah ketersediaan sumber daya pendanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan sumber daya pendanaan yang memadai maka pemerintah daerah lebih leluasa dalam menjalankan fungsi-fungsi dan urusan pemerintahan. Adapun pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung, berkeadilan, kepatutan, dan azas manfaat untuk masyarakat.

Wujud pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan APBD periode sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran

tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam proses analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Berdasarkan data realisasi pendapatan tahun 2020 hingga 2024, kondisi keuangan daerah menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, dengan tren pendapatan daerah yang tidak konsisten. Pendapatan daerah sempat meningkat dari Rp816,79 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp998,37 miliar pada tahun 2023, sebelum kembali turun drastis ke Rp808,99 miliar pada tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan pendapatan hanya sebesar 0,79% selama periode lima tahun, yang mengindikasikan adanya stagnasi fiskal. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh relatif baik dengan rata-rata 3,16%, tetapi kontribusinya terhadap total pendapatan masih tergolong kecil, sehingga struktur pendapatan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan transfer, yang merupakan porsi terbesar dari pendapatan daerah, mencatat pertumbuhan rata-rata hanya 1,26%, dengan fluktuasi yang menandakan ketergantungan fiskal yang tinggi. Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, namun tidak konsisten dari tahun ke tahun. Sementara itu, Dana Desa dan transfer antar daerah mengalami tren menurun. Pendapatan lain-lain yang sah bahkan mencatatkan penurunan tajam hingga -36,38%, dengan tahun 2023 tidak memiliki realisasi sama sekali, mencerminkan ketidaktercapaian target atau potensi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Di sisi belanja, total belanja daerah juga mengalami ketidakkonsistenan, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,47%. Belanja operasi tumbuh 2,93% per tahun, didorong oleh peningkatan belanja barang dan jasa serta bantuan sosial, yang bahkan meningkat signifikan (491,80%), meskipun nilainya masih kecil secara nominal. Belanja modal justru menurun secara rata-rata (-4,21%), menunjukkan lemahnya orientasi belanja ke arah pembangunan aset dan infrastruktur jangka panjang. Hal ini diperparah oleh tren negatif pada belanja tidak terduga dan belanja transfer, yang juga menurun selama periode analisis.

Dari data tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural antara pendapatan dan belanja daerah. Peningkatan belanja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan menyebabkan ketergantungan pada pembiayaan yang meningkat tajam hingga 134,07% secara rata-rata, meskipun realisasi tahunannya sangat fluktuatif. Hal ini mencerminkan

belum optimalnya kemandirian fiskal daerah serta lemahnya efisiensi pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan fiskal daerah yang menekankan pada optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta penguatan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi lokal yang terukur.

Tabel 2.104. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020–2024 (Rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun					rata-rata pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**816.788.855.634,18**	**845.562.863.756,18**	**824.553.991.952,51**	**998.370.281.042,73**	**809.505.443.369.94**	**0,79%**
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31.634.242.246,18	33.325.052.262,96	29.686.658.850,51	29.362.242.093,73	35.544.549.195,94	3,16%
1.1.1	Pajak Daerah	14.148.007.073,69	13.248.704.027,79	15.965.570.313,97	16.310.773.757,00	18.599.426.707,00	7,59%
1.1.2	Retribusi Daerah	3.493.020.817,48	4.731.456.914,83	3.984.032.171,00	7.134.834.674,00	1.566.244.153,00	5,17%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.318.019.763,00	1979148878	1.623.626.298,00	1.596.888.717,00	1.241.953.264,00	2,08%
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	12.675.194.592,01	13.365.742.442,34	8.113.430.067,54	4.319.744.945,73	14.136.925.071,94	33,72%
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**772.384.225.262,00**	**799.054.499.127,00**	**783.315.186.389,00**	**969.008.038.949,00**	**773.804.025.511,00**	**1,26%**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	712.873.075.531,00	743.394.103.468,00	729.061.340.260,00	55.482.217.000,00	45.048.357.000	1,59%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	635.267.105.531,00	624.335.477.614,00	686.133.704.760,00	851.583.263.975,00	676.978.622.739,00	2,95%
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	186.480.952.762,00	169.817.097.319,00	251.169.826.687,00	321.603.861.808,00	159.711.575.960,00	4,17%
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	375.518.805.000,00	368.303.160.000,00	368.244.672.250,00	383.849.195.981,00	395.427.123.385,00	1,33%
1.2.1.1.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.267.347.769,00	86.215.220.295,00	66.719.205.823,00	146.130.206.186,00	121.839.923.394,00	24,36%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	25.151.920.000,00	65.907.002.000,00	6.072.979.000,00	10.659.002.000,00	0	11,69%
1.2.1.6	Dana Desa	52.454.050.000,00	53.151.623.854,00	36.854.656.500,00	39.126.062.000,00	39.367.634.000,00	-5,64%
1.2.1.7	Insentif Fiskal	0	0	0	5.697.153.000,00	5.680.723.000,00	-0,29%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.511.149.731,00	55.660.395.659,00	54.253.846.129,00	61.942.557.974,00	51.777.045.772,00	-2,81%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	39.011.149.731,00	42.160.395.659,00	53.533.846.129,00	56.757.976.060,00	51.691.545.772,00	8,04%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	20.500.000.000,00	13.500.000.000,00	720.000.000,00	5.184.581.914,00	85.500.000,00	98,23%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.770.388.126,00	13.183.312.366,22	11.552.146.713,00	0	156.868.663,00	-36,38%

No	Uraian	Realisasi Tahun					rata-rata pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.3.1	Prendapatan Lainnya	12.770.388.126,00	13.183.312.366,22	11.552.146.713,00	0,00	156.868.663,00	-36,38%
2	**BELANJA DAERAH**	**869.734.988.650,27**	**807.470.912.182,23**	**865.767.979.709,20**	**980.270.183.929,64**	**832.217.333.836,00**	**-0,47%**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**570.292.894.170,35**	**559.898.234.708,11**	**640.801.958.959,20**	**683.833.368.630,64**	**631.659.116.114,00**	**2,93%**
2.1.1	Belanja Pegawai	352.276.430.743,00	274.063.269.975,54	308.350.657.013,00	333.755.055.240,00	354.110.209.828.00	1,16%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.441.915.852,35	271.300.030.814,57	319.660.172.869,20	332.767.580.289,64	253.819.164.750,00	10,16%
2.1.3	Belanja Hibah	27.391.102.575,00	14.400.218.918,00	10.234.147.577,00	17.149.119.101,00	23.100.436.536,00	6,48%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	183.445.000,00	134.715.000,00	2.556.981.500,00	161.614.000,00	629.305.000,00	491,80%
2.2	**BELANJA MODAL**	**159.748.471.277,92**	**142.963.186.466,12**	**120.401.935.455,00**	**184.291.542.980,00**	**104.420.106.437,00**	**-4,21%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	790.607.000,00	0,00	80.343.000,00	0,00	0,00	-100,00%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.265.764.736,00	33.331.184.690,10	28.836.390.808,00	51.188.694.187,00	26.372.465.503,00	9,45%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.625.432.770,92	44.443.379.101,50	35.745.221.460,00	34.500.354.929,00	26.344.494.672,00	-23,39%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	45.446.641.371,00	63.046.577.745,69	54.961.403.287,00	96.909.592.427,00	50.267.079.992,00	13,39%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.620.025.400,00	2.142.044.928,83	778.576.900,00	1.692.901.437,00	1.436.066.270,00	5,09%
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**29.074.357.387,00**	**878.745.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98,49%**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	29.074.357.387,00	878.745.392,00	0,00	0,00	0,00	-98,49%
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**110.619.265.815,00**	**103.730.745.616,00**	**104.564.085.295,00**	**112.145.272.319,00**	**96.138.111.285,00**	**-3,11%**
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	0,00	1.260.607.506,00	1.816.890.385,00	2.261.732.289,00	845.627.307,00	2,00%
2.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan	133.992.004.950,00	110.619.265.815,00	102.470.138.110,00	102.747.194.910,00	109.883.540.030,00	-4,40%
3	**PEMBIAYAAN**	**63.042.282.973,40**	**9.999.054.212,31**	**48.198.574.587,26**	**5.849.631.846,59**	**24.933.952.263,35**	**134,07%**
2.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**64.542.282.973,40**	**10.999.054.212,31**	**49.198.574.587,26**	**7.849.631.846,59**	**24.933.952.263,35**	**99,48%**
2.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.222.061.797,29**	**-8,33%**

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

1.3.1.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diketahui dari realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan.

1.3.1.3. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas berfluktuasi selama periode lima tahun kebelakang yaitu Tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,79 %. Gambaran umum tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2010-2024, sebagai berikut:

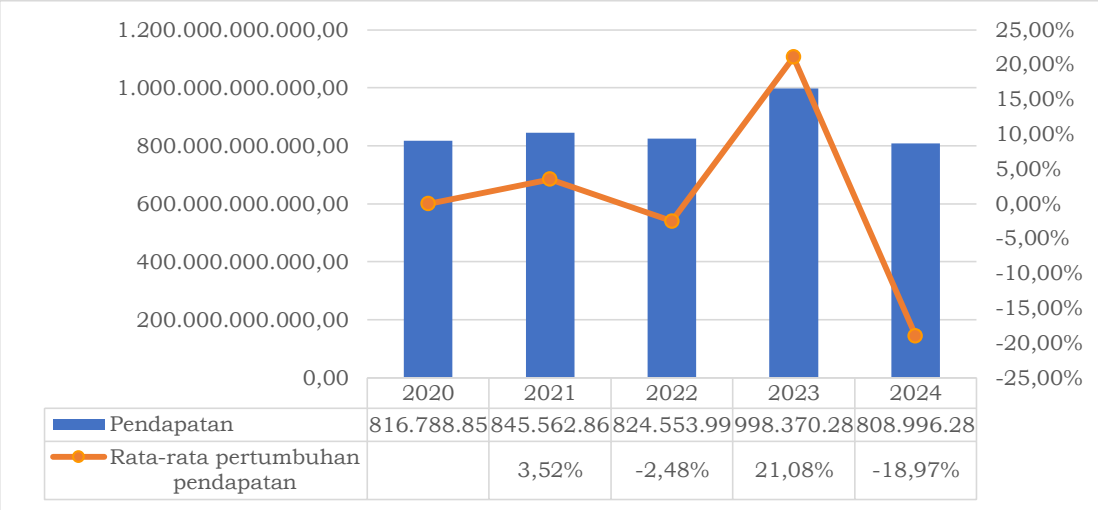

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	816.788.85	845.562.86	824.553.99	998.370.28	808.996.28
Rata-rata pertumbuhan pendapatan		3,52%	-2,48%	21,08%	-18,97%

Gambar 2.52. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020-2024
Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Secara umum, pendapatan daerah menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dimulai dari Rp816,79 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp845,56 miliar pada 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi Rp824,55 miliar, sebelum mengalami lonjakan tajam hingga mencapai Rp998,37 miliar pada tahun 2023. Tren tersebut tidak berlanjut, karena pada tahun 2024 pendapatan kembali menurun menjadi Rp808,99 miliar.

Dari segi pertumbuhan, tahun 2020–2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,52%, namun kemudian mengalami kontraksi sebesar -2,48% pada tahun 2022. Tahun 2023 menjadi titik tertinggi dengan lonjakan pertumbuhan sebesar 21,08%, yang menandakan adanya peningkatan signifikan dalam perolehan pendapatan daerah. Namun, keberlanjutan pertumbuhan ini tidak terjaga karena tahun 2024 mengalami penurunan drastis sebesar -18,97%, mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam kinerja keuangan daerah. Ketidakstabilan ini dapat menjadi sinyal lemahnya perencanaan fiskal jangka menengah atau ketergantungan yang tinggi pada sumber pendapatan tertentu yang bersifat tidak berkelanjutan.

Analisis GAP terhadap data ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara proyeksi pertumbuhan pendapatan dan realisasinya. Fluktuasi tajam yang terlihat mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sistem pendapatan daerah. Misalnya, peningkatan yang tinggi pada tahun 2023 bisa disebabkan oleh faktor-faktor non-reguler seperti bantuan pemerintah pusat, penyesuaian pajak, atau pendapatan dari kegiatan temporer. Sebaliknya, penurunan drastis pada tahun 2024 dapat diinterpretasikan sebagai kurangnya diversifikasi sumber pendapatan daerah atau lemahnya mekanisme pengumpulan pajak dan retribusi.

Dari perspektif keuangan daerah, pola yang tidak konsisten ini berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang sehat dan berkelanjutan. Ketergantungan terhadap fluktuasi pendapatan akan menyulitkan dalam alokasi anggaran yang efektif untuk pembangunan jangka panjang, pelayanan publik, dan pengurangan ketimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengelolaan pendapatan daerah yang lebih adaptif dan berbasis data, serta upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan potensi sumber daya lokal lainnya.

1.3.1.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2024, PAD Kabupaten Kepulauan Anambas menyumbang sebesar 4,33 % terhadap total pendapatan daerah. Perkembangan PAD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020-2024 secara terperinci dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

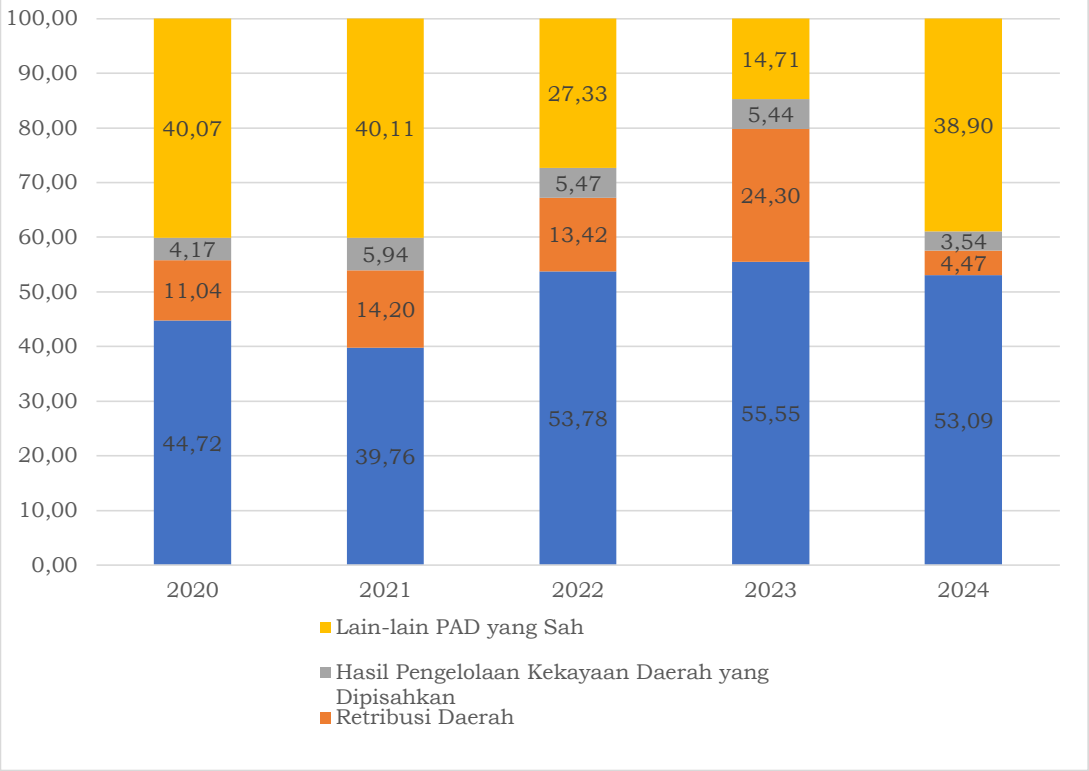

Gambar 2.53. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2020-2024
Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Ditinjau berdasarkan kontribusinya, PAD Kabupaten Kepulauan Anambas terbesar bersumber dari pajak dan lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar 49,38% dan 32,22%. Sementara sisanya bersumber dari retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kontribusi PAD adalah i) Kewenangan daerah terbatas karena wilayah laut menjadi kewenangan provinsi dan pusat, ii) Sumber pendapatan daerah yang relatif rendah, iii) Ekonomi lokal belum tumbuh secara optimal, dan iv) Kinerja BUMD rendah.

Kedepan pemerintah daerah perlu perlu mengidentifikasi dan mengembangkan sumber pendapatan lokal yang potensial seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Berikutnya, perlu ditingkatkannya kapasitas aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Alokasi belanja daerah yang diarahkan untuk mengungkit pendapatan daerah. Terakhir bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas perlu mendorong diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan berbasis blue ekonomi yang dapat meningkatkan PAD. Potensi strategis ini perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

1.3.1.5. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan. Komponen pendapatan umumnya terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah lainnya. Transfer dari pemerintah pusat mencakup dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana transfer lainnya seperti Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Otonomi Khusus atau Dana Keistimewaan. Sementara itu, transfer dari pemerintah daerah lainnya meliputi bantuan keuangan antar daerah, hibah dari provinsi ke kabupaten/kota atau sebaliknya, serta transfer lain yang disepakati antar daerah.

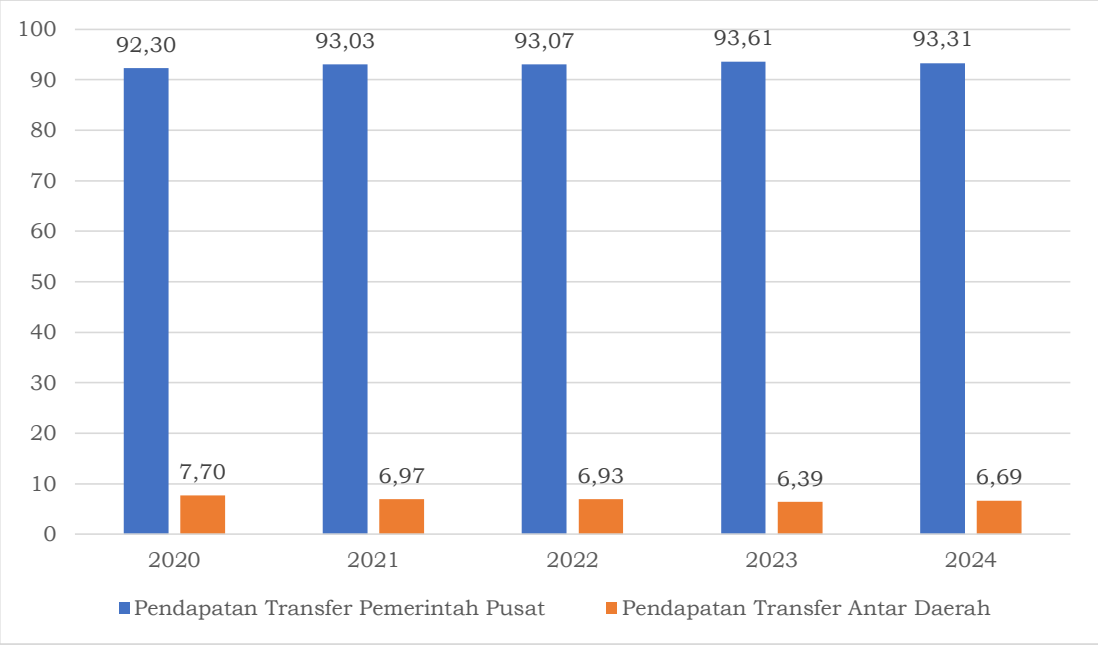

Gambar 2.54. Persentase Pendapatan Transfer 2020-2024
Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Gambar 2.46 menunjukkan bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat di Kabupaten Kepulauan Anambas mendominasi struktur pendapatan transfer daerah, dengan proporsi yang konsisten tinggi, yakni berkisar antara 92,30% hingga 93,61%. Sebaliknya, kontribusi pendapatan transfer antar daerah relatif kecil dan cenderung menurun dari tahun ke tahun, meskipun fluktuasi nilainya sangat kecil, berkisar antara 6,39% hingga 7,70%.

Secara rinci, pada tahun 2020, pendapatan transfer dari pemerintah pusat menyumbang 92,30% dari total pendapatan transfer, sedangkan pendapatan transfer antar daerah sebesar 7,70%. Angka ini terus menunjukkan tren dominasi pemerintah pusat hingga 2024, dimana persentase pendapatan transfer dari pusat mencapai 93,31% dan antar daerah hanya 6,69%. Hal ini

mencerminkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahan di daerah.

Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pusat menjadi indikasi adanya keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Rendahnya kontribusi dari transfer antar daerah mencerminkan minimnya kerja sama antardaerah dalam aspek fiskal atau belum optimalnya pemanfaatan skema transfer horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendanaan lokal atau menjalin sinergi fiskal lintas wilayah masih belum berkembang secara signifikan. Keadaan ini bisa menghambat fleksibilitas dan kemandirian daerah dalam merespons kebutuhan pembangunan lokal secara adaptif.

Dari perspektif kebijakan keuangan daerah, dominasi transfer dari pusat perlu disikapi secara hati-hati. Meskipun dana transfer pusat memberikan jaminan keberlangsungan pembiayaan daerah, ketergantungan yang terlalu besar dapat menjadi risiko fiskal, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional.

1.3.1.6. Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Gambar 2.55 menunjukkan data realisasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024, disertai dengan persentase pertumbuhan belanja tiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah berada pada kisaran Rp900 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2021. Penurunan ini tercermin dari pertumbuhan belanja yang negatif sebesar -7,16%. Namun, pada tahun 2022, belanja daerah kembali meningkat dengan pertumbuhan sebesar 7,22%, dan terus naik secara signifikan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan mencapai 13,23%. Kenaikan pada tahun 2023 ini menunjukkan adanya dorongan fiskal yang cukup besar, kemungkinan sebagai respon terhadap kebutuhan pembangunan strategis atau pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Namun demikian, tren positif ini tidak berlanjut pada tahun 2024. Realisasi belanja kembali menurun secara signifikan, dengan tingkat pertumbuhan negatif yang tajam, yaitu sebesar -15,16%. Penurunan ini merupakan yang terbesar selama periode pengamatan, mengindikasikan kemungkinan

adanya penyesuaian anggaran yang cukup ketat atau pengurangan belanja akibat terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Penurunan tajam ini juga berpotensi menghambat kelangsungan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Secara keseluruhan, pola belanja daerah yang fluktuatif ini menggambarkan belum stabilnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan fiskal daerah. Dalam konteks manajemen keuangan daerah yang efektif, fluktuasi belanja yang ekstrem dapat mengindikasikan lemahnya konsistensi dalam implementasi kebijakan penganggaran serta adanya ketergantungan terhadap sumber dana yang tidak berkelanjutan.

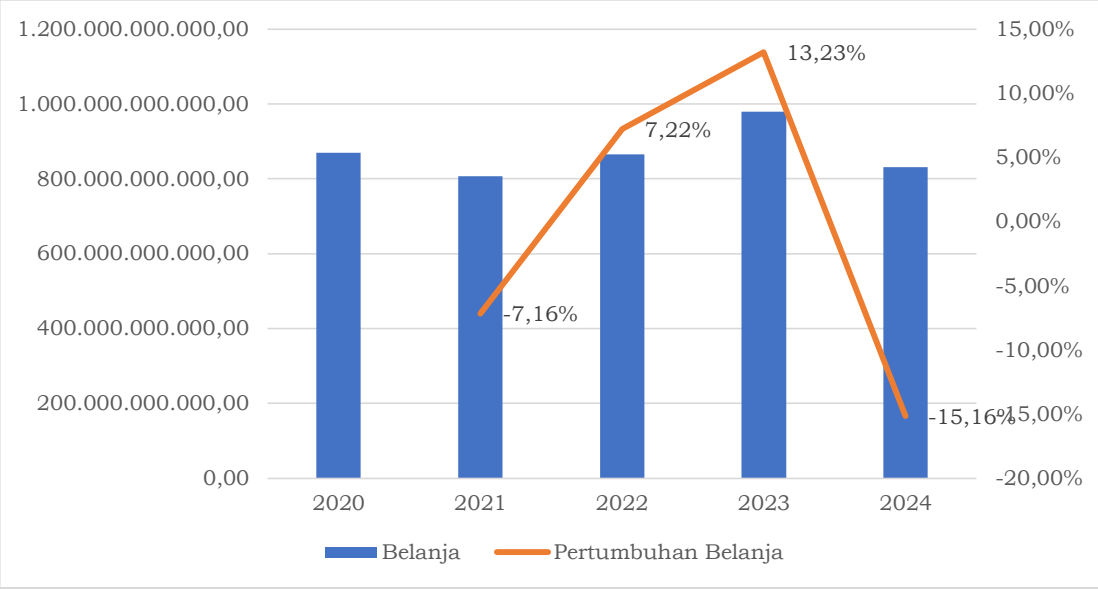

Gambar 2.55. Realisasi Belanja Daerah 2020-2024
Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Komponen belanja daerah terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja daerah tahun 2020-2024 dengan proporsi terbesar ada pada belanja operasional. Proporsinya meningkat dari 65,57% pada tahun 2020 menjadi 75,95% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah diarahkan untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta pemeliharaan. Meskipun penting untuk menjamin kelangsungan operasional pemerintahan, dominasi belanja operasi dapat mengindikasikan rendahnya kapasitas investasi daerah terhadap pembangunan jangka panjang.

Sebaliknya, belanja modal yang mencerminkan investasi pembangunan fisik, cenderung mengalami fluktuasi dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2020 proporsinya sebesar 18,37%, kemudian menurun menjadi 17,71% pada 2021, dan terus menurun hingga mencapai 12,49% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam memperkuat infrastruktur atau aset produktif daerah. Hal ini menjadi

sinyal perlunya peningkatan efisiensi fiskal dan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan strategis.

Sementara itu, belanja tidak terduga mengalami pengurangan drastis, dari 3,34% pada 2020 menjadi 0% sejak 2022. Ini dapat menunjukkan pergeseran kebijakan fiskal dalam manajemen risiko dan darurat, atau penyusunan anggaran yang lebih ketat dan efisien. Di sisi lain, belanja transfer relatif stabil, meskipun ada sedikit fluktuasi, yaitu dari 12,72% di tahun 2020 menjadi 11,56% pada 2024. Belanja ini merepresentasikan alokasi dana kepada pihak ketiga seperti desa atau instansi lain. Selengkapnya tersaji pada **Gambar 2.56** berikut ini.

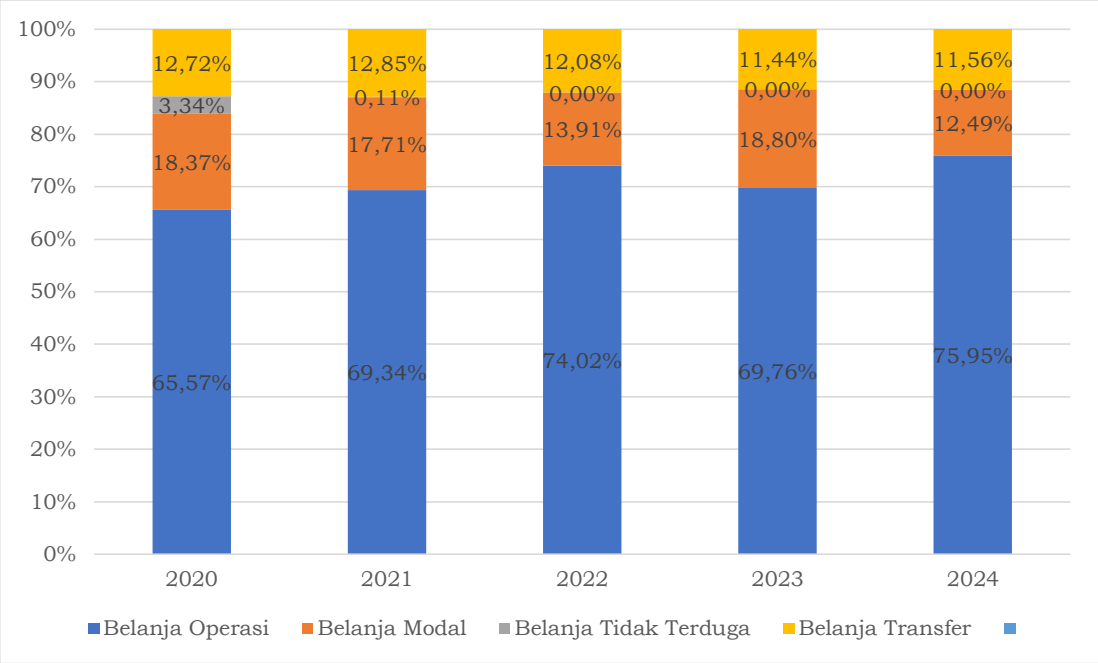

Gambar 2.56. Realisasi Komponen Belanja 2020-2024
Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Belanja operasional dalam APBD yang lebih besar berimplikasi penting bagi pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Belanja operasional yang besar menunjukkan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan pemeliharaan dan peningkatan kualitas layanan publik rutin seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan administrasi pemerintahan. Besarnya belanja operasional dapat menjadi indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ini juga bisa menunjukkan inefisiensi, seperti adanya pengeluaran yang tidak mendukung peningkatan pelayanan publik atau pembangunan jangka panjang.

Proporsi belanja operasional terlalu besar berimplikasi pada alokasi belanja modal yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, proyek-proyek pembangunan fisik, dan investasi lainnya berkurang. Hal ini dapat menghambat pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menjaga keseimbangan antara belanja

operasional dan belanja modal untuk memastikan bahwa kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dapat terpenuhi secara proporsional. Untuk itu, diperlukan inovasi pembiayaan pembangunan sebagai langkah penting dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

Beberapa upaya konkrit yang perlu dilakukan diantaranya adalah i) kerja sama *Multi Helix Public-Private Partnerships*, ii) revaluasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah, iii) mengupayakan dana insentif dan dana alokasi khusus (DAK) untuk proyek-proyek tertentu yang strategis dan prioritas, iv) diversifikasi sumber dana seperti dana internasional untuk mengurangi ketergantungan pada dana domestik, v) kerja sama internasional.

1.3.1.7. Neraca Daerah

Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan neraca daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai sumber informasi kepada manajemen Pemerintah Daerah mengenai likuiditas keuangan daerah, memberikan informasi tentang fleksibilitas keuangan *(financial flexibility)* serata sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Secara umum Neraca Daerah memiliki persamaan dasar yaitu:

$$Aset = Kewajiban + Ekuitas$$

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat dilihat dari posisi neraca terakhir yaitu Tahun Anggaran 2024. Untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap Neraca, diantaranya sebagai berikut.

Tabel 2.105. Rata-Rata pertumbuhan Neraca Daerah, 2020-2024 (Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR	**166.527.077.429,58**	**94.674.242.025,70**	**47.435.903.577,45**	**65.732.326.290,78**	**43.813.695.885,19**	**-24,09%**
Kas	10.096.149.957,31	48.091.005.786,26	6.984.586.830,57	23.949.728.959,68	2.222.061.797,29	110,76%
Piutang	128.854.219.113,27	17.123.089.896,10	14.086.873.298,87	13.518.807.748,99	17.795.503.079,7	-45,65%
Persediaan	27.576.708.359,00	29.460.146.343,34	26.364.443.448,01	28.263.789.582,11	23.796.131.008,20	4,61%
INVESTASI JANGKA PANJANG	**9.950.981.696,94**	**9.741.386.098,00**	**9.573.347.043,78**	**11.337.507.035,59**	**10.386.179.202,10**	**1,55%**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2.127.281.696,94	1.917.686.098,00	1.749.647.043,78	3.513.807.035,59	2.562.479.202,10	13,79%
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.823.700.000,00	7.823.700.000,00	7.823.700.000,00	7.823.700.000,00	7.823.700.000,00	0,00%
ASET TETAP	**1.758.946.124.017,43**	**1.853.623.664.891,94**	**1.796.366.335.170,89**	**1.832.411.541.800,93**	**1.788.214.365.710,30**	**2,76%**
Tanah	173.660.613.658,00	173.601.524.658,00	170.931.290.367,00	171.615.482.367,00	171.615.482.367,00	-0,29%
Peralatan dan mesin	375.293.976.515,04	383.628.984.631,10	406.419.495.119,10	459.753.167.299,10	486.175.619.991,1	6,84%
Gedung dan bangunan	738.387.805.838,38	772.073.734.567,88	899.205.878.959,68	926.886.684.259,33	960.163.136.909,33	7,02%
Jalan, irigasi, dan jaringan	1.047.634.801.886,14	1.066.886.084.146,45	1.206.459.143.728,28	1.294.517.038.574,14	1.359.868.793.774,63	4,61%
Aset tetap lainnya	14.177.949.435,00	14.700.612.035,16	14.700.612.035,16	16.202.632.592,16	17.579.137.862,16	5,69%
Konstruksi dalam pengerjaan	172.240.741.852,99	312.969.379.347,69	109.965.889.614,52	114.008.496.706,80	120.430.598.775,31	4,60%
Akumulasi Penyusutan	762.449.765.168,12	870.236.654.494,34	1.011.315.974.652,85	1.150.571.959.997,60	1.327.618.403.969,23	-38,97%
ASET LAINNYA	**45.100.293.174,27**	**13.489.563.329,70**	**28.347.021.833,27**	**32.527.099.632,70**	**19.906.176.355,04**	**18,27%**
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	79.846.550,00	65.134.050,00	705.579.539,17	300.055.779,93	849.286.283,93	
Aset Tidak Berwujud	46.727.936.544,00	46.864.204.544,00	47.339.437.644,00	47.339.437.644,00	47.339.437.644,00	0,33%
Aset Lain-lain	33.233.381.333,00	62.461.745.762,71	67.393.051.007,71	66.785.086.747,71	65.668.702.177,71	23,74%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	34.940.871.252,73	38.868.675.387,07	42.461.747.920,67	45.499.679.364,00	46.292.912.290,66	-43,09%

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan (%)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	57.032.845.639,94	57.951.009.224,94	57.951.009.224,94	51.575.072.459,94	
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0	-	13.321.710.788,00	21.553.208.050,00	3.916.735.000,00	
JUMLAH ASET DAERAH	**1.980.524.476.318,22**	**1.971.528.856.345,34**	**1.881.722.607.625,39**	**1.942.008.474.760,00**	**1.862.320.417.152,63**	**0,54%**
KEWAJIBAN	**1.565.123.882,00**	**119.063.925.064,32**	**20.019.260.646,01**	**3.026.794.345,36**	**95.268.542.032,92**	**2587,21%**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**1.565.123.882,00**	**119.063.925.064,32**	**20.019.260.646,01**	**3.026.794.345,36**	**95.268.542.032,92**	**2587,21%**
Pendapatan Diterima Dimuka	-	36.000.000,00	35.625.000,00	34.125.000,00	49.503.590,00	
Utang Belanja	1.466.079.882,00	47.822.123.966,00	5.002.008.905,90	2.893.625.345,36	95.219.038.443,34	1545,30%
Utang Jangka Pendek Lainnya	99.044.000,00	71.205.801.098,32	14.981.626.740,11	99.044.000,00	0	35857,07%
EKUITAS DANA	**1.978.959.352.436,22**	**1.852.464.931.281,02**	**1.861.703.346.979,38**	**1.938.981.680.414,64**	**1.767.051.875.119,71**	**-0,62%**
EKUITAS DANA LANCAR	**1.978.959.352.436,22**	**1.852.464.931.281,02**	**1.861.703.346.979,38**	**1.938.981.680.414,64**	**1.767.051.875.119,71**	**1,31%**
SiLPA						
Cadangan piutang						
Cadangan persediaan						
Ekuitas	1.978.959.352.436,22	1.852.464.931.281,02	1.861.703.346.979,38	1.938.981.680.414,64	1.767.051.875.119,71	-0,62%
EKUITAS DANA INVESTASI	**-**	**-**	**-**	**-**	-	
Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-	-	-	
Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.980.524.476.318,22**	**1.971.528.856.345,34**	**1.881.722.607.625,39**	**1.942.008.474.760,00**	**1.862.320.417.152,63**	**0,54%**

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa total aset Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan rata-rata sebesar 24,09 % per tahun dari 2020 hingga 2024. Meskipun demikian, pada tahun 2024, total aset mencapai Rp 2,019 triliun, yang merupakan nilai tertinggi dalam enam tahun terakhir. Dari lima komponen penyusun total aset, aset tetap memiliki kontribusi terbesar terhadap total aset Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan rata-rata distribusi tahunan sebesar 93,21%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Tabel 2.106** berikut.

Tabel 2.106. Persentase distribusi komponen penyusun total aset tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata distribusi
Aset Lancar	8,41%	4,80%	2,52%	3,38%	1,89%	4,20%
Investasi Jangka Panjang	0,50%	0,49%	0,51%	0,58%	0,51%	0,52%
Aset Tetap	88,81%	94,02%	95,46%	94,36%	96,86%	93,90%
Aset Lainnya	2,28%	0,68%	1,51%	1,67%	0,73%	1,57%

Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Tabel 2.106 menggambarkan komposisi distribusi komponen penyusun total aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa struktur aset pemerintah daerah sangat didominasi oleh aset tetap, yang proporsinya terus meningkat dari 88,81% pada tahun 2020 menjadi 96,86% pada tahun 2024, dengan rata-rata distribusi sebesar 93,90%. Peningkatan ini mengindikasikan kecenderungan orientasi fiskal pemerintah daerah yang lebih berfokus pada pengadaan dan pemanfaatan aset jangka panjang, seperti infrastruktur dan properti tetap, yang meskipun penting untuk pembangunan, memiliki tingkat likuiditas yang sangat rendah. Dominasi ini menunjukkan konsistensi dalam pembangunan fisik namun menyisakan ruang evaluasi terkait efisiensi pengelolaan aset untuk kebutuhan jangka pendek.

Sementara itu, aset lancar menunjukkan tren penurunan signifikan dari 8,41% di tahun 2020 menjadi hanya 1,89% pada tahun 2024. Dengan rata-rata distribusi sebesar 4,20%, penurunan ini mencerminkan berkurangnya kapasitas likuiditas jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Aset lancar memiliki peranan penting dalam mendukung kebutuhan kas operasional harian serta kemampuan untuk merespons situasi darurat atau belanja tak terduga. Ketidakseimbangan antara aset tetap dan aset lancar mengindikasikan adanya **GAP dalam pengelolaan aset**, khususnya dalam hal fleksibilitas keuangan jangka pendek. Hal ini dapat berimplikasi pada potensi rigiditas fiskal yang menghambat kelincahan respon pemerintah terhadap dinamika kebutuhan pembangunan lokal.

Komponen investasi jangka panjang tercatat stabil pada kisaran 0,49% hingga 0,58% selama lima tahun, dengan rata-rata distribusi hanya sebesar 0,52%. Skala investasi yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan potensi akumulasi aset yang dapat

memberikan nilai tambah di masa depan, seperti penyertaan modal pada BUMD atau bentuk investasi produktif lainnya. Padahal, dalam perspektif penguatan kemandirian fiskal daerah, strategi investasi jangka panjang dapat berkontribusi pada diversifikasi pendapatan daerah dan pengurangan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, aset lainnya menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata distribusi sebesar 1,57%. Penurunan dari 2,28% pada tahun 2020 menjadi 0,73% pada tahun 2024 dapat merefleksikan adanya perbaikan dalam klasifikasi aset atau justru pengurangan jenis aset yang tidak terstandarisasi. Namun demikian, secara umum, struktur total aset daerah masih menunjukkan dominasi komponen yang kurang likuid dan belum menunjukkan sinergi optimal antara dimensi aset produktif dan kebutuhan operasional jangka pendek. Oleh karena itu, dalam konteks manajemen keuangan daerah yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu merumuskan strategi pengelolaan aset yang lebih seimbang, termasuk optimalisasi aset lancar dan peningkatan proporsi investasi jangka panjang, guna mengurangi ketimpangan (GAP) struktur aset dan memperkuat ketahanan fiskal daerah.

1.3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah selama tahun anggaran 2020-2024, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai upaya, baik mengoptimalkan terhadap potensi yang ada (intensifikasi) maupun berupaya mengembangkan potensi potensi baru (ekstensifikasi). Intensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan terhadap subyek dan objek pajak/retribusi yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai. Sedangkan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan upaya memperluas subyek dan objek pajak/retribusi serta penyesuaian tarif yang nantinya akan berdampak pada kenaikan potensi pendapatan sehingga target pendapatan meningkat pada tahun berikutnya.

Upaya tersebut disamping mengembangkan faktor pendukung juga berupaya mengatasi faktor-faktor yang bisa jadi penghambat dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Dalam tahun anggaran 2020-2024, beberapa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

yang telah dilakukan dalam menunjang realisasi penerimaan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan. Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel dan grafik pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan **Tabel 2.107** sebagai berikut.

Tabel 2.107. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2020	352.276.430.743,00	871.234.988.650,27	40,43
2	Tahun anggaran 2021	274.063.269.975,54	808.470.912.182,23	33,90
3	Tahun anggaran 2022	308.350.657.013,00	866.767.979.709,20	35,57
4	Tahun anggaran 2023	333.755.055.240,00	982.270.183.929,64	33,98
5	Tahun anggaran 2024	354.110.209.828,00	831.708.174.336,00	42,58

Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Pengeluaran Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Total Pengeluaran Daerah. Dari tabel terlihat belanja pemenuhan Kebutuhan aparatur dikisaran 40,43%- 42,58%.

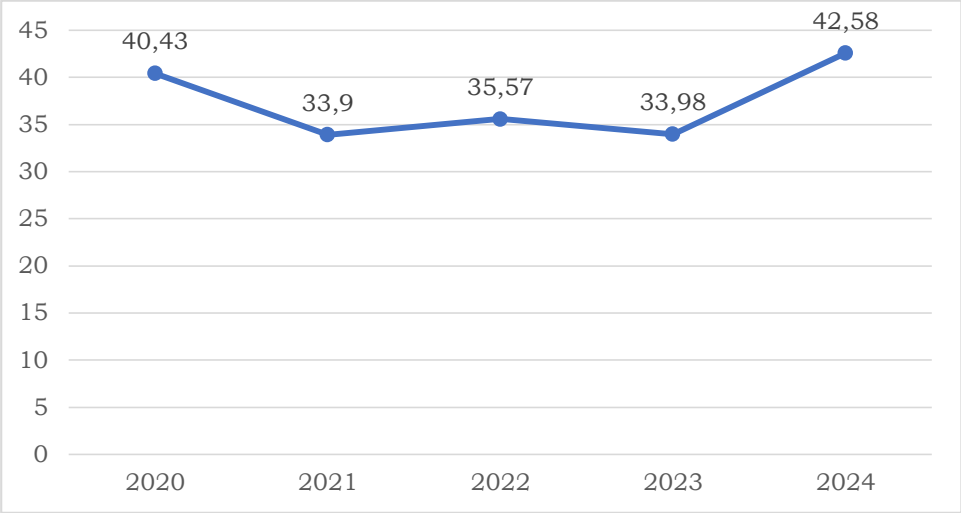

Gambar 2.57. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Pengeluaran Tahun 2020-2024
Sumber: LRA Kabupaten Kepulauan Anambas 2020-2024

Urgensi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dalam APBD terletak pada pentingnya memastikan kesejahteraan dan kinerja aparatur pemerintah, efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah. Namun juga, pemerintah daerah perlu mengelola anggaran secara bijak untuk memastikan bahwa belanja kebutuhan aparatur tidak mengorbankan alokasi untuk program-program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

1.3.2.2. Analisis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama ini sebagian besar masih bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan upaya pengelolaan keuangan daerah yang berhati-hati dan efisien dalam pelaksanaan belanja. Meskipun demikian, kontribusi dari sumber-sumber pembiayaan lainnya masih perlu ditingkatkan. Seiring dengan hal tersebut, ke depan diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi komposisi pembentuk SiLPA, apakah sepenuhnya berasal dari penghematan belanja daerah sebagai bentuk efisiensi anggaran, atau terdapat faktor lain seperti belum optimalnya realisasi belanja yang perlu menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola anggaran di masa mendatang.

Tabel 2.108. Defisit Riil Anggaran Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	816.788.855.634,18	845.562.863.756,18	824.553.991.952,51	998.370.281.042,73	808.996.283.869,94
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	817.280.938.650,27	807.470.912.182,23	865.767.979.709,20	980.270.183.929,64	831.708.174.336,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0
	Defisit riil	**-1.992.083.016,09**	**37.091.951.573,95**	**-42.213.987.756,69**	**16.100.097.113,09**	**-22.711.890.466,06**

Sumber: BPKAD, 2024

Tabel 2.109. Komposisi Penutup defisit riil 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari Total defisit riil			
		2020	2021	2022	2023
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	63.983.386.446,40	10.096.149.957,31	48.091.005.786,26	6.984.586.830,57
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	902.904.255,00	1.107.568.801,00	865.045.016,02
6	Penerimaan Piutang Daerah	558.896.527,00	0	0	0
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	**64.542.282.973,40**	**10.999.054.212,31**	**49.198.574.587,26**	**7.849.631.846,59**

1.3.3. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Perencanaan pembangunan bergantung pada keuangan daerah. Analisis proyeksi keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mendukung rencana pembangunan dan secara tepat mengidentifikasi masalah dan masalah strategis selama lima tahun ke depan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah untuk mendanai belanja wajib dan mengikat, prioritas utama dan program pembangunan jangka menengah, serta alokasi untuk belanja lainnya selama lima tahun ke depan. Proyeksi keuangan daerah juga bermanfaat untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai belanja wajib dan mengikat.

Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2025–2030 terdiri dari proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Proyeksi ini akan menghasilkan kapasitas keuangan riil Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2025–2030. Rincian APBD ini sebagai berikut:

Tabel 2.110. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025-2030 Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	URAIAN	2025 (PERUBAHAN)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	**PENDAPATAN DAERAH**						
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**52.976.977.660,00**	**56.155.596.319,60**	**57.995.819.571,81**	**60.895.610.550,40**	**62.722.478.866,92**	**64.604.153.232,92**
4.1.01	Pajak Daerah	25.422.015.531,00	26.947.336.462,86	27.755.756.556,75	29.143.544.384,58	30.017.850.716,12	30.918.386.237,60
4.1.02	Retribusi Daerah	4.891.678.070,00	5.185.178.754,20	5.496.289.479,45	5.771.103.953,42	5.944.237.072,03	6.122.564.184,19
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000,00	1.590.000.000,00	1.637.700.000,00	1.719.585.000,00	1.771.172.550,00	1.824.307.726,50
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.163.284.059,00	22.433.081.102,54	23.106.073.535,62	24.261.377.212,40	24.989.218.528,77	25.738.895.084,63
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**791.262.291.690,45**	**921.601.132.773,50**	**962.665.526.373,14**	**1.010.798.802.691,80**	**1.041.122.766.772,55**	**1.072.356.449.775,73**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	740.069.568.461,45	877.386.312.551,60	916.239.965.140,15	962.051.963.397,16	990.913.522.299,07	1.020.640.927.968,04
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.192.723.229,00	44.214.820.221,90	46.425.561.233,00	48.746.839.294,64	50.209.244.473,48	51.715.521.807,69
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**156.868.663,00**	**172.555.529,30**	**181.183.305,77**	**190.242.471,05**	**195.949.745,18**	**201.828.237,54**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	156.868.663,00	172.555.529,30	181.183.305,77	190.242.471,05	195.949.745,18	201.828.237,54
	JUMLAH PENDAPATAN	**844.396.138.013,45**	**977.929.284.622,40**	**1.020.842.529.250,72**	**1.071.884.655.713,26**	**1.104.041.195.384,66**	**1.137.162.431.246,19**
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	**BELANJA OPERASI**	**658.692.351.587,71**	**762.858.226.341,34**	**796.333.777.384,23**	**836.150.466.253,44**	**861.234.980.241,04**	**887.072.029.648,27**
5.1.01	Belanja Pegawai	468.252.931.967,21	542.302.639.917,74	566.099.826.703,45	594.404.818.038,62	612.236.962.579,78	630.604.071.457,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.040.563.832,50	216.619.234.207,31	226.124.864.455,75	237.431.107.678,54	244.554.040.908,89	251.890.662.136,16
5.1.05	Belanja Hibah	3.315.884.788,00	3.840.260.148,81	4.008.777.469,84	4.209.216.343,33	4.335.492.833,63	4.465.557.618,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	82.971.000,00	96.092.067,48	100.308.755,19	105.324.192,95	108.483.918,74	111.738.436,30

No.	URAIAN	2025 (PERUBAHAN)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
5.2	**BELANJA MODAL**	**73.098.599.203,20**	**82.005.911.480,69**	**85.582.533.198,67**	**89.836.659.858,60**	**92.516.759.654,36**	**95.277.262.443,99**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.706.591.329,77	22.822.999.648,96	23.824.512.726,13	25.015.738.362,43	25.766.210.513,30	26.539.196.828,70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.802.928.599,43	34.515.975.775,85	36.030.597.063,24	37.832.126.916,40	38.967.090.723,90	40.136.103.445,61
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.627.852.958,00	23.553.701.021,69	24.565.337.677,93	25.768.604.561,83	26.526.662.698,68	27.307.462.579,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	924.305.280,00	1.070.475.290,63	1.117.449.615,60	1.173.322.096,38	1.208.521.759,27	1.244.777.412,05
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036,00	42.759.743,56	44.636.115,77	46.867.921,56	48.273.959,21	49.722.177,98
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.147.263.978,83**	**15.226.377.619,17**	**15.894.537.656,76**	**16.689.264.539,60**	**17.189.942.475,78**	**17.705.640.750,06**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.147.263.978,83	15.226.377.619,17	15.894.537.656,76	16.689.264.539,60	17.189.942.475,78	17.705.640.750,06
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**102.179.985.041,00**	**118.338.769.181,20**	**123.531.681.011,07**	**129.708.265.061,62**	**133.599.513.013,47**	**137.607.498.403,87**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.542.567.672,00	5.260.931.159,96	5.491.790.005,68	5.766.379.505,96	5.939.370.891,14	6.117.552.017,88
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	97.637.417.369,00	113.077.838.021,24	118.039.891.005,39	123.941.885.555,66	127.660.142.122,33	131.489.946.386,00
	JUMLAH BELANJA	**847.118.199.810,74**	**978.429.284.622,40**	**1.021.342.529.250,72**	**1.072.384.655.713,26**	**1.104.541.195.384,66**	**1.137.662.431.246,19**
	SURPLUS/DEFISIT	**(2.722.061.797,29)**	**(500.000.000,00)**	**(500.000.000,00)**	**(500.000.000,00)**	**(500.000.000,00)**	**(500.000.000,00)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.222.061.797,29	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**2.722.061.797,29**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						

No.	URAIAN	2025 (PERUBAHAN)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	PEMBIAYAAN NETTO	**2.722.061.797,29**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**

1.3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih sesuai dengan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Semua uang yang diterima oleh daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah termasuk dalam pendapatan daerah. Ini meningkatkan ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya yang Sah merupakan bagian dari pendapatan daerah.

Didasarkan pada potensi komponen penyusun pendapatan daerah, terutama PAD dan Pendapatan Dana Transfer, serta tren rata-rata pendapatan dari tahun 2025–2030, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat sekitar 3,2 persen per tahun. Pendapatan daerah diperkirakan akan mencapai sekitar 847 Miliar pada tahun 2025 dan akan mencapai sekitar 1,137 triliun pada tahun 2030.

1.3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang HKPD), disebutkan ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11 Tahun 2023, jenis pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah. PAD Kabupaten Kepulauan Anambas diproyeksikan rata-rata tumbuh sekitar kurang lebih 3% persen per tahun selama periode 2025-2030. PAD Kabupaten Kepulauan Anambas diproyeksikan sebesar Rp 52,97 Miliar di tahun 2025 hingga Rp 64,6 Miliar di tahun 2030. Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sekitar 5,68% persen. Hal ini menunjukan bahwa optimalisasi terhadap potensi atau sumber-sumber pendapatan daerah menjadi sangat penting untuk terus digali dan ditingkatkan. PAD terbesar disumbang oleh pajak daerah, oleh karena itu Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan PAD khususnya dari BPHTB, pajak restoran, dan hotel.

Kebijakan yang perlu ditempuh untuk mendorong pencapaian target proyeksi PAD dalam lima tahun ke depan antara lain:

a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
b) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);

c) Penguatan dan perbaikan sistem pencatatan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang potensial untuk mengurangi potensi kehilangan pajak dan retribusi daerah.
d) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
e) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
f) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
g) Optimalisasi belanja daerah diarahkan untuk mengungkit pendapatan seperti mendorong pariwisata bertaraf internasional dan menjadikan Anambas sebagai pusat konvensi dan konferensi internasional;
h) Revaluasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
i) Optimalisasi creative finance melalui skema KPBU, CSR, dana umat, hibah, obligasi, dan sukuk; diversifikasi ekonomi lokal yang mengungkit perekonomian daerah; dan
j) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

1.3.3.1.2 Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer terdiri dari dua bagian: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari dana APBN yang diberikan kepada daerah untuk pelaksanaan desentralisasi, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah. Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari dana APBN yang diberikan kepada daerah.

Selama periode 2025–2030, diproyeksikan bahwa pendapatan transfer akan meningkat sekitar 3% per tahun. Ini diproyeksikan sebesar 793,69 Miliar rupiah pada tahun 2025 hingga 1,072 Triliun rupiah pada tahun 2030, dengan proporsi pendapatan transfer sebesar 97,81 persen dari total pendapatan daerah selama periode tersebut. Ini berarti bahwa selama lima tahun ke depan, pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan sebagian besar bergantung pada sumber pendapatan transfer. Untuk mencapai target proyeksi Pendapatan Dana Transfer dalam lima tahun ke depan, kebijakan berikut harus diterapkan:

a) Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk setiap objek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b) Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga di tingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan pendapatan transfer bagi kabupaten/kota;

c) Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

1.3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang tidak akan diterima kembali oleh pemerintah daerah. Belanja ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, serta untuk mendukung fungsi penunjang pemerintahan daerah. Belanja daerah juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Lebih lanjut, dalam pengelolaan belanja daerah, pemerintah daerah harus menjamin bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Belanja daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah harus dilakukan secara cermat dan terukur agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik. Proyeksi belanja daerah secara rinci disajikan pada **Tabel 2.111** berikut:

Tabel 2.111. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2030 Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	URAIAN	2025 (PERUBAHAN)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
5	**BELANJA DAERAH**						
5.1	**BELANJA OPERASI**	**658.692.351.587,71**	**762.858.226.341,34**	**796.333.777.384,23**	**836.150.466.253,44**	**861.234.980.241,04**	**887.072.029.648,27**
5.1.01	Belanja Pegawai	468.252.931.967,21	542.302.639.917,74	566.099.826.703,45	594.404.818.038,62	612.236.962.579,78	630.604.071.457,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.040.563.832,50	216.619.234.207,31	226.124.864.455,75	237.431.107.678,54	244.554.040.908,89	251.890.662.136,16
5.1.05	Belanja Hibah	3.315.884.788,00	3.840.260.148,81	4.008.777.469,84	4.209.216.343,33	4.335.492.833,63	4.465.557.618,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	82.971.000,00	96.092.067,48	100.308.755,19	105.324.192,95	108.483.918,74	111.738.436,30
5.2	**BELANJA MODAL**	**73.098.599.203,20**	**82.005.911.480,69**	**85.582.533.198,67**	**89.836.659.858,60**	**92.516.759.654,36**	**95.277.262.443,99**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.706.591.329,77	22.822.999.648,96	23.824.512.726,13	25.015.738.362,43	25.766.210.513,30	26.539.196.828,70
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.802.928.599,43	34.515.975.775,85	36.030.597.063,24	37.832.126.916,40	38.967.090.723,90	40.136.103.445,61
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.627.852.958,00	23.553.701.021,69	24.565.337.677,93	25.768.604.561,83	26.526.662.698,68	27.307.462.579,64
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	924.305.280,00	1.070.475.290,63	1.117.449.615,60	1.173.322.096,38	1.208.521.759,27	1.244.777.412,05
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	36.921.036,00	42.759.743,56	44.636.115,77	46.867.921,56	48.273.959,21	49.722.177,98

No.	URAIAN	2025 (PERUBAHAN)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**13.147.263.978,83**	**15.226.377.619,17**	**15.894.537.656,76**	**16.689.264.539,60**	**17.189.942.475,78**	**17.705.640.750,06**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.147.263.978,83	15.226.377.619,17	15.894.537.656,76	16.689.264.539,60	17.189.942.475,78	17.705.640.750,06
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**102.179.985.041,00**	**118.338.769.181,20**	**123.531.681.011,07**	**129.708.265.061,62**	**133.599.513.013,47**	**137.607.498.403,87**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.542.567.672,00	5.260.931.159,96	5.491.790.005,68	5.766.379.505,96	5.939.370.891,14	6.117.552.017,88
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	97.637.417.369,00	113.077.838.021,24	118.039.891.005,39	123.941.885.555,66	127.660.142.122,33	131.489.946.386,00
	JUMLAH BELANJA	**847.118.199.810,74**	**978.429.284.622,40**	**1.021.342.529.250,72**	**1.072.384.655.713,26**	**1.104.541.195.384,66**	**1.137.662.431.246,19**

Belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 3 persen per tahun. Hal ini didasarkan pada perkiraan komponen yang membentuk belanja daerah, terutama belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan modal untuk jaringan jalan dan irigasi. Belanja daerah diproyeksikan sebesar sekitar Rp 847 Miliar pada tahun 2025 dan sekitar Rp 1,137 triliun pada tahun 2030.

Dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, belanja daerah memainkan peran penting. Oleh karena itu, prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel harus diterapkan dalam pengelolaan belanja mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan. Efektivitas dan efisiensi bermaksud bahwa dana yang tersedia harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat dan, pada akhirnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparan dan akuntabel, dengan semua pengeluaran diumumkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan belanja daerah lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a) Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan;
b) Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki *multiplier effects* dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk akses dan kualitas layanan bagi kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan masyarakat adat);
c) Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan OPD sesuai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran OPD dan sasaran daerah;
d) Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja langsung secara selektif;
    1. Memperhatikan belanja wajib atau mandatory spending antara lain:
    2. Anggaran bidang Urusan Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat (1);
    3. Belanja Pegawai yang diperkenankan maksimal 30 persen dari APBD (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).
    4. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (Undang-Undang APBN).

1.3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA), penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Pembiayaan Daerah selama 2025-2030 diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya atau rata-rata. Peningkatan Pembiayaan Daerah ini untuk menutupi Defisit Anggaran yang meningkat setiap tahunnya. Sumber pembiayaan daerah terbesar diperoleh dari SILPA tahun sebelumnya yang nilainya berfluktuasi setiap tahunnya selama 2025-2030. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan Pembiayaan Daerah untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan dengan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan *output* dan *outcome*;
b) Mengupayakan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah;
c) Mengupayakan raihan SiLPA sekecil mungkin untuk mencapai penyerapan anggaran yang efektif dan efisien dengan prinsip yaitu:
    1. Menutupi defisit anggaran;
    2. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
    3. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
    4. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
    5. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
    6. Mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

1.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan suatu daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi melalui berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

2025-2029 diidentifikasi melalui suatu permasalahan pembangunan daerah yang dirumuskan dari Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, dan hasil FGD/penjaringan rumusan permasalahan pada seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Terdapat 4 (aspek) kelompok permasalahan utama yang dibagi berdasarkan keempat aspek gambaran umum kondisi daerah, dengan uraian sebagai berikut:

1.4.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Upaya Penanggulangan Sampah dan Limbah yang Belum Optimal

Sampah dan limbah menjadi salah satu isu krusial di berbagai wilayah tak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adanya peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya sampah rumah tangga. Jenis sampah ini menjadi sumber terbesar timbulan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini. Sampah tersebut dapat berupa sisa makanan, kaleng, botol, plastik, kardus, dan bahan lainnya. Dalam proses pengelolaan sampah sebagian besar masyarakat belum memahami tentang pengelolaan sampah melalui metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sepanjang tahun 2024 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 5.375,79 ton/km2 dengan daerah layanan kurang lebih 174,97 km2. Dari total sampah yang ada, sampah yang terkelola hanya sekitar 6,21 persen. Sementara 93,79 persen sisanya belum terkelola dengan baik.

Kurang maksimalnya penanganan sampah ini dapat sebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan daerah kepulauan sehingga jarak antara perumahan warga dengan lokasi pengelolaan sampah cukup jauh dan susah untuk diakses. Hal ini perlu diantisipasi karena timbulan sampah yang semakin menumpuk dan tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan hama dan penyakit dan mengancam kesehatan, terutama untuk sampah yang susah didaur ulang seperti plastik dan yang mengandung bahan kimia beracun. Kondisi ini semakin memburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah di sekitar rumah yang posisinya berada di pesisir laut. Selain akan mengganggu kesehatan juga akan mengganggu keindahan lingkungan.

Penyediaan lahan khusus untuk pengelolaan sampah dan limbah menjadi faktor penting dalam permasalahan ini, salah satunya adalah akibat keterbatasan anggaran dalam penyediaan lahan untuk pengelolaan sampah. Hal ini menyebabkan semakin rendahnya jumlah sampah dan limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) yang dapat dikelola. Pemerintah rasanya sulit untuk menyelesaikan permasalahan ini sendiri, sehingga perlu meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan swasta dan masyarakat setempat dalam pembangunan TPST.

2. Infrastruktur Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Belum Memadai

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah yang belum memadai menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Anambas. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan bahkan ekonomi. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya menjadi salah satu faktor utama penyebabnya.

Berdasarkan data Statistik Potensi Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024, ketersediaan tempat penampungan sampah sementara, baru mencapai 26 unit. Dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, masih ada kecamatan yang belum memiliki ketersediaan tempat penampungan sampah sementara yaitu Kecamatan Kute Siantan. Terdapat juga tiga kecamatan yang baru memiliki satu unit tempat penampungan sampah sementara yaitu Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Barat, dan Kecamatan Siantan Tengah. Infrastruktur tersebut dirasa masih kurang sehingga belum bisa menangani masalah pengelolaan sampah secara optimal. Ditambah masih kurangnya investasi dan pengembangan teknologi untuk mendaur ulang sampah menjadi hambatan untuk praktik reuse dan recycle. Minimnya fasilitas tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu.

Selain sampah, limbah B3 memiliki ancaman yang lebih berbahaya untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dalam pengelolaannya biasanya memerlukan investasi dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampah dan limbah biasa lainnya. Limbah B3 yang ditimbulkan berasal dari berbagai sektor diantaranya:

1) Sektor kelautan dan perikanan,
   Aktivitas penangkapan hasil laut, pengelolaan hasil laut, dan pembuatan kapal sering kali menghasilkan limbah B3 seperti obat-obatan hewan, bahan kimia pembersih, sisa bahan pakan, dan cat.

2) Usaha Pembuatan Perahu dan/atau Bagan,
   Aktivitas pembuatan perahu dan/atau bagan yang menggunakan kayu dan dilakukan di pinggir pantai/laut yang biasa menggunakan bahan kimia seperti lem kayu dan cat kayu dapat menghasilkan limbah B3.

3) Kesehatan,
   Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan tempat praktik dokter sering menghasilkan limbah B3 dari jarum suntik, kapas bekas, darah, botol, dan sisa obat-obatan.

4) Jasa, pertambangan, dan
   Kegiatan penambangan pasir, batu granit, dan mineral lainnya menghasilkan limbah B3 berupa debu, lumpur, dan sisa bahan kimia yang digunakan dalam proses penambangan

5) Rumah tangga.
   Limbah B3 dari rumah tangga bisa seperti bekas detergen, produk kecantikan, dan tempat makanan dan minuman yang susah terurai.

3. Upaya Pelestarian DAS dan Daerah Resapan Air yang perlu Diperkuat

Perlindungan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan daerah resapan air merupakan salah satu kunci dalam menjamin ketersediaan air baku di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sumber air baku di Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan berasal dari beberapa sumber diantaranya sungai, bendung (Bendung Matan, Bendung Jetis, dan Bendung Dapit), serta embung (Embung Gunung Samak, Embung Matak, Embung Telaga, dan Embung Gunung Lintang). Air sungai yang bersumber dari beberapa air terjun seperti Air Terjun Temburun dan Air Terjun Neraja di Jemaja. Sementara, sumber air tanah diperoleh dari sumur. Kedalaman muka air tanah pada wilayah daratan berkisar antara 1-3 m, sedangkan untuk daerah dengan topografi berbukit kedalaman muka air tanahnya antara 1-7 m.

Namun disisi lain, semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan laju pembangunan meningkat. Konsekuensi dari hal tersebut adalah pembukaan kawasan hutan yang menyebabkan daerah tangkapan air menjadi semakin berkurang. Kebutuhan bahan bangunan seperti kayu mendorong industri atau masyarakat melakukan penebangan hutan. Aktivitas tersebut sering kali kurang memperhatikan kelestarian lingkungan karena pengetahuan dan kesadaran yang minim tentang lingkungan. Berbagai dampak negatif akan muncul jika aktivitas tersebut dilakukan secara terus menerus tanpa adanya kebijakan yang tepat. Berkurangnya luas kawasan hutan akan menyebabkan jumlah air yang tersimpan semakin berkurang dan meningkatkan laju aliran serta sedimentasi. Sedimentasi yang meningkat pada saluran drainase menyebabkan pendangkalan dan menghalangi proses pembuangan air ke laut. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2045, luas hutan di wilayah ini akan semakin menurun. Luas kawasan hutan tahun 2023 sebesar 28.844 ha, sementara pada tahun 2029 diperkirakan menjadi 28.505 ha atau mengalami penurunan sebesar 1,17 persen dalam jangka waktu lima tahun. Untuk jangka panjang kualitas dan persentase hutan yang semakin menurun akan berpotensi menimbulkan risiko bencana seperti longsor, banjir bandang, dan kekeringan.

4. Adanya Ancaman Daerah terhadap Bencana, Kebutuhan Pangan, dan Ketersediaan Energi

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki ancaman terhadap potensi bencana seperti kebakaran hutan, tanah longsor, gelombang ekstrem, banjir, abrasi, kekeringan serta cuaca ekstrem. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Indeks Risiko Bencana dengan skor 90.50 atau memiliki kelas risiko SEDANG. Skor tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 89,41 pada tahun 2023. Namun demikian jika dilihat secara lebih detail pada indeks risiko per ancaman, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tiga jenis bencana yang memiliki Kelas Risiko Tinggi yaitu terdiri dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan skor 13.25, Bencana Tanah Longsor dengan skor 19.87, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi dengan skor 29.80.

Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa lokasi pantai mengalami kerusakan karena hantaman gelombang tersebut. Meskipun terbilang jarang terjadi bencana kebakaran hutan dan permukiman sering kali membuat pemerintah dan masyarakat tidak siap dalam menghadapinya. Hal tersebut disebabkan karena ketidakcukupan sumberdaya dan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana alat serta pemadam kebakaran yang berukuran kecil sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ancaman bencana kekeringan akibat perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan kegagalan panen. Kondisi tersebut dapat mengganggu ketahanan pangan daerah. Pada masa tersebut sering kali harga bahan pangan menjadi sangat mahal, ditambah dengan adanya pengaruh terhambatnya distribusi bahan makanan akibat adanya gelombang ekstrem. Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas masih mengandalkan bahan pangan terutama beras dari luar daerah seperti Kota Tanjung pinang dan Batam. Hal tersebut dilakukan karena produksi pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri belum optimal. Hasil proyeksi kebutuhan pangan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2045 menunjukkan bahwa sampai tahun 2028 masih mengalami defisit sebesar 1.665,66 ton/tahun, sementara pada tahun 2029 baru mulai surplus. Kondisi seperti ini perlu diantisipasi dengan meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penetapan wilayah yang bisa berpotensi sebagai lokasi cadangan pangan berkelanjutan. Apabila dilihat dari daya dukung lahan dalam penyediaan pangan, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi sedang hingga tinggi dengan total luas lahan sebesar 41.062,51 ha.

Dalam mitigasi ancaman bencana dan kerentanan pangan, ketersediaan energi yang cukup sangat diperlukan. Namun faktanya masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki keterbatasan dalam penyediaan energi listrik. Saat ini mayoritas wilayahnya masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai sumber energi utama. PLTD ini umumnya berkapasitas kecil dan tersebar di beberapa pulau sehingga

wilayah tertentu masih mengalami pemadaman listrik terutama saat musim hujan atau angin kencang. Penyelesaian terhadap masalah energi di Kabupaten Kepulauan Anambas masih sulit karena baik pemerintah maupun masyarakat memiliki kesadaran yang rendah terhadap pemanfaatan dan pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT). Ditambah belum adanya kebijakan daerah dalam mendukung implementasi energi tersebut membuat pemerintah susah dalam menjalin kerja sama dengan pihak swasta karena investasi awal terhadap jenis energi ini terbilang cukup tinggi.

5. Perlindungan Sumberdaya dan Kelestarian Lingkungan yang Belum Memadai

Perlindungan terhadap keberlanjutan potensi sumberdaya dan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi, seperti eksploitasi sumberdaya perikanan yang berlebihan yang menyebabkan ekosistem laut rusak. Ditambah lagi pemanfaatan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan menyebabkan kekayaan laut semakin berkurang. Akibatnya nelayan akan sulit untuk mendapatkan ikan. Untuk mengendalikan permasalahan tersebut diperlukan kebijakan yang jelas terkait pembatasan kewenangan dalam mengelola potensi sumberdaya kelautan perikanan. Pada sisi lain Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas sebagai kawasan konservasi. TWP ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang kaya, termasuk terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya. Selain itu, TWP ini juga menjadi habitat bagi penyu dan ikan Napoleon yang dilindungi.

Permasalahan lainnya yaitu kerusakan hutan akibat kebakaran, penebangan kayu ilegal, dan konversi lahan membuat punah satwa dan spesies tertentu. Walaupun pada tahun 2023 tutupan lahan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih didominasi oleh kawasan berhutan, terutama Hutan Lahan Kering Sekunder yang mencakup luas sekitar 42.395,92 hektar atau 67,42% dari total wilayah daratan, namun upaya pelestarian dan penyelamatan tetap perlu dilakukan. Terlebih dalam penyelamatannya belum ada dana dan sumberdaya yang cukup untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah. Hal ini tentunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem alami yang terbentuk. Untuk meminimalisir kerusakan tersebut maka sangat diperlukan dukungan dari berbagai komunitas.

Cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Anambas juga merupakan warisan yang harus tetap dijaga, namun beberapa warisan cagar budaya tersebut belum ditetapkan statusnya hingga saat ini. Pada tahun 2023, persentase penetapan terhadap total pendaftaran untuk kategori benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya tercatat masih 0%, yang menunjukkan belum adanya objek budaya berwujud yang secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pihak berwenang. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya upaya perlindungan dan pelestarian

terhadap aset budaya fisik di wilayah tersebut, baik dari segi identifikasi, dokumentasi, maupun penetapan hukum. Sementara itu, capaian pada kategori warisan budaya tak benda lebih menunjukkan kemajuan, meskipun masih terbatas, dengan 17% dari total pencatatan telah ditetapkan secara resmi. Diperlukan peningkatan usaha dalam melestarikan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaporan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang harus dilakukan setiap tahunnya. Hal tersebut akan menyebabkan hilangnya data dan bukti, memudarnya tradisi dan kearifan lokal, serta kesulitan dalam melaporkan WBTB.

6. Penurunan Kualitas Lingkungan di Kawasan Perkotaan

Dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Anambas, terjadi peningkatan aktivitas di lingkungan perkotaannya. Peningkatan aktivitas ini juga menyebabkan bertambah padatnya arus lalu lintas di jalan, namun pengaturan dan aksesibilitas jaringan jalan belum sesuai dengan standar. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya kemacetan dan dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan akibat polusi udara dari kendaraan. Migrasi penduduk ke daerah perkotaan juga meningkatkan beban terhadap infrastruktur dan layanan publik, sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan ini diperparah dengan belum terpenuhi dan memadainya fasilitas kebutuhan dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah, serta belum optimalnya pembangunan progres pembangunan fasilitas pendukung, seperti taman, ruang terbuka hijau, dan sistem pembuangan limbah. Potensi bencana alam seperti banjir dan gelombang pasang akan semakin tinggi dan berbahaya jika sistem drainase dan tata kelola wilayah kurang baik.

Kondisi di atas mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menunjukkan penurunan nilai dari tahun 2023 dengan nilai 82,32 ke tahun 2024 dengan nilai 80,61. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan signifikan pada Indeks Kualitas Air (IKA), yang pada tahun 2023 mencapai nilai 70,00 kemudian turun menjadi 60,00 pada tahun 2024. Dinamika ini mencerminkan kerentanan sistem lingkungan Anambas terhadap berbagai tekanan, baik faktor alamiah maupun antropogenik. Meskipun kualitas udara dan lahan menunjukkan performa yang stabil dan baik, kualitas air yang tidak konsisten menjadi faktor pembatas utama. Kondisi ini menyiratkan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih terfokus pada pengelolaan sumber daya air terpadu, sambil mempertahankan capaian positif di sektor pengelolaan udara dan lahan, untuk memastikan peningkatan IKLH yang berkelanjutan di masa depan.

1.4.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang belum Optimal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas sangat bergantung pada sektor pertambangan, yang secara umum tidak dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan bahkan diperparah dengan tingginya tingkat kemiskinan. Kabupaten Kepulauan Anambas perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil seperti diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain, seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa. Selain itu, perlu adanya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami perlambatan pada tahun 2024, yaitu sebesar -5,67 persen. PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas yang tidak berputar di dalam daerah akibat perilaku masyarakat yang rata-rata belanja di luar daerah (kebocoran ekonomi wilayah) menyebabkan minimnya perputaran uang di daerah tersebut. Sehingga perlu dorongan kepada masyarakat untuk belanja di dalam daerah, hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanan lokal, serta membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi.

2. Produktivitas Masyarakat di Sektor Pertanian dan Harga Pangan yang Tidak Stabil

Produktivitas masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya akses terhadap teknologi dan pengetahuan, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya motivasi dari masyarakat. Akibatnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi salah satu andalan kabupaten juga mengalami laju pertumbuhan yang menurun pada tahun 2023 yang mencapai 2,77 persen namun kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 0,49 persen.

Kurangnya produktivitas terutama produk hasil pertanian dapat berpengaruh terhadap harga pangan yang menjadi tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya akses terhadap modal, infrastruktur yang tidak memadai, dan penggunaan teknologi yang masih tradisional. Sehingga perlu adanya stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan terjangkau. Upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilakukan dengan mengadakan Gerakan Pangan Murah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan akses terhadap pangan yang murah. Peningkatan efektivitas Gerakan Pangan Murah perlu dilakukan dengan memperluas jangkauan program, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, dan meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan.

3. Nilai Karakter dan Budaya Masyarakat mulai Menurun

Perkembangan era globalisasi yang masif tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif terhadap nilai karakter dan budaya masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Posisi strategis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memudahkan masuknya budaya asing melalui kunjungan para wisatawan dari luar negeri. Mulai banyaknya wisatawan asing yang berkunjung di Kabupaten Kepulauan Anambas memang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah. Namun, di sisi lain, kunjungan wisatawan asing tersebut dapat dengan mudah mempengaruhi karakter dan budaya masyarakat Anambas, terutama para generasi muda yang masih rentan terhadap pengaruh budaya asing. Gempuran budaya asing di era globalisasi yang telah masuk ke Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini belum diimbangi dengan penguatan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai karakter dan budaya. Di samping itu, literasi masyarakat setempat termasuk literasi digital tentang pentingnya pendidikan karakter dan budaya juga masih rendah.

Beberapa dampak globalisasi yang dirasakan di tengah masyarakat Anambas sehingga berdampak pada menurunnya nilai karakter dan budaya, diantaranya adalah sikap individualisme dan kurang toleran meningkat, serta kepedulian terhadap sosial dan lingkungan menurun. Globalisasi juga mengubah gaya hidup masyarakat ke arah lebih modern dan konsumtif, sehingga menimbulkan kapasitas lingkungan menurun dengan semakin meningkatnya timbulan sampah, baik sampah plastik maupun elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai karakter dan budaya masyarakat setempat mulai menurun, terutama dalam segi kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan dan sosial sekitar perlu dibina sejak dini, namun karena pengaruh globalisasi, saat ini perhatian orang tua terhadap perkembangan anak dan penerapan gaya hidup sehat mulai berkurang. Kompleksitas kondisi yang terjadi di masyarakat tersebut dengan adanya pengaruh globalisasi, dapat dengan mudah menggeser dan melunturkan nilai-nilai karakter dan budaya lokal masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penguatan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan serta peningkatan literasi masyarakat untuk mengatasi lunturnya nilai-nilai karakter dan budaya perlu diupayakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Penguatan pendidikan karakter ini dapat menjadi bekal generasi penerus bangsa untuk menghadapi pengaruh globalisasi, terutama pengaruh budaya asing yang masuk di Kabupaten Kepulauan Anambas. Literasi dan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan tidak hanya mendidik generasi penerus memiliki pengetahuan saja, namun juga memiliki karakter sesuai kepribadian bangsa dan budaya lokal masyarakat Anambas. Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal secara resmi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor 20 Tahun 2018, bahwa

terdapat 18 nilai-nilai budaya yang harus ditanamkan melalui pendidikan karakter di sekolah, diantaranya meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan perlu diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas agar tercipta generasi berilmu dan berkarakter yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar.

4. Kesadaran Masyarakat terhadap Urgensi Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan Masih Rendah

Perwujudan Kabupaten Kepulauan Anambas yang maju, nyaman, dan berkelanjutan di masa depan perlu diimbangi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan dan lingkungan. Kesehatan dan pendidikan merupakan fondasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan juga berkaitan erat dengan eksistensi kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Berkaitan dengan pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, kondisi eksisting menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap urgensi kondisi kesehatan, pendidikan dan lingkungan masih cukup rendah. Sehubungan dengan bidang kesehatan, gaya hidup dan perilaku masyarakat saat ini kurang memperhatikan risiko kesehatan, seperti kebiasaan merokok, pernikahan dini, pola konsumsi makanan yang homogen tanpa asupan gizi, dan perilaku lainnya yang merugikan kesehatan. Berdasarkan statistik kesehatan dunia, menempati peringkat pertama di ASEAN dengan jumlah laki-laki sebagai perokok aktif terbanyak sebesar 73,6 persen (WHO, 2024)[1]. Proporsi perokok terbanyak berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, sehingga Kabupaten Kepulauan Anambas juga tercakup di dalamnya (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Tingginya jumlah perokok di wilayah ini salah satunya dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang bahaya rokok kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat terkait bahaya rokok sangat kurang, termasuk pengawasan kepada anak remaja terhadap pembelian rokok juga masih kurang. Selanjutnya untuk angka pernikahan dini, Kabupaten Kepulauan Anambas pernah menempati urutan pertama dengan persentase angka pernikahan tinggi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sekitar 50 persen, yaitu pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19, sementara kabupaten dan kota lainnya sekitar 10-40 persen (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, 2023). Pada lingkup internasional, saat ini Indonesia

1 World Health Organization, 2024

menempati urutan ke-4 di dunia dalam distribusi jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, yaitu sebesar 25,53 juta orang (UNICEF, 2024)[2]. Tingginya angka pernikahan dini secara global termasuk di daerah, seperti Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka tersebut. Namun demikian, kurangnya pengawasan dari orang tua dan kesadaran tentang risiko kesehatan pada pernikahan dini juga menyebabkan angka pernikahan dini tinggi. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menekan angka tersebut. Pada bidang kesehatan, secara umum, sosialisasi dan edukasi tentang kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang dan belum optimal. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai aspek kesehatan, seperti kesehatan ibu hamil dan melahirkan, gizi seimbang, penyakit menular termasuk penyakit menular seksual, deteksi dini pengobatan HIV, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan kesehatan balita yang perlu diperiksa rutin di posyandu. Penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi tentang kesehatan masyarakat perlu digalakkan di masa depan agar kesadaran, pemahaman, dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi kesehatan meningkat.

Tidak hanya kesadaran di bidang kesehatan yang mulai menurun, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga masih rendah, sehingga kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang dan terbatas jika dilihat dari kondisi pendidikan. Jumlah SDM di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan lulusan S1 dan S2 tidak mencapai 10 persen dari jumlah penduduk, yaitu sebesar 7,5 persen atau sejumlah 747 orang per 10.000 jiwa penduduk pada tahun 2023. APK dan APM Kabupaten Kepulauan Anambas pada jenjang SMA/MA/SMK juga masih dalam kelompok urutan tiga terbawah jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Rendahnya kesadaran masyarakat setempat terhadap pendidikan juga ditunjukkan oleh tingginya jumlah penduduk yang tergolong dalam kelompok penduduk tidak sekolah, belum tamat SD, dan tamat SD pada riwayat pendidikan terakhir yang dimiliki masyarakat setempat. Pada tahun 2022, persentase penduduk yang tidak bersekolah mencapai 31 persen, belum tamat SD sebesar 11 persen, dan tamat SD sebesar 27 persen (DISDUKCAPIL KKA, 2023)[3]. Riwayat pendidikan terakhir yang masih rendah menyebabkan pengetahuan masyarakat terhadap beberapa wawasan dan pengetahuan pada berbagai aspek kehidupan juga terbatas. Salah satunya, pengetahuan tentang mitigasi bencana, adaptasi kebencanaan, kesiapsiagaan dan penyelamatan terhadap kebencanaan, di mana pengetahuan-pengetahuan ini penting bagi masyarakat kepulauan dalam menghadapi dan mengambil tindakan penyelamatan saat terjadi bencana, terutama mitigasi bencana bagi

[2] United Nations Children's Fund, 2024

[3] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, 2023

kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan masyarakat adat. Terbatasnya wawasan dan pengetahuan sebagian besar penduduk setempat perlu mendapat perhatian khusus pemerintah daerah, salah satunya dengan memberikan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Selain di bidang kesehatan dan pendidikan, kesadaran dan kepedulian masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap lingkungan juga masih rendah. Perilaku dan kebiasaan yang tidak peduli terhadap kelestarian lingkungan masih banyak dipraktikkan masyarakat, seperti tidak membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah di laut, dan tidak mengelola limbah sampah dengan baik termasuk limbah B3. Pemahaman masyarakat juga masih kurang terhadap pentingnya mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang menjadi konsep penting dalam manajemen limbah dan pelestarian lingkungan. Tidak hanya masyarakat, kepedulian dan pemahaman beberapa perusahaan swasta juga masih kurang terhadap isu lingkungan yang berdampak pada jangka panjang dan praktik bisnis yang ramah lingkungan untuk jangka panjang belum diimplementasikan secara sempurna.

1.4.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1. Rendahnya Aktualisasi Gagasan Mengenai Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Kebijakan mengenai pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah masih dalam tahapan menghadapi tantangan. Kabupaten Kepulauan Anambas belum memiliki kajian atau masterplan percepatan dan pembangunan ekonomi perikanan yang komprehensif. Dukungan kebijakan seperti penganggaran dan sistem informasi dalam pengembangan sektor perikanan juga masih rendah. Program Pemerintah Daerah belum memenuhi kebutuhan untuk penerapan teknologi perikanan mutakhir dan sistem rantai pasok yang terintegrasi. Hal ini dapat dilihat di WPP 711 peraturan Keputusan Menteri KP Nomor 19 tahun 2022, bahwa hasil tangkapan nelayan belum optimal. Selain itu, belum ada kepastian komitmen dari pemerintah dalam tahap pengembangan sektor pariwisata dan perikanan, sehingga program-program yang ada belum mampu memberikan dukungan yang memadai untuk pengembangan sektor-sektor tersebut.

Potensi perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas sebenarnya sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah serangan penyakit pada ikan yang menjadi hambatan dalam budidaya ikan, harga permintaan rumput laut yang rendah, selain itu sarana produksi budidaya yang terbatas dan relatif mahal serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pembudidaya ikan dan rumput laut turut mengalami seleksi alam yang sangat besar. Pengembangan budidaya

ikan dan rumput laut yang seharusnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga belum optimal. Selain itu, hasil perkebunan yang rendah berdampak pada belum berkembangnya produk turunan hasil pertanian dan perkebunan, sehingga potensi dari sektor ini belum termanfaatkan dengan baik.

Sektor pariwisata, pembangunan yang berkelanjutan belum optimal dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata alam, upaya pelestariannya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam manajemen dan pengelolaan destinasi wisata masih minim, demikian juga dengan promosi dan pemasaran pariwisata yang terbatas. Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki tipe pariwisata minat khusus belum memiliki pelabuhan kapal yacht yang memadai dalam kategori skala besar, meskipun banyak kapal transportasi umum dan kapal logistik yang datang ke daerah ini. Selain itu, pengunjung kawasan wisata atau wisatawan belum teridentifikasi dengan baik sehingga jumlah wisatawan yang terdata masih minim.

Dalam sektor industri kreatif, khususnya produksi batik mangrove genting pulur, terdapat kendala pada bahan baku kain dan pewarna yang masih harus didatangkan dari Pulau Jawa, serta masih bergantung pada pelatih yang berdomisili di luar daerah. Harga jual yang tinggi karena bahan baku didatangkan dari luar juga menjadi tantangan, ditambah dengan pemasaran batik yang terbatas di lingkup lokal karena biaya pengiriman ke luar daerah sangat tinggi. Pemasaran dan promosi batik mangrove ke luar kota pun terbatas, sehingga peminat batik mangrove hanya terbatas pada kalangan tertentu. Produk unggulan asli daerah seperti pala juga belum dipasarkan secara massal sehingga kurang dikenal.

Optimalisasi pengelolaan sumber daya maritim (perikanan dan pariwisata) sebagai basis perekonomian daerah juga menghadapi berbagai hambatan. Kabupaten Kepulauan Anambas belum masuk ke dalam lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Bappenas untuk bidang pariwisata dari tahun 2022 hingga 2025, yang berdampak pada belum dibukanya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik untuk bidang pariwisata. Kurangnya pengembangan kawasan strategis pariwisata serta terbatasnya pembangunan daya tarik pariwisata prioritas karena kepemilikan dan hak kelola lahan yang belum bersih dan jelas juga menjadi kendala. Selain itu, kurangnya diversifikasi ekonomi, akses ke pasar dan peluang bisnis yang terbatas, serta belum tersedianya peralatan atau mesin produksi yang dapat meningkatkan masa kedaluwarsa produk-produk UMKM seperti cumi-cumi asin, ikan teri asin, ikan tongkol dan cakalang asap, ikan beku, cumi-cumi beku dan kerupuk atom.

2. Pengembangan Sektor Industri dan Teknologi Masih Terhambat dan Belum Menunjukkan Hasil yang Optimal

Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mengembangkan sektor industri dan pariwisata yang berkelanjutan.

Tingkat kesadaran tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan di kalangan wisatawan maupun komunitas lokal masih rendah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan sistematis. Rendahnya peran dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perkembangan ekonomi wilayah menjadi salah satu kendala utama. Banyak bahan mentah atau bahan baku yang diekspor tanpa diolah lebih lanjut, yang menyebabkan kebocoran nilai tambah ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal.

Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2021 (2,18 persen) menuju tahun 2022 (3,13 persen), laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan harus mengalami penurunan secara berturut-turut pada tahun 2023 dan di tahun 2024. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan industri pengolahan turun menjadi 1,47 persen dan kemudian pada tahun 2024 turun kembali menjadi -0,2 persen. Umumnya kondisi tersebut disebabkan antara lain infrastruktur yang kurang baik, keterbatasan sumber daya manusia, dan tingkat inovasi yang masih rendah yang dapat menghambat pertumbuhan.

Diversifikasi produk industri olahan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengembangan UMKM di Anambas juga masih berada pada tingkat yang kurang memadai. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil sering kali tidak memiliki nilai tambah yang tinggi karena hasil dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dijual langsung tanpa melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah. Hilirisasi produk pertanian, kelautan, peternakan dan pengembangan UMKM masih belum optimal, sehingga produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan oleh industri kecil tidak mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Keterkaitan antara hulu dan hilir (*linkage*) produk industri manufaktur juga masih rendah, yang menghambat situasi tersebut dan menyebabkan potensi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal.

Infrastruktur pendukung untuk pengembangan industri teknologi tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat terbatas. Kurangnya investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI) di sektor industri berteknologi tinggi menjadi hambatan utama dalam upaya modernisasi dan peningkatan daya saing industri lokal. Selain itu, industri manufaktur di Anambas belum berkembang secara optimal karena produk yang dihasilkan belum terstandarisasi sesuai dengan preferensi pasar nasional dan pasar ekspor. Hal ini menyebabkan produk-produk dari Anambas kurang diminati di pasar nasional dan internasional, mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada sektor primer sebagai basis ekonomi daerah.

Belum optimalnya hilirisasi sektor primer juga menjadi masalah utama yang perlu segera diatasi. Tanpa adanya hilirisasi yang memadai, potensi nilai tambah dari sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan peternakan masih belum dioptimalkan. Produk-produk mentah dijual dengan harga yang relatif rendah, sementara produk turunan yang bernilai tambah tinggi

tidak berkembang dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan dan program yang mendukung pengembangan hilirisasi dan diversifikasi produk-produk industri lokal. Secara keseluruhan, Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

3. Masih Kurangnya Infrastruktur yang Memadai untuk Pengembangan Potensi Strategis Unggulan Daerah

Produk hasil pertanian, perikanan, dan peternakan Kabupaten Kepulauan Anambas belum menjadi pengarusutamaan pendapatan asli daerah (PAD), terutama terkait dengan perpajakan yang kurang efisien dan keterbatasan sarana prasarana serta wilayah dan lahan pengembangan. Mayoritas wilayah yang tersedia merupakan wilayah kelautan, lahan sawah dan perkebunan yang diperparah dengan kondisi akses jalan sawah yang belum memadai dan sumber air yang sulit diakses. Selain itu, ketersediaan sarana produksi (saprodi) masih terbatas, sehingga menghambat peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian minimnya alat atau mesin pengolahan pasca panen juga menjadi kendala besar dalam meningkatkan nilai tambah hasil bumi dan perikanan, karena proses pengolahan pasca panen dan penangkapan ikan sangat penting untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan kualitas produk.

Selain itu, ketersediaan benih dan bibit unggul masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Tidak ada petani atau kelompok tani yang secara khusus bergerak dalam pemuliaan benih atau bibit unggul, sehingga semua kelompok tani masih tergolong dalam kategori kelas pemula. Selain pertanian, ketersediaan bibit benih ikan budidaya masih bergantung terhadap tangkapan alam dan daerah luar Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian juga belum optimal, yang ditandai dengan kapasitas kelembagaan yang lemah, jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian yang belum memadai, serta dukungan sarana-prasarana dan pembiayaan yang masih kurang. Minimnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan penyuluhan pertanian semakin memperparah kondisi ini. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya kendaraan operasional yang memadai untuk mendukung kegiatan penyuluhan dinas pertanian, terutama mengingat kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan.

Pada sektor pariwisata, keterbatasan sarana prasarana terutama dalam aspek transportasi dan fasilitas wisata yang belum memadai serta belum memenuhi standar menjadi hambatan utama. Kendala akses permodalan, minimnya pendidikan vokasi, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan serta promosi di sektor industri pengolahan pertanian, perikanan dan industri kreatif juga turut menghambat perkembangan industri pariwisata. Infrastruktur pendukung industri pengolahan yang terbatas menambah kompleksitas masalah yang dihadapi. Fokus pemerintah yang hanya pada

bank daerah juga menjadi masalah, karena sektor perbankan berpengaruh dalam pengembangan UMKM yang masih kurang mendapatkan perhatian khusus.

Sebagai pendukung akses dan distribusi, kondisi jalan sangat berperan besar dalam pengembangan potensi strategis unggulan daerah. Jalan aspal di Kepulauan Anambas meningkat dari 59,35 km pada tahun 2020 menjadi 81,63 km pada tahun 2024. Namun pada tahun 2024, masih terdapat jalan tanah sepanjang 132,80 km yang belum diaspal. Kondisi jalan yang baik meningkat dari 69,8 km di tahun 2020 menjadi 101,48 km di tahun 2024, namun Kabupaten Kepulauan Anambas juga masih memiliki jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Hingga tahun 2024, kondisi jalan yang rusak sepanjang 4,72 km dan rusak berat sepanjang 133,46 km.

Selain itu, kurangnya kapasitas pelabuhan untuk mendukung pengembangan ekonomi menyebabkan proses bongkar muat yang lama, dan belum adanya gudang pelabuhan menambah kesulitan dalam manajemen logistik. Infrastruktur sarana prasarana yang belum mendukung pengembangan pariwisata juga menjadi masalah, dengan terbatasnya infrastruktur pendukung dan kurangnya pengembangan amenitas pariwisata. Pembangunan amenitas objek wisata prioritas juga masih kurang, yang mengakibatkan rendahnya daya tarik wisata di kawasan ini. Kurangnya pengembangan aksesibilitas dan konektivitas transportasi ekowisata yang terintegrasi di setiap destinasi wisata juga menjadi hambatan signifikan.

Terakhir, penggunaan air, energi, dan sumberdaya lainnya untuk mendukung pariwisata berkelanjutan merupakan tantangan besar, terutama di lokasi dengan keterbatasan sumberdaya. Terbatasnya aset yang dimiliki nelayan juga menyulitkan mereka untuk memberikan jaminan yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan dan pihak ke-3, yang berdampak pada sulitnya pengembangan usaha dan investasi di sektor ini. Semua masalah ini menunjukkan perlunya perhatian yang serius dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan pertanian, perikanan, olahan hasil dan pariwisata guna mendukung perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. SDM dan Tingkat Produktivitas Masyarakat masih Rendah

SDM dan tingkat produktivitas masyarakat yang masih rendah menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rendahnya SDM di wilayah ini berkaitan erat dengan pendidikan dan kesempatan kerja. Tidak hanya pendidikan penduduk usia kerja yang rendah, ketersediaan lapangan pekerjaan di wilayah ini juga masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan link and match Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dengan pendidikan belum optimal, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat sangat kurang. Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami peningkatan nilai IPM dari

tahun ke tahun, namun apabila dibandingkan dengan nilai IPM keseluruhan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi kabupaten dengan nilai IPM terendah yaitu sebesar 73,47 setelah Kabupaten Lingga yang memiliki nilai 73,05.

Daya saing dan produktivitas tenaga kerja juga masih rendah, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pelatihan-pelatihan kerja. Saat ini belum tersedia bantuan dari CSR maupun Kementerian Ketenagakerjaan dalam pengembangan dan pengaktifan kembali Balai Latihan Kerja (BLK), mengingat pelatihan-pelatihan kerja untuk para pemuda daerah masih terbatas terutama pada tenaga kerja perempuan sebagai bagian dari pengarusutamaan gender. Perlu adanya upaya untuk lebih meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), agar tercipta SDM lokal yang berdaya saing tinggi, berkualitas unggul, dan produktif.

Selain permasalahan terkait SDM, saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas juga dihadapkan oleh lesunya tingkat produktivitas masyarakat di hampir semua sektor usaha, baik sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, maupun industri pengolahan. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan menurun, salah satunya dikarenakan oleh berkurangnya minat dan motivasi masyarakat dalam mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan. Terbatasnya petani penggarap juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian. Kondisi di lapangan saat ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar para petani di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah berusia lanjut. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan eksistensi pertanian dan perkebunan di wilayah ini secara berkelanjutan, maka diperlukan upaya-upaya untuk menumbuhkan minat para petani milenial dalam optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan secara berkelanjutan. Namun demikian, saat ini penyuluhan dan pertanian tentang pertanian dan perkebunan masih kurang dan belum optimal. Aksesibilitas jalan yang sulit, wilayah binaan penyuluhan yang remote, serta terbatasnya SDM penyuluh pertanian masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian. Perlu adanya upaya peningkatan dalam pelaksanaan pembekalan pelatihan dan pendidikan bagi penyuluh pertanian sebagai modal utama dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Selanjutnya, di sektor perikanan, masyarakat setempat terutama yang bermata pencaharian sebagai nelayan masih dihadapkan oleh isu ekonomi terkait pendapatan yang sangat fluktuatif, sebab para nelayan sangat bergantung pada hasil tangkapan, cuaca, dan musim. Sebagian besar nelayan masih berpendidikan rendah, sehingga pengetahuan terhadap berbagai produk keuangan juga minim dan terbatas. Jika dilihat dari sektor pariwisata, tingkat produktivitas masyarakat pada sektor tersebut juga masih rendah, salah satunya disebabkan oleh kurangnya SDM pariwisata yang kompeten dan berdaya saing serta masih terbatasnya SDM pelaku

usaha pariwisata. Oleh sebab itu, agar produktivitas masyarakat di sektor pariwisata meningkat, maka perlu dilaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat, terutama pada anggota kelompok yang berhubungan dengan kelembagaan pariwisata. Pembentukan dan pengaktifan kelompok sadar wisata serta pengelola pariwisata juga perlu ditingkatkan, terutama di 26 desa wisata Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi terkait pariwisata dapat tersalurkan dengan baik dan kendala yang berkaitan dengan rendahnya produktivitas masyarakat di sektor pariwisata dapat teratasi. Adapun di sektor industri pengolahan, menurunnya produktivitas masyarakat di sektor ini salah satunya dipicu oleh rendahnya jumlah pelaku usaha industri pengolahan dan kurangnya kapasitas SDM dalam mengembangkan industri pengolahan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB selama lima tahun terakhir, tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kontribusi dari sektor lainnya. Secara berurutan, kontribusi PDRB di sektor industri pengolahan selama lima tahun terakhir hanya berkisar kurang dari 1 persen, yaitu sebesar 0,12 persen (tahun 2019), 0,16 persen (tahun 2020), 0,14 persen (tahun 2021), 0,13 persen (tahun 2022), dan 0,14 persen (tahun 2023).

5. Kurangnya Pemerataan Akses terhadap Layanan Pendidikan Berkualitas

Masalah pendidikan di Kabupaten Anambas mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, yang secara kolektif berdampak pada kualitas dan akses pendidikan yang ramah terhadap perempuan dan anak. Pertama, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal belum optimal. Hal ini terlihat dari belum berkembangnya alternatif pendidikan berkualitas dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Ketidakseimbangan sarana dan prasarana pendidikan yang responsif gender juga menjadi masalah utama, dengan distribusi yang belum merata dan keterbatasan fasilitas yang menghambat proses pembelajaran efektif di banyak daerah, terutama di wilayah kepulauan.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥ 25 Tahun paling rendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia ≥ 25 Tahun sebesar 7,53 tahun, bahkan berada di bawah Kabupaten Lingga yang memiliki nilai sebesar 7,60 tahun. Sedangkan untuk Harapan Lama Sekolah, pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas (13,06 tahun) masih berada sedikit di atas Kabupaten Karimun (12,62 tahun) dan Kabupaten Lingga (12,65 tahun).

Selain itu, terdapat masalah serius terkait keterbatasan tenaga pendidik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pengalokasian tenaga pendidik yang tidak tepat sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan belum optimalnya

pemanfaatan data pokok pendidikan (Dapodik) menunjukkan perlunya analisis cermat dalam penempatan sumber daya manusia. Kompetensi guru dan tenaga pendidik juga masih rendah, yang menuntut adanya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik.

Pengelolaan dan manajemen pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas belum efektif dan berkelanjutan, yang berdampak pada akses dan relevansi pendidikan yang belum optimal. Rendahnya kompetensi tenaga pendidik berkontribusi pada mutu pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Upaya deteksi dini dan pengobatan yang memadai dalam konteks kesehatan pendidikan juga belum maksimal, terutama karena sulitnya mengenali gejala awal masalah kesehatan yang mempengaruhi proses belajar mengajar.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD dan SMP menjadi salah satu terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Hal Ini disebabkan oleh sarana prasarana pendidikan yang belum merata, rendahnya kompetensi tenaga pendidik, dan pendidikan yang belum berorientasi pada nilai dan karakter. Kurangnya alternatif pendidikan berkualitas juga menjadi faktor penghambat. Masalah ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam distribusi dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, serta peningkatan kompetensi dan manajemen tenaga pendidik.

6. Kurangnya Pemerataan Akses terhadap Layanan Kesehatan Berkualitas dan Terjangkau

Masalah kesehatan di daerah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas mencakup berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Akses yang sulit ke fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada pulau-pulau kecil (selain pulau-pulau utama) merupakan masalah utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Faktor geografis menjadi hambatan besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata dan memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar juga dapat mengurangi kualitas pelayanan, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan perawatan yang layak dan tepat waktu.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki angka umur harapan hidup terendah kedua setelah Kabupaten Lingga diantara kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki angka umur harapan hidup sebesar 73,47 tahun, dimana Kabupaten Lingga memiliki angka sebesar 73,05 tahun. Sedangkan untuk Umur Harapan Hidup Saat Lahir, pada tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas (68,37 tahun) masih berada sedikit di atas Kabupaten Natuna (66,41 tahun) dan Kabupaten Lingga (63,73 tahun), serta berada di bawah kabupaten/kota lain yang umumnya memiliki angka di atas 70 tahun.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang rendah dan terbatas menjadi masalah serius lainnya. Distribusi dokter dan tenaga

kesehatan yang belum merata menyebabkan beberapa wilayah di Anambas kekurangan tenaga medis, sehingga pelayanan kesehatan belum optimal. Selain itu, kualitas dan kuantitas peralatan kesehatan yang terbatas menambah tantangan dalam memberikan layanan kesehatan yang efektif sehingga beberapa kasus perlu dirujuk ke Rumah Sakit di luar Anambas yang secara jarak sangat jauh. Pemerataan dan peningkatan kualitas peralatan medis, termasuk alat antropometri, sangat diperlukan untuk mendukung diagnosis dan perawatan yang akurat.

Pola manajemen kesehatan yang masih belum optimal terutama dalam perencanaan berdasarkan permasalahan kesehatan, menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kesehatan yang efektif. Terbatasnya alokasi anggaran, infrastruktur, dan SDM kesehatan menunjukkan belum optimalnya komitmen dan fokus pengambil kebijakan di sektor kesehatan. Manajemen dan sistem pengelolaan kesehatan perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien dan efektif, serta program kesehatan yang dijalankan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.

Pola pikir yang sederhana dalam memandang permasalahan kesehatan dan perencanaan pembangunan kesehatan yang masih belum tertata dengan baik menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam mengelola sektor kesehatan. Peningkatan kualitas kesehatan harus menjadi perhatian utama, dengan fokus pada pemerataan layanan dan perbaikan manajemen kesehatan. Upaya deteksi dini dan pengobatan yang memadai harus ditingkatkan untuk mengurangi beban penyakit yang lebih berat di masa depan. Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak harus dioptimalkan, meskipun tantangan geografis menjadi kendala yang signifikan.

7. Pengembangan Permukiman dan Ruang Terbuka Hijau yang Terbatas

Kondisi dataran yang terbatas dan kondisi geografis yang didominasi oleh perbukitan/pegunungan di Kabupaten Kepulauan Anambas menyulitkan untuk pengembangan permukiman dan infrastruktur. Sehingga perkembangan pemukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung menyerak di sekitar bibir pantai, namun hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi pantai dan abrasi. Fenomena ini akan menumbuhkan kawasan permukiman dengan utilitas dasar (air bersih, sanitasi layak dan listrik) yang belum memadai dan belum memenuhi standar kesehatan lingkungan. Perkembangan penggunaan lahan permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 memiliki luas mencapai 557,90 km2 dan meningkat menjadi 934,98 km2 pada tahun 2023.

Kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) pun sulit diakomodasi dalam situasi perkembangan kota yang terus bertambah. Keberadaan RTH sangat penting dalam menyediakan ruang terbuka untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian ketika tekanan kebutuhan ruang lain semakin meningkat. Seperti contoh penggunaan lahan pertanian lahan kering campur yang semakin meningkat dari tahun 2021 yang memiliki luas 6.240,97 km2, menjadi 9.183,98 km2 pada tahun 2023. Terbatasnya anggaran pembiayaan dan pengelolaan yang diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan ruang terbuka hijau serta Kurangnya partisipasi masyarakat dalam merencanakan, mengembangkan dan merawat ruang terbuka hijau semakin menghambat pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

8. Keterhubungan antar Daerah dan Sistem Logistik yang Belum Optimal

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Natuna Utara. Kondisi geografis ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal keterhubungan antar daerah dan sistem logistik. Disisi lain, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi besar untuk berkembang di sektor ekonomi dan pariwisata. Namun, ketiadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) laut yang menghubungkan wilayah tersebut dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Singapura menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan integrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pasar regional dan global tidak berjalan maksimal. Rendahnya wisatawan lokal maupun internasional salah satunya juga dipengaruhi oleh ketiadaan regulasi terkait standar harga transportasi lokal seperti *Speed Boat*, Ojek, Rental Kendaraan Bermotor, dan Tarif Taksi Bandara.

Keterbatasan infrastruktur konektivitas perhubungan laut dan infrastruktur logistik pendukungnya di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu hambatan utama dalam mencapai kelancaran distribusi barang dan jasa, serta menghambat konektivitas antar wilayah. Akibatnya biaya logistik akan sangat mahal. Ditambah lagi adanya keterbatasan frekuensi dan muatan pelayaran perintis tol laut dan pelayaran penyeberangan akan mempengaruhi daya saing produk. Ketersediaan barang dan kebutuhan pokok di Anambas memiliki ketergantungan dengan kapal tol laut, KM Logistik Nusantara 4. KM Logistik Nusantara 4 melayani trayek T-2 dengan rute Tanjung Priok, Tanjung Uban, Pelabuhan Letung, Tarempa, Selat Lampa, Pelabuhan Subi, Serasan, Midai, dan Tanjung Uban. Namun kapal tol laut yang dioperasikan PT Pelni itu beroperasi satu kali dalam sebulan. Kedatangan kapal juga seringkali terkendala saat cuaca tidak bagus yaitu saat memasuki angin musim Utara. Ketidakpastian jadwal tentunya ini sangat merugikan termasuk bagi para pelaku UMKM karena tidak dapat memasarkan produknya ke luar wilayah. Oleh sebab itu maka diperlukan harmonisasi regulasi, kelembagaan, dan kerja sama antar pemangku kepentingan khususnya di sektor logistic untuk menambah frekuensi dan mengembangkan jalur alternatif.

9. Tata Kelola dan Manajemen Sumber Daya Air yang Masih Belum Optimal

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi besar dalam hal sumber daya air. Namun, tata kelola dan manajemen sumber daya air di wilayah ini masih belum memadai. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya usaha pemerintah untuk mengelola air bersih, masih belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air baku, kurangnya SDM yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan air bersih, tidak memadainya penampungan air bersih, minimnya penerapan teknologi terbarukan untuk air bersih, dan belum meratanya penyediaan sistem pengelolaan air di setiap unit wilayah. Hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti kekurangan air bersih, banjir dan kekeringan, serta penurunan kualitas air.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian akses masih relatif rendah, masing-masing sebesar 12,32% dan 12,23%, mencerminkan keterbatasan infrastruktur atau layanan air bersih pada masa tersebut. Peningkatan substansial terjadi pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 28,56%, yang kemudian berlanjut menjadi 28,96% pada tahun 2023, menunjukkan adanya intervensi atau perbaikan akses air minum yang cukup efektif. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 24,65%, yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya hambatan dalam kesinambungan layanan atau pemeliharaan infrastruktur.

Di sisi lain jika mengikuti tren pertumbuhan penduduk maka kebutuhan terhadap sumberdaya air juga akan meningkat. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2045 memprediksikan bahwa kebutuhan air bersih pada tahun 2029 sebesar 90.000 kilo liter/hari. Angka tersebut mengalami peningkatan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kebutuhan saat ini sekitar 61.000 kilo liter/hari. Oleh sebab itu tata kelola dan manajemen sumberdaya air di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditingkatkan dengan menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan dan terukur.

10. Optimalisasi Sarana dan Prasarana TIK di Daerah yang Masih Perlu Ditingkatkan

Pada era digital ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, akses dan pemanfaatan TIK di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum merata. Hal tersebut terlihat dari kapasitas *bandwidth* yang masih terlalu lemah yaitu sekitar 2MB/s. Selain itu masih terdapat beberapa daerah yang mengalami *blank spot*, karena kinerja tower untuk internet yang masih tergantung pada listrik. Sementara utilitas listriknya belum memadai karena keterbatasan bahan bakar untuk diesel. Hal ini berakibat pada berbagai hambatan, terutama dalam komunikasi dan penyebaran informasi antar

kecamatan dan desa-desa. Kelemahan jaringan koneksi internet juga menjadi kendala signifikan diberbagai bidang. Salah satunya dalam dunia usaha khususnya untuk mengurus perizinan usaha yang sebagian besar telah dilakukan secara daring. Kurangnya akses internet yang stabil dan memadai menghambat para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan mereka, termasuk mengurus perizinan yang diperlukan.

Penggunaan internet di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, sekitar 70% masyarakat telah menggunakan internet, peningkatan ini berlanjut pada tahun 2021 dan 2022, di mana persentase pengguna internet mencapai 72%. Tahun 2023 mencatat peningkatan meskipun kecil, yaitu menjadi 73%, yang mengindikasikan bahwa penetrasi internet mulai menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya mungkin masih terkendala oleh infrastruktur atau keterbatasan perangkat. Walaupun sebagian besar masyarakat telah menjangkau akses internet namun masih terdapat sebagian masyarakat yang masih terkendala. Selain itu penggunaan internet di Kabupaten Kepulauan Anambas masih berada di bawah persentase pengguna internet di Indonesia yang mencapai 78,19% pada tahun 2023.

11. Ketidakselarasan antara Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Belum terintegrasinya data-data perencanaan menjadi salah satu permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran program daerah. Manajemen data yang belum optimal menyebabkan ketidakakuratan data yang pada masanya akan menghambat proses perencanaan yang efektif dan efisien. Data yang tidak akurat dan tidak terintegrasi membuat perencanaan program menjadi tidak tepat sasaran, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai secara maksimal.

Data realisasi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2020 hingga 2024, disertai dengan persentase pertumbuhan belanja tiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah berada pada kisaran Rp900 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2021. Penurunan ini tercermin dari pertumbuhan belanja yang negatif sebesar -7,16%. Namun, pada tahun 2022, belanja daerah kembali meningkat dengan pertumbuhan sebesar 7,22%, dan terus naik secara signifikan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan mencapai 13,23%. Namun tren positif ini tidak berlanjut pada tahun 2024. Realisasi belanja kembali menurun secara signifikan, dengan tingkat pertumbuhan negatif yang tajam, yaitu sebesar -15,16%. Penurunan tajam ini juga berpotensi menghambat kelangsungan program-program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Pola belanja daerah yang fluktuatif ini menggambarkan belum stabilnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan fiskal daerah. Dalam konteks manajemen keuangan daerah yang efektif, fluktuasi belanja yang ekstrem dapat mengindikasikan lemahnya konsistensi dalam implementasi kebijakan penganggaran serta adanya ketergantungan terhadap sumber dana yang tidak berkelanjutan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan verifikasi dalam penyusunan belanja agar lebih fokus pada upaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tupoksi perangkat daerah. Verifikasi yang lebih ketat dan transparan akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Permasalahan lain yang juga perlu diperhatikan adalah keakuratan data sosial kemasyarakatan. Data yang tidak akurat menyebabkan perencanaan program menjadi tidak efektif, karena tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk memantapkan sistem *database* yang lengkap dan termutakhirkan, sehingga data yang digunakan dalam perencanaan dan penganggaran program daerah lebih dapat diandalkan.

12. Kurangnya Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran

Realisasi belanja daerah tahun 2020-2024 dengan proporsi terbesar, terdapat pada belanja operasional. Proporsinya meningkat dari 65,57% pada tahun 2020 menjadi 75,95% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah diarahkan untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji pegawai, barang dan jasa, serta pemeliharaan. Meskipun penting untuk menjamin kelangsungan operasional pemerintahan, dominasi belanja operasi dapat mengindikasikan rendahnya kapasitas investasi daerah terhadap pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, belanja modal yang mencerminkan investasi pembangunan fisik, cenderung mengalami fluktuasi dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2020 proporsinya sebesar 18,37%, kemudian menurun menjadi 17,71% pada 2021, dan terus menurun hingga mencapai 12,49% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tantangan serius dalam memperkuat infrastruktur atau aset produktif daerah. Hal ini menjadi sinyal perlunya peningkatan efisiensi fiskal dan keberpihakan anggaran terhadap pembangunan strategis.

Pengelolaan pajak di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi permasalahan hingga saat ini, permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta kurangnya promosi dan sosialisasi tentang pentingnya pajak. Hal ini menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak menyetor pajak tepat waktu, sehingga pencapaian pajak daerah belum maksimal. Selain itu, jumlah aparatur pajak yang tidak seimbang dengan beban kerja menambah kompleksitas masalah ini. Dibutuhkan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki manajemen sumber daya manusia di sektor pajak.

Selain itu, perencanaan anggaran daerah juga menghadapi tantangan besar. Fokus anggaran yang masih terpusat pada kepentingan sektoral menyebabkan anggaran belum dipergunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pengawasan dan pengendalian

dalam pengelolaan anggaran, sehingga alokasi dana sering kali tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak maksimal pada pembangunan daerah.

Keterbatasan penerimaan dana transfer pusat juga menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Masih bergantungnya pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjalankan program dan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih menjadi masalah. Ketergantungan ini menyebabkan ketidakstabilan finansial jika dana transfer mengalami penurunan atau keterlambatan. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal serta rendahnya dukungan masyarakat terkait digitalisasi pelayanan keuangan daerah menjadi kendala tersendiri.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah terkait masih kurang optimalnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Sebagian besar objek wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dikelola dengan maksimal sehingga pemungutan retribusi dari objek ini masih rendah. Permasalahan berikutnya terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata yang belum memadai, kurangnya promosi dan pemasaran destinasi wisata secara efektif, serta rendahnya kualitas pelayanan dan standar industri pariwisata yang belum memenuhi ekspektasi wisatawan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pelaku industri pariwisata dan masyarakat lokal juga turut menghambat pengembangan sektor ini. Potensi wisata yang dimiliki daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan, sehingga pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata masih jauh dari optimal. Upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata memerlukan perbaikan di berbagai aspek, termasuk infrastruktur, promosi, kualitas layanan, serta sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

1.4.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Kerja Sama dan Inovasi Pembangunan Daerah yang Masih Belum Optimal

Pendapatan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas masih didominasi oleh Pendapatan Transfer Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum mampu mengandalkan diri sendiri dalam membiayai dan melaksanakan pembangunannya, sehingga menyebabkan kurangnya inovasi dalam pembangunan daerah. Selain itu, kurangnya memadainya ketersediaan data untuk kebutuhan perencanaan pembangunan juga menghambat proses perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

Komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengembangkan teknologi inovasi kepulauan dan tata kelola pulau-pulau kecil masih kurang. Hal ini dapat menghambat proses pengembangan teknologi dan inovasi yang dibutuhkan untuk pembangunan kepulauan.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah alat untuk mengukur tingkat inovasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Indeks tersebut dapat mencakup berbagai faktor yang mencerminkan kemampuan dan potensi inovatif Kabupaten Kepulauan Anambas. Beberapa faktor yang diukur dalam Indeks Inovasi Daerah melibatkan aspek ekonomi, pendidikan, riset dan pengembangan, kolaborasi antara sektor swasta dan publik, serta adopsi teknologi. Pada tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat peningkatan signifikan dalam indeks inovasi daerahnya. Dari angka sebelumnya sebesar 33,28 pada tahun 2022, Kabupaten Anambas berhasil melonjak menjadi 42,97 pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan indeks inovasi daerah menjadi 41,36.

Peran pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melakukan upaya untuk berkoordinasi dan melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun daerah juga masih belum optimal. Sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan membangun kerja sama dengan pihak swasta dalam menciptakan kemandirian pembangunan daerah. Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan pihak swasta dapat dilakukan dengan mendorong investasi swasta, mengembangkan sektor pariwisata, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

2. Efisiensi dan Efektivitas Aparatur Negara dan Kualitas Pelayanan yang Masih Belum Optimal

Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki manajemen aparatur pemerintah dan kualitas pelayanan yang belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi pemerintah yang memiliki skor SAKIP >B dan belum adanya Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) di daerah. Kedua hal ini akan mengakibatkan kualitas pelayanan publik yang rendah, disebabkan oleh kurangnya kompetensi aparatur pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana, dan proses pelayanan yang tidak efisien.

Selain itu, sektor pariwisata di daerah dengan ditunjang oleh ekonomi kreatif juga kurang berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan Dinas terkait di daerah yang tidak dapat memunculkan program kegiatan ekonomi kreatif. Hal ini disebabkan oleh dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas membahas tentang ekonomi kreatif secara kurang detail atau kurang spesifik, tidak adanya bidang khusus terkait ekonomi kreatif di dinas terkait, dan kegiatan ekonomi kreatif di lapangan yang dilakukan hanya berdasarkan data yang ada.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian indeks ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada pada level tinggi, yakni 97,3, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 81,46, dengan GAP negatif sebesar 15,84 poin. Pada tahun 2022 indeks profesionalitas ASN meningkat drastis menjadi 98,8,

dengan kenaikan sebesar 17,34 poin. Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama dimana pada tahun 2023, indeks kembali turun tajam menjadi 64,39, mencatat GAP negatif sebesar 34,41 poin. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan dengan indeks naik menjadi 76,44, atau GAP positif sebesar 12,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Fluktuasi yang terjadi selama lima tahun terakhir mencerminkan ketidakkonsistenan dalam manajemen sumber daya aparatur. Terdapat tantangan dalam mempertahankan standar profesionalitas, baik dari sisi pelatihan, sistem merit, maupun disiplin kerja.

3. Penerapan Kebijakan Daerah yang Belum Optimal

Peraturan Daerah (Perda) memiliki hubungan yang kuat dengan keberhasilan pembangunan, dimana sebagai produk hukum daerah, Perda menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Perda yang baik dan efektif dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, sebaliknya Perda yang tidak efektif dapat menghambat kemajuan pembangunan. Perda mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan di daerah, termasuk tata ruang, lingkungan hidup, investasi, memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, dan mewujudkan kemandirian daerah. Perda yang efektif dapat membantu mencapai tujuan pembangunan daerah, seperti peningkatan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Perda juga berperan dalam mengendalikan pembangunan, mencegah dampak negatif, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.

Sosialisasi terkait Perda dan Perkada yang berlaku di Kabupaten Kepulauan Anambas masih kurang, baik dalam lingkup perangkat daerah maupun kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada menyebabkan masyarakat dan pelaku usaha tidak mengetahui dan memahami isi Perda dan Perkada yang berlaku. Kurangnya sosialisasi juga menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penegakan Perda dan Perkada.

Belum terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai amanat Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta belum terlaksananya Pendidikan Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik juga menunjukkan belum optimalnya penerapan kebijakan di daerah, meskipun kedua aturan/kebijakan ini bukan merupakan kebijakan daerah. Kurangnya gedung kantor yang sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Anambas menyebabkan sempitnya ruang gerak aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4.2. Isu Strategis Daerah

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas secara geografis berada pada posisi strategis di Laut Natuna Utara merupakan beranda depan wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) yang berhadapan langsung dengan batas teritorial laut wilayah negara tetangga Malaysia dan Vietnam. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan lautan dengan gugusan pulau-pulau kecil berupa daratan yang menyebar pada ruang laut menjadi sumber utama kehidupan masyarakat dan pendapatan daerah.

Keberadaan yurisdiksi laut mencakup sekitar 255 pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat penting dan menjadi perhatian nasional dalam membangun dan memperkuat kedaulatan nasional atas ruang laut dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Lautan serta pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi ruang yang memberikan peluang pembangunan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta menjadi kepentingan maritime menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Kegiatan perikanan (tangkap dan budidaya) dan turunannya meliputi pengolahan, perdagangan, distribusi, transportasi laut, serta wisata alam menjadi kegiatan utama masyarakat, menyediakan lapangan kerja, mata pencaharian, dan produk hasil laut untuk diperdagangkan. Seiring dengan makin pesatnya pembangunan serta tingginya permintaan sumberdaya dan kebutuhan investasi berbasis laut yang menguntungkan meliputi perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, penelitian bioteknologi, pertambangan dasar laut, minyak dan gas, energi terbarukan, dan perkapalan, terjadi pergeseran konsep menuju pembangunan yang lebih terencana di lautan. Konsep yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan kesetaraan sosial sebagai prinsip utama tata kelola kelautan atau yang popular disebut sebagai pembangunan ekonomi biru.

Perkembangan ekonomi global dan nasional yang semakin cepat dan kompleks dengan tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang eksesif memberikan beban pada lingkungan dan sosial, ditambah dengan fenomena perubahan iklim menjadi tantangan dalam mewujudkan berkelanjutan, kesetaraan sosial, dan keadilan biru dalam pembangunan. Perumusan isu strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 yang dilakukan melalui analisis terhadap dinamika global, nasional, dan regional (Provinsi Kepulauan Riau), hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta evaluasi terhadap potensi, modal pembangunan, dan kondisi umum daerah disajikan pada **Tabel 2.112.**

Tabel 2.112. Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Kurangnya Pemerataan Akses terhadap Layanan Pendidikan Berkualitas	Kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perkembangan demografi global	Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia , Perlindungan Sosial dan Pemajuan Budaya
	Kesadaran Masyarakat terhadap Urgensi Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan Masih Rendah			Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai		
				Kualitas pendidikan yang masih rendah		
	SDM dan Tingkat Produktivitas Masyarakat masih Rendah			Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat		
				Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).		
	Kurangnya Pemerataan Akses terhadap Layanan Kesehatan Berkualitas dan Terjangkau			Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan		
				Masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	
	Nilai Karakter dan Budaya Masyarakat mulai Menurun			Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan	Penguatan Budaya Lokal	
				Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global		
				Kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat		
Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas	Produktivitas Masyarakat di Sektor Pertanian	Ketahanan pangan dan energi	Peningkatan persaingan pemanfaatan	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Penguatan Perekonomian Daerah	Pengembangan Ekonomi Biru dan Peningkatan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
ditujukan pada pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan peternakan.	dan Harga Pangan yang Tidak Stabil		sumber daya alam			Produktivitas Masyarakat
Potensi pengembangan kawasan pariwisata, dimana memiliki 1.460 ha lahan yang berpotensi untuk dijadikan kawasan pariwisata alam, Kawasan pariwisata budaya, Kawasan pariwisata minat khusus, dan Kawasan pariwisata buatan	Rendahnya Aktualisasi Gagasan Mengenai Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya maritim yang optimal		Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata		
Potensi pengembangan kawasan perikanan terpadu seluas 300 ha yang berada di Kecamatan Siantan Timur.	Tata Kelola dan Manajemen Sumber Daya Air yang Masih Belum Optimal	Pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi)		Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut		
Potensi pengembangan kawasan industri di lahan 520 ha yaitu industri kecil (khususnya industri makanan yang merupakan pengolahan dari hasil laut) dan alat angkut dimana	Masih Kurangnya Infrastruktur yang Memadai untuk Pengembangan Potensi Strategis Unggulan Daerah			Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi		
		Pengentasan kemiskinan daerah	Pertumbuhan kelas menengah (middle class)	Produktivitas tenaga kerja selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
lokasi dari rencana pengembangan kawasan industri						
	Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang belum Optimal		Konstelasi perdagangan global	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas.	Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur Permukiman dan Konektivitas Wilayah
	Keterhubungan antar Daerah dan Sistem Logistik yang Belum Optimal			Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.		
	Penurunan Kualitas Lingkungan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kualitas lingkugan hidup	Peningkatan urbanisasi dunia	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan		
	Upaya Penanggulangan Sampah dan Limbah yang Belum Optimal			Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya.		
	Infrastruktur Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Belum Memadai					
	Pengembangan Permukiman dan Ruang Terbuka Hijau yang Terbatas					
	Optimalisasi Sarana dan Prasarana TIK di Daerah yang Masih Perlu Ditingkatkan		Perkembangan teknologi	Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Pengembangan Sektor Industri dan Teknologi Masih Terhambat dan Belum Menunjukkan Hasil yang Optimal					
Pengembangan kawasan pertambanganan di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral non logam, dan pertambangan mineral logam.	Adanya Ancaman Daerah terhadap Bencana, Kebutuhan Pangan, dan Ketersediaan Energi	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Perubahan iklim	Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.	Keberlanjutan Lingkungan	- Peningkatan Ketahanan Ekologi di Pulau-Pulau Kecil - Penguatan Ketahanan Pangan
	Perlindungan Sumberdaya dan Kelestarian Lingkungan yang Belum Memadai			Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau		
	Upaya Pelestarian DAS dan Daerah Resapan Air yang perlu Diperkuat			Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan		
			Geopolitik dan geoekonomi	Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.		
	Penerapan Kebijakan Daerah yang Belum Optimal	Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Tata kelola keuangan global	Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah	Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Responsif
				Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif		
	Kerja Sama dan Inovasi Pembangunan			Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Daerah yang Masih Belum Optimal			Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.		
				ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik		
	Efisiensi dan Efektivitas Aparatur Negara dan Kualitas Pelayanan yang Masih Belum Optimal			Belum meratanya kualitas pelayanan publik.		
				Selain itu, kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.		
				Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar		
				Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik		
				Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.		
				Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.		
				Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan		
				Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan.		
				Stabilitas ekonomi makro saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.		

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Ketidakselarasan antara Sistem Perencanaan dan Penganggaran			Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.		
	Kurangnya Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran			Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran		
	-		Pemanfaatan luar angkasa (space economy)	-	-	

Berikut ini isu-isu strategis daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan dan merencanakan agenda pembangunan daerah jangka menengah 2025-2029.

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perlindungan Sosial dan Pemajuan Budaya**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas mencerminkan individu-individu yang terdidik, sehat secara fisik dan mental, serta memiliki keterampilan hidup yang memadai. Pada perkembangan zaman yang saat ini, sesuatu bergerak dengan cepat dengan ketidakpastian yang cukup tinggi sehingga membutuhkan kesiapan SDM yang siap dengan segala tantangan perubahan. Dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, tidak cukup hanya menuntaskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, namun juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah pada siswa melalui penerapan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu. Pendidikan yang hadir harus mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan pemahaman konsep-konsep sains dan matematika, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki potensi besar namun juga dengan segala keterbatasan, berbagai inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam mengembangkan wilayah.

Pengembangan pendidikan inklusi dan penguatan karakter masyarakat yang berbudaya juga diperlukan sebagai pondasi pembangunan daerah berbasis ekonomi biru. Penguatan karakter masyarakat melalui pendidikan formal dan informal dapat meningkatkan kualitas SDM berintegritas yang produktif, dan berdaya saing dalam mengembangkan kemampuan selaras dengan potensi wilayah dan kebutuhan dunia global. Melalui pendidikan yang inklusif dan bermutu, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang bahaya narkoba, pentingnya perlindungan anak, serta keterampilan untuk mengelola tekanan hidup tanpa harus mencari pelarian dalam bentuk kriminalitas.

Sumber daya manusia yang cerdas juga harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang sehat. Kesehatan memiliki peran krusial dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang baik sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan individu, baik secara fisik maupun mental. Kesehatan yang prima memungkinkan individu untuk belajar, bekerja, dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan. Individu yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih produktif dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Kesehatan mental juga harus menjadi bagian integral dari pembangunan SDM karena memiliki kecenderungan untuk berpikir lebih positif, mengingat gangguan psikologis sering kali menjadi pemicu tindakan kriminal.

Individu-individu yang memiliki daya pikir cerdas, sehat fisik dan mental dapat membentuk masyarakat yang secara kolektif memiliki budaya hidup yang lebih maju. Budaya yang maju dan adaptif terhadap zaman mampu menjadi tameng sosial yang efektif dalam menghadapi berbagai ancaman. Masyarakat yang kuat dalam nilai budaya akan memiliki sistem kontrol sosial yang bekerja secara informal namun efektif. Misalnya, komunitas yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan cenderung lebih peduli terhadap perlindungan anak dan cenderung melaporkan atau mencegah tindakan kekerasan seksual serta menjunjung tinggi kerukunan.

Pemajuan budaya selaras dengan kehidupan berbudaya dan bermasyarakat dalam lingkungan kehidupan Kabupaten kepulauan Anambas. Suasana yang aman tenteram, kriminalitas yang rendah, akan mendukung kehidupan yang berbudaya, dan bermartabat. Ekspresi budaya yang positif seperti seni, musik, dan olahraga juga menjadi media yang ampuh bagi generasi muda untuk menyalurkan energi dan aspirasi mereka secara konstruktif. Dengan demikian, mereka tidak mudah terjerumus ke dalam lingkaran narkoba atau kegiatan negatif lainnya. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah perbatasan negara yang dekat dengan aktivitas pergerakan masyarakat dan perubahan budaya yang keluar dan masuk, kekuatan dan pemajuan budaya masyarakat menjadi sangat penting.

Dalam konteks pembangunan, kriminalitas menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Dua bentuk kriminalitas yang sangat meresahkan adalah penyalahgunaan narkoba dan pelecehan terhadap anak. Untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif, pendekatan yang bersifat struktural dan preventif sangat diperlukan. Salah satu strategi jangka panjang yang efektif adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemajuan budaya.

Dinamika perkembangan penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas semakin meningkat, yang tidak diimbangi dengan kesiapan pengetahuan, keterampilan dan juga kebijakan pemerintah yang tepat, juga mendorong munculnya kelompok rentan di tengah masyarakat. Munculnya kelompok rentan mengacu pada peningkatan jumlah individu atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kerentanan khusus terhadap berbagai risiko, seperti bencana alam, kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut ruang lingkup kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Kelompok rentan ini membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus karena keterbatasan mereka dalam menghadapi situasi sulit.

Perlindungan sosial atas munculnya kelompok rentan menjadi perhatian pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini maupun dimasa yang akan datang. Persentase Penduduk Miskin yang masih tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau setelah Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang, angka kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) yang semakin meningkat, dan persoalan sosial lain, membutuhkan perhatian dalam rumusan kebijakan ke depan. Perlindungan sosial juga disertai dengan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik bagi penduduk kelompok rentan. Upaya untuk memenuhi dan memfasilitasi penduduk melalui kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan yang menunjang peningkatan kebutuhan dasar masyarakat secara inklusif.

Pembangunan inklusif juga termasuk pada peningkatan peran perempuan di berbagai sektor pembangunan melalui fasilitasi dan penguatan regulasi daerah. Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi biru di sektor perikanan, kerajinan, dan industri pengolahan serta wisata bahari adalah bagian dari membangun karakter daerah Kepulauan Anambas yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Peran aktif perempuan dalam berbagai sektor-sektor pembangunan dapat memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat di Kepulauan Anambas.

2. Penguatan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya dapat dilihat dari nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Nilai tersebut merupakan salah satu indikator yang dibuat pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sebagai upaya untuk mewujudkan sebagian dari target SDG's. Target tersebut di antaranya untuk mengatasi kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih di bawah rata-rata provinsi dan nilai indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Kepulauan Anambas masih tergolong tidak aman, dengan kisaran nilai 50 hingga 54.

Penguatan ketahanan pangan merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari produksi hingga distribusi dan konsumsi pangan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, petani, pelaku usaha, hingga masyarakat luas. Jenis pangan dapat dikategorikan berdasarkan berbagai faktor, termasuk asal usul, tingkat pengolahan, dan kandungan nutrisi. Secara umum, pangan dapat dibagi menjadi pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar adalah bahan makanan yang belum mengalami pengolahan, seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang telah melalui proses pengolahan, seperti tahu, tempe, mie, dan roti. Selain itu, pangan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, yaitu pangan nabati (berasal dari tumbuhan) dan pangan hewani (berasal

dari hewan). Contoh pangan nabati adalah sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan umbi-umbian. Contoh pangan hewani adalah daging, ikan, telur, dan susu.

Dari sisi produksi, Kabupaten Kepulauan Anambas bukan merupakan wilayah dengan tingkat produksi yang tinggi terutama pada pangan nabati dan pangan hewani selain ikan. Lahan yang berpotensi tinggi hingga sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan hanya seluas 9.360,43 hektar atau sekitar 15,08% dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Lahan yang berpotensi sedang dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 31.702,08 hektar atau sekitar 51,06 %. Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah hingga sangat rendah dalam penyediaan bahan pangan bagi manusia memiliki luasan sebesar 21.022,63 hektar atau sekitar 33,86 % dari keseluruhan lahan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Walaupun tidak menjadi wilayah produksi pangan yang tinggi, namun upaya produksi dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan tetap perlu diupayakan ke depan. Peningkatan produk hasil pertanian, perikanan, dan peternakan Kabupaten Kepulauan Anambas harus diupayakan selain memenuhi kebutuhan pangan juga menjadi pengarusutamaan pendapatan asli daerah (PAD). Harus dilakukan perbaikan kondisi akses jalan sawah yang belum memadai dan sumber air yang sulit diakses. Selain itu, ketersediaan sarana produksi (saprodi) harus ditingkatkan, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas. Alat atau mesin pengolahan pasca panen harus diperhatikan ketersediaan dan kondisinya agar dapat meningkatkan nilai tambah hasil bumi dan perikanan, karena proses pengolahan pasca panen dan penangkapan ikan sangat penting untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan kualitas produk.

Upaya lain yang harus dilakukan adalah untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit unggul, selain petani atau kelompok tani harus ditingkatkan kapasitasnya agar menjadi petani profesional dan mumpuni. Pada sektor perikanan, ketersediaan bibit benih ikan budidaya harus diupayakan secara maksimal agar tidak bergantung terhadap tangkapan alam dan daerah luar Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian juga harus dioptimalkan, yang ditandai dengan kapasitas kelembagaan yang meningkat, jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian yang memadai, serta dukungan sarana- prasarana dan pembiayaan yang cukup.

Kemudian selanjutnya dari sisi upaya distribusi pangan, mencakup berbagai kegiatan untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ini melibatkan penguatan infrastruktur, modernisasi sistem logistik, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam rantai pasokan pangan. Tujuan utama dari upaya distribusi pangan adalah untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh

masyarakat, serta untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan dalam menjamin aksesibilitas dan keterjangkauan distribusi logistik. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain menjaga stabilitas pasokan, memperbaiki dan membangun infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan gudang.

Modernisasi sistem logistik pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola distribusi secara efisien juga perlu diupayakan pemerintah daerah. Hal lain juga perlu dilakukan dengan melakukan operasi pasar, memberikan subsidi pangan, serta memanfaatkan sistem informasi distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, terutama ketika musim angin Utara yang seringkali menjadi kendala perjalanan kapal. Dengan kebutuhan yang cukup besar dalam menjamin distribusi pangan tersebut, maka perlu upaya dalam memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, termasuk Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk kelancaran distribusi pangan.

Bagian terakhir dari penguatan ketahanan pangan yaitu dalam menjamin konsumsi pangan terutama dalam pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman bagi seluruh masyarakat. Penguatan Cadangan Pangan merupakan salah satu strategi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkal/kap/hari. Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan (2024) ditemukan bahwa Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) untuk Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan persentase meningkat dari 7,58% pada tahun 2019 menjadi 13,71% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun indeks ketahanan pangan secara umum meningkat, jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan justru bertambah, menandakan adanya tantangan dalam distribusi atau akses pangan yang memadai.

Penganekaragaman konsumsi pangan bagi wilayah kepulauan yang memiliki keragaman pangan yang cukup rendah, perlu dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi berbagai jenis makanan selain beras, seperti umbi-umbian, sagu, dan pangan lokal lainnya. Selain itu dilakukan juga pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang prinsip gizi seimbang dan cara mengolah pangan lokal menjadi makanan yang lezat dan bergizi. Upaya lain yaitu dengan menciptakan berbagai olahan pangan lokal yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas pangan, keamanan pangan dilakukan dengan memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman dari kontaminasi dan zat

berbahaya melalui pengawasan dan sertifikasi. Kemudian dalam mencapai gizi seimbang, dilakukan dengan mempromosikan pola makan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup dan seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Selain itu upaya pengolahan pangan perlu dilakukan dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan lokal dengan cara yang sehat dan bergizi.

3. Pengembangan Ekonomi Biru dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat

a. Perikanan tangkap

Meningkatkan usaha perikanan merupakan tantangan dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan laut di Kabupaten Kepulauan Anambas. Keragaman teknik penangkapan ikan di Kepulauan Anambas mencerminkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan modal masyarakat nelayan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan laut yang melimpah serta kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan perairan. Sebagian besar nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan alat tangkap pancing, dan bagan apung. Nelayan pancing memainkan peran penting dalam menangkap ikan-ikan permukaan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti ikan tongkol, cakalang, kakap merah, kakap putih, tenggiri, kuwe, dll. Demikian juga nelayan bagan apung dengan kapal pongpong berperan menangkap ikan bilis (teri), cumi-cumi, dan berbagai jenis ikan pelagis untuk memenuhi permintaan pasar yaitu kebutuhan konsumsi ikan dan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan.

Isu strategis dalam upaya meningkatkan usaha penangkapan ikan, menjamin keberlanjutan, serta efisiensi adalah penguasaan teknologi dan kelembagaan. Teknologi penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas belum berkembang, demikian juga kelembagaan usaha nelayan masih individu, kekeluargaan, serta belum menuju pada korporasi dengan manajemen usaha yang modern dan profesional.

Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang belum berkembang mengakibatkan kemampuan operasi kapal-kapal ikan di Kepulauan Anambas relatif tertinggal dibandingkan dengan kapal-kapal ikan yang berasal dari luar daerah seperti kapal ikan dari Pulau Jawa (Pantura) dan wilayah lainnya seperti kapal-kapal ikan dari Provinsi Sumatera Utara. Mayoritas nelayan di Kepulauan Anambas menggunakan teknologi alat bagan apung, jaring (gillnet), pancing ulur, dan bubu. Sedangkan kapal-kapal ikan dari luar daerah menggunakan alat tangkap yang lebih canggih seperti pukat cincin (purse seine). Kesenjangan penguasaan teknologi penangkapan ikan pada armada kapal ikan di satu sisi berdampak pada efisiensi dan efektivitas hasil penangkapan ikan pada armada kapal ikan di Kepulauan Anambas. Disisi lain penggunaan teknologi alat tangkap bagan apung bertujuan selain mendapatkan target hasil tangkapan ikan bilis (teri)

dan cumi-cumi, juga dapat menangkap berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran (ikan rucah) untuk kebutuhan pakan pada usaha budidaya pembesaran ikan kerapu.

Kebutuhan ikan rucah yang besar, mencapai 1 – 2 ton per hari, dalam jangka panjang memberikan tekanan pada ketersediaan stok (populasi) sumberdaya ikan di alam, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, serta mengancam keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengatasi ketergantungan penggunaan pakan alami dengan inovasi dan penerapan teknologi dengan menciptakan teknologi pembuatan pakan alternatif yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan usaha budidaya perikanan.

Isu lainnya adalah tingginya kebutuhan bahan bakar solar pada usaha penangkapan ikan, sementara suplainya terbatas. Keterbatasan suplai bahan bakar solar di Kepulauan Anambas mengakibatkan nelayan sering mengalami kesulitan mencukupi kebutuhan bahan bakar solar untuk operasional melaut, yang berdampak pada produktivitas dan pendapatan usaha. Kebijakan kuota subsidi solar pada usaha perikanan, menciptakan ketergantungan nelayan dan ketidakpastian pada usaha penangkapan ikan.

Dari observasi di lapangan, kebutuhan solar untuk nelayan bagan apung sebesar 20-22 jerigen atau sekitar 700-770 liter per bulan (@ 35 liter solar/jerigen). Alat tangkap bagan apung melakukan trip penangkapan ikan biasanya selama 20 – 22 hari dalam sebulan. Jumlah alat tangkap bagan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Anambas diperkirakan sekitar 700 unit, sehingga total kebutuhan solar untuk kebutuhan nelayan bagan sekitar 490-539 ribu liter solar per bulan. Subsidi solar dari pemerintah pada nelayan dibatasi sebesar 7 jerigen per bagan per bulan. Tingginya kebutuhan solar untuk kegiatan penangkapan ikan mengakibatkan timbulnya potensi penyimpangan penggunaan bahan bakar solar bersubsidi pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ketergantungan penggunaan bahan bakar solar pada usaha penangkapan ikan juga menimbulkan ancaman terjadinya pencemaran akibat tumpahan dan limbah dari penggunaan bahan bakar solar dan oli di pelantar tempat tambat dan labuh kapal-kapal ikan. Hal demikian perlu diatasi melalui inovasi dan penerapan teknologi dengan menciptakan sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

Selain itu, industri pembuatan kapal ikan telah tumbuh dan memegang peranan penting dalam mendukung usaha penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adanya pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan kapal ikan menunjukkan tingkat kearifan masyarakat lokal dalam pengembangan industri maritim. Pembuatan kapal yang andal dan sesuai dengan karakteristik perairan setempat tidak hanya meningkatkan efisiensi dan keselamatan nelayan dalam beroperasi, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri penangkapan ikan. Pengembangan industri pembuatan kapal ikan menjadi faktor penting meningkatkan daya saing sektor perikanan.

b. Perikanan budidaya

Usaha perikanan budidaya di perairan laut telah berkembang dengan komoditi utamanya ikan kerapu dan napoleon hidup. Perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat, dan pelestarian sumberdaya ikan. Budidaya pembesaran ikan kerapu dan napoleon hidup memiliki prospek pengembangan yang baik, sebab pasar komoditi ikan kerapu dan napoleon hidup tersedia pada tingkat pasar domestik dan internasional. Pengembangan perikanan budidaya dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga ekosistem perairan laut dengan praktik budidaya ikan yang bertanggung jawab.

Isu lainnya yaitu pengembangan budidaya rumput laut dan lobster untuk diversifikasi komoditi perikanan budidaya dan peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat. Pengembangan inovasi dan teknologi, serta pelatihan budidaya rumput laut dan lobster dapat membantu menghidupkan industri budidaya perikanan dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Pengembangan budidaya perikanan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan bimbingan teknis dan kemudahan berusaha, akses permodalan dan pasar pada masyarakat.

Disamping itu peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mengenai teknik budidaya yang baik, efektif dan efisien. Disamping itu kemandirian usaha perikanan budidaya juga menjadi isu penting. Kemandirian dalam pakan dan benih budidaya ikan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada pakan ikan rucah serta meningkatkan efisiensi produksi perikanan. Dengan mengembangkan pakan dan benih di tingkat lokal, daerah ini dapat mengatasi ketergantungan pada pakan ikan rucah dan benih ikan kerapu dari luar. Selain itu, produksi pakan ikan alternatif dan benih kerapu juga berpotensi mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk perikanan Kepulauan Anambas di pasar domestik dan internasional.

c. Pengolahan hasil perikanan

Modernisasi teknologi dan sarana pengolahan hasil perikanan merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penerapan inovasi dan teknologi dalam proses pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan hasil perikanan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, serta dapat memenuhi standar pasar nasional dan internasional. Selain itu, modernisasi ini juga bertujuan untuk mengurangi kehilangan hasil tangkapan dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga nilai tambah produk perikanan dapat lebih optimal. Dengan menggunakan peralatan dan metode pengolahan yang lebih modern, hasil tangkapan dapat diolah dengan

lebih cepat dan higienis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jual produk di pasar global. Peningkatan standar pengolahan, *branding* produk, *traceability* dan bimbingan teknis menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk hasil perikanan.

Selain itu, pengembangan pengolahan perikanan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menguasai teknologi terbaru dan menerapkan praktik terbaik dalam pengolahan hasil perikanan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi operasional. Dengan demikian, modernisasi pengolahan perikanan diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perikanan unggulan di Nasional.

Pemanfaatan akses pasar internasional dalam sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi strategi utama dalam memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan nilai ekonomi daerah. Dengan memanfaatkan hubungan dagang internasional, produk perikanan Anambas dapat dijual ke pasar global yang memiliki permintaan tinggi dan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, akses pasar internasional memungkinkan pengenalan standar kualitas dan praktik terbaik dari berbagai negara, yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu produk lokal. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan, tetapi juga memperkuat reputasi Kepulauan Anambas sebagai produsen perikanan berkualitas tinggi.

Disamping itu, isu penting lainnya adalah mengupayakan kemandirian garam di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kebutuhan garam untuk usaha pengasinan relatif besar, sehingga kemandirian garam menjadi isu penting hasil perikanan merupakan salah satu isu untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan garam dari luar daerah dan melakukan produksi lokal. Melalui pengembangan teknologi produksi yang ramah lingkungan dan efisien, serta pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses produksi garam, diharapkan dapat tercapai kemandirian dalam memenuhi kebutuhan garam domestik. Yang modern dan berkelanjutan, serta peningkatan akses terhadap pasar. Dengan demikian, pengembangan inovasi dan teknologi produksi garam penting untuk mewujudkan kemandirian garam, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kepulauan Anambas, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.

d. Pariwisata bahari

Pariwisata bahari merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah di Kepulauan Anambas. Pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten

Kepulauan Anambas memerlukan terobosan dan strategi baru untuk mengatasi hambatan yang bersifat struktural dengan mengubah strategi dari konsep pembangunan yang bersifat sektoral menuju pada konsep keterpaduan pengembangan ekonomi biru dengan menjadikan Anambas sebagai pusat pendidikan, penelitian dan inovasi pariwisata bahari serta ekonomi kreatif bertaraf internasional. Konsep keterpaduan dalam pengembangan ekonomi biru ini mengedepankan partisipasi dalam diplomasi melalui pendidikan, penelitian, dan inovasi ekonomi biru, sekaligus untuk penguatan kedaulatan ruang wilayah beranda depan NKRI dengan membangun sarana bertaraf internasional untuk pertemuan ilmuwan, dan akademisi dari berbagai negara.

Keterpaduan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan pendidikan dapat mendorong kemajuan pariwisata bahari, serta mengatasi hambatan aksesibilitas dan mempercepat pembangunan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ragam potensi pariwisata bahari dapat berkembang dengan makin pesatnya kunjungan masyarakat dari dalam dan luar negeri bersamaan dengan berkembangnya forum-forum ilmiah bertaraf nasional dan internasional di Kepulauan Anambas. Destinasi wisata bahari seperti di Desa Belibak dapat dikembangkan menjadi *icon* wisata karena memiliki kekayaan sumber daya berupa hutan *mangrove*, kawasan terumbu karang yang ideal untuk aktivitas penyelaman dan snorkling, dilengkapi dengan penyediaan fasilitas penginapan.

Selain itu, potensi pantai Padang Melang di Pulau Jemaja menawarkan panorama pasir putih yang menawan dengan atraksi kano dapat menarik wisatawan lokal dan internasional. Demikian juga potensi hutan *mangrove* yang mempesona di Keramat Siantan, Batu Ampar, dan Genting Pulur yang berpotensi menjadi destinasi wisata treking mangrove. Namun, di balik keindahan alamnya, pengembangan potensi wisata bahari Anambas masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam mendukung ekonomi kreatif di sektor pariwisata menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, pengembangan wisata berbasis konservasi mangrove, peningkatan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan potensi wisata, serta pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang seperti akomodasi, peralatan wisata, dan atraksi wisata masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait.

Strategi pengembangan Pulau Jemaja diarahkan melalui pendekatan pengembangan kawasan yang terintegrasi, guna memaksimalkan potensi sumber daya alam dan posisi strategis wilayah, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengembangan kawasan industri, perdagangan terintegrasi menjadi salah satu fokus utama, dengan memanfaatkan potensi sektor perikanan, hasil laut, dan komoditas unggulan daerah yang dapat diolah langsung di kawasan tersebut, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi dan mendorong terciptanya lapangan kerja. Selain itu, penguatan sektor agroindustri dan pengembangan kawasan

agrominapolitan di Pulau Jemaja bertujuan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi, yang terhubung dengan pasar domestik maupun internasional. Potensi strategis Pulau Jemaja juga memungkinkan pengembangan kawasan industri penunjang kegiatan minyak dan gas bumi (migas), perkapalan, industri logistik dan perdagangan yang dapat menjadi simpul pendukung aktivitas ekonomi regional dan lintas negara di kawasan perbatasan.

Sektor pariwisata menjadi pilar penting lain melalui optimalisasi wisata berbasis kelestarian hutan dan pemanfaatan potensi wisata bawah laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pendekatan ini mengedepankan prinsip ekowisata yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pelibatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya pertambangan, baik skala rakyat maupun yang ditangani secara profesional, diarahkan pada pemanfaatan yang bertanggung jawab dan sesuai kaidah lingkungan guna menghindari kerusakan ekosistem. Dengan kombinasi strategi ini, Pulau Jemaja diharapkan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang memiliki daya saing tinggi namun tetap menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian alam.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana penginapan termasuk *guesthouse* diperlukan untuk merespon permintaan pasar. Frekuensi kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Kepulauan Anambas cenderung meningkat. Wisatawan asing memiliki kebiasaan tinggal selama 1-3 bulan. Meskipun demikian, industri wisata Anambas masih terkendala oleh biaya transportasi yang mahal, minimnya investor, infrastruktur wisata yang terbatas, industri *souvenir* belum berkembang, serta terbatasnya frekuensi kunjungan kapal regular penumpang menuju Kepulauan Anambas.

Dukungan swasta dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah Kepulauan Anambas seperti di sektor usaha migas, dan lainnya serta keberadaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi promotor penting dalam pengembangan aktivitas wisata bahari di Anambas. Meski demikian, upaya-upaya ini perlu diperkuat dengan strategi yang lebih komprehensif guna memaksimalkan potensi wisata bahari Anambas. Pengembangan SDM melalui pelatihan dan edukasi, promosi wisata yang inovatif dengan teknologi informasi, peningkatan aksesibilitas, serta diversifikasi produk wisata menjadi kunci dalam menarik minat wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kepulauan Anambas.

Selain pengembangan SDM, penting juga untuk memperhatikan aspek promosi wisata. Promosi yang intensif dan tepat sasaran dapat meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan terhadap destinasi wisata bahari di Anambas. Dengan demikian, peningkatan aksesibilitas, baik melalui perbaikan infrastruktur transportasi maupun kemudahan akses informasi wisata, menjadi faktor krusial yang perlu mendapat perhatian.

Investasi dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya, dapat mendukung kelancaran arus wisatawan dan barang menuju Kepulauan Anambas.

Diversifikasi produk wisata juga merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan daya tarik wisata Anambas. Pengembangan berbagai jenis wisata, seperti wisata alam, budaya, dan edukasi, dapat memberikan pengalaman yang beragam bagi wisatawan. Dengan demikian, wisatawan dapat memiliki lebih banyak pilihan aktivitas selama berada di Anambas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran mereka di daerah tersebut. Diversifikasi ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis wisata tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Kebijakan dan program percepatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi biru melalui kerja sama *multi-helix* diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Anambas. Kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta menjadi faktor penentu dalam mencapai tujuan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kemampuannya masing-masing. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan infrastruktur, masyarakat berperan dalam menjaga dan mengelola destinasi wisata, pihak swasta dapat berinvestasi dalam fasilitas dan promosi wisata, masyarakat berperan dalam pengembangan budaya lokal, serta perguruan tinggi berperan dalam pengembangan pendidikan dan pengkajian potensi ekonomi biru di Kepulauan Anambas. Melalui sinergi ini, Kepulauan Anambas berpotensi menjadi destinasi wisata bahari unggulan yang berkelanjutan bertaraf internasional dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

Pengembangan *branding* wisata bahari di Kepulauan Anambas menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya tarik dan pengenalan destinasi ini di kancah nasional maupun internasional. Salah satu isu utama adalah kurangnya promosi yang efektif dan berkelanjutan, yang mengakibatkan rendahnya kesadaran wisatawan terhadap potensi wisata bahari di Anambas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi branding yang komprehensif dan terpadu, melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal. *Branding* perlu menonjolkan keunikan dan keindahan alam Kepulauan Anambas, seperti terumbu karang yang menawan, pantai pasir putih, serta ekowisata *mangrove*. Selain itu, penguatan identitas budaya lokal, kampanye pemasaran digital dapat membantu dalam membangun citra positif dan menarik minat wisatawan. Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat branding wisata bahari Anambas, sehingga mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya.

Promosi intensif dan partisipasi dalam pameran pariwisata internasional dapat memperkenalkan keindahan alam bawah laut dan kekayaan budaya Kepulauan Anambas ke khalayak global. Selain itu, kerja sama dengan agen perjalanan dan platform booking internasional dapat memudahkan akses wisatawan ke Anambas. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing, pendapatan dari sektor pariwisata bahari akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Pemanfaatan akses pasar internasional dalam kedua sektor ini menjadi kunci utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan promosi wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan komponen krusial dalam meningkatkan daya tarik dan daya saing sektor pariwisata daerah. Melalui program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, diharapkan SDM lokal dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan destinasi wisata bahari secara profesional. Selain itu, promosi yang intensif dan strategis, baik melalui media konvensional maupun digital, bertujuan untuk memperkenalkan keindahan alam bawah laut dan kekayaan budaya Anambas kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Sinergi antara pengembangan SDM dan promosi wisata bahari ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperpanjang masa tinggal mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Diversifikasi produk (keragaman destinasi) wisata bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya tarik dan memperpanjang masa tinggal wisatawan. Dengan mengembangkan berbagai jenis objek wisata bahari, seperti snorkling, *diving*, wisata budaya maritim, dan ekowisata, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih beragam dan memuaskan para wisatawan. Disamping itu dapat meningkatkan daya saing, menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru dan peluang usaha di sektor pariwisata. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk menarik segmen wisatawan yang lebih luas, baik dari pasar domestik maupun internasional, yang pada gilirannya dapat memperkuat keunggulan Kepulauan Anambas sebagai destinasi wisata bahari nasional.

4. Peningkatan Infrastruktur Permukiman dan Konektivitas Wilayah

Pembangunan infrastruktur dasar mencakup listrik, air bersih, kesehatan dan sanitasi lingkungan, dan transportasi, merupakan fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyediaan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan seperti listrik dapat meningkatkan produktivitas dan perkembangan industri lokal. Demikian juga ketersediaan sarana air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai sangat penting untuk menjaga dan

meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penularan penyakit. Sementara itu, pengembangan transportasi yang efektif dapat mempermudah mobilitas penduduk dan distribusi barang, sehingga mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Dengan membangun infrastruktur dasar yang kuat dan terpadu, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi investasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pengembangan fasilitas untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah isu penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam fasilitas kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang dilengkapi dengan peralatan medis modern dan tenaga kesehatan yang terlatih, dapat menjamin akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga. Selain itu, peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk pembangunan sekolah untuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; penyediaan bahan ajar yang berkualitas, serta pelatihan bagi tenaga pendidik, dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik dan responsif gender tidak hanya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan terdidik, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan adalah fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pembangunan rumah sakit tipe C di Kecamatan Siantan, yang direncanakan berlokasi di kawasan Tanjung Momong, Desa Tarempa Timur, merupakan inisiatif strategis dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Keberadaan fasilitas kesehatan dengan standar pelayanan tipe C ini diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit di luar daerah, sekaligus mempersingkat waktu penanganan pasien pada situasi darurat. Rumah sakit ini dirancang untuk menyediakan layanan komprehensif meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, instalasi gawat darurat, dan dukungan fasilitas diagnostik modern. Pemilihan lokasi di Tanjung Momong memiliki signifikansi tersendiri, mengingat posisinya yang strategis untuk menjangkau wilayah sekitar sehingga dapat berfungsi sebagai pusat rujukan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Anambas dan sekitarnya.

Upaya penignkatan kualitas kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan infrastruktur kesehatan semata, tetapi juga sebagai langkah transformasi layanan kesehatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Strategi pengembangan meliputi pemenuhan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, pengadaan peralatan

medis berteknologi mutakhir, serta penerapan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi pelayanan. Lebih jauh, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan mitra strategis diharapkan menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan operasional rumah sakit. Dengan pendekatan holistik tersebut, rumah sakit tipe C di Tanjung Momong diharapkan menjadi manifestasi komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pemenuhan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan serta kesehatan, perlu mempertimbangkan efektifitas mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah dengan sebaran masyarakat pada pulau-pulau besar maupun pulau kecil. Hal-hal seperti banyaknya sebaran fasilitas kesehatan namun dengan peralatan yang tidak memadai, atau banyaknya sebarang bangunan sekolah namun dengan jumlah siswa yang sedikit, perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kebijakan.

Pengelolaan sampah laut, sampah darat, dan limbah di Kepulauan Anambas merupakan upaya esensial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kesehatan masyarakat setempat. Dengan menerapkan sistem pengelolaan yang komprehensif dan terpadu, termasuk pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah serta limbah, Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mengurangi dampak negatif pencemaran terhadap ekosistem laut dan darat. Implementasi teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, seperti daur ulang dan pengomposan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, akan meningkatkan partisipasi dan kesadaran lingkungan. Selain itu, kebijakan pengelolaan sampah yang efektif juga akan menciptakan peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang dan pengolahan limbah, yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah laut, sampah darat, dan limbah yang efisien merupakan langkah strategis untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kepulauan Anambas.

Perhatian lebih perlu diberikan kepada peningkatan upaya penanganan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Aspek yang penting untuk ditingkatkan adalah aspek pemrosesan akhir. Selain penyediaan tempat pemrosesan akhir yang memadai, tantangan lainnya adalah tidak lagi menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) melainkan sudah harus menerapkan model *sanitary landfill.*

Pembangunan permukiman yang nyaman dan ramah lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Permukiman yang nyaman dan ramah lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, biaya terjangkau serta pengelolaan air dan limbah yang efektif. Implementasi teknologi hijau, seperti panel surya untuk energi terbarukan dan sistem

pengelolaan air hujan, dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam pulau-pulau kecil yang terbatas. Selain itu, permukiman ramah lingkungan juga dapat menyediakan ruang hijau yang memadai, yang tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi tetapi juga sebagai penyerap karbon dan pengatur iklim mikro. Dengan demikian, pembangunan permukiman ramah lingkungan di Kepulauan Anambas dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif.

Meskipun demikian, pembangunan permukiman yang nyaman dan ramah lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi tantangan, terutama terkait dengan fenomena pembangunan rumah pelantar yang merupakan bentuk permukiman tradisional di wilayah pesisir. Rumah pelantar, yang dibangun di atas tiang-tiang pancang di perairan dangkal, menghadapi berbagai masalah seperti kerentanan terhadap cuaca ekstrem, erosi, dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim. Selain itu, infrastruktur dasar di rumah pelantar seperti sanitasi lingkungan dan akses air bersih sering kali tidak memadai. Selain itu, rumah pelantar memiliki risiko hukum terkait perizinan yang kompleks. Keberadaan rumah pelantar terikat dengan aturan hukum penataan ruang pesisir dan laut.

Untuk mengatasi tantangan dari sisi lingkungan, diperlukan pendekatan yang inovatif yang mempertimbangkan budaya lokal dengan menggabungkan praktik-praktik ramah lingkungan, serta penguatan struktur rumah pelantar untuk keamanan dan keselamatan.

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan upaya vital untuk memastikan ketersediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat dan mendukung permukiman yang sehat dan nyaman. Pendekatan holistik dalam pengelolaan sumber daya air mencakup pembangunan infrastruktur penampungan dan distribusi air yang efisien, penerapan teknologi pemurnian air laut (desalinasi), serta konservasi daerah aliran sungai dan sumber mata air. Selain itu, edukasi dan partisipasi masyarakat dalam praktik-praktik pengelolaan air yang bijak sangat diperlukan untuk mengurangi pemborosan dan mencegah pencemaran. Strategi pengelolaan yang terpadu ini tidak hanya akan menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri, tetapi juga akan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan tekanan lingkungan lainnya. Dengan demikian, pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang efektif menjadi fondasi penting meningkatkan kualitas permukiman masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penjaminan akan pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum adalah tanggung jawab Negara. Oleh karena itu, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, baik melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). SPAM yang dibangun meliputi SPAM

jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. Penyelenggaraan SPAM ini meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM, dan perlu dilandaskan pada Rencana Induk SPAM Kabupaten dan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaran SPAM Kabupaten. Selain itu, keberadaan Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya juga perlu dibina dan didukung pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pengolahan air laut menjadi sumber air bersih merupakan solusi inovatif untuk mengatasi masalah ketersediaan air tawar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan memanfaatkan teknologi desalinasi, air laut dapat diolah menjadi air bersih yang layak untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Teknologi ini sangat relevan bagi daerah kepulauan yang sering menghadapi keterbatasan sumber air tawar. Investasi dalam infrastruktur pengolahan air laut dapat memastikan pasokan air bersih yang stabil dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi. Selain itu, pengolahan air laut juga dapat mengurangi tekanan pada sumber air tawar yang terbatas, sehingga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, pengembangan teknologi pengolahan air laut perlu menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan sumber daya air untuk permukiman di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Terkait konektivitas wilayah, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari ratusan pulau kecil yang tersebar di Laut Natuna Utara, menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal keterhubungan antar daerah. Keterbatasan infrastruktur konektivitas khususnya perhubungan laut, udara dan infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah. Ditambah lagi adanya keterbatasan frekuensi dan muatan pelayaran perintis tol laut dan pelayaran penyeberangan akan memengaruhi daya saing produk. Tidak hanya berpengaruh terhadap pergerakan dan perpindahan orang, namun masalah keterbatasan konektivitas juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi karena kelancaran logistik dapat terhambat dan para pelaku UMKM tidak dapat memasarkan produknya ke luar wilayah. Oleh sebab itu maka diperlukan harmonisasi regulasi, kelembagaan, dan kerja sama antar pemangku kepentingan, khususnya sektor swasta sebagai penyedia jasa, dalam peningkatan konektivitas wilayah.

Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana konektivitas antardaerah di wilayah daratan dan kepulauan, Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memuat kebijakan mengenai jalur distribusi logistik dan transportasi yang lebih efektif dan efisien sehingga memungkinkan pengiriman barang dan jasa serta mobilisasi penduduk secara cepat dan tepat. Hal tersebut tercantum dalam Bab 5 RPJPN 2025-2045 tentang Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju

Indonesia Emas. Selain itu, bab khusus Arah Kebijakan Wilayah Sumatera dalam RPJPN 2025-2045 menyebutkan bahwa potensi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan jalur perdagangan internasional mampu memberikan kesempatan bagi Pulau Sumatera untuk membangun jalur-jalur logistik yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas sehingga isu kesenjangan mampu dikurangi.

Peningkatan konektivitas transportasi skala regional dan global merupakan strategi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pasar yang lebih luas. Dengan memperbaiki infrastruktur transportasi, seperti pelabuhan laut, bandara, dan jaringan jalan yang terhubung dengan baik, daerah ini dapat lebih mudah diakses oleh pelaku bisnis dan wisatawan. Konektivitas yang baik dapat meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat aliran barang dan jasa. Selain itu, keterhubungan yang lebih baik dengan pusat-pusat ekonomi regional dan global akan membuka peluang bagi perdagangan internasional dan investasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lokal seperti perikanan, pariwisata, dan industri kreatif.

Lebih jauh, peningkatan konektivitas transportasi juga memiliki implikasi positif terhadap kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Akses yang lebih mudah dan cepat ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial. Selain itu, pengembangan transportasi yang terpadu dan berkelanjutan dapat mengurangi isolasi geografis, memperkuat kohesi sosial, dan mempercepat respon terhadap situasi darurat. Implementasi teknologi transportasi cerdas dan ramah lingkungan juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada gilirannya, sektor-sektor ekonomi unggulan, yaitu pariwisata dan perikanan, akan berkembang diikuti dengan meningkatnya aliran investasi yang masuk karena Anambas menjadi semakin menarik dengan konektivitas dan infrastrukturnya yang membaik.

5. Peningkatan Ketahanan Ekologi di Pulau-pulau Kecil

Potensi energi baru terbarukan di Kabupaten Kepulauan Anambas menawarkan peluang signifikan untuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan energi daerah. Mengingat lokasi geografis Anambas yang strategis, potensi untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga angin, tenaga surya, dan energi laut sangat besar. Implementasi teknologi energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mahal dan tidak ramah lingkungan, serta mendukung komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Investasi dalam infrastruktur energi terbarukan juga dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, eksplorasi dan pengembangan potensi energi baru terbarukan dapat menjadi prioritas

dalam rencana pembangunan daerah untuk mencapai energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pengendalian pemanfaatan sumber daya (ekstraktif) daratan pesisir merupakan langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pulau kecil dan memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Mulai berkembangnya penambangan pasir illegal, penangkapan ikan yang tidak lestari, pembukaan hutan yang tidak terkontrol, dapat menyebabkan dampak merugikan di kemudian hari. Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan kekayaan hayati, perlu partisipasi daerah bersama masyarakat dalam pengawasan aktivitas pemanfaatan sumberdaya ekstraksi seperti penangkapan dan budidaya ikan, pengambilan terumbu karang, dan eksplorasi bawah laut secara ketat. Pengaturan ini dapat dilakukan melalui penerapan masterplan daerah dan blueprint pengembangan ekonomi biru yang mempertimbangkan klasterisasi potensi ruang darat dan laut pulau kecil, pengawasan berbasis masyarakat pada kegiatan penangkapan dan budidaya, dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, promosi praktik penangkapan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan perlu didorong dan ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif terhadap ekosistem pulau kecil.

Implementasi teknologi desalinasi merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah keterbatasan air bersih di daerah kepulauan seperti yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Teknologi desalinasi memungkinkan konversi air laut menjadi air tawar yang layak konsumsi melalui proses pemisahan garam dan mineral lainnya. Dengan investasi dalam infrastruktur desalinasi dengan inovasi dan teknologi modern dapat menjamin dan meningkatkan pasokan air bersih yang stabil dan berkelanjutan untuk kebutuhan rumah tangga, industri pengolahan hasil perikanan, dan pariwisata di Kepulauan Anambas. Selain itu, teknologi desalinasi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber air tawar yang terbatas dan rentan terhadap perubahan iklim, sehingga meningkatkan ketahanan air daerah dalam jangka panjang.

Pengembangan sarana pelayanan untuk menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi isu penting. Disamping itu pemetaan risiko dan mitigasi bencana kebakaran merupakan upaya esensial untuk memahami dan mengelola potensi bahaya alam di pulau kecil yang dapat mengancam keselamatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan pemetaan yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, terutama Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Bencana Tanah Longsor, serta Gelombang Ekstrim dan Abrasi yang memiliki kelas risiko tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan risiko juga memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah preventif dan proaktif dalam mengatasi kerentanan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu,

hasil pemetaan dapat digunakan untuk edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko bencana dan tindakan pencegahannya.

Pengembangan sistem peringatan dini merupakan komponen kunci dalam manajemen risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda awal bencana dan memberikan peringatan cepat kepada masyarakat dan pihak berwenang, sehingga tindakan evakuasi dan mitigasi dapat segera dilakukan. Implementasi teknologi komunikasi dan sensor yang canggih dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan deteksi bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan cuaca ekstrem. Dengan sistem peringatan dini yang handal, pemerintah dapat mengurangi dampak negatif bencana terhadap kehidupan dan harta benda masyarakat. Selain itu, pengembangan sistem peringatan dini melalui pelatihan dan simulasi rutin untuk memastikan bahwa masyarakat dan petugas siap merespon dengan cepat dan tepat.

Rehabilitasi dan konservasi ekosistem merupakan bagian integral dari strategi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Upaya rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak akibat aktivitas manusia atau bencana alam, seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan kawasan pesisir. Konservasi ekosistem, di sisi lain, berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati serta fungsi ekosistem. Dengan melakukan rehabilitasi dan konservasi, Anambas dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi basis kehidupan masyarakat. Program ini juga berkontribusi meningkatkan ketahanan ekologi yang mencakup mitigasi perubahan iklim dan mengatasi potensi risiko dari bencana alam di Kepulauan Anambas.

6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Responsif

Bagi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki berbagai tantangan dalam pembangunan, peningkatan kompetensi aparatur merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, para aparatur dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan terbaru yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang regulasi dan kebijakan terkini, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya dapat memperbaiki kinerja individu aparatur tetapi juga memperkuat kapasitas institusi pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Selain itu, dengan aparatur yang lebih kompeten, pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, investasi dalam peningkatan

kompetensi aparatur merupakan fondasi penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penguatan sistem government digital merupakan upaya penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Implementasi teknologi digital dalam berbagai aspek pelayanan publik, seperti administrasi, perizinan, dan pengelolaan data, dapat mempercepat proses birokrasi dan mengurangi potensi kesalahan serta penyimpangan. Tantangan layanan publik yang berupaya menjangkau masyarakat yang tersebar di wilayah kepulauan, memerlukan intervensi teknologi informasi yang menghadirkan kecepatan dan kedekatan akses. Sistem government digital memungkinkan interaksi yang lebih mudah dan cepat antara pemerintah dan masyarakat, memberikan akses informasi yang lebih luas dan real-time, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, digitalisasi juga mendukung penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih aman dan efisien, yang sangat penting untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan yang berbasis data. Dengan demikian, penguatan sistem government digital tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga membangun fondasi untuk pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah merupakan prinsip fundamental yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan anti korupsi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penerapan transparansi dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah daerah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan. Di sisi lain, akuntabilitas memastikan bahwa para pejabat dan institusi pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang ditetapkan. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta sistem pelaporan yang efektif, perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, responsif, dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Pengembangan kebijakan berbasis bukti merupakan pendekatan yang krusial untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan relevan. Dengan menggunakan metode penelitian ilmiah dan analisis data yang komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, mengevaluasi berbagai opsi kebijakan, dan memilih solusi yang paling efektif dan efisien. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah

untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan yang telah diimplementasikan, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Kebijakan berbasis bukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh data yang akurat dan dapat diverifikasi.

Penguatan sistem pengawasan juga merupakan elemen kunci dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem pengawasan yang efektif mencakup mekanisme internal dan eksternal yang bertujuan untuk memantau kinerja pemerintah, mengidentifikasi penyimpangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Penguatan sistem pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas auditor internal, pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan sistem pengawasan yang kuat, pemerintah daerah dapat mendeteksi dan menangani masalah lebih awal, mencegah praktik korupsi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, pengembangan kebijakan berbasis bukti dan penguatan sistem pengawasan saling melengkapi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Perbaikan infrastruktur dan fasilitas kerja yang ramah terhadap kelompok rentan merupakan langkah esensial dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi informasi, pegawai pemerintah dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif. Infrastruktur yang baik, seperti gedung perkantoran yang layak dan ramah terhadap kelompok rentan, jaringan komunikasi yang handal, dan peralatan kerja yang memadai, akan menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan mendukung kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, perbaikan fasilitas kerja juga berkontribusi pada kesejahteraan pegawai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam pelayanan pada masyarakat.

Pengelolaan keuangan yang produktif dan efisien adalah komponen kunci dalam mencapai target dan sasaran pembangunan daerah. Dengan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal dan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Adanya keterbatasan anggaran, juga adanya efisiensi dari pemerintah pusat yang sangat berdampak pada pembiayaan pembangunan, perlu disikapi dengan pengelolaan keuangan yang tepat. Pengelolaan keuangan yang efisien melibatkan perencanaan anggaran yang cermat, pengendalian pengeluaran yang ketat, serta pelaporan keuangan yang transparan. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pengelolaan anggaran, serta meminimalkan risiko

kecurangan dan penyalahgunaan dana publik. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang efisien tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat mendukung program dan kebijakan pembangunan secara efektif.

Perencanaan dan evaluasi berkelanjutan merupakan elemen penting dalam siklus manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Proses perencanaan yang komprehensif perlu didasarkan pada analisis kebutuhan dan potensi daerah, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Perencanaan yang baik fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan serta dapat mengakomodasi inovasi dan perkembangan teknologi. Selain itu, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menilai kinerja program dan kebijakan yang telah diimplementasikan, sehingga dapat diidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan disesuaikan dengan kebutuhan aktual. Melalui perencanaan dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan secara efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat serta lingkungan.

BAB 3. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah strategis di Laut Natuna Utara yang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain, wilayah ini memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional. Namun, berbagai tantangan strategis dihadapi, mulai dari kualitas sumber daya manusia (SDM), perlindungan sosial, hingga pemanfaatan potensi ekonomi biru. Peningkatan kualitas SDM, khususnya dalam pendidikan, kesehatan mental, serta pelestarian budaya, menjadi kunci dalam memperkuat karakter masyarakat pesisir. Perlindungan sosial juga harus diperluas untuk kelompok rentan, dengan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan dalam sektor produktif seperti perikanan dan pariwisata.

Dari sisi ketahanan pangan, Anambas masih menghadapi indeks ketahanan pangan yang rendah akibat keterbatasan lahan produktif dan infrastruktur pertanian. Optimalisasi pertanian dan perikanan, serta distribusi pangan yang merata sangat dibutuhkan. Di sektor ekonomi biru, pengembangan perikanan tangkap dan budidaya memerlukan inovasi teknologi, penguatan kelembagaan, dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar serta pakan alami. Modernisasi pengolahan hasil perikanan dan pemanfaatan pasar global diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk daerah.

Pariwisata bahari memiliki potensi besar namun terkendala SDM, promosi, dan infrastruktur. Oleh karena itu, pengembangan destinasi, pelatihan masyarakat, peningkatan aksesibilitas, serta branding wisata perlu diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Isu konektivitas dan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, penanganan sampah, transportasi, dan permukiman ramah lingkungan juga sangat mendesak untuk ditangani guna meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketahanan ekologi di pulau-pulau kecil perlu ditingkatkan melalui pengembangan energi terbarukan, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem, serta penguatan sistem peringatan dini bencana. Terakhir, tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif sangat diperlukan untuk mendukung seluruh agenda pembangunan ini. Penguatan kompetensi aparatur, digitalisasi layanan publik, pengelolaan keuangan yang efisien, serta perencanaan dan evaluasi berbasis data menjadi pondasi menuju pembangunan Anambas yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Berdasarkan gambaran isu strategis tersebut, dipandu juga dengan visi jangka panjang 2045 yaitu “Kepulauan Anambas yang Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru”, maka disusunlah visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah, dan program-program prioritas daerah yang diuraikan sebagai berikut.

3.1 Visi dan Misi

Pada bagian ini dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Visi, misi dan janji kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode tahun 2025-2030. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"KEPULAUAN ANAMBAS YANG BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL DI BIDANG MARITIM MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA"

Terdapat lima kata kunci/frasa yang terkandung pada rumusan visi tersebut dengan masing-masingnya dijabarkan sebagai berikut:

1. **Berdaya saing**, adalah kondisi ketika sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing dengan daerah-daerah serupa lainnya. Kualitas SDM yang baik ini dibentuk dari layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan menjangkau seluruh warga. Melalui akses yang baik terhadap pendidikan, maka SDM daerah akan dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga kebutuhan akan tenaga kerja terampil (*high skilled workers*) dapat dipenuhi oleh warga daerah sendiri. Pelaku-pelaku UMKM memiliki daya saing dan produktivitas berbekal kualitas input yang digunakan dan penggunaan teknologi. Daya saing yang meningkat tercermin dari Indeks Daya Saing Daerah.
2. **Inovatif**, adalah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang adaptif dengan berbagai pendekatan baru dalam pembangunan sehingga dapat senantiasa kreatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berbagai perkembangan terkini yang menuntut adanya pendekatan yang inovatif adalah **i)** ketahanan pangan, energi, dan air (*food, energy, and water nexus*), dan **ii)** serta perekonomian daerah yang dikembangkan dengan berbasis pada ekonomi biru.
3. **Agamis,** adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki keimanan yang kuat, ketaatan dalam beribadah berdasarkan

keyakinan yang dianut, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang agamis memparipurnakan SDM yang berdaya saing, karena untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, tidak cukup hanya berbekal daya saing (produktivitas dan keterampilan) saja, melainkan juga memerlukan moralitas yang tinggi sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

4. **Unggul di bidang maritim**, adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengoptimalkan karunia yang dimilikinya berupa untaian gugusan pulau-pulau dan kekayaan potensi laut. Berbekal karunia tersebut, maka Kabupaten Kepulauan Anambas akan memajukan wisata bahari yang memanfaatkan lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Kekuatan dasar dari wisata bahari terletak pada pemandangan, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat kepulauan.

   Untuk dapat memiliki keunggulan tersebut, maka infrastruktur pendukung usaha haruslah memadai dan prima, baik untuk perikanan (budidaya dan tangkap) maupun pariwisata. Diantara infrastruktur tersebut adalah ketersediaan energi, infrastruktur konektivitas dan logistik. Modernisasi dan digitalisasi harus dilakukan sehingga untuk produk perikanan misalnya, produknya menjadi produk yang memiliki ketelusuran (*traceability*) sebagai permintaan dari pasar dunia. Sertifikasi untuk berbagai produk yang dihasilkan juga harus didapatkan sehingga produk-produk tersebut dapat dijamin kualitasnya bagi konsumen internasional. Pengembangan destinasi dan promosi wisata daerah menjadi hal yang dikedepankan. Tentunya perwujudan berbagai program tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit dan juga memerlukan sumber-sumber lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peningkatan iklim investasi daerah harus dijadikan sebagai prioritas utama. Keunggulan di bidang maritim harus tercermin pada tingginya daya tarik investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. **Maju dan sejahtera**, adalah ketika masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencapai taraf hidup yang makmur, sehat, dan damai. Kemakmuran menyangkut pada aspek ekonomi, sementara kesehatan menyangkut pada sisi fisik dan mental manusia. Adapun kedamaian terkait dengan aspek sosial, emosional, dan spiritual. Pengertian tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan bersifat multi-dimensi dan harus diupayakan pemenuhannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan usaha-usaha yang cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan yang tinggi tercermin dari rendahnya angka

kemiskinan melalui sumber-sumber penghidupan warga yang berkelanjutan dan ditunjang oleh berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan.

Untuk dapat mewujudkan kondisi-kondisi yang termuat di dalam pernyataan visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut.

Misi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendorong kemajuan daerah, khususnya dalam mewujudkan visi Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera. Melalui penguatan kualitas SDM, visi tersebut dapat tercapai karena masyarakat yang berdaya saing tidak hanya mampu menghadapi tantangan global, tetapi juga tetap berpegang pada nilai keagamaan dan budaya lokal demi terwujudnya Anambas yang unggul, maju, dan sejahtera.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata, diperlukan sasaran yang lebih terukur dan spesifik. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan akses baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan kebudayaan, serta penguatan kesetaraan gender. Selain itu, peningkatan stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun juga penting dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang harmonis.

Misi 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan

Infrastruktur yang memadai merupakan fondasi utama bagi peningkatan daya saing daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis berupa keterisolasian antarwilayah. Dengan infrastruktur yang merata, masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan dasar, aktivitas ekonomi, serta transportasi publik yang mendukung pergerakan manusia dan barang. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah unggul di bidang maritim.

Pelaksanaan misi ini diarahkan untuk mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman. Peningkatan konektivitas transportasi publik menjadi prioritas penting dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Demikian pula, penyediaan infrastruktur dasar yang adil dan terjangkau di seluruh wilayah akan memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata, sehingga mengurangi disparitas antarwilayah. Pendekatan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial-ekonomi, karena infrastruktur

yang baik akan membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih jauh, misi ini juga akan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan pembangunan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup serta penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai wilayah kepulauan, memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak lingkungan, sehingga pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan mitigasi risiko bencana. Dengan demikian, misi kedua tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan di masa depan, sejalan dengan visi besar Anambas yang berdaya saing dan unggul di bidang maritim.

Misi 3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif

Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, dan unggul hanya dapat dicapai melalui dukungan birokrasi yang profesional dan kolaboratif. Sebagai regulator dan juga eksekutor dalam hal pelayanan publik dan pembangunan daerah, maka birokrat yang profesional dan kolaboratif akan menentukan kualitas dari pelayanan publik dan pembangunan yang dilaksanakan yang pada akhirnya akan menentukan daya saing, inovasi, dan keunggulan daerah.

Agar dapat mewujudkan pelayanan yang prima, maka diperlukan penguatan reformasi birokrasi secara berkesinambungan. Agenda reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan sejak lama, perlu untuk terus dilanjutkan dan senantiasa diperkuat agar tidak terjebak untuk hanya menjadi sekadar jargon dan rutinitas belaka. Untuk itu, kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif menjadi tujuan dari misi ini. Kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah, dan inovatif serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Misi 4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi yang sangat besar di bidang kemaritiman dan pariwisata. Ekonomi masyarakat di Kepulauan Anambas sangat bergantung pada bidang maritim dimana mayoritas penduduk berprofesi di sektor perikanan. Pengembangan ekonomi berbasis maritim dan wisata diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan ekonomi daerah. Kepulauan Anambas yang unggul di bidang maritim dicapai dengam memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.

Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata dilakukan dengan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim

dan pariwisata. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata, meningkatkan investasi dan integrasi ekonomi, dan menurunkan pengangguran daerah.

Misi 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Misi kelima merupakan fondasi penting untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah yang berdaya saing, inovatif, agamis, dan unggul di bidang maritim menuju masyarakat maju dan sejahtera. Misi ini menekankan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat, khususnya yang berada di desa-desa dan wilayah kepulauan terpencil, mampu menikmati kesejahteraan secara merata. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar warga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama dalam menggerakkan roda pembangunan di lingkungannya.

Pelaksanaan misi ini diarahkan pada pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, pemerintah daerah akan menempuh berbagai strategi yang mendukung pencapaian dua sasaran utama. Pertama, menurunnya angka kemiskinan, yang akan dilakukan melalui 1) peningkatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi petani, nelayan, kelompok marjinal, dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien ; dan 2) Mempercepat pembangunan dan penuntasan kemiskinan daerah. Kedua, meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa, yang akan diwujudkan melalui Meningkatkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dan penyedia sumber daya.

Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan masyarakat Kepulauan Anambas semakin berdaya, mampu mandiri, serta memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, sehingga kesejahteraan dapat meningkat secara inklusif. Pada akhirnya, pencapaian misi ini akan menjadi salah satu pilar utama terwujudnya visi besar Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu masyarakat yang maju, sejahtera, dan unggul, sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai wilayah kepulauan maritim yang berdaya saing

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, yang dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi daerah serta berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis. Sasaran menggambarkan capaian yang

diharapkan melalui serangkaian tindakan—yang direncanakan secara sistematis.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada arah pembangunan jangka panjang yang tercantum dalam RPJPN, RPJPD Provinsi Kepulauan Riau, serta RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2045. Penyusunan ini juga berlandaskan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2029, sehingga tercipta integrasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan secara hierarkis. Hal ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus menjawab kebutuhan lokal masyarakat Anambas.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas berperan sebagai *blueprint* yang mengarahkan seluruh arsitektur kinerja pembangunan, mulai dari perencanaan anggaran (APBD) hingga evaluasi program. Setiap sasaran harus terhubung dengan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, memungkinkan pengukuran keberhasilan secara transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan itu, tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD berfungsi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap misi. Artinya, setiap tujuan dan sasaran yang dirumuskan tidak hanya menjadi arah kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian misi pembangunan daerah. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD ini memiliki posisi strategis sebagai instrumen untuk memastikan terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus menjadi pedoman dalam pengendalian, evaluasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 3.1. Visi/Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
KEPULAUAN ANAMBAS yang BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL di BIDANG MARITIM menuju MASYARAKAT MAJU dan SEJAHTERA	**Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur**	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,86	74,26	74,65	75,05	75,44	75,83
			Meningkatnya Kualitas layanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	7,62	8,01	8,4	8,8	9,19	9,59
				Harapan Lama Sekolah	13,2	13,3	13,39	13,49	13,59	13,68
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	68,84	69,3	69,77	70,23	70,69	71,15
				Prevalensi Stunting	13,30	12,50	12,30	11,80	11,30	11,00
			Meningkatnya kualitas Pengembangan kebudayaan	Indeks Pengembangan Kebudayaan	53,7	55	56,3	57,6	58,9	60,1
			Meningkatnya kualitas kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44
			Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,99
	Misi 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	91,92	92,43	92,93	93,44	93,94	94,45

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Misi 3 Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif		Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Rasio Konektivitas	0,54	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	84,52	84,89	85,27	85,64	86,02	86,39
			Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	84,37	83,65	82,93	82,22	81,5	80,78
				Persentase penurunan emisi GRK						
				a. Kumulatif	0,04	0,09	0,14	0,198	0,25	0,29
				b. Tahunan	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22
		Meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (74,57)	BB (74,90)	BB (75,17)	BB (75,48)	BB (75,77)	BB (76)
			Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP	B (63,66)	B (65,34)	B (67,05)	B (68,72)	BB (70,46)	BB (71,86)
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	73,48	73,87	74,13	74,46	74,72	75,00
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	4,20	4,25	4,30	4,35	4,40	4,50
				Indeks Inovasi Daerah	41,50	41,80	42,10	42,30	42,50	42,80
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik	3,04	3,07	3,19	3,31	3,43	3,55

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Misi 4 Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata			Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	80	81	82	83	84	85
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata		Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)	3,26	3,56	3,86	4,16	4,46	4,76
			Meningkatnya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	4,64	4,91	5,19	5,46	5,74	6,01
				Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	0,2	0,35	0,59	0,84	1,08	1,32
				Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	0,17	0,18	0,2	0,21	0,22	0,24
			Meningkatnya investasi dan integrasi ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,52	24,99	25,46	25,93	26,4	26,87
			Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	1,69	1,7	1,71	1,72	1,73	1,74

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Misi 5 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa		Tingkat Kemiskinan	6,65-6,38	6,37-6,09	6,08-5,81	5,80-5,53	5,52-5,25	5,24-4,46
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,19	2,16	2,13	2,09	2,06	2,02
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	65	67	69	71	73	75
				Persentase rumah tangga sasaran (sangat miskin dan miskin) yang mendapatkan bantuan dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif	62	64	66	68	70	72
			Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa	Indeks Desa	0,71	0,73	0,75	0,77	0,78	0,80

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan memiliki peran strategis dalam menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah yang relevan, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Keduanya menjadi pedoman komprehensif bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Strategi RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang bersifat menyeluruh dan sistematis, berisi upaya-upaya yang akan dilakukan melalui optimalisasi sumber daya, pengelolaan tahapan pelaksanaan, penentuan fokus pembangunan, serta pemilihan program prioritas. Strategi ini disusun dalam bentuk pentahapan tahunan (annual staging) yang logis, terstruktur, dan berkelanjutan guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan secara bertahap dalam rentang lima tahun perencanaan. Dengan demikian, strategi berfungsi sebagai kerangka implementasi tahunan yang mendukung arah kebijakan pembangunan secara konsisten dan terarah.

Sementara itu, arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari misi pembangunan daerah ke dalam garis-garis besar kebijakan pembangunan yang menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas. Arah kebijakan disusun secara tematik dan sektoral agar selaras dengan strategi serta mampu menjawab isu-isu pembangunan daerah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Selain itu, arah kebijakan juga disusun selaras dengan arah kebijakan yang tertuang pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang menyatakan bahwa untuk Kepulauan Anambas, arah kebijakan provinsi adalah bahwa pembangunan perlu diawali dengan penguatan layanan dan infrastruktur dasar, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi seperti pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan konektivitas antarpulau, serta peningkatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung digitalisasi ekonomi. Pemerintah provinsi juga akan berkontribusi terhadap pembangunan dan preservasi jalan yang berstatus jalan provinsi, selain juga berkontribusi untuk membangun ekonomi biru Kepulauan Anambas.

Dengan keterpaduan antara strategi yang bersifat tahunan dan arah kebijakan yang bersifat substantif, diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode RPJMD 2025–2029 dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dijabarkan pada **Tabel 3.2** berikut ini.

Tabel 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulaun Anambas Tahun 2026-2030

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
MISI 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata	Meningkatnya Kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan kompetensi, kesempatan, dan minat bagi siswa dalam melangsungkan pendidikan serta menghasilkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar.	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).	Pemantapan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat berbasis kepulauan.
					Peningkatan Program Beasiswa dan Orang tua Asuh.			
					Peningkatan upaya Zero Buta Huruf.			
				Peningkatan sarana prasarana dan mutu pendidikan yang berkualitas dan merata.	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.	Peningkatan Pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah.	
					Program Revitalisasi Bantuan Perlengkapan Sekolah SD-SMP Gratis.	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan tenaga pendidikan.		
					Peningkatan kualitas layanan pendidikan.			

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat termasuk ibu dan balita termasuk dalam penanggulangan penyakit dan jaminan dalam mendapatkan layanan kesehatan	Peningkatan inisiasi upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Pemantapan kualitas dan akses kesehatan serta perilaku hidup sehat.
					Peningkatan upaya penyehatan lingkungan.	Peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis.	Penurunan AKI, AKB dan percepatan perbaikan gizi Masyarakat.	
				Penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Penjangkauan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk.	Percepatan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	
					Peningkatan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan tenaga kesehatan.			
		Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan	Meningkatkan identitas dan karakter budaya masyarakat yang berkontribusi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal demi terciptanya insan beradab	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal demi terciptanya insan beradab	Peningkatan perlindungan terhadap warisan budaya daerah.	Peningkatan pelibatan berbagai pemangku kebijakan dalam rangka pembangunan kebudayaan daerah.	Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi
						Peningkatan event budaya dan		

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
			terhadap aspek pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat	dan berakhlak dalam sendi kehidupan masyarakat dengan melibatkan peran Lembaga Adat Melayu (LAM).	dan berakhlak dalam sendi kehidupan masyarakat melalui kurikulum pendidikan.	kesenian secara rutin. Peningkatan integrasi aktivitas budaya dan pengembangan ekonomi kreatif.		kehidupan masyarakat.
		Meningkatnya kualitas kesetaraan gender	Meningkatkan perlindungan dan peran keluarga, anak, pemuda, perempuan, lansia serta penyandang disabilitas dalam pembangunan	Penguatan sistem hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Peningkatan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan, serta fasilitas penunjang aktivitas lansia dan penyandang disabilitas.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun	Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antarumat beragama yang dapat berkontribusi	Peningkatan kerukunan, keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas politik melalui peran serta	Peningkatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan melalui kegiatan pendidikan dan pembinaan masyarakat.	Peningkatan perlindungan hak kebebasan beragama dan beribadah bagi semua orang.	Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan organisasi keagamaan, untuk meningkatkan kerukunan.	Pemantapan peran kerjasama antarumat beragama dalam mencapai

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
			dalam kemajuan pembangunan	masyarakat, kelompok agama, tokoh masyarakat, partai politik, dan Forkopimda.				tujuan pembangunan.
				Penyelenggaraan Program Rumah Tahfidz.		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.		
				Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji, Imam Mesjid dan Marbot Mesjid.				
MISI 2 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan;	Mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	Meningkatkan ketersediaan dan ketangguhan infrastruktur konektivitas *intraregion* dan *interregion*	Optimalisasi rute kapal dan pesawat reguler untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah (Rute Pesawat Letung (Anambas) – Batam/ Batam – Anambas setiap hari, Rute Kapal Letung – Tarempa setiap hari, Rute Kapal Anambas – Malaysia.	Pembangunan dan revitalisasi dermaga strategis di titik prioritas secara kolaboratif (pemerintah, pusat, provinsi dan kabupaten).	Penguatan sistem transportasi laut berbasis kebutuhan logistik dan masyarakat.	Penigkatan dukungan melalui koordinasi berkala terhadap pembangunan dan perluasan bandara untuk mendukung aksesibilitas daerah.	Penerapan skema transportasi maritim yang berkelanjutan melalui integrasi transportasi laut, udara, dan darat.
				Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses	Peningkatan penyediaan infrastruktur	Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan kolaborasi bersama pemerintah pusat dan provinsi		Pemantapan pemanfaatan akses internet

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
				internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage*.	secara bertahap dan regulasi dalam pengembangan akses internet bagi masyarakat.	dalam mempercepat pemerataan akses internet.		yang dapat mendukung aktivitas sosial dan eknomi masyarakat.
			Mengembangkan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung logistik dan pengembangan ekonomi dengan pendekatan teknologi modern hingga hilirisasi produk unggulan	Peningkatan perbaikan dan pembangunan jalan utama di pusat ekonomi dan wisata.	Penguatan infrastruktur penunjang pariwisata yang memiliki keterhubungan dengan pengembangan perikanan.	Peningkatan revitalisasi pelabuhan barang dan distribusi logistik.	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan serta integrasi pelabuhan terhadap wilayah *hinterland* dan multimoda.	Peningkatan integrasi infrastruktur ekonomi dengan sektor perikanan, kelautan, dan wisata.
				Penguatan pengelolaan jalan daerah, jalan desa, dan jalan pada pulau-pulau kecil.	Penguatan infrastruktur penunjang pengembangan perikanan yang memiliki keterhubungan dengan pengembangan pariwisata.			
				Penyediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan (termasuk perkebunan)	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk	Pengembangan infrastruktur penunjang sentra produksi pangan daerah.	Pemantapan infrastruktur dan sarana prasaran pengembangan pertanian terpadu dan ketahanan

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
				produk pertanian secara terintegrasi diantaranya melalui 1) peningkatan luas daerah irigasi, 2) peningkatan efisiensi penggunaan air melalui sistem irigasi yang modern.	yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global, berikut penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan.		pangan daerah.
				Penyediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan tangkap dan budidaya secara terintegrasi.		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya		
			Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar terutama air minum, sanitasi, listrik, rumah Layak	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan. perpipaan	Penguatan kelembagaan pengelola SPAM.	Pembinaan dan dukungan bagi Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM di kawasannya.	Peningkatan pengembangan dan pengelolaan SPAM.	Pemantapan infrastruktur pelayanan dasar berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah.
					Pengembangan infrastruktur sanitasi dan limbah domestik	Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat pesisir dan	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai	

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1 -2026	STRATEGI TAHAP 2 -2027	STRATEGI TAHAP 3 -2028	STRATEGI TAHAP 4 -2029	STRATEGI TAHAP 5 -2030
					berbasis masyarakat.	kepulauan rawan bencana.	dengan karakteristik wilayah.	
				Peningkatan koordinasi dalam pemeliharaan dan perawatan terhadap kerusakan dan gangguan kelistrikan terutama pada lokasi strategis dan penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.		Peningkatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan kolaborasi bersama pemerintah pusat dan provinsi dalam mempercepat pemerataan elektrifikasi.	Peningkatan ekspansi jaringan listrik dan inisiasi pemanfaatan energi terbarukan.	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada konservasi dan tata kelola SDA pengelolaan sampah, dan Circular Economy	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.	Pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis desa.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan hidup dan kebencanaan.	Implementasi model pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan berbasis Circular Economy.	Pemantapan implementasi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana.
				Penguatan regulasi pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan.		Penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah secara memadai menggunakan sistem pembuangan model *sanitary landfill.*		
		Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana dan	Meningkatkan resiliensi terhadap bencana terutama hidrometeorologi	Pembangunan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana berbasis	Peningkatan penanganan bencana banjir di kawasan perkotaan ibu kota disertai	Penguatan infrastruktur adaptasi perubahan iklim.	Implementasi model ketahanan bencana berbasis sistem informasi dan koordinasi lintas sektor.	

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
		perubahan iklim		komunitas di wilayah rawan. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana dan penanganan darurat.	peningkatan perbaikan wilayah sepadan sungai.			
MISI 3 Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif	Meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif	Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah dan cepat	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui peningkatan literasi kebijakan publik, keterlibatan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, serta penguatan mekanisme kontrol sosial terhadap pelaksanaan program	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja pemerintah melalui penerapan transparansi, penguatan sistem akuntabilitas keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah.	Pemantapan Sistem Tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
					pembangunan daerah.			
			Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang profersional, akuntabel, amanah dan berintegritas	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi.	Peningkatan kualitas pengelolaan SDM Aparatur.	Peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Peningkatan sistem dan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai unsur.	Peningkatan Kinerja melalui Sistem Manajemen yang Efektif.
				Peningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.	Peningkatkan kualitas layanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas hingga kecamatan dan desa.			
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, ramah dan inovatif	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis inovasi dan pengembangan teknologi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah.	Membuat peta jalan (*roadmap*) peningkatan kapasitas dan pengembangan inovasi yang terintegrasi dengan reformasi birokrasi.	Peningkatan pemanfaatan hasil litbang jirap,serta invensi dan inovasi sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah.	Meningkatkan kerjasama multihelix dalam mendukung pembangunan wilayah.	Pemantapan sistem birokrasi daerah dan layanan publik berbasis inovasi.
				Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik yang prima.	Peningkatkan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang handal.	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik.	Peningkatan kualitas pelayanan melalui penggunaan teknologi.	
MISI 4	Meningkatkan pertumbuhan	Meningkatnya kontribusi	Memperkuat daya tarik	Pembangunan objek wisata	Penataan dan penguatan daya	Pemanfaatan keragaman	Penguatan Promosi dan Aksesibilitas Wisata	Pemantapana inisiasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata	ekonomi berbasis maritim dan pariwisata	sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata	wisata berbasis alam, budaya, dan perikanan dalam kerangka Ekonomi Biru dengan meningkatkan inovasi dan daya saing	yang mendukung pengembangan destinasi wisata yang berkualitas dan terstandarisasi.	tarik wisata, baik wisata alam dan wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif.	sumberdaya alam, budaya, dan kreativitas sebagai diversifikasi daya tarik wisata.	untuk Meningkatkan Daya Saing Destinasi.	pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah secara bertahap dan berkelanjutan.
					Peningkatan SDM pariwisata berdaya saing global.	Penciptaan Anambas Rest Area atau daerah persinggahan kapal sehingga menciptakan destinasi wisata baru.		
				Peningkatan inovasi dalam budidaya dan hilirisasi perikanan.	Penyelenggaraan Program Tangkap Olah Jual (TOJ) dan optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan modernisasi dan digitalisasi sektor perikanan termasuk kapal dan sarana produksi perikanan.	Optimaliasasi perikanan dan kelautan yang berbasis pada aspek keberkelanjutan.	
				Peningkatan orientasi program perangkat daeah dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perikanan.	Pelaksanaan kajian-kajian yang komprehensif dan mendalam mengenai pengembangan ekonomi daerah dan ekonomi biru sebagai landasan bagi perumusan kebijakan yang	Peningkatan kolaborasi dan kerjasama dalam peningkatan hilirisasi dan industrialisasi perikanan.		

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1 -2026	STRATEGI TAHAP 2 -2027	STRATEGI TAHAP 3 -2028	STRATEGI TAHAP 4 -2029	STRATEGI TAHAP 5 -2030
					berbasis ilmu pengetahuan (*science-based policy*).			
			Mengembangkan UMKM yang profesional, produktif, dan berdaya saing	Peningkatan kapasitas UMKM melalui pembiayaan, kemampuan manajemen, dan pengolahan logistik bahan pangan.	Peningkatan skema pembiayaan dalam pengembangan usaha melalui pelibatan sektor swasta.	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique and high-value economy), diantaranya melalui peningkatan hilirisasi komoditas unggulan daerah oleh IKM, koperasi, dan UMKM.	Peningkatan akses pasar produk-produk UMKM.	
				Pembangunan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM.	Peningkatan sertifikasi produk-produk UMKM.		Peningkatan produktivitas UMKM.	
		Meningkatnya investasi dan integrasi ekonomi	Meningkatkan keunggulan dan daya tarik daerah dalam menjaring minat investasi serta dalam memanfaatkan peluang penguatan kawasan Anambas-Natuna	Perbaikan iklim investasi menjadi lebih efisien untuk mendorong peningkatan investasi dengan penerapan regulasi yang ringkas, dan pelayanan perijinan berusaha yang cepat dan bebas pungli.	Peningkatan iklim investasi daerah melalui perbaikan regulasi yang efektif.	Peningkatan Pelayanan perijinan yang cepat, murah dan transparan.	Penciptaan ekosistem penerapan teknologi dan digitalisasi pada sektor strategis ekonomi yang mendukung kemudahan dan pembukaan akses informasi yang lebih luas.	Pemantapan iklim investasi pada sektor ekonomi strategis dan unggulan yang disertai kerjasama antar kawasan prioritas pengembangan ekonomi biru.
						Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar daerah dalam peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan.		
		Meningkatnya kontribusi sektor	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Penguatan kapasitas petani dan	Peningkatan sarana, prasarana, dan	Pengembangan hilirisasi dan nilai tambah produk	Perluasan akses pasar dan jaringan distribusi melalui pembangunan	Penguatan pembiayaan dan investasi

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
		pertanian dalam perekonomian daerah	sektor pertanian berbasis potensi lokal serta berorientasi pada hilirisasi dan perluasan pasar.	kelembagaan pertanian melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelompok tani dan koperasi.	teknologi pertanian meliputi irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, serta pemanfaatan mekanisasi dan digital farming.	pertanian melalui fasilitasi pengolahan, sertifikasi mutu, dan kemasan produk.	pasar tani, promosi produk unggulan, dan pemanfaatan platform digital.	pertanian melalui fasilitasi akses KUR, kemitraan dengan dunia usaha, serta dukungan investasi sektor pertanian.
MISI 5 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka	Meningkatkan kesempatan dan partisipasi kerja bagi masyarakat disertai peningkatan kapasitas dalam menghadapi perkembangan lapangan usaha	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan upah di atas standar hidup layak.	Peningkatan akses dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Penumbuhan kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, fasilitasi akses terhadap Modal, dan insentif pajak untuk memulai bisnis.	Pemantapan link and macth dalam memastikan lulusan dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja dan dunia usaha yang berkembang.
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi petani, nelayan, kelompok marjinal, dan rentan dengan	Pendataan dan pemutakhiran jumlah penduduk miskin dan penerima perlindungan sosial lainnya.	Penyusunan SOP mengenai penyaluran bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, petani, dan buruh lepas.	Kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.	Sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan.	Evaluasi dan pemantapan program-program pengentasan kemiskinan yang efektif dan tepat sasaran.

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI TAHAP 1	STRATEGI TAHAP 2	STRATEGI TAHAP 3	STRATEGI TAHAP 4	STRATEGI TAHAP 5
				-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
			mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Peningkatan kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin/rentan miskin.	Pendataan dan pemutakhiran jumlah nelayan, petani, dan buruh lepas calon penerima bantuan.			
			Mempercepat pembangunan dan penuntasan kemiskinan daerah	Peningkatan bantuan produktif dalam mendukung usaha ekonomi masyarakat.	Peningkatan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Lansia.	Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan pusat dan daerah.	Mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat untuk meningkatkan standar hidup layak, termasuk dalam mencegah permukiman kumuh.	
						Pembangunan Rumah Layak Huni melalui pembiayaan pemerintah pusat.		
		Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa	Meningkatkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dan penyedia sumber daya	Peningkatan ketersediaan dan pemenuhan infrastruktur air bersih desa.	Peningkatan ketersediaan dan pemenuhan infrastruktur aksesibilitas dan ekonomi desa.	Pengembangan sektor-sektor non pertanian untuk diversifikasi mata pencaharian masyarakat desa.	Peningkatan pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana tingkat desa.	Penguatan kelembagaan, pelayanan publik, serta tata kelola keuangan desa.

Pentahapan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029, yaitu:

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera,” sekaligus membangun fondasi jangka panjang pada periode pertama RPJPD 2025–2045, diperlukan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur, konsisten, serta selaras dengan karakteristik kepulauan. Perumusan arah kebijakan ini memiliki signifikansi strategis mengingat dinamika pembangunan wilayah kepulauan sarat dengan kompleksitas, baik dari sisi geografis, demografis, maupun keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, setiap fase pembangunan tidak semata-mata disusun sebagai respons atas tantangan yang ada, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Upaya optimalisasi tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan adaptif, serta pelayanan publik yang inklusif hingga menjangkau pulau-pulau kecil.

Sejalan dengan kerangka tersebut, tahapan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2026–2030 diarahkan pada penguatan fondasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing sektor unggulan, serta pemantapan infrastruktur konektivitas antar pulau. Fokus pembangunan ini ditujukan tidak hanya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk membangun struktur ekonomi maritim yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan kepulauan Anambas diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi strategis daerah dalam konteks pembangunan regional maupun nasional.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan daerah serta karakteristik kewilayahan Kabupaten Kepulauan Anambas, diperlukan suatu kerangka tahapan pembangunan yang sistematis, terukur, dan harmonis dengan arah pembangunan nasional maupun provinsi. Kerangka tahapan ini tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknokratis, melainkan juga sebagai strategi integratif untuk memadukan potensi sumber daya alam, sosial, dan budaya dengan kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan demikian, pembangunan Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjawab tantangan struktural sekaligus memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat lokal, regional, maupun global.

Gambar 3.1. Pentahapan Pembangunan Tahunan

Tahap 2026 Akselerasi Pengelolaan Potensi Kelautan, Perikanan, dan Pariwisata Bahari

Pembangunan tahun 2026 difokuskan pada percepatan pengelolaan potensi ekonomi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari, yang ditopang oleh kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada karakteristik kepulauan. Prioritas pembangunan meliputi:

a. Akselerasi pengelolaan potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari dengan memperhatikan keberlanjutan ekologi laut.
b. Akselerasi peningkatan konektivitas antar pulau serta pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya transportasi laut
c. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia berkarakter bahari

Tahap 2027 Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Kelautan dan SDM Berkualitas

Tema pembangunan tahun 2027 diarahkan pada pengembangan potensi perekonomian daerah berbasis kelautan dan perikanan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter bahari. Prioritas pembangunan mencakup:

a. Pengembangan potensi ekonomi maritim, investasi pesisir, dan pariwisata bahari berkelanjutan.
b. Pengembangan layanan publik yang merata hingga pulau-pulau kecil, disertai penguatan ketahanan bencana.
c. Pengembangan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dan penguatan budaya bahari.

Tahap 2028 Penguatan Daya Saing Sektor Perikanan, dan Pariwisata Bahari

Pada tahun 2028, fokus pembangunan ditujukan pada penguatan daya saing sektor unggulan daerah, terutama perikanan, dan pariwisata bahari, yang ditopang tata kelola pemerintahan adaptif terhadap kondisi kepulauan. Prioritas pembangunan meliputi:

a. Penguatan sektor perikanan tangkap, budidaya laut, dan industri pengolahan hasil perikanan bernilai tambah.
b. Penguatan konektivitas logistik antar pulau untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa.
c. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, dan peningkatan peran masyarakat dalam tata kelola kepulauan.

Tahap 2029 Pemantapan Perekonomian Kepulauan dan SDM Unggul

Tema pembangunan 2029 diarahkan pada pemantapan struktur ekonomi kepulauan yang tangguh dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Prioritas pembangunan mencakup:

a. Pemantapan perekonomian berbasis kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari yang berdaya saing.
b. Pemantapan infrastruktur konektivitas antar pulau, transportasi laut, serta penyediaan sarana-prasarana dasar seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
c. Pemantapan kualitas SDM lokal melalui pendidikan, kesehatan, serta peningkatan daya saing tenaga kerja berkarakter bahari.

Tahap 2030 Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi Maritim yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tahun 2030 menjadi tahap strategis menuju perwujudan pertumbuhan ekonomi maritim yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Prioritas pembangunan meliputi:

a. Perwujudan struktur perekonomian maritim yang inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perubahan iklim.
b. Perwujudan konektivitas antar pulau yang terintegrasi dengan jaringan logistik nasional.
c. Perwujudan sumber daya manusia yang produktif, berbudaya bahari, serta memiliki daya saing di tingkat regional.

3.4 Program-Program Prioritas Daerah

Program prioritas merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program prioritas dapat memastikan bahwa pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mencapai target-target pembangunan yang diinginkan dalam jangka menengah. Program prioritas yang disusun mengacu pada ketentuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Untuk itu, ditetapkan *outcome* dan program prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas secara lebih rinci dijabar pada **Tabel 3.3** berikut ini.

Tabel 3.3. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
KEPULAUAN ANAMBAS yang BERDAYA SAING, INOVATIF, AGAMIS, UNGGUL di BIDANG MARITIM menuju MASYARAKAT MAJU dan SEJAHTERA	**Misi 1**	T1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya secara merata		**T1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**			
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur		S1.1	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	**S1.1a Rata-Rata Lama Sekolah**			
					S1.1b Harapan Lama Sekolah			
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	O1.1.1 Persentase anak usia (5-6) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Program Pengelolaan Pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
					O1.1.2 Persentase anak usia (7-15) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)			
					O1.1.3 Persentase anak usia (7-18) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)			
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	O.1.1.4 Persentase guru memiliki sertifikat pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Urusan Pendidikan	
			S1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**S1.2a Usia Harapan Hidup**			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
					S1.2b Prevalensi Stunting			
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	O1.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan	
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	O1.2.2 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Urusan Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	O1.2.3 Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
				Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	O1.2.4 Persentase Pelayanan kesehatan terakreditasi	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		S1.3	Meningkatnya kualitas pengembangan kebudayaan		**S1.3 Indeks Pengembangan Kebudayaan**			
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	O1.3.1 Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	O1.3.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap	Program Pengembangan Kebudayaan	Urusan Pemerintahan	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
				pengembangan kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan		Bidang Kebudayaan	
			Meningkatnya kualitas kesetaraan gender		**S1.4. Indeks Ketimpangan Gender**			
		S1.4		Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	O.1.4.1 Persentase anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					O1.4.2 Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK)perempuan			
			Meningkatnya stabilitas sosial dan kehidupan beragama yang rukun		**S1.5 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**			
		S1.5		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	O1.5.1 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
					O1.5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			
				Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	O1.5.3 Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	O1.5.4 Persentase cakupan perlindungan masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Misi 2	T2	Mewujudkan Anambas sebagai hunian yang nyaman		**T2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**			
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan		S2.1	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	**S2.1 Rasio Konektivitas**			
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	O2.1.1 Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	O2.1.2 Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	02.1.3 Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	02.1.4 Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan akses air minum layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
					O2.15 Persentase Rumah Tangga			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
					dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum			
					O2.1.6 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan			
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	02.1.7 Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	Urusan Perhubungan	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		**S2.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**			
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	O2.2.1 Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Urusan Lingkungan Hidup	
					O2.2.2 Indeks Kualitas Udara			
		S2.2		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	O.2.2.3 Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Urusan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya cakupan layanan persampahan	O2.2.4 Persentase cakupan pemenuhan sistem dan pengelolaan persampahan kabupaten	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
				Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan	O2.2.5 Persentase peningkatan rumah tangga yang terlayani air limbah yang aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Urusan pekerjaan umum dan	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					sistem air limbah domestik	O2.2.6 Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Sistem Air Limbah	penataan ruang	
					Meningkatnya tata kelola persampahan	O2.2.7 Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Urusan Lingkungan Hidup	
						O2.2.8 Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah			
						O.2.2.9 Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah			
			S2.3	Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim		**S2.3a Indeks Risiko Bencana**			
						S2.3b Persentase penurunan emisi GRK			
						a. Kumulatif			
						b. Tahunan			
					Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	O2.3.1 Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang	
						O2.3.2 Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob			
	Misi 3	T3	Meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan kolaboratif			**T3. Indeks Reformasi Birokrasi**			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
	Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif			Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel		**S3.1a Nilai SAKIP**			
						S3.1b Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	O3.1.1 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Perencanaan	
						O3.1.2 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			
			S3.1		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	O3.1.3 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	O3.1.4 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang perekonomian dan SDA			
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	O3.1.5 Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
				bidang infrastruktur dan kewilayahan	infrastruktur dan kewilayahan			
				Meningkatnya tata kelola anggaran	O3.1.6 Persentase ketepatan waktu penyusunan Ranperda tentang APBD dan APBDP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Keuangan Daerah	
					O3.1.7 Persentase penganggaran belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
					O3.1.8 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
					O3.1.9 Persentase Penurunan Silpa			
		S3.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih, efektif, ramah dan inovatif		**S3.3a Indeks Pelayanan Publik**			
					S3.3b Indeks Inovasi Daerah			
					S3.3c Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik			
					S3.3d Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)			
				Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	O3.3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unsur Pemerintahan	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	O3.3.2 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Urusan Administrasi dan Pencatatan Sipil	
					O3.3.3 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			
					O3.3.4 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			
					O3.3.5 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan			
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	O3.3.6 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk		
					O3.3.7 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak			
				Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	O3.3.8 Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan	
				Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	O3.3.9 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Unsur Penelitian dan Pengembangan	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	O3.3.10 Nilai domain kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	
					Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	O3.3.11 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
						O3.3.12 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang mengakses internet			
					Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	O3.3.13 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan	
					Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	O3.3.14 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
						O3.3.15 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
	Misi 4	T4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata			**T4. Laju Pertumbuhan**			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3	4	6	7	8	9	10
					Ekonomi (Tanpa Migas)			
	Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata		Meningkatnya kontribusi sektor unggulan berbasis maritim dan pariwisata		**S4.1a Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)**			
					S4.1b Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)			
					S4.1c Kontribusi Sektor Industri pengolahan terhadap PDRB (%)			
		S4.1		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	O4.1.1 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan	
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	O4.1.2 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan	
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	O4.1.3 Persentase Produksi Pengolahan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	
				Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	O4.1.4 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Urusan Pariwisata	
				Meningkatnya jangkauan	O4.1.5 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Urusan Pariwisata	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					pemasaran pariwisata				
					Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif	O4.1.6 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Urusan Pariwisata	
					Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	O4.1.7 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Urusan Pariwisata	
					Meningkatnya realisasi pembangunan industri	O4.1.8 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Urusan Perindustrian	
						O4.1.9 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di level kabupaten			
					Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	O4.1.9 Pertumbuhan Wirausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
						O4.1.10 Proporsi jumlah UMKM Non pertanian pada level kabupaten			
			S4.2	Meningkatnya investasi dan integrasi ekonomi		**S4.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya iklim dan kemudahan berinvestasi	O4.2.1 Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	
					Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	O4.2.2 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Urusan Penanaman Modal	
			S4.3	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah		S4.3 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)			
					Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	O4.3.1 Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan komoditas peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian	
					Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	O4.3.2 Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian	
	Misi 5			Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa		**T5. Tingkat Kemiskinan**			
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.	T5	S5.1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka		**S5.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**			
					Meningkatnya produktivititas tenaga kerja	O5.1.1 Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	
					Meningkatnya penempatan tenaga kerja	O5.1.2 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	Urusan Tenaga Kerja	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya daya saing UMKM	O5.1.3 Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
			S5.2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		**S5.2a Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**			
						S5.2b Persentase rumah tangga sasaran (sangat miskin dan miskin) yang mendapatkan bantuan dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif			
					Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	O5.2.1 Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasisosial	Program Pemberdayaan Sosial	Urusan Sosial	
						O5.2.2 Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial didalam panti rehabilitasisosial bagi pemerlu layanan kesejahteraan sosial			

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
						(PPKS) layanan diluar HIV/AIDS dan NAPZA			
						O5.2.3 Persentase SDM kesejahteraan sosial yang eningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial			
						O5.2.4 Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayan sosial			
					Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	O5.2.5 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	Urusan Sosial	
						O5.2.6 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
						O5.2.7 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
						O5.2.8 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
					Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	O5.2.9 Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan bantuan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Sosial	

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Urusan	Ket.
1	2	3		4	6	7	8	9	10
					Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	O5.2.10 Efektivitas Kerja Sama Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Sekretariat Daerah	
						O5.2.11 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			
						O5.2.12 Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan			
						O5.2.13 Persentase jumlah kebijakan yang dilaksanakan			
			S5.3	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat desa		**S5.3 Indeks Desa**			
					Meningkatnya kualitas penataan desa	O5.3.1 Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					Meningkatnya efektifitas kerjasama antar desa	O5.3.2 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program peningkatan kerjasama desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Persandingan antara janji politik kepala daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan program prioritas daerah merupakan upaya untuk mengintegrasikan komitmen kampanye ke dalam arah kebijakan pembangunan yang konkret. Janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye menjadi fondasi dalam penyusunan program prioritas daerah. Oleh karena itu, keselarasan antara janji politik dan program prioritas menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas pemerintahan serta efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Persandingan janji politik dan program perangkat daerah disajikan pada **Tabel 3.4** berikut.

Tabel 3.4. Persandingan Janji Politik Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah

No.	Janji Politik				
	Program Unggulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan
	Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis, dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Luhur				
1	Zero Buta Huruf	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (Kegiatan Pendataan Keaksaraan Fungsional)	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Bantuan Perlengkapan Sekolah SD-SMP		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SD)	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SD)	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (SMP)	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Janji Politik				
	Program Unggulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (SMP)	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Rumah Tahfidz	Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Insentif Guru Ngaji, Imam Mesjid dan Marbot Mesjid dan petugas rumah ibadah lainnya	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
5	Beasiswa Perguruan Tinggi dan Orang Tua Asuh		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
6	Pembangunan Anjungan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No.	Janji Politik				
	Program Unggulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan
7	Program Event Kebudayaan		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Lembaga Adat	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
	Misi 2 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan				
1	Memangkas Rentang Kendali (Akses Transportasi)	Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2	Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rekonstruksi Jalan	
				Rehabilitasi Jalan	
		Pengelolaan Pelayaran	Kegiatan Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten /Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Janji Politik				
	Program Unggulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			Penyediaan Angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /Atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Misi 3 Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif				
1	Anambas dalam jari	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
				Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
2	Pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Disesuaikan dengan Visi, Misi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No.	Janji Politik				
	Program Unggulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan
	Dan Program Kepala Daerah Terpilih)				
3	Optimalisasi Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
4	Meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
5	Peningkatan kesejahteraan RT/RW			Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
	Misi 4 Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata				
1	Tangkap Olah Jual (TOJ) dan optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
				Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

No.	Janji Politik				
	Program Unggulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan
2	Hilirisasi Perikanan dan Industrialisasi	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem Perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3	Program Anambas Rest Area dan Ciptakan Destinasi Wisata Baru	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya tarik wisata Kab/kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
				Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan

No.	Janji Politik				
	Program Unggulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bidang Pariwisata
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
4	Anambas Memanggil	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Misi 5 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan				
1	UMKM Naik Kelas	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	Sertifikasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK)	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
3	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Janji Politik				
	Program Unggulan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan
4	BPJS Tenaga Kerja Untuk Nelayan, Petani dan Buruh Lepas	Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

BAB 4. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Pada bab ini dirumuskan berbagai program perangkat daerah untuk mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Pedoman yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Pada bagian Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 secara rinci disajikan pada **Tabel 4.1** berikut ini.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	169.672.602.915	100%	171.360.428.944	100%	173.082.922.233	100%	174.813.752.456	100%	176.561.990.981	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,80%	87%	87,5%		88%		88,5%		89%		89,5%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN														
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia (5-6) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	85,83%	100,00 %	100,00 %	44.868.003.317	100,00 %	47.494.943.921	100,00 %	50.187.217.260	100,00%	51.858.878.109	100%	54.535.406.218	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Persentase anak usia (7-15) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,95%	100,00 %	100,00 %		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase anak usia (7-18) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	18,47%	22,57%	26,67%		30,77%		34,87%		38,97%		43,07%		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
Meningkanya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	100%	350.001.000	100%	350.001.000	100%	350.001.000	100%	350.001.000	100%	350.001.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	59%	68%	76%	150.000.000	76%	200.000.000	77%	200.000.000	78%	350.000.000	79%	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui	82%	82%	83%	100.000.000	84%	150.000.000	85%	150.000.000	86%	160.000.000	87%	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	122.959.548.909	100%	125.033.135.300	100%	127.117.457.556	100%	129.212.623.034	100%	130.318.740.166	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Kepuasan Mayarakat	85,5%	86,0%	86,5%		87,0%		87,5%		88,0%		88,5%		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI)	0/100.000 KH	0/100.000 KH	0/100.000 KH	60.485.665.881	0/100.000 KH	61.733.719.626	0/100.000 KH	63.599.037.506	0/100.000 KH	65.408.112.163	0/100.000 KH	68.145.635.167	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	76%	76%	79%	650.000.000	81%	650.000.000	87%	800.000.000	89%	800.000.000	89%	800.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	66%	67%	68%	250.000.000	78%	350.000.000	82%	350.000.000	86%	350.000.000	86%	350.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	79,63%	79,63%	80%	501.000.000	85%	502.000.000	90%	503.000.000	95%	504.000.000	95%	504.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN														
Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	100%	100%	100%	730.000.000	100%	730.000.000	100%	730.000.000	100%	730.000.000	100%	730.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	13.591.260.925	100%	14.983.807.512	100%	15.636.633.608	100%	15.463.309.593	100%	15.417.322.661	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
	Indeks Kepuasan Mayarakat	84,4%	84,6%	84,8%		85,0%		85,2%		85,4%		85,6%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	58,60%	59,60%	62,20%	1.150.000.000	65,40%	7.765.000.000	67,80%	42.340.000.135	70,40%	42.150.000.000	71,40%	13.810.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	5,41%	5,46%	5,87%		6,10%		6,33%		6,56%		6,79%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	42,67%	42,67%	56,00%		56,00%		57,33%		64,00%		64,00%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Menurunnya kesenjangan antarwilayah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan terjangkau	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	61,56%	61,56%	62,10%	3.000.000.000	62,58%	4.412.015.592	63,21%	3.000.000.000	63,65%	6.400.000.000	64,02%	11.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum	61,96%	70,92%	72,72%		74,53%		76,34%		76,94%		78,14%		
	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	61,56%	61,57%	62,06%		65,13%		68,21%		69,23%		71,28%		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya cakupan layanan persampahan	Persentase cakupan pemenuhan sistem dan pengelolaan persampahan kabupaten	39%	39%	39,92%	1.350.000.000	40,83%	3.450.000.000	44,17%	3.950.000.000	49,17%	4.500.000.000	50,83%	4.750.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah yang aman	30,46%	31,04%	33,35%	1.518.663.592	35,98%	2.800.000.000	38,21%	3.280.000.000	40,75%	4.080.000.000	42,07%	5.380.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	6,45%	6,45%	12,30%		18,14%		23,99%		29,84%		35,68%		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE														
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	70,00%	70,00%	76,50%	15.145.600.000	80%	550.000.000	83,50%	950.000.000	87%	1.700.000.000	91%	5.150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG														
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase cakupan penyelenggaraan bangunan gedung	80%	85%	88%	10.750.000.000	88%	16.950.000.000	90%	12.059.587.073	93%	10.830.976.587	95%	18.350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan Lingkungannya	-	85%	85%	850.000.000	87%	950.000.000	87%	200.000.000	87%	2.900.000.000	90%	6.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN														
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	46,38%	47,72%	49,18%	30.954.361.081	50,38%	43.686.921.462	52,79%	36.109.600.000	54,31%	44.259.700.135	55,62%	47.910.116.481	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
Meningkatnya kompetisi tenaga konstruksi	Persentase Cakupan Pedoman Tertib Penyelenggaraan untuk Panduan Pengawasan Jasa Konstruksi	20%	20%	30%	400.000.000	40%	400.000.000	60%	400.000.000	70%	400.000.000	90%	400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase cakupan penyelenggaraan penataan ruang	43,75%	43,75%	47,50%	2.600.000.000	50%	1.700.000.000	55%	3.350.000.000	62,50%	500.000.000	75%	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya kesenjangan antarwilayah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan terjangkau	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	61,56%	61,56%	62,10%	300.000.000	62,58%	300.000.000	63,21%	300.000.000	63,65%	300.000.000	64,02%	300.000.000	UPT SPAM SIANTAN
	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum	61,96%	70,92%	72,72%		74,53%		76,34%		76,94%		78,14%		
	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	61,56%	61,57%	62,06%		65,13%		68,21%		69,23%		71,28%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83,00%	83,00%	86,00%	50.000.000	88,00%	50.000.000	93,00%	50.000.000	95,00%	50.000.000	95,00%	50.000.000	UPT SPAM SIANTAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi yang layak huni	-	0	20%	560.000.000	40%	860.000.000	60%	2.660.000.000	80%	860.000.000	100%	660.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN														
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	-	0%	2,60%	1.300.000.000	4,54%	1.600.000.000	8,05%	1.400.000.000	10,38%	1.500.000.000	14,28%	1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	39,13%	39,13%	45,65%	7.600.000.000	52,17	9.200.000.000	58,07%	7.600.000.000	62,73%	8.400.000.000	74,84%	23.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	12.356.124.504	100%	12.550.385.749	100%	12.675.889.606	100%	12.802.648.503	100%	12.930.674.987	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,4	88	88,3		88,8		89,2		89,5		90		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	80%	80%	80%		80%		82%		85%		90%		
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	80%	83%	87%	901.000.000	89%	971.881.245	90%	1.111.519.878	92%	1.249.903.471	95%	1.387.019.476	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan Pasca Bencana	80%	85%	100%		100%		100%		100%		100%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	13.945.511.173	100%	14.193.308.075	100%	14.122.897.090	100%	14.654.037.906	100%	14.897.871.864	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,09	87,3	87,6		88,2		88,6		89,5		91		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100%	100%	100%	228.737.349	100%	264.425.417	100%	618.321.373	100%	370.665.527	100%	410.316.540	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	92%	92%	93%		94%		95%		96%		97%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	8.124.721.575	100%	8.205.968.791	100%	8.288.028.478	100%	8.370.908.763	100%	8.454.617.851	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,9	86	86,5		87		87,5		88		91		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100%	100%	100%	989.000.000	100%	1.090.027.216	100%	1.190.241.960	100%	1.289.636.107	100%	1.388.201.450	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang bertujuan dalam potensi kesejahteraan sosial dan kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah orang/Lembaga masyarakat yang diberdayakan	43/orang/ Lembaga	44/orang/Lembaga	56/orang/ Lembaga	120.000.000	58/orang/ Lembaga	160.000.000	60/orang/ Lembaga	160.000.000	62/orang/ Lembaga	160.000.000	64/orang/ Lembaga	160.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70%	71%	72%	350.000.000	74%	390.000.000	76%	390.000.000	78%	390.000.000	80%	390.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70%	72	75%		77%		79%		81%		83%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70%	71%	73%		76%		79%		82%		85%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70%	72%	75%		78%		81%		84%		87%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan bantuan	800 orang	810 orang	820 Orang	325.000.000	830 Orang	325.000.000	840 Orang	325.000.000	850 Orang	325.000.000	860 Orang	350.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENANGANAN BENCANA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	0%	0%	40%	155.000.000	50%	155.000.000	55%	155.000.000	60%	155.000.000	70%	180.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	3,33%	3,33%	3,36%	1.330.000.000	3,39%	1.345.000.000	3,42%	1.230.000.000	3,45%	838.000.000	3,48%	816.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	10,24%	10,24%	13,64%	172.367.247	13,64%	176.000.000	15,38%	136.000.000	15,38%	156.000.000	17,19%	161.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	3.159	3.165	3.170	817.505.000	3.175	794.219.100	3.180	837.947.654	3.185	941.991.511	3.190	964.918.913	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	96,1%	96,4%	96,7%		97%		97,05%		97,08%		97,2%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	5.527.424.086	100%	5.582.698.327	100%	5.638.525.310	100%	5.694.910.563	100%	5.751.859.669	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,80%	88%	88,5%		89%		89,5%		90%		90,5%		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGARUSUTAMA AN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
Meningkatnya Kualitas dan efektivitas penyelengaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	12,48%	12,50%	12,53%	360.000.000	12,56%	360.000.000	12,59%	360.000.000	12,62%	360.000.000	12,65%	360.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	54,94%	54,94%	55,54%		56,18%		56,86%		57,58%		58,34%		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam Perencanaan, evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	86%	86%	87,50%	10.000.000	89%	10.000.000	90,50%	10.000.000	92%	10.000.000	93,50%	10.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	100%	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Konperhensif	100%	100%	100%	206.790.000	100%	222.020.041	100%	222.020.041	100%	272.020.041	100%	315.575.217	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)														
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	56,60	56,62	56,66	110.000.000	56,70	110.000.000	56,74	110.000.000	56,80	110.000.000	60,00	110.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	71,78	71,85%	71,9		71,95		71,98		72		72,05		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	136.000.000	100%	136.000.000	100%	136.000.000	100%	136.000.000	100%	136.000.000	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Konperhensif	100%	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	144.119.029	100%	144.119.029	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	144.677.298	100%	144.677.298	100%	144.677.298	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	71,78	71,85%	71,9		71,95		71,98		72		72,05		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Persentase capaian angka kecukupan energi (AKE)	96,50%	96,7	96,90%	670.800.000	97,10%	630.000.000	97,30%	680.000.000	97,50%	680.000.000	97,50%	623.000.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	8,76%	8,75%	8,74%		8,73%		8,72%		8,71%		8,70%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan yang Ditangani	17%	19%	22%	250.000.000	37%	170.000.000	46%	170.000.000	56%	170.000.000	66%	170.000.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	100%	100%	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	100%	135.000.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN														
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	-	-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN														
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	-	100	100%	2.430.000.000	100%	2.130.000.000	100%	2.430.000.000	100%	2.130.000.000	100%	2.130.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM														
Meningkatnya ketersedian tanah untuk kepentingan umum	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu	4,44%	4,44%	6,71%	1.100.000.000	11,21%	1.100.000.000	19,34%	1.100.000.000	28,54%	1.100.000.000	36,47%	1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase cakupan penatagunaan tanah	85%	85%	87%	150.000.000	87%	150.000.000	89%	150.000.000	90%	150.000.000	92%	150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	430.198.827	100%	434.500.815	100%	438.845.823	100%	443.234.282	100%	447.666.624	UPT PENGELOLAAN SAMPAH
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	15%	18%	20%	55.000.000	25%	55.550.000	35%	89.205.500	45%	103.076.555	50%	57.233.221	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas air	60%	60%	60,10%	180.000.000	60,20%	198.000.000	60,3%	217.800.000	60,4%	239.580.000	60,5%	263.538.000	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara	94,45%	94,45%	94,55		94,65%		94,75%		94,85%		94,95%		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)														
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	47,38%	47,38%	48%	100.350.000	49%	110.385.000	50%	156.777.499	51%	172.455.249	52%	189.700.775	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	52,20%	52,20%	54%	25.000.000	55%	27.500.000	56%	30.250.000	57%	33.275.000	58%	36.602.500	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH	80%	96%	96,50%	143.054.940	96,70%	157.360.434	98%	173.096.477	99%	190.406.125	100%	209.446.738	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya kapasitas SDM bidang Lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	65%	80%	85%	91.257.360	90%	100.383.096	95%	110.421.406	98%	121.463.546	100%	133.609.901	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	74%	89%	92%	25.000.000	95%	27.500.000	98%	30.250.000	100%	33.275.000	100%	36.602.500	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	100%	100	100%	25.000.000	100%	27.500.000	100%	30.250.000	100%	33.275.000	100%	36.602.500	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	52%	52,20%	54%	538.112.826	55%	591.924.109	56%	701.351.916	57%	771.487.110	58%	848.635.821	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah	6,21%	14,77%	17,53%		20,28%		23,03%		25,78%		28,53%		
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	55.96%%	56,08%	58,83%		61,57%		64,32%		67,06%		69,81%		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	8.699.081.222	100%	8.786.072.034	100%	8.873.932.754	100%	8.962.672.082	100%	9.052.298.803	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,60%	88,00%	88,50%		89,00%		89,50%		90,00%		90,50%		DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	9,66%	30,00%	35%	205.000.000	40%	263.450.812	45%	341.031.716	50%	417.734.013	50%	443.548.917	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	81,51%	85,00%	87%		88%		89%		100%		100%		DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi database kependudukan yang disampaikan	16,67%	16,67%	33%	150.000.000	50%	180.000.000	66,67%	190.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	68.000.000	100%	68.000.000	100%	68.000.001	100%	68.000.000	100%	68.000.000	DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	3.472.129.469	100%	3.516.850.764	100%	3.562.019.271	100%	3.607.639.464	100%	3.653.715.859	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,5%	85,0%	85,5%		86,0%		86,5%		87,0%		87,5%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100%	100%	100%	1.402.387.215	100%	1.399.941.294	100%	1.413.435.377	100%	1.431.477.773	100%	1.461.063.968	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26,10%	39,15%	58,72%		78,29%		97,87%		100%		100%		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	-	10%	19,23	478.612.785	38,46	495.000.000	61,54	545.000.000	100	570.000.000	100	592.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENATAAN DESA														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	33%	33%	50%	60.000.000	67%	110.000.000	83%	110.000.000	100%	130.000.000	100%	139.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya efetifitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	11,54%	17,31%	23,08%	20.000.000	28,85%	20.000.000	38,46%	20.000.000	48,08%	20.000.000	57,69%	22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks advokasi dan pengendalian penduduk	65,74	65,78	65,8	914.000.000	65,9	1.264.000.000	65,92	964.000.000	65,94	964.000.000	65,94	964.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Laju pertumbuhan penduduk	1,36	1,36	1,46		1,56		1,66		1,76		1,76		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Mneingkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	67%	67,20%	67,80%	2.821.992.000	68,30%	2.892.992.000	68,80%	2.935.992.000	69%	2.848.392.000	69%	2.848.392.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	3,00%	3,10%	2,85%		2,70%		2,65%		2,50%		2,40%		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	81,00%	81,50%	82%	2.869.800.000	82,50%	2.869.800.000	83%	2.869.800.000	84%	2.895.800.000	84%	2.895.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	430.713.767	100%	435.020.905	100%	439.371.114	100%	443.764.825	100%	448.202.473	UPT PENGELOLAAN TRANSPORTASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	0,25%	0,27%	0,32%	1.023.020.663	0,37%	1.414.530.568	0,43%	1.872.234.023	0,48%	2.210.860.617	0,53%	3.068.571.248	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	18%	20%	22%		24%		26%		28%		30%		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut	0,31%	0,33%	0,35%	11.308.674.021	0,37%	18.233.878.434	0,39%	27.400.017.650	0,41%	31.102.387.884	0,43%	34.618.700.378	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	14.774.562.732	100%	14.922.308.359	100%	15.071.531.443	100%	15.222.246.757	100%	15.374.469.225	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,7%	86,0%	87,0%		88,0%		89,0%		90,0%		91,0%		DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	6.809.620.197	100%	6.764.259.399	100%	6.923.734.983	100%	7.238.210.568	100%	7.356.505.463	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85,50%	86%		86,50%		87%		87,50%		88%		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	70%	75%	77%	2.674.159.014	80%	2.890.000.000	82%	3.005.000.000	85%	2.990.000.000	87%	3.090.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang mengakses internet	73,78%	78,43%	79,14%		79,86%		80,58%		80,82%		81,30%		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA														
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai domain kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE	2,51	2,58	2,66	4.190.000.000	2,76	4.203.995.396	2,85	4.203.995.396	2,94	4.203.995.396	4,11	4.213.995.396	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	93%	100%	100%	7.427.017.773	100%	7.501.287.951	100%	7.576.300.830	100%	7.652.063.838	100%	7.728.584.474	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,80%	93%	93,20%		93,5		93,8		94		94,20%		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI														
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	13,75%	13,75%	13,79%	40.000.000	13,83%	42.000.000	13,87%	42.000.000	13,91%	42.000.000	13,95%	42.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI														
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	6,25%	6,25%	6,75%	31.307.500	6,79%	35.000.000	6,83%	35.000.000	6,87%	35.000.000	6,91%	35.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														GAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	13%	13%	15%	42.781.000	18,75%	45.000.000	-	-	18,75%	50.000.000	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	1,25%	1,25%	2,50%	30.514.000	3,75%	61.601.077	-	-	-	-	-	-	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan wirausaha	10%	11%	12%	120.000.000	14%	385.000.000	15%	385.000.000	16%	425.866.490	17%	425.866.490	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Proporsi Jumlah UMKM Non Pertanian pada Level Kabupaten	3,09%	3,28%	3,38%		3,48%		3,58%		3,61%		3,71%		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	11,67	11	11,67	430.736.975	13,33	415.500.000	15	385.500.000	16,67	385.500.000	18,33	464.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya iklim dan kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	29.079.984.342	29.500.000	30.000.000	250.000.000	30.500.000	520.000.000	31.000.000	520.000.000	32.000.000	575.000.000	33.000.000	575.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	2,30%	2,34%	2,40%	310.000.000	2,46%	270.000.000	2,52%	310.000.000	2,59%	310.000.000	2,65%	320.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	90%	92%	93%	510.574.000	93%	445.216.000	93%	470.216.000	93%	499.596.406	93%	520.596.406	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL														
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	88%	89%	90%	324.535.000	91%	310.000.000	92%	310.406.000	95%	310.000.000	96%	360.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	-	-	85%	75.000.000	90%	73.000.000	90%	73.000.000	95%	73.000.000	95%	73.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	82%	100%	4.811.500.459	100%	4.789.025.648	100%	4.849.251.837	100%	4.890.909.621	100%	4.935.541.810	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5%	88,0%	88,5%		89,0%		89,5%		90,0%		90,5%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN														
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pembinaan Kapasitas Kepemudaan	65,50%	65,50%	66%	1.150.000.000	67%	1.150.000.000	68%	1.150.000.000	69%	1.150.000.000	70%	1.150.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang berprestasi di provinsi	49%	60%	71%	4.247.724.433	72%	4.247.724.433	73%	4.247.724.439	74%	5.000.000.000	75%	5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN														
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	77%	77%	78%	200.000.000	78%	200.000.000	80%	200.000.000	81%	300.000.000	82%	300.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,72	1,75	1,80	615.000.000	1,95	665.000.000	2,15	675.000.000	2,35	665.000.000	2,60	715.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI														
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	-	2,7	2,70	435.000.000	3,45	495.000.000	3,45	505.000.000	4,20	510.000.000	4,85	526.180.789	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	40%	44%	48%	1.595.000.000	50%	1.393.842.254	53%	1.919.133.686	55%	1.680.000.000	60%	1.375.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL														
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	30%	30%	35%	100.000.000	40%	100.000.000	45%	150.000.000	50%	100.000.000	55%	150.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	0%	10%	15%	100.000.000	25%	100.000.000	35%	100.000.000	45%	300.000.000	55%	250.000.000	
	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Telah ditetapkan pendaftarannya	0%	4,35%	8,26%		1,22%		1,61%		17,39%		20,87%		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah ditetapkan terhadap total pencatatan	16,67%	25%	31,60%		38,20%		44,80%		47%		49,20%		
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN														
Meningkanya tata kelola museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	0%	0%	0	-	0	-	0	-	0	-	30%	195.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	4.858.712.018	100%	4.907.299.138	100%	4.956.372.130	100%	5.005.935.851	100%	5.055.995.209	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,7%	90,7%	90,8%		90,9%		91,0%		91,1%		91,2%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	76,70	76,70	76,80	459.000.000	76,90	505.000.000	77,00	542.000.000	77.20	571.000.000	77,50	608.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP														
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase tersusunnya arsip yang sesuai standar	0	15,00	20,00	100.000.000	30,00	113.767.120	35,00	136.048.369	40,00	165.838.888	50,00	187.133.770	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	14.544.618.215	100	14.690.964.397	100	14.838.774.041	100	14.988.061.782	100	15.138.842.399	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,50%	90%	90,50%		91%		91,50%		92%		92%		DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	27227,35 TON	27499,62 TON	27499,97 TON	1.000.000.000	27774,26 TON	573.992.182	28052,01 TON	450.000.000	28332,53 TON	440.000.000	28615,85 TON	481.178.273	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	179 TON	180 TON	188 TON	2.005.000.000	197 TON	2.905.000.000	207 TON	2.500.000.000	218 TON	2.929.081.526	239 TON	3.000.000.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Persentase Produksi Pengolahan Perikanan	74%	75%	78%	1.200.000.000	82%	367.000.000	91%	442.000.000	100%	497.000.000	100%	780.000.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	UPT Perbenihan Ikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Pemerintahan	100%	100%	100%	5.508.225.444	100%	5.563.307.699	100%	5.618.940.776	100%	5.675.130.184	100%	5.731.881.486	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,30%	89,50%	89,70%		89,90%		90,10%		90,30%		90,50%		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	22%	22%	22%	1.850.000.000	23%	2.000.000.000	24%	1.850.000.000	25%	1.933.868.787	26%	2.000.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3,68%	3,68%	7,35%	253.000.000	11,03%	155.000.000	14,70%	125.000.000	18,39%	100.000.000	22,06%	100.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan Tervalidasi	0%	0%	20%	160.000.000	40%	190.000.000	60%	200.000.000	80%	200.000.000	100%	210.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	18,30%	18,80%	19,30%	2.230.000.000	20,30%	2.530.000.000	21,30%	2.305.000.000	22,30%	2.515.000.000	23%	2.728.041.994	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	UPT BALAI BENIH PERTANIAN TERPADU
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan komoditas peternakan	80%	81%	85%	1.200.000.000	87%	945.750.000	90%	681.040.903	95%	776.670.000	100%	916.670.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	87%	88,20%	88,25%	400.000.000	89%	900.000.000	92%	1.600.000.000	95%	1.350.000.000	100%	1.100.000.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	70,17%	86,00%	90%	350.000.000	92%	710.000.000	94%	760.000.000	96%	680.000.000	100%	740.000.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27.05 – PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	0%	75%	77%	100.000.000	80%	150.000.000	85%	250.000.000	95%	250.000.000	100%	250.000.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	50%	75%	77%	100.000.000	78%	192.920.000	80%	294.020.000	90%	345.230.000	100%	346.561.000	DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100%	100%	100%	10.576.860	100%	15.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	100%	25.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	7,14%	7,14%	7,14%	305.133.918	7,14%	350.000.000	7,14%	400.000.000	7,14%	520.000.000	7,14%	700.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya Pengendalian Stabilitas Harga kebutuhan Barang Pokok dan penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	0,71%	0,71%	0,71%	62.077.500	0,69%	66.050.000	0,67%	416.050.000	0,65%	516.050.000	0,63%	516.050.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	-	100%	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	90.446.318	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	3%	6%	9%	815.000.000	12%	615.000.000	15%	615.000.000	18%	715.000.000	21%	715.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Level Kabupaten	99,91%	99,92%	99,92%		99,93%		99,93%		99,93%		99,94%		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	56%	60%	70%	47.000.000	75%	47.000.000	85%	47.000.000	95%	47.000.000	100%	47.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	0	10%	50.000.000	15%	50.000.000	17%	50.000.000	19%	68.467.000	22%	74.213.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
UNSUR SEKRETARIAT DAERAH														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah	70%	70%	70%	11.320.000.000	75%	11.599.855.665	80%	11.696.750.000	85%	11.849.500.000	90%	12.111.225.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3200 (sedang)	3200 (sedang)	3200 (sedang)		3200 (sedang)		3200 (sedang)		3350 (Tinggi)		3400 (Tinggi)		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase jumlah kebijakan yg dilaksanakan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	58%	58%	60%	3.047.382.680	65%	3.036.791.984	70%	3.243.432.981	75%	3.456.209.376	80%	3.603.299.774	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Indeks Kematangan Organisasi dengan Predikat Tinggi	29%	41%	52,94%	38.953.201.076	67,65%	39.750.347.782	82,35%	40.513.224.125	91,18%	41.214.109.405	100%	41.871.705.683	SEKRETARIAT DAERAH
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,09	87	87,5		88		88,5		89		91		SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR SEKRETARIAT DPRD														
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Persetujuan Peraturan Daerah	70%	70%	70%	3.158.287.165	75%	3.358.287.165	80%	3.850.156.735	85%	3.522.287.165	90%	3.897.137.885	SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	80%	80%	80%	3.215.224.266	80%	3.333.224.266	85%	3.149.594.146	85%	3.724.224.266	90%	3.795.224.316	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	20.321.865.140	100%	20.537.772.671	100%	20.763.440.753	100%	21.050.587.734	100%	21.138.644.496	SEKRETARIAT DPRD
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,09	86,59	87,01		87,51		88		88,5		90		SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PERENCANAAN														
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatknya kualitas perencaanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	99%	100%	100%	1.089.407.996	100%	1.137.177.997	100%	1.216.717.413	100%	1.466.519.949	100%	1.391.738.383	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	99%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	1.202.549.000	100%	1.212.159.560	100%	1.314.044.290	100%	1.444.882.922	100%	1.658.964.016	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang perekonomian dan SDA	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNSUR KEUANGAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	15.355.765.695	100%	15.556.549.186	100%	15.688.973.295	100%	15.931.746.275	100%	16.149.720.977	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,2%	86,0%	87,0%		88,0%		89,0%		90,0%				BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusuan Ranperda tentang APBD dan APBDP	100%	100%	100%	114.518.481.064	100%	117.363.061.548	100%	119.915.372.414	100%	122.629.742.410	100%	125.151.502.683	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase penganggaran belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	Persentase Penurunan Silpa	-	11%	11%		9%		7%		5%		3%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Dokumen pelaporan keuangan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH														
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Dokumen Laporan Pengelolaan asset daerah	100%	100%	100%	3.737.073.000	100%	3.716.873.000	100%	3.716.873.000	100%	3.199.465.000	100%	3.199.465.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pertumbuhan PAD	19,32%	49,04%	6,00%	1.375.429.000	3,28%	1.050.000.000	5,00%	1.065.000.000	3,00%	1.325.000.000	3,00%	1.285.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
UNSUR KEPEGAWAIAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	6.865.734.534	100%	6.934.391.879	100%	7.003.735.798	100%	7.073.773.156	100%	7.144.510.888	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,9	92,3	92,8		93,3		93,8		94,2		94,7		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	90%	90%	91%	571.368.308	92%	867.421.423	93%	862.850.448	94%	898.596.747	94%	973.154.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA														
meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi Dasar Manajerial dan fungsional	46%	46%	46%	926.460.200	47%	729.021.000	48%	831.519.318	49%	893.006.922	49%	914.982.997	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	20%	30%	36%	250.000.000	45%	650.000.000	54%	500.000.000	60%	250.000.000	70%	255.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH														
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Menghasilkan Inovasi	41,18%	45,00%	50%	645.000.000	55%	245.000.000	60%	370.000.002	65%	394.817.000	75%	405.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	9.464.142.016	100%	9.659.783.437	100%	9.756.381.271	100%	9.853.945.081	100%	9.952.484.433	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,2	86,5	87		88		89		90		91		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNSUR PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	3.265.965.911	100%	3.298.625.570	100%	3.331.611.826	100%	3.364.927.944	100%	3.398.577.224	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,6	88	88,3		88,8		90		90,5		91		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN														
Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola	83,20%	84,60%	86%	517.100.000	87,40%	560.101.659	88,80%	602.776.721	90,20%	645.121.922	91,60%	687.133.960	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	81%	81%	82%	3.601.766.326	83%	3.818.766.326	84%	4.067.480.836	85%	4.067.480.836	86%	4.213.543.110	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	2.367.000.000	LEVEL 3	2.400.020.967	LEVEL 3	2.400.020.967	LEVEL 3	2.647.415.957	LEVEL 3	2.747.415.957	INSPEKTORAT DAERAH
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3		LEVEL 3		LEVEL 3		LEVEL 3		LEVEL 3		INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	13.064.564.060	100%	13.195.209.701	100%	13.327.161.798	100%	13.460.433.416	100%	13.595.037.750	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,5	86,5	88		89,5		91		92,5		93		INSPEKTORAT DAERAH
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87%	88%	100%	5.066.230.803	100%	4.736.811.794	100%	4.749.142.448	100%	4.813.936.407	100%	4.962.490.106	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,5	90	90,2		90,4		90,6		90,8		90,99		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	83%	84%	85%	912.140.783	85%	1.275.927.223	87%	1.352.964.001	89%	1.387.537.474	89%	1.318.351.207	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	83%	83%	85%	135.000.000	85%	140.000.000	87%	160.000.000	89%	170.000.000	89%	200.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	65%	67%	70%	460.363.589	75%	470.363.590	77%	480.363.589	80%	490.363.589	82%	500.363.589	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	78%	79%	81,58%	14.636.411	84,21%	44.636.411	86,84%	64.636.411	89,47%	84.636.411	90%	104.636.411	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Terselesaikan	82%	83%	100%	380.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
UNSUR KEWILAYAHAN														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KECAMATAN SIANTAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	90,00%	90,00%	100%	4.981.588.672	100%	5.031.404.559	100%	5.081.718.604	100%	5.132.535.790	100%	5.183.861.148	KECAMATAN SIANTAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20%	85%	86%		87%		88%		89%		91%		KECAMATAN SIANTAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	88%	89%	91%	15.000.000	92%	16.050.000	93%	17.173.500	94%	18.118.043	95%	19.114.535	KECAMATAN SIANTAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	84%	85%	88%	759.309.441	91%	813.051.988	93%	867.248.943	95%	923.174.473	98%	977.943.984	KECAMATAN SIANTAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	-	-	-	-	84%	2.000.000	87%	2.140.000	90%	2.257.700	93%	2.381.874	KECAMATAN SIANTAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	87%	87%	91%	70.614.088	92%	75.557.074	93%	80.846.069	94%	85.292.603	95%	89.983.696	KECAMATAN SIANTAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88%	88%	89%	99.576.472	93%	106.546.825	95%	114.005.102	97%	120.275.383	99%	126.890.529	KECAMATAN SIANTAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KECAMATAN SIANTAN SELATAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00 %	2.766.860.932	100,00 %	2.794.529.541	100,00 %	2.822.474.837	100,00%	2.850.699.585	100,00 %	2.879.206.581	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,1%	85%	86,5%		88%		89,5%		90%		91%		KECAMATAN SIANTAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90%	90%	92%	5.000.000	94%	5.500.000	96%	6.050.000	98%	6.655.000	100%	7.320.500	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	90%	90%	92%	308.000.000	94%	311.200.000	96%	342.320.000	98%	376.552.000	100%	414.207.200	KECAMATAN SIANTAN SELATAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	90%	90%	92%	40.000.000	94%	42.200.000	96%	42.220.000	98%	46.442.000	100%	51.086.200	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	90%	90%	92%	150.000.000	94%	168.000.000	96%	175.000.000	98%	188.804.003	100%	188.150.000	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90%	90%	92%	85.000.000	94%	100.528.610	96%	100.990.532	98%	87.000.000	100%	83.279.326	KECAMATAN SIANTAN SELATAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KECAMATAN SIANTAN UTARA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00 %	3.001.371.840	100,00 %	3.031.635.558	100,00 %	3.061.699.414	100,00%	3.092.316.408	100,00 %	3.150.742.572	KECAMATAN SIANTAN UTARA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,8%	85%	86%		88%		89%		90%		91%		KECAMATAN SIANTAN UTARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	20.000.000	KECAMATAN SIANTAN UTARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100%	100%	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	274.997.003	KECAMATAN SIANTAN UTARA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	200.000.000	100%	225.083.719	100%	228.367.300	100%	229.947.742	100%	224.022.012	KECAMATAN SIANTAN UTARA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	51.000.000	100%	45.000.000	100%	49.500.000	100%	60.000.000	100%	75.000.000	KECAMATAN SIANTAN UTARA
KECAMATAN SIANTAN TENGAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	90%	90,5%	100%	3.814.000.657	100%	3.852.140.664	100%	3.890.662.071	100%	3.929.568.691	100%	3.968.864.378	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,9%	83,5%	84		85%		86%		88%		90%		KECAMATAN SIANTAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70%	75%	80%	54.000.000	83%	70.000.000	86%	90.000.000	89%	90.000.000	91%	90.000.000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	90%	90%	91%	150.000.000	92%	160.000.000	93%	240.042.163	94%	285.225.000	95%	304.817.005	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	85%	85%	87%	38.000.000	88%	60.000.000	89%	32.350.000	90%	32.350.000	91%	50.000.000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	81%	81%	82%	90.000.000	83%	100.000.000	85%	120.000.000	87%	120.000.000	88%	130.000.000	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68%	68%	69%	120.000.000	70%	109.180.006	73%	63.586.449	78%	64.817.005	85%	63.599.327	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
KECAMATAN SIANTAN TIMUR														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00 %	2.585.523.333	100,00 %	2.611.378.566	100,00 %	2.634.968.059	100,00%	2.663.867.276	100,00 %	2.690.505.948	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,2%	84,0%	85,0%		86,0%		87,0%		88,0%		91,0%		KECAMATAN SIANTAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	55.760.973	100%	65.212.223	100%	72.924.018	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100%	100%	100%	185.000.000	100%	187.495.234	100%	188.495.234	100%	198.495.234	100%	201.495.234	KECAMATAN SIANTAN TIMUR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	52.000.000	100%	58.000.000	100%	68.000.000	100%	75.000.000	100%	85.000.000	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	100%	100%	80.000.000	100%	87.000.000	100%	98.000.000	100%	97.000.000	100%	101.000.000	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	115.000.000	100%	130.000.000	100%	145.000.000	100%	152.000.000	100%	162.000.000	KECAMATAN SIANTAN TIMUR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KECAMATAN JEMAJA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00%	100,00 %	100,00 %	6.282.959.384	100,00 %	6.348.310.958	100%	6.422.513.648	100%	6.488.553.774	100%	6.557.502.712	KECAMATAN JEMAJA
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,8%	84,0%	86,0%		88,0%		89,0%		90,0%		91,0%		KECAMATAN JEMAJA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	70%	72%	74%	15.000.000	75%	15.000.000	77%	30.000.000	78%	30.000.000	78%	50.000.000	KECAMATAN JEMAJA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	50%	51%	52%	106.140.000	55%	156.181.574	56%	168.072.031	58%	240.000.000	65%	271.869.263	KECAMATAN JEMAJA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	75%	77%	77%	2.000.000	80%	5.000.000	80%	5.000.000	82%	6.000.000	82%	10.000.000	KECAMATAN JEMAJA
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum														
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70%	72%	73%	18.000.000	74%	20.000.000	75%	55.000.000	77%	55.000.000	80%	70.000.000	KECAMATAN JEMAJA
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	63.000.000	100%	78.000.000	100%	78.000.000	100%	84.425.053	100%	78.000.000	KECAMATAN JEMAJA

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (KEL. LETUNG)														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	69%	72%	75%	137.058.000	87%	137.058.000	89%	139.058.000	91%	139.058.000	92%	141.058.000	KELURAHAN LETUNG
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (KEL. LETUNG)														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	79%	80%	81%	645.500.000	83%	655.500.000	84%	662.800.000	85%	662.800.000	87%	672.800.000	KELURAHAN LETUNG
KECAMATAN JEMAJA TIMUR														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100%	3.369.863.453	100%	3.403.562.088	100%	3.437.597.709	100%	3.471.973.686	100%	3.506.693.422	KECAMATAN JEMAJA TIMUR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2%	85,5%	86,5%		88,0%		89,5%		90,0%		91,0%		KECAMATAN JEMAJA TIMUR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	87%	87%	89%	1.000.000	90%	1.000.000	90%	1.000.000	90%	1.000.000	90%	1.000.000	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	76%	80%	80%	200.000.000	80%	220.000.000	80%	242.000.000	80%	266.200.000	80%	279.510.000	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	83%	85%	87%	39.996.200	89%	43.995.820	90%	47.418.421	90%	49.789.342	90%	52.278.809	KECAMATAN JEMAJA TIMUR

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	83%	85%	87%	129.877.000	89%	142.864.700	90%	150.007.935	90%	157.508.332	90%	171.684.082	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	95.126.800	100%	101.158.114	100%	111.273.926	100%	119.543.901	100%	131.566.216	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
KECAMATAN KUTE SIANTAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00 %	4.091.031.746	100,00 %	4.131.942.063	100,00 %	4.173.261.484	100,00%	4.214.994.099	100,00 %	4.257.144.040	KECAMATAN KUTE SIANTAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,1%	86,5%	87,5%		88,5%		89,5%		90,5%		91,0%		KECAMATAN KUTE SIANTAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	34.112.700	100%	37.612.700	100%	39.112.700	100%	41.612.700	100%	43.112.700	KECAMATAN KUTE SIANTAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100%	100%	100%	249.403.096	100%	284.903.096	100%	314.403.096	100%	347.903.096	100%	378.403.096	KECAMATAN KUTE SIANTAN
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	36.018.100	100%	41.018.100	100%	46.018.100	100%	51.018.100	100%	56.018.100	KECAMATAN KUTE SIANTAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	100%	100%	105.000.000	100%	107.000.000	100%	108.411.532	100%	125.000.000	100%	129.170.246	KECAMATAN KUTE SIANTAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	75.466.104	100%	80.376.422	100%	93.466.104	100%	85.965.656	100%	94.466.104	KECAMATAN KUTE SIANTAN
KECAMATAN PALMATAK														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100,00 %	5.440.866.141	100,00 %	5.495.454.802	100,00 %	5.548.589.350	100,00%	5.606.275.244	100,00 %	5.662.517.996	KECAMATAN PALMATAK
	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,2%	85,0%	86,0%		87,0%		88,0%		89,0%		90,0%		KECAMATAN PALMATAK
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	KECAMATAN PALMATAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100%	100%	100%	412.500.000	100%	442.500.000	100%	412.500.000	100%	451.231.429	100%	494.017.436	KECAMATAN PALMATAK

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	100%	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	280.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	KECAMATAN PALMATAK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	30.000.000	100%	64.328.662	100%	62.611.437	100%	62.611.437	100%	80.000.000	KECAMATAN PALMATAK
KECAMATAN JEMAJA BARAT														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya dukungan urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	100%	100%	2.514.430.754	100%	2.539.575.062	100%	2.564.970.812	100%	2.590.620.520	100%	2.616.526.726	KECAMATAN JEMAJA BARAT
	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,2%	89,0%	89,5%		90,0%		90,5%		91,0%		91,0%		KECAMATAN JEMAJA BARAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	76%	78%	80%	200.000.000	82%	220.000.000	84%	242.000.000	86%	266.200.000	88%	279.510.000	KECAMATAN JEMAJA BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	76%	78%	80%	164.877.000	82%	170.010.373	84%	169.384.825	86%	169.202.836	88%	175.783.464	KECAMATAN JEMAJA BARAT
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE* 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	95.126.800	100%	101.158.114	100%	111.273.926	100%	119.543.901	100%	131.566.216	KECAMATAN JEMAJA BARAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	85%	87%	89%	1.000.000	90%	1.000.000	91%	1.000.000	92%	1.000.000	93%	1.000.000	KECAMATAN JEMAJA BARAT
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	83%	85%	87%	39.996.200	88%	43.995.820	89%	47.418.421	90%	49.789.342	91%	52.278.809	KECAMATAN JEMAJA BARAT
TOTAL					**978.429.284.622**		**1.021.342.529.251**		**1.072.384.655.713**		**1.104.541.195.385**		**1.137.662.431.246**	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 berperan sebagai instrumen kunci dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan Sasaran RPJMD. IKU tersebut dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana program dan kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan adanya IKU, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih efektif.

Selain itu, IKU juga berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai visi yang diharapkan. Dengan membandingkan capaian kinerja dengan alokasi anggaran yang telah dikeluarkan, pemerintah daerah dapat menentukan apakah sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pendanaan yang dialokasikan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Setiap indikator kinerja utama disertai dengan target yang dirancang secara realistis dan progresif sepanjang periode perencanaan 2025–2030. Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan tren historis lima tahun sebelumnya. Penyusunan target juga memperhatikan dinamika nasional dan regional yang dapat mempengaruhi capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, IKU menjadi komponen krusial dalam menjaga konsistensi antara visi-misi kepala daerah dan rencana aksi pembangunan tahunan.

Sebagai pelengkap dari fungsi strategisnya, indikator kinerja utama (IKU) yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi rujukan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. IKU tersebut berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga memastikan keselarasan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor. Dengan menjadikan IKU sebagai acuan dalam Renstra OPD, maka upaya pencapaian tujuan pembangunan dapat dilakukan secara terintegrasi, terukur, dan bertanggung jawab melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat

sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta menjamin efektivitas pencapaian hasil pembangunan daerah secara menyeluruh.

Untuk memastikan kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan, setiap IKU yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030 dijabarkan lebih lanjut menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK ini dirinci dalam Tabel 8.3, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dengan adanya IKK, seluruh pihak terkait dapat memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga koordinasi dan sinergi antar instansi dapat terjalin dengan lebih baik sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,86	74,26	74,65	75,05	75,44	75,83	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,62	8,01	8,40	8,80	9,19	9,59	
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,20	13,30	13,39	13,49	13,59	13,68	
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,84	69,3	69,77	70,23	70,69	71,15	
5	Prevalensi Stunting	%	13,30	12,50	12,30	11,80	11,30	11,00	
6	Indeks Pengembangan Kebudayaan	Indeks	53,70	55,00	56,30	57,60	58,90	60,10	
7	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,49	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80	90,99	
9	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	91,92	92,43	92,93	93,44	93,94	94,45	
10	Rasio Konektivitas	Indeks	0,54	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74	
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	84,52	84,89	85,27	85,64	86,02	86,39	
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	84,37	83,65	82,93	82,22	81,50	80,78	
	Persentase penurunan emisi GRK								
13	a. Kumulatif	%	0,04	0,09	0,14	0,20	0,25	0,29	
14	b. Tahunan	%	0,10	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (74,57)	BB (74,90)	BB (75,17)	BB (75,48)	BB (75,77)	BB (76)	
16	Nilai SAKIP	angka	B (63,66)	B (65,34)	B (67,05)	B (68,72)	BB (70,46)	BB (71,86)	
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	73,48	73,87	74,13	74,46	74,72	75,00	
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,20	4,25	4,30	4,35	4,40	4,50	
19	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41,50	41,80	42,10	42,30	42,50	42,80	
20	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik	Indeks	3,04	3,07	3,19	3,31	3,43	3,55	
21	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas	%	3,26	3,56	3,86	4,16	4,46	4,76	
23	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	%	4,64	4,91	5,19	5,46	5,74	6,01	
24	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	%	0,20	0,35	0,59	0,84	1,08	1,32	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Kontrinbusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	%	0,17	0,18	0,20	0,21	0,22	0,24	
26	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	24,52	24,99	25,46	25,93	26,40	26,87	
27	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	%	1,69	1,7	1,71	1,72	1,73	1,74	
28	Tingkat Kemiskinan	%	6,65-6,38	6,37-6,09	6,08-5,81	5,80-5,53	5,52-5,25	5,24-4,46	
29	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	2,19	2,16	2,13	2,09	2,06	2,02	
30	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	65,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	
31	Persentase Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	
32	Indeks Desa	Indeks	0,71	0,73	0,75	0,77	0,78	0,80	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2030 didasarkan pada pendekatan kinerja. Pendekatan ini diwujudkan melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang mencerminkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama periode perencanaan. IKD menjadi tolok ukur capaian kinerja pemerintah daerah, baik secara makro maupun sektoral, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Indikator Kinerja Daerah dalam dokumen ini disusun secara komprehensif, mencakup dua jenis indikator utama, yaitu indikator makro pembangunan daerah dan indikator kinerja kunci per urusan pemerintahan. Indikator makro mencerminkan kondisi umum dan capaian pembangunan yang bersifat lintas sektor, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia (IPM), serta indeks gini. Sementara itu, indikator kinerja kunci dirumuskan untuk setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.

IKD yang ditetapkan dalam RPJMD ini berlaku selama periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Penetapan rentang waktu tersebut bertujuan agar terdapat kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lintas tahun dalam satu siklus pemerintahan daerah. Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi bagian dari SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Perlu dicermati bahwa tahun 2030 merupakan tahun transisi yang strategis, karena berada pada batas akhir RPJMD sekaligus awal dari perencanaan jangka menengah periode selanjutnya. Pelaksanaan target IKD pada tahun tersebut akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, perencanaan tahun transisi harus memperhatikan kesinambungan kebijakan serta kesiapan kelembagaan dan sumber daya pelaksana, agar capaian pembangunan tidak terputus dan tetap berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain menjadi bagian integral dalam dokumen RPJMD 2025–2029, IKD yang ditetapkan juga memegang peranan strategis sebagai indikator kinerja utama dalam kerangka RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2045. Dalam konteks ini, IKD tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur pencapaian sasaran jangka menengah, tetapi juga sebagai komponen penting yang mengarahkan pencapaian visi jangka panjang daerah. Oleh karena itu, penyelarasan antara target IKD dalam RPJMD dengan tujuan pembangunan jangka panjang menjadi krusial untuk menjamin konsistensi arah kebijakan pembangunan lintas periode pemerintahan. Hal ini

memastikan bahwa setiap capaian jangka menengah turut berkontribusi terhadap visi besar pembangunan daerah di tahun 2045.

Dengan adanya penetapan IKD dalam dokumen RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dapat memiliki acuan yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. IKD tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendali arah pembangunan daerah yang responsif terhadap dinamika lokal, nasional, dan global. Penyusunan indikator ini juga memperhatikan prinsip inklusivitas, keterukuran, dan akuntabilitas agar mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas secara lebih adaptif dan berkelanjutan. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditampilkan pada **Tabel 4.3** berikut ini.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	55,34	55,4	55,51	55,65	55,72	55,83	55,91	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	9,04	8,75	8,74	8,73	8,72	8,71	8,7	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan (IUP RPJPD)
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	790,94	702,29	733,4	764,51	795,61	826,72	857,83	Sekretariat Daerah, BPS (IUP RPJPD)
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak	%	24,65	25,73	26,82	27,9	28,99	30,07	31,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, BPS
5	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan akses air minum layak	%	61,96	70,92	72,72	74,53	76,34	76,94	78,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (IUP RPJPD)
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	80,61	84,52	84,89	85,27	85,64	86,02	86,39	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (IUP RPJPD)
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%RT	6,45	6,45	12,3	18,14	23,99	29,84	35,68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (IUP RPJPD)
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/Kg	6,21	14,77	17,53	20,28	23,03	25,78	28,53	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (IUP RPJPD)
9	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%RT	55,96	56,08	58,83	61,57	64,32	67,06	69,81	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (IUP RPJPD)

10	Kapasitas Air Baku	m^3/detik	0,068	0,070	0,071	0,072	0,074	0,074	0,075	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (IUP RPJPD)
11	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	61,56	61,57	62,06	65,13	68,21	69,23	71,28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (IUP RPJPD)
12	Persentase penurunan emisi GRK (Kumulatif)	%	0,03 (2023)	0,04	0,09	0,14	0,198	0,25	0,29	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (IUP RPJPD/PROV)
13	Persentase penurunan emisi GRK (Tahunan)	%	0,09 (2023)	0,1	0,12	0,14	0,17	0,19	0,22	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (IUP RPJPD/PROV)
14	Indeks Risiko Bencana	poin	90,50	84,37	83,65	82,93	82,22	81,5	80,78	BPBD (IUP RPJPD/Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
15	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,46	0,46%	0,46%	0,47%	0,47%	0,49%	0,49%	BPBD
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,34	1,30	1,26	1,22	1,18	1,14	1,10	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, BPS
17	Rasio Penduduk terhadap Jenis kelamin	%	107,1	107	107	107	107	107	107	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, BPS
18	Kepadatan Penduduk	Orang/ m2	80,31	80,29	80,27	80,25	80,23	80,21	80,19	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, BPS
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Dengan Migas)	%	-5,67	0,91-1,21	1,08-1,43	1,25-1,66	1,42-1,88	1,59-2,11	1,76-2,33	BPS
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)	%	4,58	3,26	3,56	3,86	4,16	4,46	4,76	BPS

3	Tingkat Kemiskinan	%	6,67	6,65-5,75	6,37-5,49	6,08-5,23	5,80-4,98	5,52-4,72	5,24-4,46	BPS (IUP RPJPD)
4	PDRB Per Kapita (ADHB)	Rp Juta	362,07	395,98	399,49	403,00	406,51	410,02	413,53	BPS
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,38	2,19	2,16	2,13	2,09	2,06	2,02	BPS (IUP RPJPD)
6	Indeks Gini	angka	0,296	0,290	0,283	0,277	0,270	0,264	0,258	BPS
7	Indeks Pembangunan Manusia	angka	73,47	73,864	74,258	74,652	75,046	75,44	75,834	BPS
8	Usia Harapan Hidup	tahun	68,37	68,84	69,3	69,77	70,23	70,69	71,15	BPS (IUP RPJPD)
9	Prevalensi Stunting	%	15,8	13,3	12,5	12,3	11,8	11,3	11,0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IUP RPJPD)
10	Angka Kematian Ibu	kasus	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IUP RPJPD)
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	49,38	55,48	58,44	61,40	64,37	65,36	67,33	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IUP RPJPD)
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	74,73	78,5	79,87	81,23	82,59	83,05	84,05	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (IUP RPJPD)
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	92,23	98,74	98,80	98,85	98,91	98,93	98,97	BPJS Kesehatan (IUP RPJPD)
14	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	7,21	7,62	8,01	8,4	8,8	9,19	9,59	BPS (IUP RPJPD)
15	Harapan Lama Sekolah	tahun	11,82	13,2	13,3	13,39	13,49	13,59	13,68	BPS (IUP RPJPD)
	Angka Literasi Membaca									
16	SD	%	62,6	65,10	67,60	70,10	72,60	75,10	77,60	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (IUP RPJPD)
17	SMP	%	70,25	71,35	72,45	73,55	74,65	75,75	76,85	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (IUP RPJPD)
	Angka Numerasi									

18	SD	%	52,07	54,97	57,87	60,77	63,67	66,57	69,47	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (IUP RPJPD)
19	SMP	%	60,77	62,27	63,77	65,27	66,77	68,27	69,77	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (IUP RPJPD)
20	Persentase anak usia (5-6) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	85,83	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (IUP RPJPD)
21	Persentase anak usia (7-15) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,95	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
22	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	%	15,32 (2023)	16,2	18,23	20,27	22,31	22,98	24,52	DKUMPP, BPS (IUP RPJPD)
23	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke-atas yang mengakses internet	%	73,78	78,43	79,14	79,86	80,58	80,82	81,30	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, BPS (IUP RPJPD)
24	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	92,9	93,1	93,5	93,8	94,0	94,4	94,6	DISPUSIPDA
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	96,1 (2023)	96,40	96,7	97,00	97,05	97,08	97,2	BPJS Ketenagakerjaan (IUP RPJPD)
26	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Skor	90 (2023)	90	90,2	90,4	90,6	90,8	90,99	Bakesbangpol, Kementerian Agama (IUP RPJPD)
27	Indeks Pembangunan Kebudayaan									
28	a. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	0	4,35	8,26	1,22	1,61	17,39	20,87	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (IUP RPJPD)

29	b. Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	%	16,67	25	31,6	38,2	44,8	47	49,2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (IUP RPJPD)
30	Indeks Perlindungan Anak	angka	60,05 (2023)	60,5	61,2	61,8	62,3	62,8	63	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA
31	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	57,01 (2023)	57,3	58,26	59,22	60,18	60,5	61,14	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kemenduk Bangga (IUP RPJPD)
32	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,49	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46	0,45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS (IUP RPJPD)
33	Indeks Pembangunan Pemuda	nilai	69,45	69,5	69,52	69,58	69,6	69,63	69,65	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kemenpora
34	Indeks Pembangunan Gender	nilai	91,58	91,59	91,6	91,61	91,62	91,63	91,64	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Angka Ketergantungan	%	47,93	48,30	48,68	49,06	49,44	49,82	50,21	BPS
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	%	0,15	0,17	0,18	0,2	0,21	0,22	0,24	BPS (IUP RPJPD)
3	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	%	0,12	0,2	0,35	0,59	0,84	1,08	1,32	BPS (IUP RPJPD)
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	BPS
5	Rasio Kewirausahaan	%	4,46	4,88	5,15	5,42	5,68	5,95	6,22	BPS (IUP RPJPD)

6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,67	54,56	55,45	56,34	57,23	58,12	59,01	BPS (IUP RPJPD)
7	Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah	Skor	1,08	1,30	1,51	1,73	1,95	2,17	1,08	BRIN (IUP RPJPD)
8	Indeks Inovasi Daerah	Skor	41,36	41,5	41,8	42,1	42,3	42,5	42,8	BSKDN KEMENDAGRI
9	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	101,76	106,24	107,41	108,58	109,75	110,92	112,09	BPS (IUP RPJPD)
10	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	104,81	107,68	109,27	110,87	112,46	114,05	115,65	BPS (IUP RPJPD)
11	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	Nilai	4,36	4,64	4,91	5,19	5,46	5,74	6,01	BPS (IUP RPJPD)
12	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	ribu orang	2,13	2,26	2,82	3,38	3,95	4,14	4,61	IUP RPJPD/DISPARBUD
13	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level kabupaten (%)	%	3,09	3,28	3,38	3,48	3,58	3,61	3,71	BPS (IUP RPJPD)
14	proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	%	99,91	99,92	99,92	99,93	99,93	99,93	99,94	BPS (IUP RPJPD)
15	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0,04	0,152	0,365	0,579	0,793	0,864	1,006	BPS (IUP RPJPD)
16	Return on Asset (ROA) BUMD (%)	%	0	0	0,135	0,27	0,405	0,45	0,54	BPS (IUP RPJPD)
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%PDRB	24,05	24,52	24,99	25,46	25,93	26,4	26,87	BPS (IUP RPJPD)
18	Ekspor Barang dan Jasa	%PDRB	48,83	54,23	54,96	55,69	56,42	57,15	57,87	BPS (IUP RPJPD)
19	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	3,3	3,61	3,92	4,23	4,54	4,85	5,16	BPS
20	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	%	91,8	91,92	91,98	92,04	92,1	92,16	92,22	Bappeda Prov (IUP RPJPD)
21	Persentase Desa Mandiri	%	21,15%	25%	27%	29%	31%	33%	33%	BPS (IUP RPJPD)

22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,0081	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	BPS (IUP RPJPD)
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98	98,2	98,5	98,7	98,9	99,0	99,2	Kemenkum, Seke (IUP RPJPD)
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,04	3,07	3,19	3,31	3,43	3,55	3,67	Kemenpan RB, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika (IUP RPJPD)
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	4,19	4,2	4,25	4,3	4,35	4,4	4,5	Kemenpan RB, Sekretariat Daerah (IUP RPJPD)
4	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77,3	80	81	82	83	84	85	Inspektorat Daerah (IUP RPJPD)
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	63,3	65	66	68	69	70	71	Sekretariat Daerah, Kemen HAM
7	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	2,97	2,98	3,01	3,05	3,11	3,16	3,25	Bappeda, BRIN (IUP RPJPD)
8	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	%	87,16	-	-	-	-	-	91,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (IUP RPJPD)
9	Persentase potensi konflik terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja (IUP RPJPD)
10	Indeks Akses Keuangan Daerah	nilai	3,16	3,27	3,32	3,38	3,43	3,49	3,52	Sekretariat Daerah, Bappenas
INDIKATOR KINERJA KUNCI DAERAH										
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	Persentase anak usia (5-6) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	%	85,83	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase anak usia (7-15) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,95	100	100	100	100	100	100	

4	Persentase anak usia (7-18) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	18,47	22,57	26,67	30,77	34,87	38,97	43,07	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,23	0,33	0,33	0,43	0,43	0,43	0,43	
2	Persenstase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persenstase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,7	100	100	100	100	100	100	
4	Persenstase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	94,3	100	100	100	100	100	100	
5	Persenstase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	93,4	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai satndar	%	87	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95,5	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	80,3	100	100	100	100	100	100	

9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	91	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,4	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,5	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00%	100	100	100	100	100	100	
15	Angka Kematian Bayi (AKB)	%	6 bayi/8,1%	15	14,8	14,5	13	13,8	13,5	
16	Pemberian makanan tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	94,44	95	96	97	98	99	100	
17	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multipe Micronutrient Sipplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	%	88,98	90	92	94	96	97	98	

18	Makanan bergizi seimbang pada Ibu Hamil	%	78	80	82	84	86	88	90	
19	Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	%	61,4	70	71	72	73	74	75	
20	Bayi Usia <6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	65,1	67	68	69	70	72	73	
21	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam	%	94	100	100	100	100	100	100	
22	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI	%	82	100	100	100	100	100	100	
23	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	87,69	100	100	100	100	100	100	
25	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	80,14	100	100	100	100	100	100	
26	Anak usia 0-23 bulan mendapat Imunisasi Rutin Lengkap	%	93	100	100	100	100	100	100	
27	Anak usia 6-23 bulan diare mendapatkan oralt dan zinc sesuai standar	Orang	0	8	8	9	9	10	10	
28	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	Orang	0	376	376	376	376	376	376	
29	Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk	%	100	100	100	100	100	100	100	

30	Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	98,06	100	100	100	100	100	100	
31	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	80,14	100	100	100	100	100	100	
32	Anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralt dan zinc sesuai standar	Orang	0	4	4	4	5	5	5	
33	Anak usia 24-59 bulan ipantau kasus pneumonia	Orang	0	36	36	36	36	36	36	
34	Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	Orang	0	2629	2629	2629	2629	2629	2629	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	%	61,56	61,56	62,1	62,58	63,21	63,65	64,02	
2	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air limbah yang aman	%	30,46	31,04	33,35	35,98	38,21	40,75	42,07	
3	Persentase cakupan pemenuhan sistem dan pengelolaan persampahan kabupaten	%	39	39	39,92	40,83	44,17	49,17	50,83	
4	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	46,38	47,72	49,18	50,38	52,79	54,31	55,62	
5	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	42,67	42,67	56	56	57,33	64	64	
6	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	70	70	76,5	80	83,5	87	90,5	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										

1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	Orang / Tahun	0	3	4	5	6	7	8	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	12,48%	12,50%	12,53%	12,56%	12,59%	12,62%	12,65%	
2	persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persentase	11%	13%	15%	17%	19%	19%	20%	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persentase	70%	70%	70%	73%	75%	78%	80%	
4	persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persentase	33%	50%	52%	54%	56%	58%	60%	
5	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	rasio/orang	7%	6%	5.8%	5.6%	5,40%	5,20%	5%	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
1	Jumlah penganggur yang dilatih	orang	20	0	20	20	20	20	20	

2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	10,24	13,64	13,64	13,64	15,38	15,38	17,19	
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1	Score pola pangan harapan	Poin	80,73	80,5	81	81,5	82	82,5	83	
2	Angka Konsumsi Ikan	Poin	47,16	77	78	82	91	100	100	
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	9,04	8,75	8,74	8,73	8,72	8,71	8,7	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
1	Indeks Kualitas Air	%	60	60,00	60,10	60,20	60,30	60,40	60,50	
2	Indeks Kualitas Udara	%	94,45	94,45	94,55	94,65	94,75	94,85	94,95	
3	Persentase RTH	%	N/A	47,38	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	N/A	52,20	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,40%	99,46%	99,50%	99,60%	99,70%	99,70%	100%	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,00%	85%	87%	88%	89%	99%	100%	
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,20%	99,50%	99,50%	99,60%	99,70%	99,70%	100%	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	8,82%	16,67%	33,33%	50,00%	66,67%	83,33%	100%	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	

2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	21,15	25	26,92	28,85	30,77	32,69	34,62	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Persentase pemakaian kontrasepsi moderen (Moderen Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	67,2	67.2	67.8	68.3	68.8	69	69.5	
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	3,1	3.1	2.85	2.7	2.65	2.5	2.4	
3	Indeks Lansia Berdaya	%	0	55	55.5	56	56.5	57	57.5	
4	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	5	10	20	30	40	50	60	
5	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	%	82	82	84	86	88	90	92	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1	Konektivitas Darat	Rasio	N/A	0,27	0,32	0,37	0,43	0,48	0,53	
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	N/A	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	
3	Konektivitas Laut	Rasio	N/A	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (Survei)	%	N/A	75	77	80	82	85	87	
2	Nilai Domain Kebijakan, Tata Kelola dan Manajemen SPBE	Nilai	2,51	2,59	2,66	2,77	2,85	2,94	4,11	

3	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	1,72 (kurang)	1,75 (kurang)	1,80 (cukup)	1,95 (cukup)	2,15 (cukup)	2,35 (cukup)	2,6 (Baik)	
4	Nilai Keamanan SPBE	Nilai	N/A	2,7	2,7	3,45	3,45	4,2	4,85	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	11,67	11	11,67	13,3	15	16,6	18,3	
2	Persentase koperasi aktif	%	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
1	Persentase Perizinan yang diselesaikan	%	79%	80%	85%	85%	90%	95%	95%	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (rasio)	Rasio	76,7	76,75	76,8	76,9	77	77,2	77,5	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
1	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah (%)	%	0%	20%	25%	30%	40%	50%	55%	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
1	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	wisatawan	2132	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
2	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	kegiatan	1	1	2	3	4	5	5	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
1	Sarana pertanian yang diberikan	Paket	2	10	10	10	10	10	10	
2	Prasarana pertanian yang diberikan	Unit	0	0	1	1	1	1	1	
3	Presentase prasarana pertanian yang digunakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										

1	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	0,71	0,71	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	3	3	3	3	3	3	3	
4.01 - UNSUR SEKRETARIAT DAERAH										
1	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Skor	N/A	4	4	5	5	5	5	
2	Indeks BerAkhlak	Skor	N/A	66,5	67,5	69	71	73	75	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	N/A	87	87,5	88	88,5	89	91	
5.02 - UNSUR KEUANGAN										
1	Rasio PAD	Angka	4,3	5	6	7	8	9	10	
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Angka	81,339	83	84	85	86	87	88	
3	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Angka	69,562	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
4	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Angka	2,88	0	0	0	0	0	0	
5.05 UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	41,36	16,13	29,03	45,16	58,06	67,74	77,42	
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	77,5	12,5	29,17	50	75	83,33	100	

6.01 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	60.01	66	67	68	69	70	71	

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berperan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai rencana pembangunan, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang mencakup strategi, tujuan, program, serta kerangka pendanaan indikatif guna mendukung pembangunan daerah unggul, inovatif, dan berdaya saing.

Dalam penyusunannya, RPJMD ini diselaraskan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, seperti RPJMN dan RPJMD Provinsi, juga telah mengintegrasikan prinsip dan kerangka kerja Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar dokumen RPJMD tidak hanya menjadi pedoman arah pembangunan daerah, tetapi juga mampu mengantisipasi ketidakpastian, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar implementasi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan sistematis, maka ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pembangunan daerah harus dijalankan secara berkesinambungan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memastikan implementasi RPJMD sejalan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.
3. Strategi pembangunan dioptimalkan melalui pendekatan berbasis data serta evaluasi berkala terhadap pencapaian indikator kinerja daerah agar pengambilan keputusan lebih tepat sasaran.
4. Keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta perlu terus diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan daerah.

5. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diperkuat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif.
6. Sinkronisasi kebijakan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RKPD, Renstra perangkat daerah, serta dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan RAPBD), perlu dilakukan guna memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
7. Pemantauan dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan, sehingga tantangan dapat diidentifikasi lebih dini dan peluang perbaikan dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah dapat dimaksimalkan.

5.3 Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengantisipasi perubahan dalam periode transisi antara RPJMD yang sedang berjalan dengan perencanaan berikutnya, diperlukan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Tahun 2030 harus tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 serta RPJMN Tahun 2025-2029.
2. RKPD Tahun 2025 dalam periode RPJMD yang baru harus menjamin kesinambungan kebijakan dengan memperhatikan program strategis yang masih dalam tahap pelaksanaan agar perencanaan dan penganggaran tetap terintegrasi.
3. Evaluasi komprehensif terhadap capaian RPJMD sebelumnya perlu dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk periode selanjutnya, sehingga perencanaan dapat disusun berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang telah diperoleh.
4. Penyusunan RAPBD pada Tahun 2030 harus mempertimbangkan prioritas pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus mengakomodasi program baru yang telah ditetapkan dalam RPJMD selanjutnya.
5. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) harus diterapkan selama proses transisi guna menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Pedoman transisi ini bertujuan untuk mencegah kesenjangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah serta memastikan kesinambungan kebijakan yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Anambas.

5.4 Evaluasi Pelaksanaan dan Manajemen Risiko

Keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Mengingat tingginya kompleksitas program pembangunan—termasuk keterlibatan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan jenjang pemerintahan, serta dinamika ketidakpastian global—maka diperlukan pendekatan evaluasi pelaksanaan yang sistematis dan berbasis bukti. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai kinerja, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan pengambilan keputusan yang adaptif.

Di sisi lain, peningkatan intensitas risiko yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan daerah menuntut diterapkannya pendekatan manajemen risiko secara terintegrasi dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan RPJMD. Kompleksitas lintas kewenangan serta keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah menjadikan manajemen risiko sebagai alat strategis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons potensi risiko yang dapat mengganggu capaian pembangunan. Dalam konteks ini, kolaborasi antar perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci penting.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip manajemen risiko pembangunan nasional yang mencakup integrasi proses bisnis, sistem informasi risiko, penguatan kapasitas sumber daya manusia, sistem insentif, dan penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas, integrasi evaluasi dan manajemen risiko perlu diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program prioritas secara tepat sasaran, efisien, serta responsif terhadap dinamika yang berkembang.

5.5 Penutup

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan pembangunan daerah yang unggul, inovatif, dan berdaya saing. Sebagai instrumen kebijakan strategis, RPJMD ini disusun untuk mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas dalam skala nasional maupun regional. Keberhasilan implementasi RPJMD ini

sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen dalam menjalankan program serta kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat guna menciptakan pembangunan yang efektif serta berkelanjutan.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi aktif dalam mendorong pembangunan daerah yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan global serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial" sebagai strategi nasional yang dilaksanakan semua sektor/bidang pembangunan. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju dalam sektor ekonomi, kelautan, dan pariwisata, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Melalui kerja sama dan sinergi yang kuat, visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat peran daerah dalam menghadapi tantangan masa depan.

Bupati Kepulauan Anambas,

Aneng

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025-2029